QANUN ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH
TAHUN 2012 -2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012;

c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Qanun;

e. bahwa berdasarkan...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2012-2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
7. Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Lembaga Daerah /Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012 – 2017 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Aceh adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan hasil penyesuaian.
13. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPA Tahun 2012 – 2017 yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPA Tahun 2012 - 2017 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu kepada RPJM Aceh.

14. Rencana...

14. Rencana Kerja Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota tahun 2012 – 2017, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mempedomani dan atau mengacu kepada RPJM Aceh.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaran Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Aceh yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.
17. Kepala Bappeda Aceh adalah Kepala SKPA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Aceh.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 2

RPJM Aceh berisi penjabaran visi, misi dan program Gubernur Aceh hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung pada 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Aceh;
BAB III	:	Gambaran Pengelolaan Keuangan Aceh Serta Kerangka Pendanaan ;
BAB IV	:	Analisis Isu-Isu Strategis;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VII	:	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Aceh;
BAB VIII	:	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
BAB IX	:	Penetapan Indikator Kinerja Aceh;
BAB X	:	Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan;
BAB XI	:	Penutup.

Pasal 4...

Pasal 4

RPJMA Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

a. SKPA dalam menyusun Renstra SKPA dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012-2017;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota.
c. Pemerintah Aceh dalam penyusunan RKPA setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Aceh dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh SKPA dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Aceh.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 7

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Aceh lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan Aceh; dan
    b. pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) RPJM Aceh dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.
(2) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun Aceh ini mulai berlaku.
(3) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun Aceh.
(4) Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Aceh ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun Aceh ini.

(5) Pada saat Qanun Aceh ini mulai berlaku, maka RPJM Aceh menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Aceh Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPA Tahun 2018 sebelum ditetapkannya RPJM Aceh Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Gubernur terpilih periode selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Aceh ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012-2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2012, Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 12.

PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH
TAHUN 2012 -2017

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement)*, yang ditandatangani pada 15 Agustus Tahun 2005 di Helsinki Filandia, menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Hal yang harus dipahami bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan sebagian dari faktor yang memberi konsiderasi dibentuknya Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA mengatur dengan tegas tentang tatanan otonomi yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Aceh dan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Aceh dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Aceh wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Aceh, yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh). Selanjutnya Pemerintah Aceh akan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan.

Kegiatan…

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta UUPA secara khusus.

Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan Aceh berupa peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan Aceh. Aceh sebagai wialayah yang baru terlepas dari Bencana alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami dan bencana kemanusian (konflik yang berkepanjangan) membutuhkan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat untuk mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunannya dari wilayah lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (RPJM Aceh) merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Aceh hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung pada 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

RPJM Aceh dalam penyusunannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005).

Berkenaan,...

Berkenaan dengan tata cara penyusunannya, RPJM Aceh ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Penyusunan RPJM Aceh ini juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen RPJM Aceh ini dapat digunakan sebagai dokumen RPJM Aceh Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPA Tahun 2018 sebelum RPJM Aceh Tahun 2018-2023 disusun dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 9...

Pasal 9

Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur adalah antara lain seperti terjadinya perubahan data baik itu disebabkan proses pemukhtahiran data maupun karena kejadian alam seperti adanya musibah alam yang menimbulkan korban nyawa dan kerusakan infrastruktur dan mempengaruhi perekdonomian masyarakat, selain itu juga disebabkan oleh ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan baru baik secara nasional maupun khusus Aceh serta hal-hal lain yang mempengaruhi data dan memerlukan kebijakan teknis pelaksanaannya melalui Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 56.

LAMPIRAN
QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2012-2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1950 diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu Aceh merupakan salah satu daerah yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, hingga diakuinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara "*de facto"* dan *"de jure"*.

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement)* Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebagai turunannya maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 141 ayat (1) UUPA mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) nilai-nilai Islam; b) sosial budaya; c) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d) keadilan dan pemerataan; dan e) kebutuhan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menindaklanjuti UU tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Permendagri tersebut menjelaskan tentang dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu lima tahun.

Gubernur Aceh untuk periode 2012-2017 dilantik pada tanggal 25 Juni 2012. Sesuai Pasal 76 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPA, lintas SKPA, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRK, para ulama dan cendikiawan, pemuka adat, LSM/lembaga donor/lembaga internasional, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
29. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
31. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 1, Tambahaan Lembaran Daerah Aceh Nomor 11;
35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12);sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan

Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);

36. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 37, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 37);
37. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini, RPJM Aceh mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJP Aceh.

RPJM Aceh menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPA;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

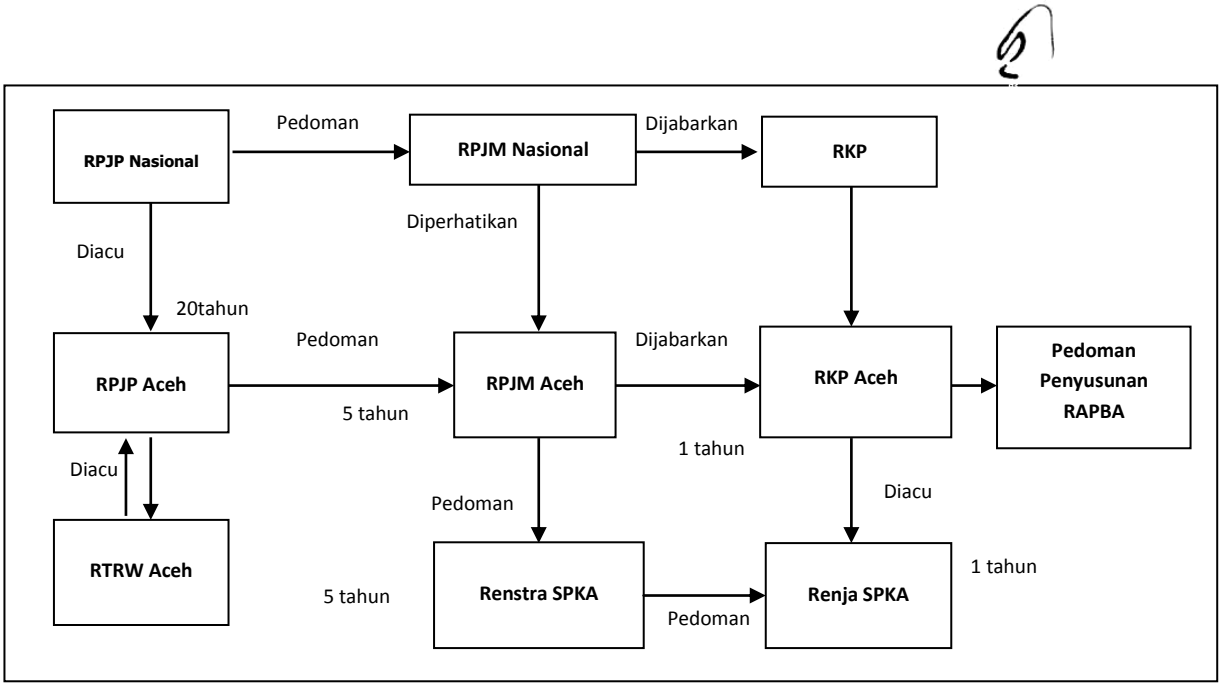

Catatan :
Dijabarkan : Hal-hal yang dianggap mendasar harus identik
Dipedoman : Hal-hal yang memberikan arah dan koridor

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Aceh Tahun 2012–2017 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya substansi dari masing-masing bab sebagai berikut. Bab I menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan. BAB II menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. BAB III menguraikan tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan. BAB IV menguraikan tentang permasalahan dan tantangan pemerintahan aceh dan isu strategis. BAB V berisi visi, misi, tujuan dan sasaran. BAB VI berisi strategi pembangunan Aceh, rumusan strategi pembangunan Aceh dan arah kebijakan pembangunan Aceh. BAB VII mengandung kebijakan umum, kebijakan khusus dan program pembangunan Aceh. BAB VIII menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. BAB IX merupakan penetapan indikator kinerja daerah, BAB X adalah pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, sedangkan BAB XI penutup.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

RPJM Aceh bermaksud:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota di Pemerintahan Aceh;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan arah pengembangan usaha bagi pelaku usaha serta harapan bagi setiap warga masyarakat Aceh.

1.5.2. Tujuan

RPJM Aceh bertujuan:

1. Menjamin terwujudnya pembangunan yang fokus, terintegrasi, sinkron, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Aceh berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, serta tercapainya target tujuan pembangunan milenium dan peningkatan indeks pembangunan manusia;
3. Menyediakan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Aceh.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

Kondisi umum Aceh digambarkan dalam beberapa aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Aceh

Aceh memiliki luas wilayah darat 5.677,081 km^2, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km^2 dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada tahun 2011, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 284 kecamatan, 755 mukim dan 6.451 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor: 413.4/24658/2011 Tanggal 13 Oktober 2011).

2.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8 %) tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha; dataran landai (8 – 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha; agak curam (16 - 25 %) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40%) dengan luas 219.599,85 Ha tersebar di daerah tengah; dan wilayah sangat curam (> 40%) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.2**.

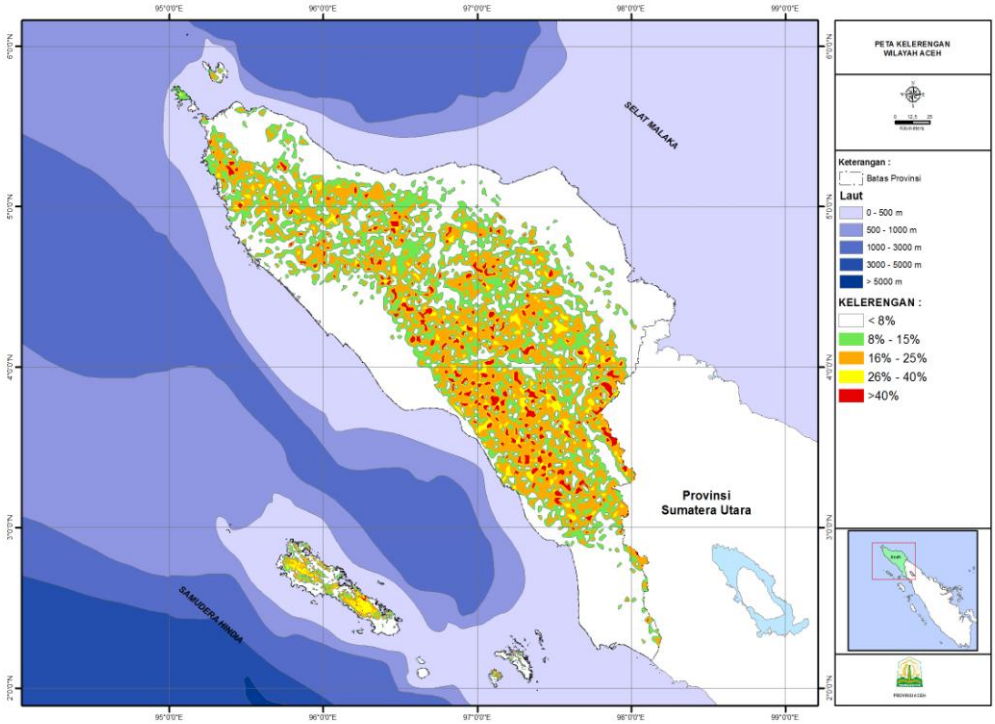

Gambar 2.2 Peta Kelerengan

Berdasarkan **Gambar 2.3** wilayah Aceh memiliki empat level ketinggian: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh bagian Simeulue, Sabang, dan pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl terdapat diseluruh kabupaten/kota kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl mulai terlihat ke tengah, dimana daerah yang dominan adalah kabupaten : Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Gunung Bur Ni Telong di Kabupaten Bener Meriah dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah , dan Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

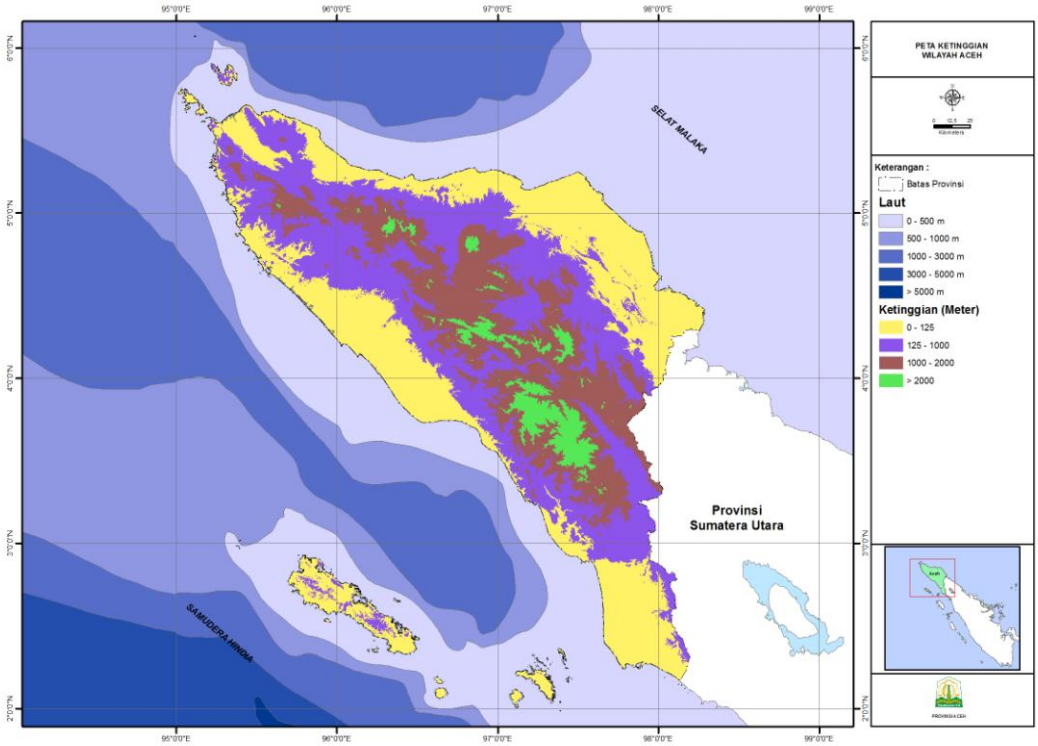

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Wilayah Daratan

2.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi, seperti pada **Gambar 2.4**.

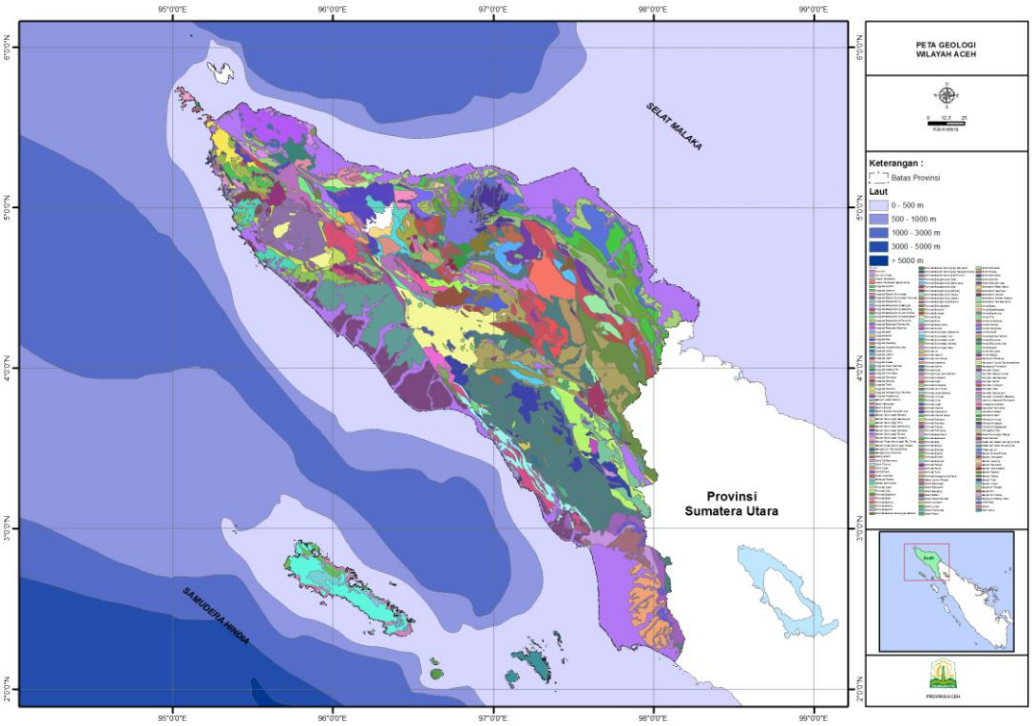

Gambar 2.4 Peta Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dapat dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;
b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
c. Batu gamping atau dolomit (*ilimestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (volcanic products – lava, lahar, tuff, breccia), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar G. Geureudong, G. Seulawah, dan G. Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment* (*gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

2.1.1.4. Hidrologi

A. Air Permukaan

Di wilayah Aceh terdapat 408 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar sampai kecil dimana sebanyak 73 sungai besar dan 80 sungai kecil. Pengelolaan sungai sebagai sumber daya air ditetapkan Sembilan Wilayah Sungai (WS), seperti disajikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Penetapan Wilayah Sungai Aceh

Kode WS	Wilayah Sungai	Daerah Aliran Sungai	Kewenangan
Strategis Nasional			
01.01.A3	Aceh – Meureudu	Aceh; Sibayang; Raya; Lubok; Areu; Ie-masen; Lampanah; Leungah; Babeue; Laweueng; Batee; Seuleunggoh; Baro; Tiro; Putu; Pante Raja; Pangwa; Beuracan; Meureudu; Jeulanga; Samalanga; Meuseugo; Lamih; Geupe; Pincung; Same; Teunom; Reundrah; Sotoy dan Sabang	Pemerintah
01.04.A3	Woyla – Bateue	Wayla; Layung; Meureubo; Suenagan; Trang; Tripa; Seuneuam; Seumayam; Rubee; Suak Keutapang; Bateue dan Susoh	Pemerintah
01.05.A3	Jambo Aye	Geureuntang, Reunget; Rusa; Arakundo; Jambo Aye; Bugeng; Gading; Idi; Peudawa Puntong; Peudawa Rayeuk; Peureulak; Leungo Rayeuk dan Babah	Pemerintah
Lintas Provinsi			
01.09.A2	Alas – Singkil	Kuala Hitam; Hitam; Anun; Singkil; Banyak; Tuangku dan Bangkaru	Pemerintah
Lintas Kabupaten/Kota			
01.02.B	Teunom – Lambeso	Geuteut; Bentaroe; Tunong; Lambeuso; Unga; Babah Awe; No; Cramong; Masen; Le Item; Ringgih; Sabee; Panga; Teunom	Pemerintah Aceh
01.03.B	Pase – Peusangan	Pandrah; Nalon; Peudada; Lhong; Peusangan; Tuam; Buluh; Pase; Penggaraman dan Bukit	Pemerintah Aceh
01.06.B	Tamiang – Langsa	Raya, Bayeuen; Tengku Armiya; Birimpontong; Langsa; Manyak Payed; Raja Muda; Putaurukut; Bunin; Simpang Kiri; Genting; Tamiang; Paya Udang; Kemiri; Matang Maku; Sailau; dan Masin	Pemerintah Aceh
01.07.B	Baru – Kluet	Butea; Kluet; Suak Panjang; Lembang; Laut Bangko; Bakongan; Ujong Pulocut; Seulukat; Trumon dan Lamedame	Pemerintah Aceh
Dalam Kabupaten			
01.09.C	Simeulue	Seufulu; Amuren; Salit; Ladan; Tulatula; Lala; Ujung; Alang; Lekon; Siumat; Tapah; Lasia dan Babi	Pemkab Simelue

Sumber: Inpres 12 tahun 2012

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang mengalir ke Samudera Hindia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang mengalir ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara.

Potensi sumber daya air sungai dikelompokkan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu; (1) Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, yang termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik, (2) Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang pantai Timur termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik, dan (3) Wilayah pantai Barat, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik.

Potensi sumber daya air dengan debit rata – rata terbesar terdapat pada WS Baru – Kluet sebesar 50,73 m3/detik, sebaliknya debit rata – rata terkecil terdapat pada WS Tamiang – Langsa sebesar 2,10 m3/detik, yang secara rinci disajikan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No	Wilayah Sungai	Panjang (Km)	Luas WS (Km^2)	Debit rata-rata (m^3/detik)
1	Aceh – Meureudu	1447,79	23562,16	19,31
2	Jambo Aye	1.514,05	13.864,06	30,45
3	Woyla – Bateue	547,40	5.621,00	38,69
4	Alas – Singkil	1.639,80	10.090,13	25,63
5	Pase – Peusangan	1.836,00	21.185,00	17,78
6	Tamiang – Langsa	802,20	12.970,90	2,10
7	Teunom – Lambeusoi	413,80	17.335,26	31,26
8	Baru – Kluet	103,00	10.004,70	50,73
9	Simeulue	622,22	1.980,00	-
Jumlah Total		**8.926,26**	**116.613,2**	**215, 95**

Sumber : Status Lingkungan Hidup Daerah Aceh, 2011

Pada wilayah Aceh terdapat tujuh danau yang letaknya tersebar di beberapa kabupaten/kota Wilayah Aceh terdapat 6 danau yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota seperti Danau Laut Tawar di Aceh Tengah, Danau Aneuk Laot di Sabang, serta beberapa danau kecil yaitu Danau Laut Bangko di Aceh Selatan, Danau Peastep di Gayo Lues, Danau Paris dan Danau Bangun di Aceh Singkil, dengan potensi seperti disajikan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m^3)
1	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.761,71	175.000.000
2	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,9	3.000.000
3	Danau Laut Bangko	Aceh Selatan	70,8	2.400.000
4	Danau Peastep	Gayo Lues	10,9	2.000.000
5	Danau Paris	Aceh Singkil	58,51	877.650
6	Danau Bungaran	Aceh Singkil	82,65	1.446.375
7	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,45	516.750
	Total		**6064.92**	**185.240.775**

Sumber: Draft RTRWA 2012 – 2032

B. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) D Di wilayah Aceh, sesuai Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia Tahun 2009 **(Gambar 2.5)**, dapat diidentifikasikan 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

NO	CAT	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			**1,743,681.75**

Sumber : Draft RTRWA tahun 2012 – 2032 Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia Tahun 2009

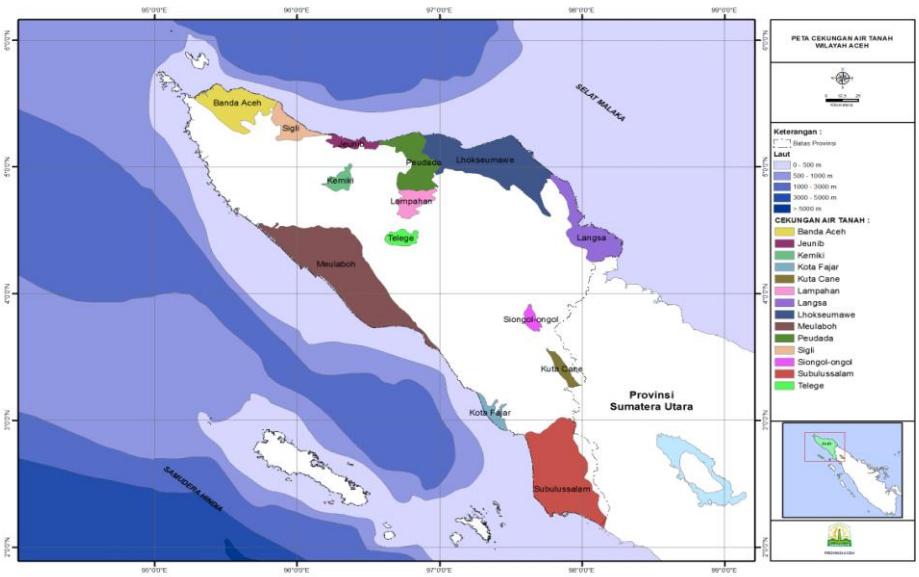

Gambar 2.5. Peta Cekungan Air Tanah

2.1.1.5. Klimatologi

Aceh memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau dan musim penghujan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Rata-rata curah hujan selama 10 tahun terakhir berkisar dari 80,10 mm/bulan pada bulan Pebruari hingga 159,40 mm/bulan pada bulan Oktober. Sedangkan curah hujan tertinggi sebesar 3.868,68 mm/tahun di Kabupaten Aceh Barat Daya dan terendah sebesar 269 mm/tahun di Kota Lhokseumawe. Lebih jelasnya grafik curah hujan di wilayah barat Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.6**.

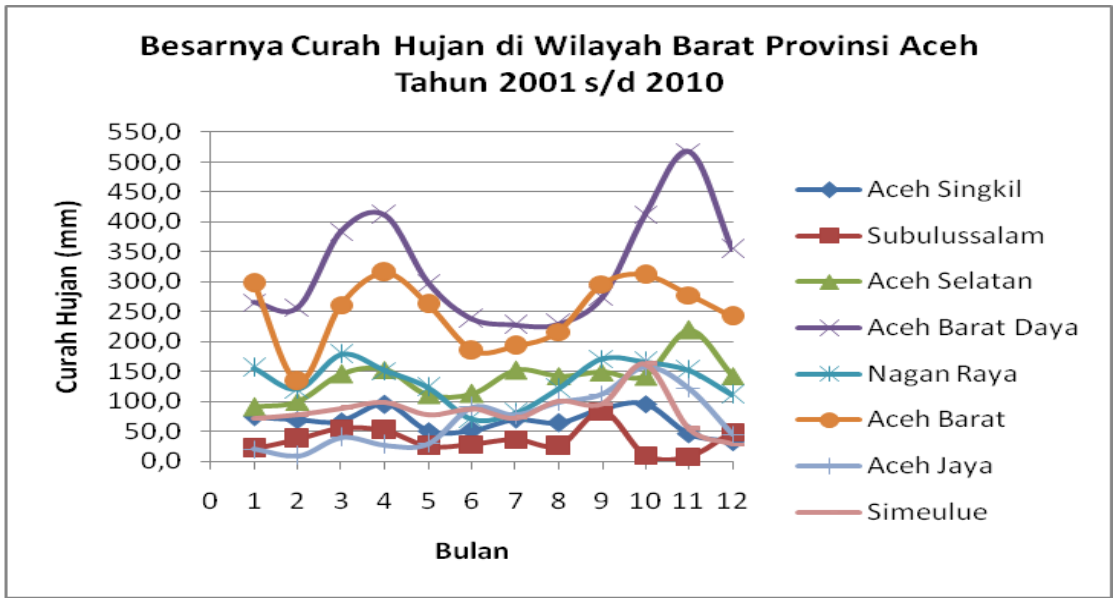

Gambar 2.6. Curah Hujan di Wilayah Barat Aceh

Berdasarkan tipe curah hujan menurut Schmidt and Fergusson (1951), Aceh yang memiliki tiga wilayah yaitu Barat, Tengah dan Timur memiliki lima tipe curah hujan yaitu A (sangat basah), B (basah), C (agak basah), D (sedang) dan E (agak kering). Tipe A penyebarannya di Kabupaten Aceh Selatan, Sabang, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Tipe B penyebarannya di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Timur dan Bener Meriah, sedangkan Kabupaten Simeulue mempunyai tipe C. Kabupaten Aceh Utara memiliki tipe D dan Kota Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Gayo Lues memiliki tipe E. Lebih jelasnya rata-rata curah hujan di tiga wilayah Timur dan tengah Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.7** dan **Gambar 2.8**.

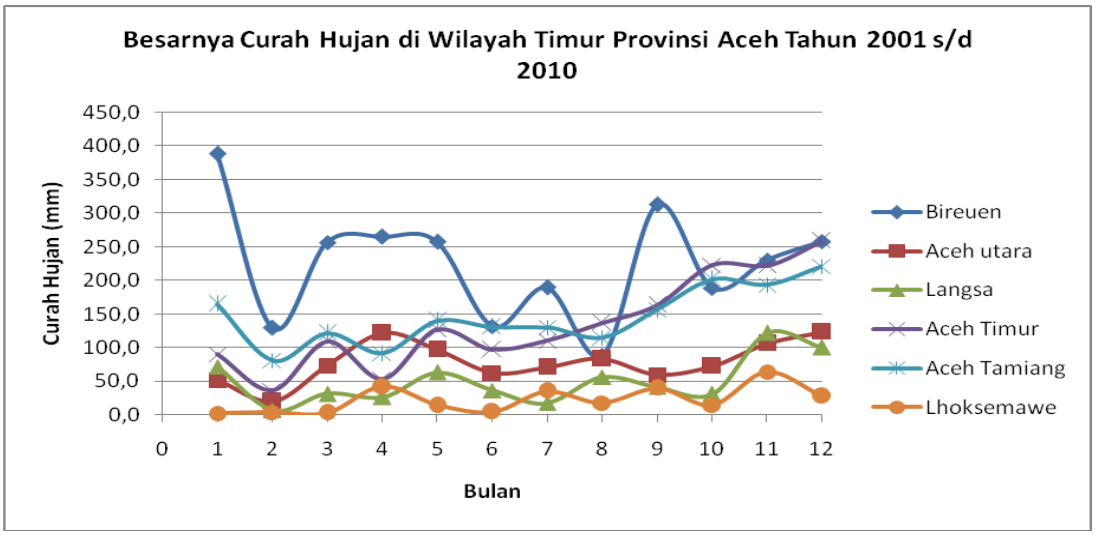

Gambar 2.7. Curah Hujan di Wilayah Timur Aceh

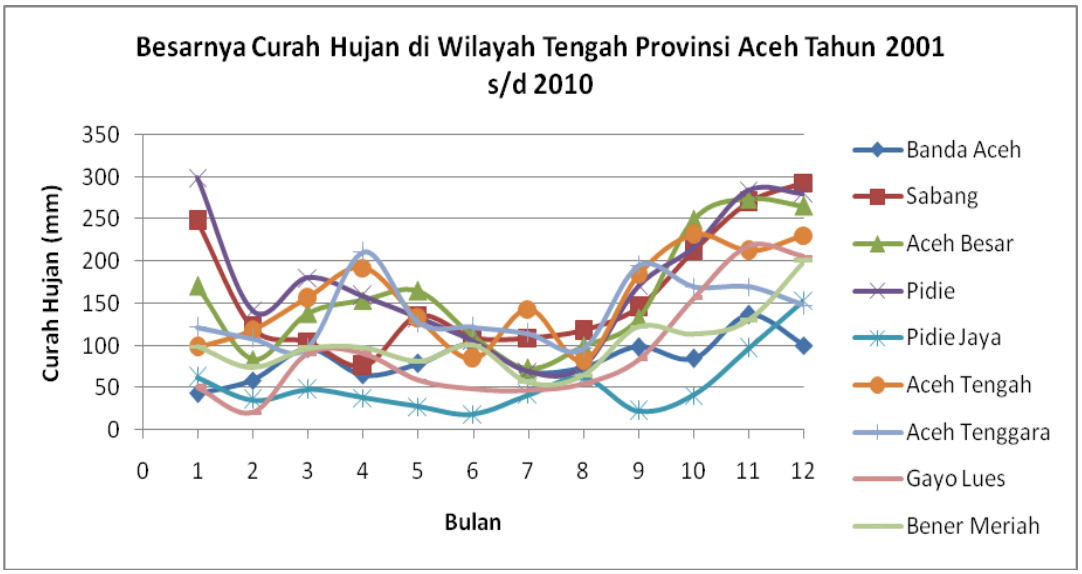

Gambar 2.8. Curah Hujan di Wilayah Tengah Aceh

Sedangkan rata-rata temperatur udara di Aceh pada tiga wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Utara dan Nagan Raya yaitu berkisar dari 26,35 hingga 26,92 ^{o}C dengan temperatur terendah sebesar 24,55 ^{o}C dan tertinggi 27,80 ^{o}C. Rata-rata kelembaban udara di tiga wilayah tersebut berkisar dari 80,73 persen hingga 80,73 persen **(Tabel 2.5)**.

Tabel 2.5
Rata-rata Temperatur dan Kelembaban Udara di Tiga Wilayah Aceh Tahun 2006 – 2010

	Kabupaten/Kota	Rata-rata	Tertinggi	Terendah
Temperatur (C)	Banda Aceh	26,92	27,80	26,15
	Aceh Utara	26,56	27,45	24,55
	Nagan Raya	26,35	27,03	25,83
Kelembaban Udara (%)	Banda Aceh	82,06	87,25	76,25
	Aceh Utara	80,73	85,25	77,63
	Nagan Raya	86,05	87,00	84,40

Sumber: BMKG Indrapuri (2011), data diolah.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme dan aturan itu tertuang dalam aturan Lembaga Adat, sesuai pasal 98 ayat (3) UUPA antara lain seperti Panglima Laot, Pawang Glee, dan Kejreun Blang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2010 – 2030 rencana pola ruang wilayah Aceh terdiri atas Kawasan Lindung dengan luas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya dengan luas 2.934.602 Ha (52,3%). Untuk mengurangi perubahan fungsi baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya perlu dilakukan penegasan dan penataan batas masing-masing kawasan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan konversi lahan yang menyalahi aturan. Pola pemanfaatan penggunaan lahan/hutan disesuaikan dengan fungsi lahan/hutan itu sendiri sehingga dapat menjamin kelestarian produksi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Jika dibandingkan pada tahun 2008, luas penggunaan lahan hutan 3.523.925 Ha atau sebesar 60,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan luas lahan hutan sebesar 20,01 persen. Sebaliknya, penggunaan lahan untuk perkebunan besar dan kecil mengalami peningkatan sebesar 4,91 persen, pada tahun 2008 seluas 742.511 Ha (12,72%) menjadi seluas 1.001.081 Ha (17,63%) pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan. Selanjutnya pada tahun 2010, luas lahan pertanian sawah seluas 311.872 Ha atau 5,49 persen dan pertanian tanah kering semusim mencapai 137.672 Ha atau 2.43 persen seperti ditunjukkan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6
Jenis Penggunaan Lahan di Aceh
Tahun 2007 – 2011

No	Penggunaan Lahan	Luas/Area (Ha)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Perkampungan	117.560	117.582	117.589	117.589	125.439
2	Industri	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
3	Pertambangan	115.009	115.049	115.049	205.049	206.049
4	Persawahan	311.825	311.849	311.872	311.872	314.991
5	Pertanian tanah kering semusim	137.616	137.665	137.672	137.672	139.049
6	Kebun	305.577	305.591	305.599	305.599	305.624
7	Perkebunan					
	- Perkebunan Besar	627.000	691.050	699.401	800.401	800.401
	- Perkebunan Kecil	51.450	51.461	200.680	200.680	200.680
8	Padang (Padang rumput, alang-alang dan semak)	229.726	229.726	229.726	229.726	232.023
9	Hutan (Lebat, berkular sejenis)	3.588.135	3.523.925	2.483.080	2.291.080	2.291.080
10	Perairan Darat (Kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk danau dan rawa	204.292	204.292	204.292	204.292	206.741
11	Tanah terbuka (Tandus, rusak dan land cleaning)	44.439	44.439	44.439	44.439	44.439
12	Lainnya/others	-	101.006	941.567	823754	806.637
TOTAL		**5.736.557**	**5.837.563**	**5.794.894**	**5.676.081**	**5.677.081**

Sumber: BPS, 2012

Pola pemanfaatan penggunaan lahan/hutan disesuaikan dengan fungsi lahan/hutan itu sendiri sehingga dapat menjamin kelestarian produksi dan keseimbangan lingkungan

hidup. Pola sebaran permukiman penduduk berkaitan erat dengan kondisi topografi, yaitu berada di kawasan yang datar di sepanjang pantai utara-timur, sebagian wilayah pantai barat-selatan dan lembah-lembah sungai.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk;

a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
c. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan;
d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2012-2032 telah menetapkan 4 kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center)* tersebar di 6 (enam) zona, meliputi;
    1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Besar.
    2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Bireuen.
    3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Tamiang
    4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Tenggara.
    5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat *agro industri* di Kabupaten Aceh Barat.

b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industry;
c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
d. Kawasan khusus.

Pengembangan wilayah juga dilakukan dengan peninjauan kembali distribusi penduduk dari kabupaten/kota yang berpenduduk padat ke kabupaten/kota yang penduduk tidak padat untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, penyediaan lapangan usaha baru dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indentifikasi lahan yang sesuai khususunya lahan terlantar perlu dilakukan dengan memperhatikan arahan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) Aceh.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan 126.915 jiwa meninggal, 37.063 jiwa hilang, lebih kurang 100.000 jiwa luka berat maupun ringan serta 517.000 unit rumah rusak terutama di wilayah pesisir pantai barat Aceh. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Terdapat dua tipe gunung api di Aceh, yaitu gunung api tipe A dan tipe C. Gunung api tipe A yaitu Gunung Api Seulawah Agam di Aceh Besar, Gunung Api Puet Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, dan Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah, sedangkan gunung api tipe C yaitu Gunung Api Jaboi di Sabang.

Berdasarkan cacatan historis kebencanaan lima tahun terakhir, Aceh mangalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung longsor. Banjir bandang melanda beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tamiang (Krueng Tamiang), Kabupaten Pidie (Kreung Tangse), Kabupaten Pidie Jaya (Krueng Meureudu), Kabupaten Aceh Jaya (Krueng Teunom), Kabupaten Aceh Tenggara (Sungai Lawe Sigala-gala), Kabupaten Aceh Singkil (Kreung Singkil). Banjir bandang telah menimbulkan kerugian harta benda dan merenggut jiwa manusia akibat dari rusaknya

lingkungan. Demikian juga tanah longsor terjadi pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya. Bencana longsor ini pada umumnya terjadi pada wilayah perbukitan dan pegunungan.

Berdasarkan RTRWA 2012-2032 Aceh dapat dibagi dalam beberapa kawasan rawan bencana yaitu :

1. kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, yang tersebar pada beberapa kawasan dalam kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya;
3. kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
4. kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
5. kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (*Modified Mercally Intensity*) meliputi seluruh wilayah Aceh;
6. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya;
7. kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah Barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
8. kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;

9. kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
10. kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
11. kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Aceh antara lain: belum sistematis dalam penanganan penanggulangan bencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam penanganannya, masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, masih lemahnya koordinasi dalam penanggulangan bencana (fase tanggap darurat), terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kebencanaan serta masih lemahnya kemitraan dan keterpaduan dalam penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Guna menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana diperlukan beberapa penanganan prioritas yang dibagi berdasarkan 4 fase kejadian, kejadian pra bencana, bencana, pasca bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Di sisi lain, Aceh yang rawan terhadap bencana alam juga memiliki dinamika sosial dan budaya unik yang rawan terhadap bencana sosial. Kompleksitas dari potensi bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya.

2.1.4. Demografi

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Aceh berjumlah 4.494.410 jiwa terdiri dari 2.248.952 jiwa laki-laki dan 2.245.458 jiwa perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 529.751 jiwa atau sebesar 11.79 persen dari total penduduk di Aceh. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kota Sabang, yaitu sebesar 30.653 jiwa atau sebesar 0.68% dari total penduduk. Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk di Aceh terus meningkat pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan.

Pada tahun 2010 Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km^2**.** Angka ini masih di bawah angka rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 124 orang/km^2. wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 3.642 orang per km2. Kota Lhokseumawe (668 jiwa/km2) dan Kota Langsa (568 jiwa/km2) juga

memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain. Kondisi demikian disebabkan karena pada daerah-daerah tersebut terdapat akses yang mudah dicapai terhadap sarana dan prasarana wilayah. Fasilitas yang sudah cukup memadai pada daerah-daerah tersebut cukup menarik perhatian masyarakat untuk menetap disana. Kondisi yang terjadi di tiga kabupaten tersebut, berbanding terbalik dengan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues yang memiliki luas wilayah sekitar 10 persen dari wilayah Aceh memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sekitar 14 orang per km2. Selama periode 2005-2010 kepadatan penduduk di Aceh terus meningkat, dari 68 jiwa/km2 pada tahun 2005 naik menjadi 78 jiwa/km2 pada tahun 2010.

Laju pertumbuhan penduduk Aceh terus mengalami peningkatan. Pada periode 2009-2010, laju pertumbuhan penduduk Aceh mencapai 3,00 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode 2008-2009 yang hanya sebesar 1,62 persen. Jika dilihat dari persebarannya, pertumbuhan tertinggi pada periode 2009-2010 adalah di Kabupaten Aceh Besar (12,36%). Namun pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Aceh Jaya (-7,38%) yaitu pada tahun 2009 memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.904 jiwa berkurang menjadi 76.782 jiwa pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 komposisi jumlah penduduk perempuan (2.245.458 jiwa atau 49.96 persen dari total penduduk) tetap lebih sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk laki-lakinya pada tahun yang sama (2.248.952 jiwa atau 50.04 persen dari total penduduk) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.7**. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2000 – 2010, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan komposisinya relatif seimbang dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, penduduk Aceh tergolong ke dalam kelompok ekspansif. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Penduduk Aceh dengan usia dibawah 15 tahun mendekati 40 persen dari total penduduk, sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas 3,81 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 56 jiwa penduduk Aceh yang belum dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun) tahun 2010.

Berdasarkan rasio jenis kelamin, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2010 adalah 99 persen yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rasio untuk tahun 2009 tidak jauh berbeda dari tahun 2010.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Persentase
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
0-4	253.712	239.717	493.429	10,98
5-9	243.660	230.550	474.210	10,55
10-14	241.286	229.002	470.288	10,46
15-19	223.321	219.159	442.480	9,85
20-24	214.391	224.005	438.396	9,75
25-29	206.555	211.272	417.827	9,30
30-34	181.093	183.800	364.893	8,12
35-39	164.744	162.205	326.949	7,27
40-44	134.996	134.606	269.602	6,00
45-49	111.812	113.412	225.224	5,01
50-54	90.675	88.268	178.943	3,98
55-59	65.745	62.404	128.149	2,85
60-64	43.374	49.589	92.963	2,07
65-69	31.645	37.031	68.676	1,53
70-74	21.381	29.206	50.587	1,13
75-79	9.997	15.408	25.405	0,57
80-84	6.870	9.730	16.600	0,37
85-89	2.373	3.232	5.605	0,12
90-94	916	1.706	2.622	0,06
95+	406	1.156	1.562	0,03
Jumlah	**2.248.952**	**2.245.458**	**4.494.410**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2011

2.1.5. Sosiologi

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), "Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut", yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu

"***Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana***". Dalam kontek kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prisip otorianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh yang dihitung atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir (2007-2011) mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhannya selama 3 tahun secara berturut-turut (2007-2009) mengalami kontraksi (negatif) yaitu -2,36 persen (2007), -5,24 persen (2008) dan -5,51 persen (2009), atau mengalami penurunan dari 36,85 triliun rupiah pada tahun 2006 menjadi 35.98 triliun rupiah (2007), 34.09 triliun rupiah (2008), 32.22 triliun rupiah (2009). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya produksi minyak dan gas alam. Sebagaimana diketahui bahwa selama hampir 30 tahun terakhir struktur ekonomi Aceh didominasi oleh sub sektor migas, sehingga perubahan sumbangan sektor ini tentu akan berpengaruh terhadap nilai PDRB Aceh secara keseluruhan.

Sebaliknya, sejak tahun 2010 hingga 2011, PDRB Aceh mengalami pertumbuhan positif yaitu secara berturut-turut 2,39 persen (2010) dan 5,02 persen (2011), atau meningkat dari 32.22 triliun rupiah (2009) menjadi 33,12 triliun rupiah (2010) dan 34,78 triliun rupiah (2011). Peningkatan tersebut cenderung disebabkan karena membaiknya harga

minyak dan gas alam di pasaran internasional, dan juga karena meningkatnya secara signifikan nilai sumbangan sektor-sektor lainnya (non migas), terutama sektor pertanian dan sektor perdagangan. Walaupun demikian, pertumbuhan positif tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,2 persen (2010) dan 6,5 persen (2011). Perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB Aceh selama kurun waktu 2007-2011 secara lebih rinci disajikan pada **Tabel 2.8** dan **Tabel 2.9**.

Tabel 2.8
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sektor		2007		2008		2009		2010*		2011**	
		Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%
1	Pertanian	8,16	22,67	8,22	24,12	8,43	26,18	8,86	26,78	9,35	26,90
2	Pertambangan & Penggalian	7,29	20,27	5,31	15,57	2,80	8,68	2,61	7,89	2,61	7,51
3	Industri Pengolahan	4,49	12,48	4,12	12,08	3,79	11,78	3,49	10,56	3,56	10,25
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,08	0,23	0,09	0,27	0,10	0,32	0,12	0,37	0,13	0,37
5	Konstruksi	2,15	5,97	2,16	6,34	2,23	6,92	2,34	7,09	2,49	7,16
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,67	15,75	5,92	17,36	6,21	19,28	6,61	19,98	7,06	20,28
7	Pengangkutan & Komunikasi	2,14	5,94	2,17	6,38	2,28	7,08	2,43	7,35	2,62	7,54
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,52	1,45	0,55	1,60	0,59	1,83	0,62	1,88	0,66	1,90
9	Jasa-jasa	5,48	15,24	5,55	16,29	5,78	17,93	6,03	18,10	6,29	18,09
PDRB		**35,98**	**100**	**34,10**	**100**	**32,22**	**100**	**33,12**	**100**	**34,77**	**100**
PDRB Tanpa Migas		**26,02**		**26,52**		**27,57**		**29,09**		**30,80**	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012
* angka sementara
** angka sangat sementara

Tanpa memperhitungkan migas, PDRB Aceh selama periode tahun 2007-2011 terus mengalami pertumbuhan positif, namun selama periode tersebut laju pertumbuhannya sempat mengalami perlambatan di tahun 2008 yang hanya tumbuh sebesar 1,92 persen. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh krisis keuangan global yang melanda dunia pada tahun 2008. Krisis finansial yang diawali di Amerika Serikat tersebut telah menimbulkan sentimen pasar global terutama terhadap produk-produk ekspor negara-negara dunia ke-3 termasuk komoditi ekspor bahan baku pertanian dari Aceh. Kendatipun demikian, sejak tahun 2009 hingga 2011 pertumbuhan PDRB Aceh nonmigas secara bertahap kembali mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dari sisi produksi yang didorong oleh meningkatnya secara signifikan sumbangan sektor pertanian dan perdagangan.

Tanpa migas, selama tahun 2007-2011 secara berturut-turut pertumbuhan PDRB Aceh adalah 7,23 persen (2007), 1,92 persen (2008), 3,97 persen (2009), 5,49 persen (2010), dan 5,89 persen (2011). Sedangkan perkembangan nilai PDRB Aceh nonmigas atas dasar harga konstan, secara berturut-turut adalah 26,02 triliun rupiah (2007), 26,52 triliun rupiah (2008), 27,58 triliun rupiah (2009), 29,09 triliun rupiah (2010), dan 30,80 triliun rupiah (2011).

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Baik Atas Dasar Harga Berlaku (HB) Maupun Konstan (HK), Selama Tahun 2007-2011

Sektor		2007		2008		2009		2010*		2011**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	8,23	3,62	6,96	0,81	5,25	2,56	7,60	5,02	8,58	5,55
2	Pertambangan & Penggalian	-18,55	-21,10	-13,17	-27,24	-40,53	-47,28	4,46	-6,72	15,45	0,12
3	Industri Pengolahan	-7,00	-10,10	3,21	-8,32	-4,89	-7,85	-3,55	-8,00	0,38	1,90
4	Listrik, Gas & Air Bersih	31,68	23,70	13,25	11,48	31,80	13,79	29,84	16,97	18,71	8,57
5	Konstruksi	28,83	13,93	15,65	0,69	9,20	3,13	13,35	5,11	10,99	6,22
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	13,85	1,70	10,79	4,50	5,10	4,94	11,97	6,36	13,97	6,82
7	Pengangkutan & Komunikasi	29,63	10,95	12,29	1,78	15,49	4,88	10,74	6,57	13,46	7,97
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-0,72	6,02	9,57	4,20	20,86	7,83	14,43	5,54	10,04	6,49
9	Jasa-jasa	14,77	14,30	4,78	1,28	13,09	3,99	12,05	4,46	4,18	4,30
PDRB		**2,51**	**-2,36**	**3,45**	**-5,24**	**-2,12**	**-5,51**	**8,33**	**2,79**	**9,69**	**5,02**
PDRB Tanpa Migas		**14,38**	**7,23**	**9,03**	**1,92**	**8,67**	**3,97**	**10,49**	**5,49**	**10,09**	**5,89**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012
* angka sementara
** angka sangat sementara

Sedangkan bila dihitung atas dasar harga berlaku, secara umum nilai PDRB Aceh selama tahun 2007-2011 terus mengalami pertumbuhan positif, terkecuali pada tahun 2009 sempat mengalami kontraksi akibat menurunnya secara signifikan kontribusi migas sebesar 6,25 triliun rupiah, yaitu dari kontribusinya sebesar 19,33 triliun (2008) turun menjadi hanya 13,08 triliun rupiah.

Laju pertumbuhan PDRB Aceh atas dasar harga berlaku secara berturut-turut adalah 2,51 persen (2007), 3,45 persen (2008), -2,12 persen (2009), 8,33 persen (2010), dan 9,69 persen (2011) dengan nilai PDRB Aceh secara berturut-turut adalah 71,09 triliun (2007), 73,55 triliun rupiah (2008), 71,99 triliun rupiah (2009), 77,98 triliun rupiah (2010), dan 85,54 triliun rupiah (2011). Dengan demikian selama 2007-2011 terjadi peningkatan sebesar 14,45 triliun rupiah atau rata-rata meningkat sebesar 3,61 triliun rupiah.

Tanpa migas, selama 2007-2011 nilai PDRB Aceh atas dasar harga berlaku juga mengalami pertumbuhan positif, walaupun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2008 dan 2009. Nilai PDRB Aceh tanpa migas atas dasar harga berlaku selama 2007-2011

mengalami peningkatan lebih besar mencapai sebesar 21,94 triliun rupiah, yaitu dari 49,72 triliun rupiah pada tahun 2007 meningkat menjadi 71,66 triliun rupiah pada tahun 2011, atau rata-rata meningkat sebesar 5,48 triliun rupiah setiap tahunnya. Secara lebih terperinci, nilai PDRB Aceh atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDRB Aceh Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor		2007		2008		2009		2010*		2011**	
		Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%	Rp (Trilyun)	%
1	Pertanian	18,14	25,51	19,4	26,37	20,42	28,36	21,97	28,17	23,85	27,89
2	Pertambangan & Penggalian	15,98	22,48	13,88	18,87	8,25	11,47	8,62	11,06	9,96	11,64
3	Industri Pengolahan	7,94	11,16	8,19	11,14	7,79	10,82	7,51	9,63	7,54	8,82
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,17	0,24	0,2	0,27	0,26	0,36	0,34	0,43	0,40	0,47
5	Konstruksi	5,42	7,62	6,26	8,52	6,84	9,5	7,75	9,94	8,61	10,06
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	9,23	12,98	10,22	13,9	10,74	14,92	12,03	15,43	13,71	16,03
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,75	8,08	6,45	8,78	7,45	10,35	8,25	10,58	9,37	10,95
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,35	1,9	1,48	2,01	1,79	2,49	2,05	2,63	2,25	2,63
9	Jasa-jasa	7,12	10,02	7,46	10,15	8,44	11,72	9,46	12,13	9,85	11,52
PDRB		**71,09**	**100**	**73,55**	**100**	**71,99**	**100**	**77,98**	**100**	**85,54**	**100**
PDRB Tanpa Migas		**49,72**		**54,21**		**58,91**		**65,09**		**71,66**	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012
* angka sementara
** angka sangat sementara

Dilihat dari sisi kontribusi sektor-sektor yang membentuk struktur PDRB Aceh, selama tahun 2007-2011 sektor pertanian masih menjadi leading sektor yang diikuti oleh perdagangan, hotel dan restoran. Atas dasar harga konstan, pada tahun 2007 kontribusi pertanian adalah sebesar 22,67 persen meningkat menjadi 26,88 persen di tahun 2011. Peningkatan tersebut adalah akibat menurunnya kontribusi migas secara signifikan, sehingga pertumbuhan sektor pertanian setiap tahun telah mengambil alih peran migas terhadap PDRB Aceh. Akan tetapi jika dihitung tanpa migas, kontribusinya menurun dari 31,35 persen (2007) menjadi 30,35 persen (2011), akibat meningkatnya kontribusi sektor lainnya yang tumbuh secara positif, terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian walaupun sebagai penyumbang nilai PDRB terbesar, namun kontribusinya belum sebanding dengan keterlibatan masyarakat Aceh yang sekitar 60 persen masih menggantungkan harapan kepada sektor ini.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberi peran yang semakin penting terhadap struktur PDRB Aceh. Kontribusi sektor ini menempati urutan ke-2 baik dengan

migas maupun tanpa migas. Dengan migas, pada tahun 2007 sektor ini memberi kontribusi sebesar 15,75 persen dan terus meningkat setiap tahun hingga menjadi sebesar 20,30 persen pada tahun 2011. Sedangkan tanpa migas, sektor ini memberi kontribusi sebesar 21,77 persen (2007) dan meningkat menjadi 22,92 persen (2011). Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja terampil dan tamatan sekolah kejuruan, belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan di Aceh. Dengan migas, kontribusi sektor ini bahkan terus menurun yaitu dari 12,48 persen pada tahun 2007 turun menjadi 10,23 persen di tahun 2011.

Penurunan ini sangat dipengaruhi akibat semakin berkurangnya produksi pengolahan gas alam cair di kawasan industri strategis Lhokseumawe. Sedangkan tanpa migas, kontribusinya hampir tidak mengalami peningkatan yaitu sekitar 5,47 persen (2007) menjadi 5,63 persen (2011). Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan bahan baku utama yang dihasilkan di Aceh yaitu bersumber dari pertanian (*agroindustri*) belum berkembang dengan baik. Ekspor produk pertanian dari Aceh masih cenderung dalam bentuk bahan baku mentah (*row material*) dan hal ini yang menyebabkan masih rendahnya nilai tambah yang diperoleh daerah **(Tabel 2.11)**.

Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di Aceh diantaranya akibat masih rendahnya peran swasta termasuk pengusaha lokal untuk mengolah sumberdaya alam yang tersedia di daerah sendiri, terutama produk-produk bahan baku pertanian. Sedangkan kelompok industri kecil dan rumah tangga produktivitasnya juga masih sangat rendah dan belum kompetitif terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah.

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor-sektor
Terhadap PDRB Aceh Dengan Migas Selama Tahun 2007 S.d 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

Sektor		2007		2008		2009		2010		2011	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	25,51	22,67	26,37	24,12	28,36	26,18	28,17	26,78	27,89	26,90
2	Pertambangan & Penggalian	22,48	20,27	18,87	15,57	11,47	8,68	11,06	7,89	11,64	7,51
3	Industri Pengolahan	11,16	12,48	11,14	12,08	10,82	11,78	9,63	10,56	8,82	10,25
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,24	0,23	0,27	0,27	0,36	0,32	0,43	0,37	0,47	0,37
5	Konstruksi	7,62	5,97	8,52	6,34	9,50	6,92	9,94	7,09	10,06	7,16
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	12,98	15,75	13,90	17,36	14,92	19,28	15,43	19,98	16,03	20,28
7	Pengangkutan & Komunikasi	8,08	5,94	8,78	6,38	10,35	7,08	10,58	7,35	10,95	7,54
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,90	1,45	2,01	1,60	2,49	1,83	2,63	1,88	2,63	1,90
9	Jasa-jasa	10,02	15,24	10,15	16,29	11,72	17,93	12,13	18,10	11,52	18,09
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012
** angka sementara*
*** angka sangat sementara*

Jika diamati perkembangan kontribusi sektor-sektor yang membentuk struktur PDRB selama periode 2007-2011, bahwa ekonomi Aceh telah mengalami pergeseran struktur (*economic structural transformation*) selama lima tahun terakhir. Kontribusi sektor *primer* (pertanian serta pertambangan dan penggalian) telah mengalami penurunan dari 42,94 persen (2007) turun menjadi 34,38 persen (2011), dan demikian pula halnya dengan sektor *sekunder* (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta konstruksi) dari 18,68 persen (2007) turun menjadi 17,77 persen (2011).

Penurunan kedua sektor ini telah digantikan oleh sektor *tertier* (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa) yang setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan secara signifikan sehingga kontribusinya meningkat tajam dari 38,38 persen (2007) naik menjadi 47,85 persen (2011). Sektor tertier cenderung mengalami pertumbuhan signifikan di kawasan perkotaan yang selama beberapa tahun terakhir kian berkembang pesat di hampir seluruh wilayah Aceh. Tumbuh dan semakin berkembangnya perkotaan di Aceh lebih cepat dengan pedesaan, telah menstimulir terjadinya konsentrasi alokasi sumber daya manusia yang berkualitas di wilayah perkotaan. Hal tersebut diduga mendorong terjadinya pergeseran struktur ekonomi Aceh dari sektor primer dan sekunder ke sektor tertier **(Tabel 2.12)**.

Tabel 2.12
Perkembangan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Tanpa Migas Selama Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

Sektor		2007		2008		2009		2010		2011	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	36,48	31,35	35,78	31,01	34,66	30,59	33,75	30,45	33,29	30,35
2	Pertambangan & Penggalian	1,53	1,55	1,45	1,52	1,37	1,48	1,36	1,49	1,39	1,49
3	Industri Pengolahan	3,59	5,47	3,59	5,45	3,66	5,58	3,62	5,64	3,66	5,63
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,35	0,32	0,36	0,34	0,44	0,38	0,52	0,42	0,56	0,43
5	Konstruksi	10,89	8,25	11,56	8,15	11,61	8,09	11,91	8,06	12,01	8,08
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	18,56	21,77	18,86	22,32	18,24	22,53	18,48	22,72	19,13	22,92
7	Pengangkutan & Komunikasi	11,56	8,21	11,91	8,20	12,65	8,27	12,68	8,36	13,07	8,52
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,72	2,01	2,73	2,06	3,04	2,13	3,15	2,13	3,15	2,15
9	Jasa-jasa	14,32	21,08	13,77	20,94	14,33	20,95	14,53	20,74	13,75	20,43
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012
* angka sementara, ** angka sangat sementara

2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi yang terjadi di Aceh selama periode 2007-2011 secara umum menunjukkan penurunan yaitu dari 9,41 persen pada tahun 2007 menjadi 3,43 persen pada tahun 2011. Rata-rata penurunan setiap tahunnya adalah sebesar 6,51 persen. Walaupun

perkembangan diakhir periode menunjukkan penurunan, namun tren selama lima tahunnya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 11,92 persen, juga dipengaruhi oleh laju inflasi nasional yang juga meningkat menjadi 11,06 persen dari tahun 2007 yang hanya 6,59 persen. Semakin membaiknya kondisi sarana dan prasarana transportasi diduga ikut memberi andil yang besar terhadap menurunnya tingkat inflasi tersebut, karena hal ini terkait dengan kelancaran arus distribusi barang terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Disamping itu, berkurangnya peredaran uang pasca proses rehab dan rekon Aceh sejak tahun 2009 diperkirakan ikut menekan tingginya inflasi. Perkembangan tingkat inflasi di Aceh selama periode 2007-2011 semakin rendah dan mendekati perkembangan tingkat inflasi rata-rata nasional, seperti terlihat pada **Tabel 2.13**.

Tabel 2.13
Laju Inflasi tahun 2007 – 2011

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata pertumbuhan
Aceh	9,41	11,92	3,72	5,86	3,43	-0,58
Nasional	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	-0,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Jika dihitung atas harga konstan, perkembangan PDRB perkapita Aceh selama periode 2007-2011 tidak jauh berbeda dengan perkembangan PDRB Aceh secara keseluruhan, baik dengan migas maupun tanpa migas (secara terinci dapat dilihat pada **Tabel 2.14**). Selama tahun 2007-2010 terus mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi migas. Pada tahun 2007 PDRB perkapita Aceh adalah sebesar Rp. 8,52 juta terus menurun menjadi Rp. 7,37 juta di tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp. 7,59 juta, namun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007. Kondisi inipun masih jauh dibawah rata-rata nasional yang mencapai Rp. 9,25 juta pada tahun 2011.

Sedangkan tanpa memperhitungkan migas, nilai PDRB Aceh perkapita atas dasar harga konstan memperlihatkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya yaitu dari Rp. 6,16 juta (2007) meningkat menjadi Rp. 6,72 (2011). Walaupun peningkatannya tergolong lamban, namun perkembangan sektor-sektor nonmigas Aceh telah memberi harapan yang baik terhadap peningkatan PDRB perkapita, dan tersebut dapat terjadi karena angka pertumbuhan PDRB nonmigas lebih besar dari angka pertumbuhan penduduk. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang, pertumbuhan sektor-sektor nonmigas di Aceh kedepan perlu terus didorong agar dapat

meningkat lebih tinggi, terutama sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Tabel 2.14
Pendapatan Perkapita Aceh 2007-2011
Berdasarkan Harga Konstan

Pendapatan Perkapita	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
PDRB Migas (Rp)	35.983.090.790.000	34.097.992.470.000	32.219.086.319.415	33.118.170.547.757	34.779.702.729.176
PDRB Non Migas (Rp)	26.022.200.960.000	26.523.093.380.000	27.547.794.892.128	29.089.351.224.606	30.801.676.451.896
Jumlah Penduduk (Jiwa)	4.223.833	4.293.915	4.363.477	4.494.410	4.584.298 *
Pendapatan Perkap – Migas (Rp)	8.519,060	7.941,003	7.383.810	7.368.747	7.586.702
Pendapatan Perkap-Non Migas (Rp)	6.160.802	6.176.902	6.313.266	6.472.340	6.718.952

*) angka perkiraan sementara
Sumber: BPS, 2012 (data olahan)

Jika dihitung atas dasar harga berlaku, bahwa nilai PDRB Aceh perkapita dengan migas walaupun perkembangannya setiap tahun fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kontribusi migas, namun secara umum mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 16,83 juta pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 18,66 juta. Kondisi tersebut juga masih dibawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar Rp 20,00 juta perkapita. Sedangkan tanpa migas, menunjukkan perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2007 nilainya sebesar Rp. 11,77 juta perkapita dan meningkat menjadi Rp. 15,94 juta pada tahun 2011, atau rata-rata setiap tahunnya meningkat sebesar Rp 1,04 juta. Perkembangan PDRB Aceh per kapita atas dasar harga berlaku baik dengan migas maupun tanpa migas, secara terperinci selama periode 2007-2011 dapat dilihat pada **Tabel. 2.15**.

Jika PRDB perkapita dianalisa berdasarkan sektor-sektor, maka masih terjadi ketimpangan yang mencolok antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Dengan asumsi bahwa masyarakat yang menggantungkan ekonominya kepada pertanian sekitar 55 persen, maka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sektor pertanian pada tahun 2011 adalah sebesar hanya Rp 10,41 juta. Sedangkan rata-rata secara keseluruhan adalah Rp 18,66 juta perkapita. Oleh karenanya, dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah pedesaan dan juga identik dengan petani/nelayan, maka pada masa yang akan datang pembangunan sektor pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan) harus menjadi prioritas, terutama dari sisi produktivitas dan nilai tambah yang diperoleh.

Tabel 2.15
Pendapatan Perkapita Aceh 2007-2011
Berdasarkan Harga Berlaku

PENDAPATAN PERKAPITA	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
PDRB Migas (Rp)	71.093.359.398.740	73.547.550.715.438	71.986.953.996.337	77.983.775.688.457	85.537.965.914.929
PDRB Non Migas (Rp)	49.718.173.075.267	54.209.880.047.035	58.907.781.775.890	65.087.894.983.314	71.657.715.895.023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	4,223,833	4,293,915	4,363,477	4,494,410	4.584.298 *
Pendapatan Perkap-Migas (Rp)	16.831.479	17.128.320	16.497.613	17.351.282	18.658.902
Pendapatan Perkap-Non Migas (Rp)	11.770.866	12.624.814	13.500.193	14.481.966	15.943.742

*) angka perkiraan sementara
Sumber: BPS, 2012 (data olahan)

2.2.1.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan mengevaluasi Rasio Gini yang memiliki kisaran nilai 0 - 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Rasio gini Aceh pada tahun 2007-2008 sebesar 0,27, dan tahun 2009 sebesar 0,29 masih tergolong dalam kelompok ketimpangan rendah. Indeks gini yang rendah ini tidak bermakna positif karena rendahnya indeks gini tersebut dipengaruhi oleh dominasi kolompok masyarakat miskin. Hal ini tergambar dari pendapatan perkapita penduduk Aceh (non migas) pada tahun 2011 berdasarkan harga konstan hanya sebesar Rp.6.718.952/tahun (Rp.559.913/bulan) atau berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 15.943.742/tahun (1.328.645/bulan).

2.2.1.5. Pemerataan Pendapatan

Berdasarkan kriteria World Bank, menyebutkan bahwa proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. Sementara itu, distribusi pendapatan penduduk Aceh untuk tahun 2007 pada kelas 40 persen terendah sebesar 22,63 persen, kelas 40 persen menengah sebesar 39,38 persen dan kelas 20 persen tinggi sebesar 37,99 persen. Sedangkan pada tahun 2008 distribusi pendapatan penduduk pada kelas 40 persen terendah sebesar 22,64 persen, kelas 40 persen

menengah sebesar 38,68 persen dan kelas 20 persen tinggi sebesar 38,68 persen (BPS, 2009). Upaya untuk menurunkan persentase distribusi pendapatan penduduk kelas 40 persen terendah sebesar 22,64 persen yang didominasi oleh penduduk miskin perlu dilakukan. Hal ini dapat ditempuh melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan SDM, perbaikan infrastruktur, akses pasar, modal, pengembangan ekonomi lokal dan promosi potensi sumberdaya alam.

2.2.1.6. Ketimpangan Regional

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dalam pemerataan antar daerah maka dapat digunakan indikator pemerataan yaitu Indeks Williamson (IW). Nilai IW lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah, semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat kesenjangan antar wilayah.

Hasil evaluasi nilai PDRB perkapita kabupaten/kota di Aceh menunjukkan bahwa nilai IW Aceh yang dievaluasi dengan PDRB perkapita migas pada tahun 2007 sebesar 2,27 yang menurun menjadi 2,20 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan indeks disparitas antar wilayah masih relatif kecil. Selanjutnya IW Aceh yang dievaluasi dengan PDRB perkapita non-migas pada tahun 2007 sebesar 1,29 menurun menjadi 1,20 pada tahun 2008. Indeks Williamson yang dihitung dengan PDRB perkapita migas menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari nilai IW PDRB perkapita non migas. Hal ini menggambarkan bahwa beberapa kabupaten/kota (seperti Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur) memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan nilai IW.

Sementara itu, Depkeu (2010) melaporkan bahwa IW Indonesia pada tahun 2007 sebesar 0,49 dan sebesar 0,48 pada tahun 2008. Data di atas menunjukkan bahwa nilai IW Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan nilai IW Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota di Aceh menurut ukuran PDRB perkapita penduduk. Oleh karena itu, beberapa kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita penduduk rendah menjadi sasaran utama pembangunan lima tahun ke depan.

2.2.1.7. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2007-2011 menunjukkan penurunan secara signifikan, dari 26.65 persen pada tahun 2007 menjadi 19,38 pada tahun 2011 yakni penurunan sebesar 7,08 persen, sementara selama periode yang sama angka kemiskinan nasional hanya turun 4,09 persen. Namun demikian, jika dilihat dari angka

kemiskinan per tahunnya, angka kemiskinan Aceh masih di atas angka rata-rata kemiskinan Sumatera Utara dan Nasional **(Tabel. 2.16)**.

Tabel. 2.16
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Aceh dengan Rata-rata Nasional Tahun 2007-2011

NO	WILAYAH	TINGKAT KEMISKINAN (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	**Aceh**	26.65	23.53	21.80	20.98	19.57
2	**Sumatera Utara**	13.90	12.55	11.51	11.31	11.33
3	**Rata-rata Nasional**	16.58	15.42	14.15	13.33	12.49

Sumber: BPS Nasional, 2012

Penduduk miskin di Aceh periode 2007-2011 masih sangat terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Pada tahun 2007, penduduk miskin Aceh untuk perkotaan 176.020 jiwa (18,68%) sedangkan di pedesaan sejumlah 718.780 jiwa (29,87%). Angka kemiskinan ini terus mengalami penurunan sampai tahun 2011 untuk perkotaan 218.080 jiwa (13,69%) sedangkan di pedesaan sejumlah 864.900 jiwa (21,87%). Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, angka kemiskinan Aceh masih diatas angka kemiskinan Sumatera Utara dan Nasional **(Tabel 2.17)**.

Tabel. 2.17
Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Aceh dengan Nasional Tahun 2007-2011

Wilayah			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)									
			2007		2008		2009		2010		2011	
			K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
1	**Aceh**	Jw	176,02	718,78	173,40	688,50	182,20	710,70	195,80	763,90	218,80	864,90
		%	18,68	29,87	16,67	26,30	15,44	24,37	14,65	23,54	13,69	21,87
2	**Sumut**	Jw	691,13	790,18	689,00	801,90	688,00	811,60	761,70	852,10	833,50	935,00
		%	14,21	13,63	12,85	12,29	11,45	11,56	11,34	11,29	10,75	11,89
3	**Nasional**	Jw	11.046,75	18.972,18	11.097,80	19.925,60	11.910,5	20.619,4	12.768,5	22.194,8	13.559,3	23.609,0
		%	12,52	20,37	11,65	18,93	10,72	17,35	9,87	16,56	9,23	15,72

Sumber: BPS Nasional, 2012

Menurunnya angka kemiskinan di pedesaan merupakan dampak dari adanya program-program pemberdayaan masyarakat pedesaan seperti PNPM Mandiri, BKPG dan adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA) serta perbaikan infrastruktur dasar lainnya. Demikian pula halnya dengan terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) (mencapai 103,97 pada posisi Juni 2011), diperkirakan ikut memberi dampak terhadap penurunan persentase penduduk miskin, terutama di pedesaan. Hal ini bermakna bahwa

nilai tukar hasil pertaniannya sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai barang/jasa yang dibeli untuk keperluan produksi dan juga keperluan rumah tangga petani itu sendiri.

Pada tahun 2017 Pemerintah Aceh mempunyai target menurunkan angka kemiskinan mencapai 9,50 persen. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan tersebut perlu dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan SDM, perbaikan infrastruktur, akses pasar, modal, pengembangan ekonomi lokal dan promosi potensi sumberdaya alam.

Aceh memiliki 17 dari 23 Kabupaten/Kota yang masih tergolong daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan. Daerah tertinggal tersebut merupakan wilayah konsentrasi penduduk miskin di Aceh (Keputusan Kementerian PDT nomor 001/KEP/M-PDT/02/2005). Selanjutnya tingkat kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota secara rinci sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.18**.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Miskin Menurut kabupaten/Kota
Tahun 2007-2010

No	Kabupaten/ Kota	Persentase (%)			
		2007	2008	2009	2010
1	Simeulue	32,26	26,45	24,72	23,63
2	Aceh Singkil	28,54	23,27	21,06	19,39
3	Aceh Selatan	24,72	19,40	17,50	15,93
4	Aceh Tenggara	21,60	18,51	16,77	16,79
5	Aceh Timur	28,15	24,05	21,33	18,43
6	Aceh Tengah	24,41	23,36	21,43	20,10
7	Aceh Barat	32,63	29,96	27,09	24,43
8	Aceh Besar	26,69	21,52	20,09	18,80
9	Pidie	33,31	28,11	25,87	23,80
10	Bireuen	27,18	23,27	21,65	19,51
11	Aceh Utara	33,16	27,56	25,29	23,43
12	Aceh Barat Daya	28,63	23,42	21,33	19,94
13	Gayo Lues	32,31	26,57	24,22	23,91
14	Aceh Tamiang	22,19	22,29	19,96	17,99
15	Nagan Raya	33,61	28,11	26,22	24,07
16	Aceh Jaya	29,28	23,86	21,86	20,18
17	Bener Meriah	26,55	29,21	26,58	26,23
18	Pidie Jaya	35,00	30,26	27,97	26,08
71	Banda Aceh	6,61	9,56	8,64	9,19
72	Sabang	27,13	25,72	23,89	21,69
73	Langsa	14,25	17,97	16,20	15,01
74	Lhokseumawe	12,75	15,87	15,08	14,07
75	Subulussalam	30,16	28,99	26,80	24,36
Provinsi		**26,65**	**23,53**	**21,80**	**20,98**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

2.2.1.8. Angka Kriminalitas yang tertangani

Menurut BPS (2009) terdapat dua jenis kriminalitas yaitu kejahatan terhadap anak dan kejahatan terhadap perempuan. Pada tahun 2007 terjadi 7 kasus kejahatan terhadap anak yang dilaporkan, 7 kasus dalam proses dan 4 kasus telah diselesaikan. Sementara itu kejahatan terhadap perempuan terjadi 18 kasus yang dilaporkan, 6 kasus dalam proses dan 3 kasus telah diselesaikan. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kasus kriminalitas terhadap anak, yang dilaporkan menjadi 91 kasus, 11 kasus dalam proses dan 78 kasus telah diselesaikan. Kejahatan terhadap perempuan juga meningkat, yang dilaporkan 134 kasus, 16 kasus dalam proses dan 119 kasus telah diselesaikan. Tindak kejahatan yang terjadi di Aceh secara umum mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 tercatat 1.095 kasus, tahun 2007 tercatat 2.748 kasus dan 2008 tercatat 2.667 kasus. Pada umumnya tindak kejahatan tersebut berupa pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan narkotika **(Tabel 2.19)**.

Tabel 2.19
Indeks Tindak Kejahatan Menonjol
Di Aceh Tahun 2006-2008

No.	KASUS	TAHUN		
		2006	2007	2008
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pencurian dengan pemberatan	218	513	510
2	Pencurian Kendaraan Bermotor	430	1113	1061
3	Pencurian dengan kekerasan	56	175	130
4	Penganiayaan Berat	115	360	364
5	Kebakaran	38	86	14
6	Pembunuhan	11	43	42
7	Perkosaan	30	48	60
8	Kenakalan Remaja	0	0	0
9	Uang Palsu	1	18	9
10	Narkotika	196	392	477
Provinsi		**1095**	**2748**	**2667**

Sumber : Polda NAD, 2009

Jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan kelompok umur di Aceh pada tahun 2008 sebanyak 795 orang. Persentase tersangka narkoba pada tahun 2008 didominasi kelompok umur > 30 tahun dan 25-29 tahun (**Tabel 2.20**).

Tabel 2.20
Jumlah tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2008

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	<16	1	0.13
2	16-19	61	7.67
3	20-24	195	24.53
4	25-29	205	25.79
5	>30	333	41.89
	Total	795	100

Sumber: Badan Narkotika Nasional (2009)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Menurut Badan Pusat Statistik (2011), angka melek huruf di Aceh dalam kurun waktu tahun 2006-2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 94,27 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf kemudian meningkat menjadi 96,88 persen pada tahun 2010 **(Tabel 2.21)**. Umumnya penduduk buta aksara di Aceh berada pada kelompok usia lanjut (usia 50 tahun ke atas). Pada kelompok usia 15-44 tahun tercatat 0,74 persen penduduk yang buta aksara, pada kelompok usia 45-49 tahun sebesar 4 persen, sedangkan pada kelompok usia 50 tahun ke atas mencapai 11,28 persen.

Dibandingkan dengan rata-rata nasional tahun 2010 sebesar 92,91 persen, capaian angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Aceh sudah lebih baik. Capaian di daerah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, yaitu 98,48 persen di perkotaan dan 96,22 persen di perdesaan. Namun demikian dalam kurun waktu lima tahun terakhir kesenjangan ini menurun tajam dari 5,02 persen pada tahun 2006 menjadi 2,26 persen pada tahun 2010.

Tabel 2.21
Angka Melek Huruf Dewasa di Aceh
Tahun 2007 dan 2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
1	Simeulue	98,30	98,30	98,58	98,66	98,85
2	Aceh Singkil	96,20	96,20	96,22	96,24	93,23
3	Aceh Selatan	96,42	96,42	96,47	96,53	94,42
4	Aceh Tenggara	96,94	96,94	97,10	97,95	96,76
5	Aceh Timur	97,24	97,35	97,51	98,21	95,30
6	Aceh Tengah	97,47	98,08	98,13	98,60	98,41
7	Aceh Barat	94,06	94,06	94,08	94,53	93,76
8	Aceh Besar	96,93	96,93	96,95	96,96	96,06
9	Pidie	94,53	95,51	95,56	95,91	96,30
10	Bireuen	98,34	98,34	98,37	98,47	97,24
11	Aceh Utara	96,04	96,04	96,42	97,81	95,27
12	Aceh Barat Daya	95,70	96,22	96,25	96,34	93,23

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
13	Gayo Lues	86,70	86,70	86,97	87,27	90,16
14	Aceh Tamiang	98,00	98,00	98,25	98,27	96,33
15	Nagan Raya	89,70	89,70	89,78	89,85	93,77
16	Aceh Jaya	91,78	93,73	93,78	93,99	93,31
17	Bener Meriah	97,19	97,19	97,45	98,50	96,87
18	Pidie Jaya	94,20	94,20	94,23	95,45	93,22
19	Banda Aceh	99,03	99,03	99,10	99,16	98,57
20	Sabang	98,26	98,26	98,81	98,99	96,72
21	Langsa	98,75	98,75	99,10	99,20	97,86
22	Lhokseumawe	98,82	98,82	99,22	99,62	98,29
23	Subulussalam	96,50	96,50	96,53	96,54	91,76
ACEH		**94,51**	**95,94**	**96,39**	**96,88**	**96,95**
SUMATERA UTARA		**97,03**	**97,04**	**97,15**	**97,32**	**97,46**
NASIONAL		**91,87**	**92,19**	**92,58**	**92,91**	**92,99**

Sumber: Badan Pusat Statistik, AcehInfo 2012

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Selama periode tahun 2007-2010, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami kenaikan. Pada kelompok usia pendidikan dasar, APS penduduk usia 7-12 tahun naik dari 98,93 persen pada tahun 2007 menjadi 99,19 persen pada tahun 2010, demikian juga dengan APS penduduk usia 13-15 tahun yang meningkat dari 93,90 persen pada tahun 2007 menjadi 94,99 persen pada tahun 2010 **(Tabel 2.22)**. Capaian APS ini telah melampaui rata-rata nasional tahun 2010 yang masing-masing sebesar 98,02 persen dan 86,24 persen. Bahkan capaian APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,19 persen tahun 2010 menempatkan Aceh di posisi nomor urut ketiga secara nasional (sesudah Provinsi DIY dan Kep. Riau), sedangkan capaian APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 94,99 persen menempatkan Aceh di posisi nomor urut satu secara nasional.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah di Aceh Tahun 2007-2011

Kelompok Usia & Jenis Kelamin		Kota					Desa					Kota+Desa				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
7-12	Laki-Laki	99.49	99.48	99.12	98.81	99,04	98.69	98.92	98.73	99.04	98,76	98.85	99.08	98.83	98.98	98,84
	Perempuan	99.46	99.21	99.86	99.73	99,36	98.90	98.98	99.16	99.30	99,18	99.01	99.05	99.35	99.41	99,23
	L+P	**99.48**	**99.35**	**99.48**	**99.26**	**99,19**	**98.74**	**98.95**	**98.93**	**99.16**	**98,97**	**98.93**	**99.06**	**99.07**	**99.19**	**99,03**
13-15	Laki-Laki	96.57	97.25	96.64	96.90	97,13	92.47	92.27	91.93	92.85	91,85	93.40	93.70	93.15	93.83	93,24
	Perempuan	95.55	97.33	97.94	97.57	96,28	94.20	93.54	94.78	95.77	94,45	94.47	94.57	95.57	96.20	94,95
	L+P	**96.12**	**97.29**	**97.25**	**97.22**	**96,71**	**93.29**	**92.89**	**93.30**	**94.28**	**93,09**	**93.90**	**94.12**	**94.31**	**94.99**	**94,07**
16-18	Laki-Laki	84.29	81.27	79.23	76.74	80,53	67.79	68.09	67.38	69.48	69,73	71.66	71.50	70.49	71.48	72,91
	Perempuan	85.10	80.90	80.97	82.89	78,22	69.97	69.98	72.82	72.90	69,34	73.06	73.13	74.92	75.58	71,89
	L+P	**84.67**	**81.07**	**80.10**	**79.77**	**79,42**	**68.90**	**69.03**	**70.13**	**71.20**	**69,54**	**72.36**	**72.32**	**72.72**	**73.53**	**72,41**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

Pada kelompok usia pendidikan menengah, capaian APS penduduk usia 16 - 18 tahun pada tahun 2007 sebesar 72,36 persen meningkat menjadi 73,53 persen pada tahun 2010. Capaian ini juga telah jauh melampaui rata-rata nasional tahun 2010 yang hanya sebesar 56,01 persen dan secara nasional Aceh menempati peringkat tertinggi.

Menurut daerah tempat tinggal, APS di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan pada semua kelompok umur. Data *SP2010* menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan APS penduduk usia 7-12 tahun antara kota dan desa sebesar 0,10 persen dan pada penduduk usia 13-15 tahun sebesar 2,94 persen. Bagi penduduk usia 16 - 18 tahun, APS di daerah perkotaan tercatat 8,57 persen lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di perkotaan dan perdesaan telah memiliki kesempatan yang relatif sama dalam mengakses pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar. Dalam kaitannya dengan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hanya persebaran SMP/MTs atau yang sederajat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau yang masih harus mendapat perhatian. Kondisi ini berbeda dengan pendidikan menengah yang belum mampu diakses secara merata terutama oleh masyarakat di perdesaan.

Perbandingan menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa APS penduduk perempuan selalu lebih tinggi dari pada laki-laki. Di kalangan penduduk usia 7-12 tahun APS perempuan lebih tinggi 0,43 persen dibandingkan laki-laki, usia 13-15 tahun APS perempuan mencapai 2,37 persen lebih tinggi, dan usia 16-18 tahun selisihnya mencapai 4,10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak perempuan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun capaian APS penduduk 16-18 tahun di Aceh cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun rasio siswa SMA berbanding SMK masih timpang. Pada tahun 2010 rasio siswa SMA berbanding SMK sebesar 79 : 21, suatu tingkat capaian yang terpaut sangat jauh dibandingkan dengan target nasional sebesar 60 : 40. Hal ini disebabkan belum meratanya sebaran lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di samping layanan yang diberikan belum mampu melahirkan lulusan yang memiliki daya saing di pasar kerja.

C. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Aceh dalam kurun waktu tahun 2006-2010 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8,50 tahun pada tahun 2006 menjadi 8,81 tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2010 kabupaten/kota yang memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah adalah Nagan Raya sebesar 7,57 tahun, kemudian disusul kota Subulussalam sebesar 7,59 tahun dan Aceh Barat Daya sebesar 7,72 tahun. Angka tertinggi di Kota Banda Aceh sebesar 12,09 tahun, diikuti Kota Sabang sebesar 10,55 tahun dan Kota Langsa sebesar 10,45 **(Tabel 2.23)**.

Tabel 2.23
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Aceh
Tahun 2006 – 2010

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Simeulue	6.20	7.60	8.00	8.30	8.52
2	Aceh Singkil	7.70	7.70	7.70	7.74	7.76
3	Aceh Selatan	8.20	8.20	8.20	8.28	8.43
4	Aceh Tenggara	9.30	9.30	9.30	9.34	9.35
5	Aceh Timur	8.40	8.40	8.40	8.49	8.49
6	Aceh Tengah	9.00	9.27	9.29	9.44	9.52
7	Aceh Barat	8.20	8.20	8.20	8.23	8.48
8	Aceh Besar	9.40	9.48	9.48	9.51	9.55
9	Pidie	8.60	8.60	8.60	8.65	8.67
10	Bireuen	9.10	9.20	9.20	9.23	9.26
11	Aceh Utara	9.20	9.10	9.10	9.12	9.15
12	Aceh Barat Daya	7.50	7.50	7.50	7.63	7.72
13	Gayo Lues	8.70	8.70	8.70	8.71	8.71
14	Aceh Tamiang	8.40	8.40	8.40	8.77	8.78
15	Nagan Raya	6.70	7.32	7.32	7.34	7.57
16	Aceh Jaya	8.70	8.70	8.70	8.71	8.72
17	Bener Meriah	8.10	8.49	8.49	8.53	8.77
18	Pidie Jaya	8.00	8.00	8.00	8.38	8.64
19	Banda Aceh	11.20	11.86	11.86	11.91	12.09
20	Sabang	9.60	10.13	10.23	10.36	10.55
21	Langsa	9.40	9.70	9.88	10.04	10.45
22	Lhokseumawe	9.70	9.70	9.70	9.91	9.99
23	Subulussalam	7.50	7.50	7.50	7.58	7.59
ACEH		**8.50**	**8.50**	**8.50**	**8.63**	**8.81**

Sumber: Bappeda, 2012 (Data diolah)

Rata-rata lama sekolah penduduk di Aceh tahun 2010 memang telah berada di atas rata-rata nasional sebesar 7,92 *(Susenas, 2010)*, namun apabila ditelaah lebih lanjut masih terlihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki tercatat sebesar 9,20 sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan sebesar 8,50. Dengan kata lain, rata-rata penduduk laki-laki berpendidikan tamat SMP/MTs dan telah memasuki tahun pertama jenjang pendidikan menengah sedangkan rata-rata penduduk perempuan hanya berpendidikan sampai kelas tiga SMP/MTs dan tidak tamat.

D. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Pembangunan pendidikan Aceh telah menghasilkan beberapa kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator tertentu, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tercatat kenaikan APK penduduk usia 4-6 tahun di TK/RA dari sebesar 16,85 persen pada tahun 2007 menjadi 26,88 persen pada tahun 2010. Pada jenjang pendidikan dasar, capaian APK penduduk usia 7-12 tahun di SD/MI/SDLB/Paket A/Pesantren Salafiyah Ula cenderung berfluktuasi dari sebesar 113,40 persen pada tahun 2006 menjadi 113,27 persen pada tahun 2010, sedangkan APK penduduk

usia 13-15 tahun di SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Pesantren Salafiyah Wustha meningkat dari sebesar 96,50 persen pada tahun 2006 menjadi 102,83 persen pada tahun 2010.

Selanjutnya capaian APK penduduk usia 16-18 tahun di SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C juga mengalami peningkatan dari 73,70 persen pada tahun 2006 menjadi 81,89 pada tahun 2010. Demikian juga APK penduduk usia 19-24 tahun pada jenjang Pendidikan Tinggi (PT) yang meningkat dari 19,00 persen pada tahun 2007 menjadi 25,03 persen pada tahun 2009. Khusus capaian tahun 2009 Kemdikbud menerbitkan dua indikator APK PT, yaitu APK penduduk usia 19-24 tahun di PT sebesar 25,03 persen dan APK penduduk usia 19-23 tahun di PT sebesar 29,45 persen, secara rinci sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.24**.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Di Aceh Tahun 2006 – 2010

No	Tingkat Pendidikan	Capaian (%)				
		2006	2007	2008	2009	2010
A. Angka Partisipasi Kasar (APK)						
1	TK/RA	16,85	16,38	22,80	22,62	26,88
2	SD/MI/SDLB/Paket A/Pesantren Salafiyah Ula	113,40	116,36	115,20	109,59	113,27
3	SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ Pesantren Salafiyah Wustha	96,50	94,48	92,16	104,55	102,83
4	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	73,70	81,81	78,19	75,04	81,89
5	Perguruan Tinggi	n.a.	19,00	19,15	25,03	n.a.
B. Angka Partisipasi Murni (APM)						
1	SD/MI/SDLB/Paket A/Pesantren Salafiyah Ula	95,48	95,73	96,16	96,95	97,32
2	SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ Pesantren Salafiyah Wustha	78,39	76,36	76,67	77,40	78,58
3	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	57,07	61,76	62,05	62,10	62,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, AcehInfo 12

Adapun capaian APM penduduk usia 7-12 tahun di SD/MI/SDLB/Paket A/Pesantren Salafiyah Ula juga bergerak fluktuatif, sebesar 95,48 persen pada tahun 2006 menjadi 97,32 persen pada tahun 2010, sedangkan APM penduduk usia 13-15 tahun di SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Pesantren Salafiyah Wustha meningkat dari sebesar 78,39 persen pada tahun 2006 menjadi 78,58 persen pada tahun 2010. Pada jenjang pendidikan menengah, capaian APM penduduk usia 16-18 tahun di SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C juga mengalami peningkatan dari 57,07 persen pada tahun 2006 menjadi 62,42 pada tahun 2010.

E. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2010 pada Tabel 2.29 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Analisis dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD pada tahun 2006 mencapai angka 23,90 persen dan menurun menjadi 21,68 persen

pada tahun 2010. Penurunan angka tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk SD sederajat 26,18 persen, SLTP sederajat 21,11 persen, SLTA sederajat 23,10 persen, Diploma I/II/III sederajat 3,40 persen, Diploma IV/S1 4,29 persen, S2/S3 0,23 persen pada tahun 2010. Perubahan peningkatan pencapaian indikator tersebut secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.25**.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Aceh Tahun 2006 – 2010

Tingkat Pendidikan	Kota					Desa					Kota+Desa				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Tidak/belum tamat SD	13.71	12.97	15.81	12.77	13.39	27.04	26.90	27.62	26.47	24.93	23.90	23.56	24.20	22.51	21.68
SD Sederajat	20.25	18.56	18.53	18.28	17.21	33.57	31.37	30.23	29.71	29.69	30.44	28.30	26.84	26.40	26.18
SLTP Sederajat	21.87	20.49	19.20	20.11	18.61	21.40	21.58	21.81	22.28	22.10	21.51	21.32	21.05	21.65	21.11
SLTA Sederajat	33.61	34.55	34.16	35.90	35.12	15.22	16.40	16.55	17.33	18.40	19.54	20.74	21.65	22.70	23.10
Diploma I/II/III	4.08	5.01	4.45	4.97	5.50	1.54	1.93	2.15	2.42	2.58	2.13	2.67	2.82	3.16	3.40
Diploma IV/SI	6.01	7.75	7.31	7.48	9.47	1.18	1.79	1.62	1.74	2.27	2.32	3.22	3.27	3.40	4.29
S2/S3	0.47	0.67	0.53	0.49	0.71	0.05	0.03	0.02	0.05	0.04	0.15	0.19	0.17	0.18	0.23
SLTP+	66.04	68.47	65.66	68.96	69.40	39.38	41.73	42.14	43.82	45.38	45.66	48.14	48.96	51.09	52.14

Sumber: Badan Pusat Statistik, AcehInfo 2012

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka penduduk di perdesaan yang tidak/belum menamatkan SD/sederajat sebesar 24,93 persen, menamatkan SD/sederajat sebesar 29,69 persen, SLTP/sederajat sebesar 22,10 persen, SLTA/sederajat sebesar 18,40 persen, D-I/II/III sebesar 2,58 persen, D-IV/S1 sebesar 2,27 persen dan S2/S3 sebesar 0,04 persen. Sementara itu, penduduk perkotaan yang tidak/belum menamatkan SD/sederajat sebesar 13,39 persen, yang menamatkan SD/sederajat sebesar 17,21 persen, SLTP/sederajat sebesar 18,61 persen, SLTA/sederajat sebesar 35,12 persen, D-I/II/III sebesar 5,50 persen, D-IV/S1 sebesar 9,47 persen dan S2/S3 sebesar 0,71 persen. Analisa data tersebut menggambarkan bahwa hingga tahun 2010, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi di perdesaan memiliki kecenderungan lebih banyak menamatkan pada jenjang SD/sederajat, diikuti SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat. Sedangkan di perkotaan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi didominasi pada jenjang SLTA/sederajat, SLTP/sederajat dan perguruan tinggi.

F. Peringkat Lulusan Pendidikan Menengah yang Memasuki Perguruan Tinggi

Daya saing lulusan pendidikan menengah dapat diukur dengan menggunakan indikator nilai dan peringkat lulusan sekolah menengah saat mengikuti Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ke berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hasil SNMPTN tahun ajaran 2011/2012 dapat dilihat pada tampilan **Tabel 2.26**.

Tabel 2.26
Nilai Rataan dan Peringkat Peminat SNMPTN Per Propinsi Asal SLTA Tahun 2011

No	Provinsi	Kelompok IPA		Kelompok IPS	
		Rataan	Peringkat	Rataan	Peringkat
1	DKI Jakarta	70.13	1	64.39	1
2	DI Yogyakarta	67.82	2	62.57	2
3	Jawa Tengah	63.91	3	59.52	3
4	Jawa Barat	62.38	4	57.68	4
5	Jawa Timur	61.37	5	57.45	5
6	Banten	61.08	6	56.28	6
7	Kepulauan Riau	60.55	7	55.98	7
8	Bali	59.28	8	54.43	8
9	Lampung	56.34	9	53.63	9
10	Sumatra Barat	56.30	10	52.49	10
11	Lain-lain*)	56.27	11	49.77	15
12	Kepulauan Bangka Belitung	54.92	12	52.27	11
13	Kalimantan Selatan	53.70	13	51.95	12
14	Sumatra Selatan	53.54	14	51.11	13
15	Sumatra Utara	52.99	15	50.02	14
16	Kalimantan Timur	52.80	16	48.70	18
17	Sulawesi Selatan	52.74	17	47.53	21
18	Riau	51.82	18	48.59	19
19	Bengkulu	50.88	19	48.70	17
20	Jambi	50.52	20	48.11	20
21	Kalimantan Barat	50.28	21	49.35	16
22	Sulawesi Barat	49.62	22	45.15	22
23	Papua Barat	48.84	23	40.75	30
24	Kalimantan Tengah	48.14	24	44.79	23
25	Sulawesi Utara	47.50	25	43.00	26
26	Papua	46.04	26	40.62	31
27	Nusa Tenggara Barat	45.61	27	44.50	24
28	Sulawesi Tengah	45.16	28	41.51	28
29	Nusa Tenggara Timur	45.08	29	41.87	27
30	Sulawesi Tenggara	45.07	30	41.49	29
31	**Nanggroe Aceh Darussalam**	**44.86**	**31**	**43.19**	**25**
32	Maluku Utara	42.90	32	38.37	33
33	Gorontalo	42.77	33	39.65	32
34	Maluku	42.31	34	38.09	34

Sumber: Hasil Rapat Forum Rektor 2011
**) Luar Negeri*

Mencermati nilai dan peringkat yang tertera pada Tabel 2.26, capaian kompetensi lulusan Sekolah Menengah di Aceh masih rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Nilai rataan yang dicapai lulusan Sekolah Menengah di Aceh untuk kelompok IPA hanya mencapai 44,86 (peringkat ke-31 dari 33 Provinsi), sedangkan kelompok IPS mencapai 43,19 (peringkat ke-25 dari 33 Provinsi).

G. Peringkat Hasil Uji Kompetensi Guru

Hasil Uji Kompetensi Guru di Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

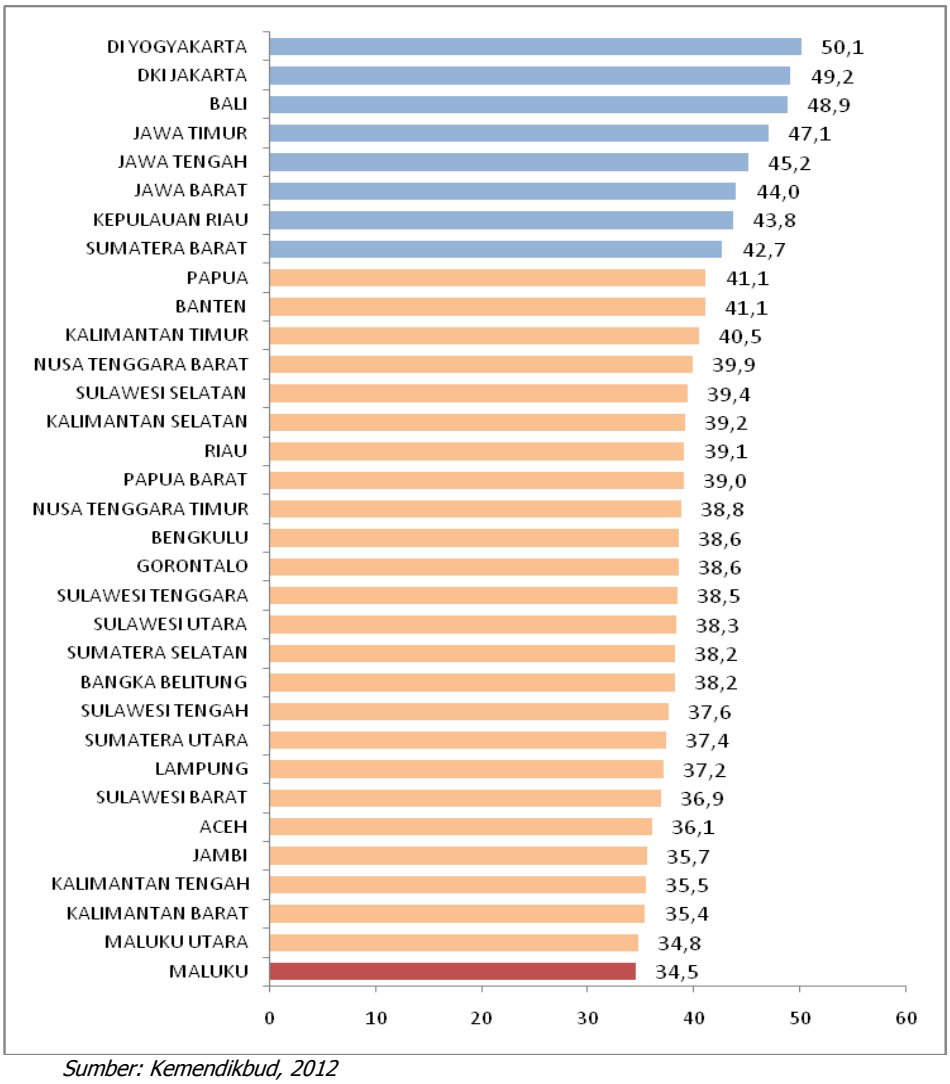

Sumber: Kemendikbud, 2012

Gambar 2.9 Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) Guru Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2012

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa capaian peringkat Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) Guru di Aceh tahun 2012 berada pada urutan ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh yang telah berhasil meningkatkan AMH, APS, angka rata-rata lama sekolah, APK dan APM, namun belum dapat meningkatkan jumlah lulusan sekolah menengah yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri dalam dan luar Aceh. Hal ini berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi tenaga pendidik (guru).

2.2.2.2. Kesehatan

Status kesehatan masyarakat Aceh dapat digambarkan melalui beberapa indikator utama, yaitu: umur harapan hidup, angka kematian, status gizi, angka kesakitan, kesehatan lingkungan, dan perilaku.

A. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH orang Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2007-2010. UHH hanya sedikit meningkat dari 68,4 di tahun 2007 menjadi 68.7 di tahun 2010, akan tetapi masih berada dibawah angka nasional (69,43). Dibanding dengan provinsi lain di Indonesia, UHH orang Aceh hanya sedikit lebih tinggi dari UHH orang Papua (68.35 tahun). Sedangkan secara internal Aceh, masih terdapat disparitas UHH antar kabupaten/kota **(Tabel 2.27)**. Masyarakat Aceh yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, UHH mencapai 72,35 tahun sedangkan yang berdomisili di Kabupaten Simeulue hanya 62,98 tahun (BPS, 2011). Jika dibandingkan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dari tahun 2007-2010, angka harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan perempuan di Aceh relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kesehatan pada laki-laki.

Tabel 2.27
Umur Harapan Hidup di Aceh Tahun 2007-2010

No	Provinsi	2007	2008	2009	2010
1	Simeulue	62.75	62,84	62,91	62,98
2	Aceh Singkil	64.27	64,46	64,69	64,92
3	Aceh Selatan	66.61	66,71	66,82	66,93
4	Aceh Tenggara	69.11	69,16	69,19	69,22
5	Aceh Timur	69.41	69,52	69,63	69,74
6	Aceh Tengah	69.31	69,42	69,53	69,64
7	Aceh Barat	69.69	69,78	69,87	69,97
8	Aceh Besar	70.42	70,52	70,64	70,75
9	Pidie	68.94	69,11	69,32	69,53
10	Bireuen	72.22	72,28	72,32	72,35
11	Aceh Utara	69.41	69,52	69,63	69,74
12	Aceh Barat Daya	66.30	66,49	66,74	66,99
13	Gayo Lues	66.73	66,84	66,96	67,08
14	Aceh Tamiang	68.09	68,18	68,27	68,37
15	Nagan Raya	69.31	69,42	69,53	69,64
16	Aceh Jaya	67.84	67,91	67,97	68,02
17	Bener Meriah	67.31	67,41	67,52	67,63
18	Pidie Jaya	68.91	69,02	69,13	69,24
19	Kota Banda Aceh	69.99	70,24	70,56	70,88
20	Kota Sabang	70.10	70,36	70,69	71,02
21	Kota Langsa	69.96	70,14	70,36	70,58
22	Kota Lhokseumawe	69.70	70,00	70,41	70,81
23	Subulussalam	65.40	65,54	65,71	65,89
	ACEH	**68.40**	**68,50**	**68,60**	**68,70**
	NASIONAL	**68.70**	**69,00**	**69,21**	**69,43**

Sumber: BPS, 2011

B. Angka Kematian

Angka kematian difokuskan pada beberapa indikator kematian utama, yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah angka kematian bayi dibawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Secara umum AKB di Aceh

mengalami penurunan secara bermakna dalam satu dekade ini. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), pada tahun 1997 AKB di Aceh sebesar 45 per 1.000 kelahiran hidup; dan turun menjadi menjadi 25 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka ini jauh lebih rendah dari angka rata-rata nasional 34 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia, 2011). Namun masih sangat tinggi dibandingkan dengan target MDGs (15 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015).

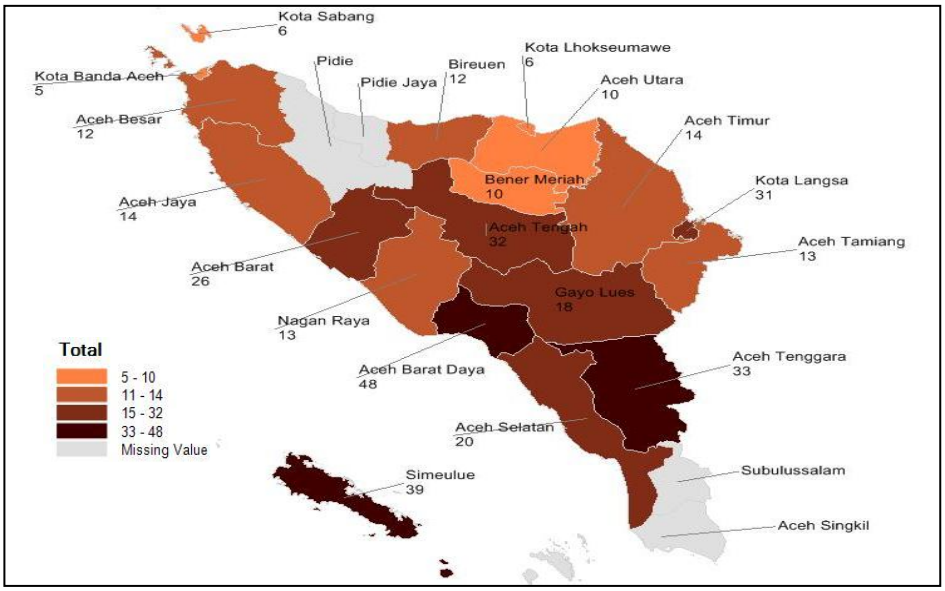

Sumber: DHS (2007), AcehInfo (2010)

Gambar 2.10 Peta Angka Kematian Bayi menurut kabupaten/kota

AKB masih cukup bervarasi antar kabupaten/kota **(Gambar 2.10)** dan masih relatif tinggi di daerah pedesaan, pada keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah. Kelompok masyarakat inilah umumnya masih mengalami hambatan *financial* atau sosial kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan. Kelompok inilah yang menjadi tantantangan utama dalam menurunkan angka kematian bayi.

2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA juga merupakan salah satu indikator penting karena memberikan gambaran peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum mencapai umur 5 tahun dan merupakan salah satu target MDGs. Secara umum, AKABA di Aceh menurun dari 58.6 per 1.000 kelahiran hidup pada pada tahun 1997 menjadi 45 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Namun angka AKABA di Aceh masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu; 44 per 1.000 kelahiran hidup.

Selanjutnya tantangan besar untuk mencapai target MDGs 32 per 1.000 kelahiran hidup. MGDs menetapkan nilai normative AKABA "rendah" bila angka kematian lebih rendah

dari 20 per 1.000 kelahiran hidup. Walaupun tidak ada data yang akurat per kabupaten/kota, diperkirakan disparitas AKABA cukup tinggi antar daerah bila dilihat dari disparitas indicator proksi jumlah balita yang menderita muntah berak (diare) dan balita yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Diperkirakan AKABA juga lebih tinggi pada keluarga yang berpendidikan rendah, keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan pada keluarga yang tinggal didaerah pedesaan yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat **(Gambar 2.11)**.

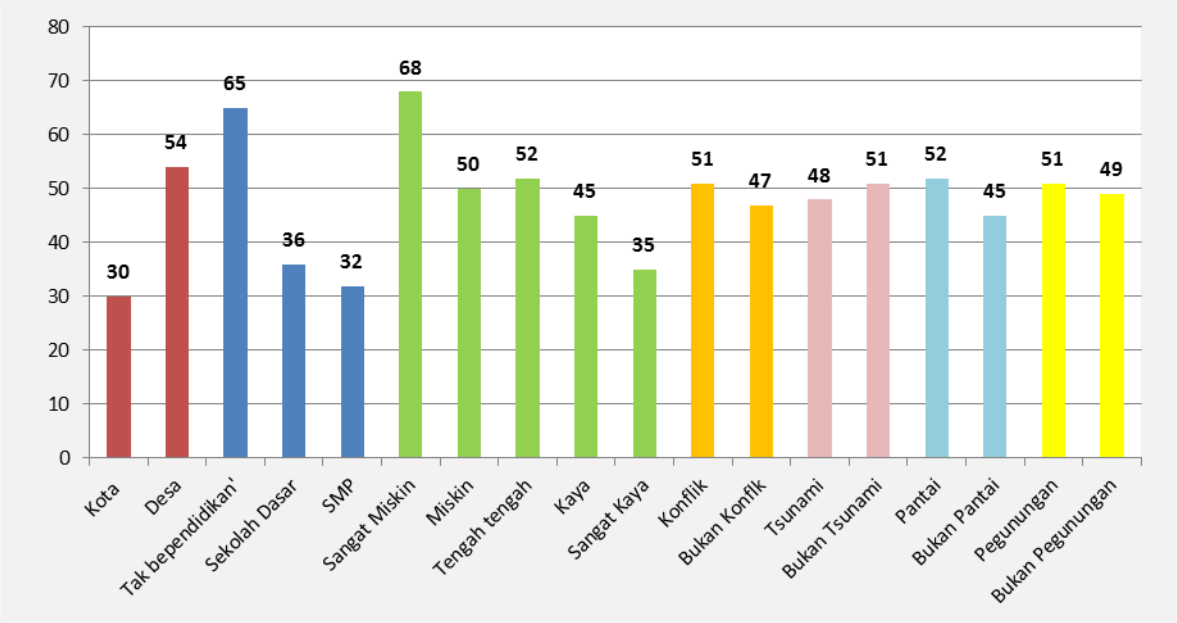

Gambar 2.11 Hubungan Kematian Balita dengan tempat tinggal, status ekonomi dan pendidikan

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah ibu yang meninggal akibat kehamilan, persalinan dan nifas di Aceh masih relatif tinggi, melebihi rata-rata nasional. SDKI 2007 melaporkan bahwa AKI di Aceh masih sebesar 238 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan rata-rata AKI nasional sudah mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup, dan target MGDs 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Tantangan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan kurang berfungsinya sistem deteksi dini ibu hamil yang beresiko tinggi dan sistem rujukan persalinan belum efektif disamping faktor medis seperti pendarahan, hipertensi saat hamil atau pre eklamasi dan infeksi (Kementerian Kesehatan, 2010), **Gambar 2.12**.

Jika dilihat data RISKESDAS 2010, angka rata-rata umur perkawinan pertama di Aceh adalah 20,7 tahun dengan persentase tertinggi adalah di umur 15-19 tahun (36,9%). Melihat angka ini, diperkirakan rendahnya pengetahuan remaja akan kehamilan dan kesehatan

reproduksi juga berkontribusi terhadap kematian Ibu. Selain itu, ketidaksetaraan gender, nilai budaya, serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan juga diperkirakan berkontribusi terhadap kematian ibu.

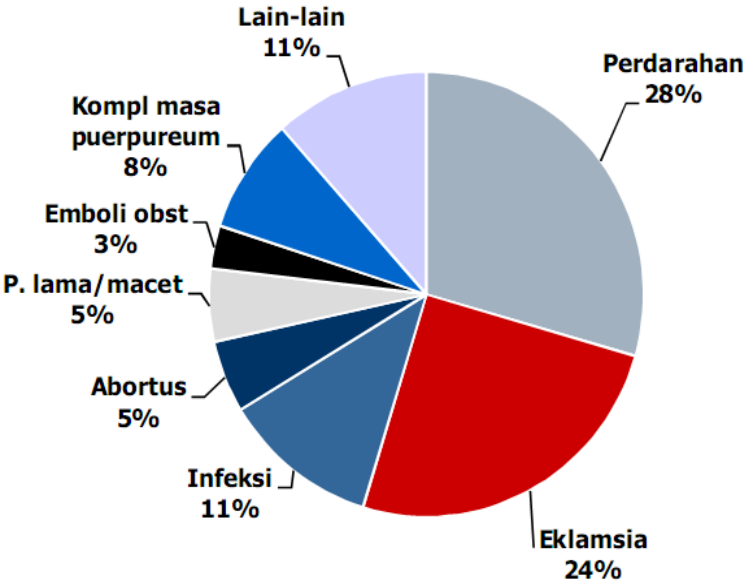

Gambar 2.12 Distribusi Persentase Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

C. Status Gizi

Status gizi difokuskan pada status gizi balita yang diukur dari tiga indikator utama, yaitu; prevalensi balita Kekurangan Gizi (gizi buruk dan gizi kurang), balita pendek dan balita kurus serta masalah gizi lainnya.

1. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Secara umum status gizi masyarakat di Aceh sudah menunjukkan perbaikan. Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang di Aceh menurun dari 26,5 persen pada tahun 2007 menjadi 23,7 persen pada tahun 2010, namun angka ini masih berada di atas angka rata-rata nasional yang telah mencapai 17,9 persen **(Gambar 2.13)**.

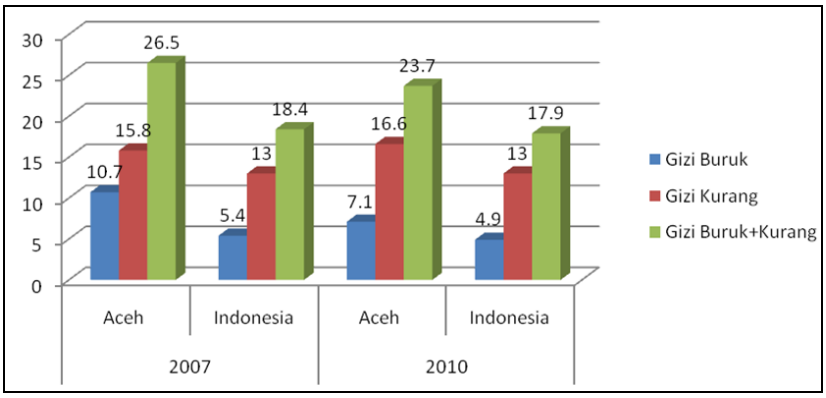

Sumber: Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2010

Gambar 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Kurang (BB/U) di Aceh Dibandingkan angka Nasional

Disparitas status gizi buruk dan kurang antar kabupaten masih relatif tinggi. Dari 21 kabupaten/kota yang disurvey pada Riskesdas (2007) hanya 5 kabupaten yang sudah mencapai target nasional dan 4 kabupaten/kota yang sudah mencapai target MDGs 2015 (Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Banda Aceh dan Kota Sabang) seperti disajikan pada **Tabel 2.28**.

Tabel 2.28
Persentase Gizi Buruk dan Kurang (BB/U) per Kabupaten/Kota
Tahun 2007 (Riskesdas 2007)

No	Kabupaten / Kota	Kurang gizi		Gizi Buruk		Gizi Kurang	
		%	Status	%	Status	%	Status
1	Kota Sabang	14.6	Tercapai	3,0	Tercapai	11,6	Tercapai
2	Kota Banda Aceh	15.5	Tercapai	5,5	Hampir	10,0	Tercapai
3	Aceh Tengah	15.1	Tercapai	6,2	Tidak	8,9	Tercapai
4	Kota Langsa	27.1	Tidak	9,4	Tidak	17,7	Tidak
5	Kota Lhokseumawe	24.0	Tidak	9,8	Tidak	14,2	Tercapai
6	Aceh Tamiang	21.4	Tidak	6,6	Tidak	14,8	Tercapai
7	Aceh Besar *	20.0	Tidak	7,6	Tidak	12,5	Tercapai
8	Aceh Barat Daya	39.1	Tidak	15,7	Tidak	23,4	Tidak
9	Bireun	32.8	Tidak	9,0	Tidak	13,8	Tercapai
10	Pidie	23.6	Tidak	6,4	Tidak	17,3	Tidak
11	Bener Meriah	13.7	Tercapai	4,8	Tercapai	8,9	Tercapai
12	Aceh Singkil	21.0	Tidak	7,9	Tidak	13,1	Tercapai
13	Simeulue	39.7	Tidak	20,5	Tidak	19,1	Tidak
14	Aceh Timur	21.7	Tidak	10,7	Tidak	11,1	Tercapai
15	Aceh Utara	35.5	Tidak	16,0	Tidak	19,5	Tidak
16	Aceh Tenggara	48.7	Tidak	29,6	Tidak	19,2	Tidak
17	Aceh Selatan	24.9	Tidak	8,0	Tidak	16,9	Hampir
18	Nagan Raya	36.1	Tidak	20,3	Tidak	15,7	Hampir
19	Aceh Barat	29.9	Tidak	14,5	Tidak	15,4	Hampir
20	Aceh Jaya	29.0	Tidak	9,9	Tidak	19,1	Tidak
21	Gayo Lues	19.5	Hampir	11,9	Tidak	7,6	Tercapai
22	Pidie Jaya						
23	Subulussalam						
Aceh, RISKESDAS 2007		**26,5**	**Tidak**	**10,7**	**Tidak**	**15,8**	**Tercapai**
Aceh, RISKESDAS 2010		**23.7**	**Tidak**	**7.1**	**Tidak**	**16.60**	**Tercapai**
Indonesia		**17,9**	**Tercapai**	**4,96**	**Tercapai**	**13**	**Tercapai**
Target MDG's		**15**		**3,36**		**11,9**	

2. Prevalensi Balita Pendek

Jumlah anak pendek *(stunting)* di Aceh masih sangat tinggi dan prevalensinya hanya menurun sedikit. Pada tahun 2007 prevalensi *stunting* di Aceh mencapai 44,6 persen dan pada tahun 2010 hanya menurun sedikit menjadi 38,9 persen. Prevalensi stunting di Aceh masih diatas angka rata-rata nasional (35,6%), seperti disajikan pada **Gambar 2.14**. Beberapa kabupaten/kota di Aceh, prevalensi *stunting* melebihi angka rata-rata provinsi. Dari 21 Kabupaten/kota yang disurvey di Aceh, tiga kabupaten diantaranya mempunyai prevalensi *stunting* cukup tinggi, yaitu kabupaten Aceh Tenggara (66,9%), Simelue (63,9%), Aceh Barat Daya (60,9%) dan Gayo Lues (59,9%).

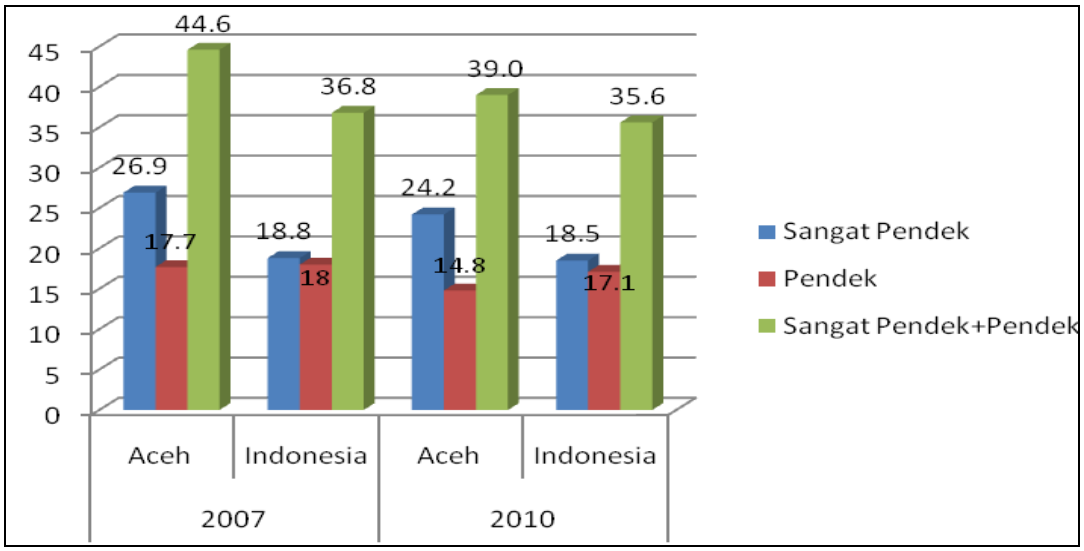

Sumber: Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2010

Gambar 2.14 Prevalensi stunting (TB/U) di Aceh Dibandingkan dengan angka Nasional

3. Prevalensi Balita Kurus

Angka balita kurus juga terjadi penurunan di Aceh, pada tahun 2007 prevalensinya 18,3 persen turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2010 **(Gambar 2.15)**. Namun prevalensi anak kurus menurut Kabupaten di Aceh sangat bervariasi, ada 13 kabupaten yang memiliki prevalensi balita sangat kurus di bawah angka prevalensi provinsi, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Pidie, Biureun, Aceh Barat daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Bener Meriah, Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa seperti terlihat pada **Gambar 2.16**.

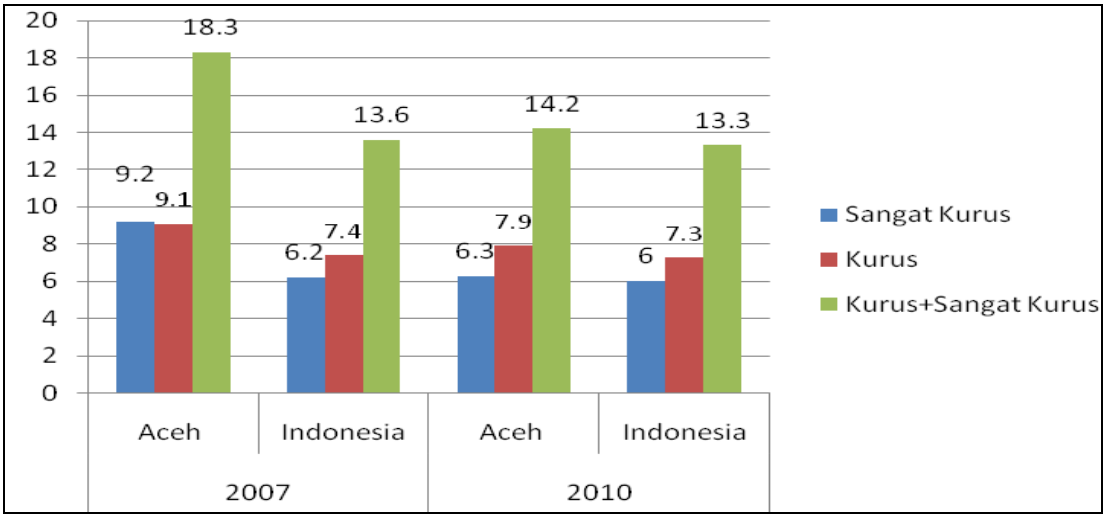

Sumber: Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2010

Gambar 2.15 Prevalensi Kurus dan Sangat Kurus (Indeks BB/TB) Aceh dan Nasional

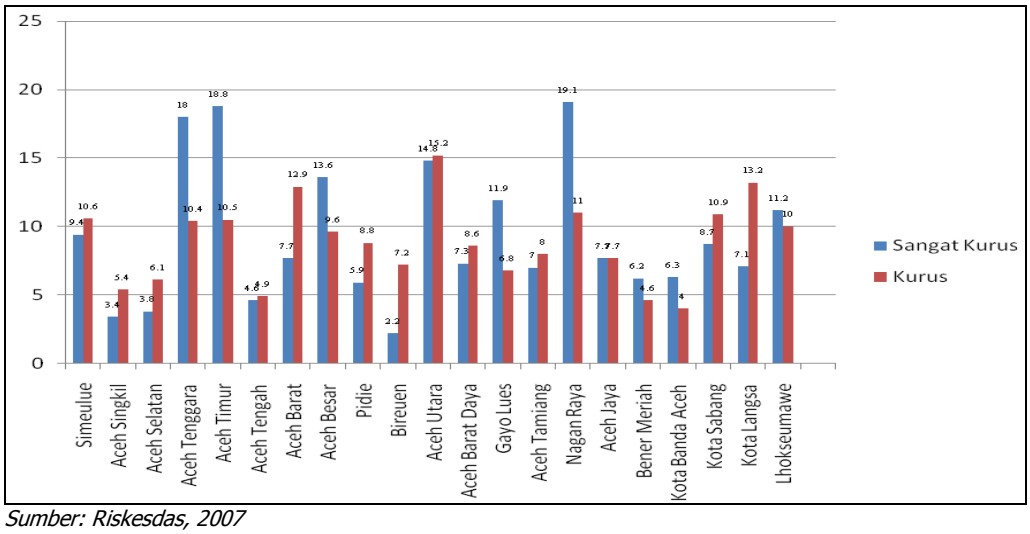

Sumber: Riskesdas, 2007

Gambar 2.16 Prevalensi Kurus dan Sangat Kurus (Indeks BB/TB) Di Aceh menurut Kabupaten/Kota

4. Masalah Gizi Lain

Permasalahan gizi lainnya adalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada wanita. Berdasarkan data Riskesdas 2007, prevalensi KEK pada wanita usia 15-45 tahun di Aceh adalah 12,3 persen sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka KEK rata-rata Nasional (13,6%). Tetapi terdapat sembilan kabupaten dengan prevalensi risiko KEK di atas angka rata-rata Aceh, yaitu Simeulue, Aceh Selatan, Bireuen, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya, Kota Kota Langsa, untuk Kota Banda Aceh dan Aceh timur prevalensi KEK masih sangat tinggi mencapai 23,0 persen dan 23,4 persen, seperti terlihat pada **Gambar 2.17**.

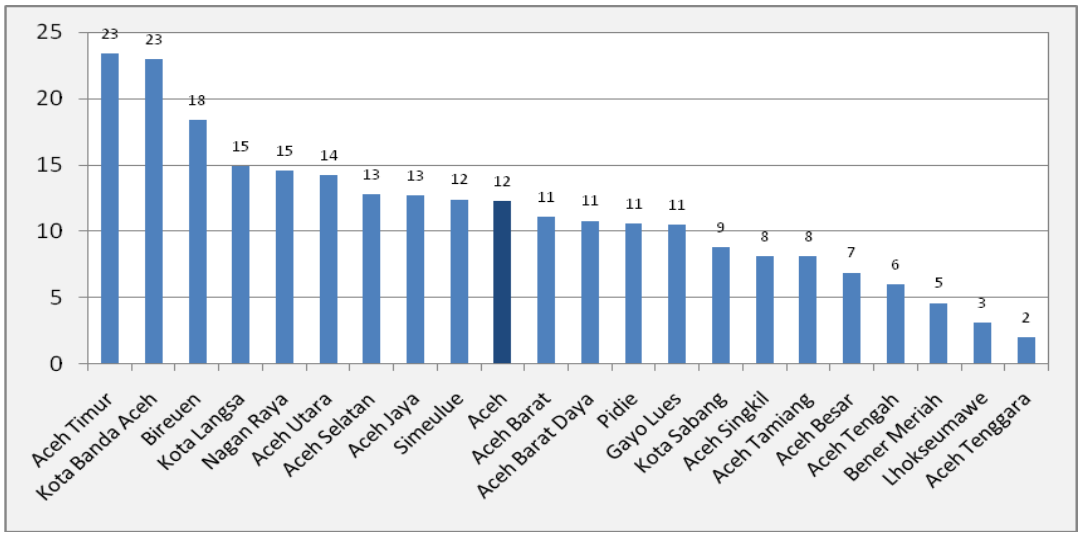

Sumber: Riskesdas, 2007

Gambar 2.17 Persentase Wanita usia 15-45 Tahun yang KEK menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Selain itu, seperempat (25%) wanita usia subur (WUS) di Aceh terlalu kurus atau dua kali lipat dari pada kondisi nasional (13.6%). Kondisi WUS yang kurus berdampak pada resiko

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Diperkirakan prevalensi BBLR di Aceh sekitar 11,3 persen, hampir dua kali lipat lebh tinggi daripada prevelensi nasional (Riskesdas, 2007). Kecukupan konsumsi energi penduduk umur 13-15 tahun (usia pra remaja) di Aceh perlu mendapat perhatian. Rata-rata kecukupan konsumsi energi penduduk umur 13-15 tahun (usia pra remaja) berkisar 67,9 persen- 84,7 persen. Kecukupan energi dan protein usia 13-15 tahun di Aceh adalah 22 persen. Angka ini adalah angka terendah di Indonesia.

D. Angka Kesakitan

Angka keluhan kesehatan (sakit), pernah mengeluh menderita salah satu *penyakit* selama satu bulan yang lalu (pada saat survey dilakukan), pada tahun 2011 sebesar 30.62 persen, terjadi penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan periode 2008-2010 yang mencapai 35 persen. Namun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka kesakitan tahun 2007 yang hanya sekitar 25 persen. Angka kesakitan masyarakat Aceh hampir dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata angka kesakitan nasional yang hanya sebesar 15 persen. Disamping itu, disparitas antar kabupaten/kota juga relatif tinggi. Pada tahun 2011, angka kesakitan tertinggi terdapat di kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya, persentase melebihi 40 persen dari total jumlah masyarakat yang di survey di kabupaten tersebut; sedangkan di kabupaten Simeulue kurang dari 15 persen (14,35), sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.29**.

Tabel 2.29
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
1	Simeulue	29,07	23,51	22,40	17,60	14,35
2	Aceh Singkil	27,14	31,86	35,52	34,07	26,78
3	Aceh Selatan	25,69	37,16	34,73	39,04	21,28
4	Aceh Tenggara	18,39	25,74	18,76	26,90	29,24
5	Aceh Timur	33,26	36,60	47,34	40,84	39,45
6	Aceh Tengah	28,73	36,42	39,44	34,22	35,60
7	Aceh Barat	33,52	31,97	26,96	29,99	35,01
8	Aceh Besar	13,68	37,99	39,70	33,50	32,88
9	Pidie	18,02	43,16	34,83	30,32	17,67
10	Bireuen	31,47	43,22	34,01	24,07	25,14
11	Aceh Utara	33,21	40,70	39,24	42,50	36,20
12	Aceh Barat Daya	22,27	31,81	29,00	30,03	33,93
13	Gayo Lues	23,24	37,94	32,11	42,48	29,31
14	Aceh Tamiang	19,57	34,53	35,02	37,06	26,79
15	Nagan Raya	21,23	31,79	34,60	32,96	30,65
16	Aceh Jaya	40,42	41,44	42,02	43,26	33,13
17	Bener Meriah	33,23	44,56	42,36	52,33	40,66
18	Pidie Jaya	24,42	42,26	39,39	53,61	47,55
19	Banda Aceh	15,08	24,60	20,34	27,34	29,38
20	Sabang	9,89	18,98	20,57	23,05	17,63
21	Langsa	22,80	31,40	36,19	41,88	30,25
22	Lhokseumawe	24,66	43,99	38,15	31,05	34,31
23	Subulussalam	16,74	33,08	33,68	39,69	21,27
	ACEH	**25,14**	**36,80**	**35,28**	**35,09**	**30,62**

Sumber: Badan Pusat Statistik, AcehInfo 2012

Pola Penyakit; sepuluh jenis penyakit terbanyak yang tercatat di Puskesmas dan Rumah Sakit Sentinel terlihat pada **Table 2.30**. Saat ini penyakit yang diderita oleh masyarakat Aceh tidak hanya didominasi oleh penyakit infeksi menular, tetapi penyakit kronik tidak menular juga sudah menjadi ancaman baru kesehatan penduduk Aceh yang sebahagian besarnya juga dipengaruhi oleh pola perilaku masyarakat.

Tabel 2.30
Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan Rumah Sakit

No	Jenis Penyakit (Berbasis Puskesmas)	Jumlah kasus	No	Jenis Penyakit (Berbasis Rumah Sakit)	Jumlah kasus
1	ISPA	241.753	1	Hypertensi	17.383
2	Diare	67.441	2	Penyakit gigi dan mulut	10,059
3	Tersangka TB Paru	7.464	3	Diabetes Mellitus	8.712
4	Malaria Klinis	7.183	4	Gangguan mata	5.477
5	Diare berdarah	3.847	5	Gangguan pencernaan	5.455
6	TBC Paru BTA+	2.071	6	Nyeri pinggang	4.464
7	Tifus perut klinis	1.708	7	Stroke	3.478
8	Pneumonia	1.673	8	Anemia	802
9	Filariasis	1.147	9	Cedera intrakranial	692
10	DBD	1.086	10	Gagal Ginjal Kronik	492

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh & RSUDZA, 2012

Penyakit infeksi masih didominasi oleh penyakit ISPA dan Diare. Penyakit ini umumnya menyerang anak balita. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) masih merupakan penyebab kesakitan tertinggi anak balita di Aceh. Hasil survey SDKI tahun 2007, rata-rata prevalensi ISPA di Aceh sekitar 16 persen, namun disparitas antar kabupaten cukup tinggi. Prevelensi ISPA di Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues dan Aceh Barat Daya masing-masing mencapai 32,4 persen, 30,2 persen dan 28,6 persen. Namun kasus ISPA yang dilaporkan Puskesmas cenderung menurun. Misalnya, total kasus ISPA tahun 2005 sebanyak 183.459 dan tahun 2009 penyakit ISPA menurun menjadi 168.630 kasus. Pneumonia sering menyertai ISPA. Sekitar 40-43 persen anak menderita ISPA berlanjut ke Pneumonia, terutama bila pengobatan ISPA tidak dilakukan secara adekuat. Prevalensi Pneumonia di Aceh sekitar 3,97 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sekitar 2.85 persen.

Prevalensi Diare di Aceh sekitar 17,3 persen. Angka ini dua kali lebih tinggi dari angka nasional (9%). Beberapa kabupaten/kota seperti Gayo Lues, Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil mempunyai prevalensi diare tertinggi, masing-masing 39,1 persen, 31,7 persen dan 26.8 persen. Tingginya kasus ISPA dan Diare pada anak balita dibeberapa kabupaten/kota sering dijadikan indikator proxy disparitas angka kematian anak antar kabupaten **(Gambar 2.18)**.

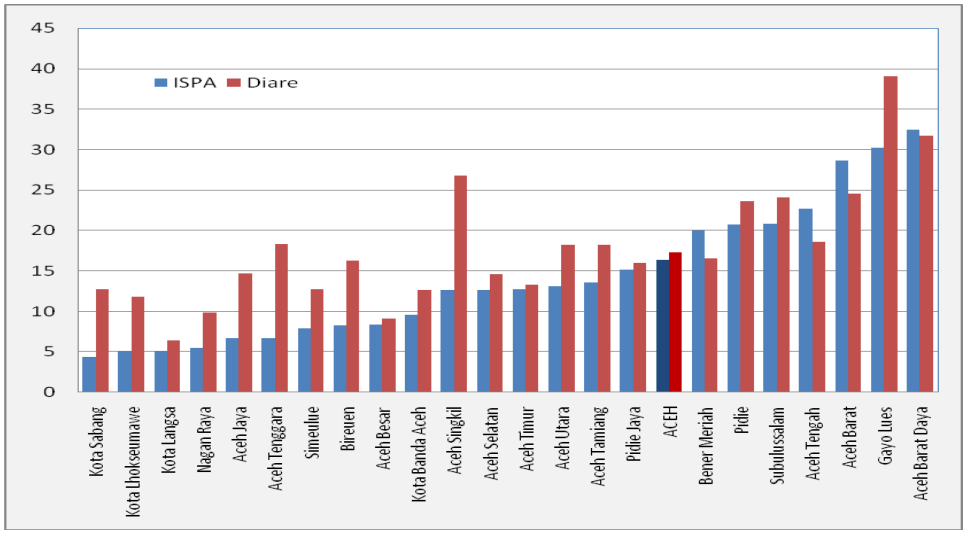

Gambar 2.18 Persentase balita menderita ISPA dan diare di Aceh

Malaria masih endemis hampir diseluruh Aceh. Riskedas 2007 melaporkan bahwa bahwa prevalensi malaria di Aceh 3,7 persen masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang hanya sebesar 2.85 persen. Persentase penggunaan kelambu yang berinsektisida (*insectisida treated net*) juga masih rendah (35%) dengan disparitas antar kabupaten antara 6 persen di Kota Banda Aceh dan yang tertinggi di kabupaten Subulusalam (74%).

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan ancaman kesehatan bagi sebagian masyarakat Aceh. Prevelensi di Aceh diperkirkan sebesar 1.45 persen, lebih tinggi dari prevelensi nasional yang hanya 0.99 persen. Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Tuberkulosis tahun 2004, estimasi prevalensi TB nasional adalah 104 per 100.000 penduduk. Prevalensi TB di Sumatera adalah 160 per 100.000 pendududk. Angka prevalensi ini juga disepakati untuk dijadikan sebagai estimasi angka insiden TB. Indikator utama yang digunakan untuk menilai kemajuan Program Pengendalian Penyakit TB adalah angka penemuan kasus/case detection rate (CDR) dan angka kesuksesan pengobatan/success rate (SR). Angka penenuan kasus tahun 2011 sebesar 54,9 persen, masih cukup jauh dari target nasional minimal 70 persen. Namun demikian, telah terjadi peningkatan sebesar 5,2 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya mencapai 49,7 persen. Disamping itu terjadi perbedaan angka penemuan kasus yang cukup tinggi antar kabupaten/kota. Di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah mencapai 120 persen, sedangkan di Kabupaten Bener Meriah baru mencapai 16 persen. Sedangkan angka kesuksesan pengobatan mencapai 92 persen, telah memenuhi target nasional minimal 85 persen.

Penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan utama di Aceh. Prevelensi DBD di Aceh 1.1 persen, lebih tinggi daripada angka nasional sebesar 0,11 persen. Angka kesakitan DBD di Aceh sebesar 57,2 per 100.000 penduduk,

masih lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan dibawah atau sama dengan 50 per 100.000 penduduk. Terjadi penurunan bila dbandingkatan tahun 2010 yang mencapai 64 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD tertinggi terdapat di Kota Sabang (447 per 100.000), Banda Aceh (170,4 per 100.000) dan Aceh Besar (149,9 per 100.000 penduduk) (Dinas Kesehatan Aceh, 2011).

Penyakit Kusta juga masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Aceh, dimana Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Sumatera yang masih tergolong sebagai daerah endemis tinggi kusta (prevalensi diatas 1 per 10.000 penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah penderita kusta terdaftar mencapai 594 atau prevalensi 1,2 per 10.000 penduduk. Proporsi anak diantara kasus baru kusta yang ditemukan masih tinggi, yaitu 8,7 persen, sedangkan target nasional kurang dari 5 persen. Tingginya proporsi anak menggambarkan masih terus berlangsungnya proses penularan ditengah-tengah masyarakat. Demikian juga, proporsi cacat tingkat 2 diantara kasus baru yang ditemukan masih tinggi, yaitu 15,6 persen, sedangkan target nasional kurang dari 5 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya keterlambatan penemuan kasus kusta oleh petugas kesehatan. (Dinas Kesehatan Aceh, 2011).

Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), seperti campak, pertusis dan tetanus neonatorum masih cukup tinggi kejadiannya di Aceh. Pada tahun 2011 dilaporkan terjadi sebanyak 708 kasus campak klinis, 93 kasus pertusis dan 3 kasus tetanus neonatorum (Profil Kesehatan Aceh, 2011).

HIV dan AIDS merupakan fenomena permasalahan kesehatan masyarakat di Aceh, sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS di Aceh sampai dengan 2011 sebanyak 112 kasus yang tercatat. Estimasi jumlah yang terinfeksi diperkirakan jauh lebih banyak dari angka tercatat **(Gambar 2.19)**. Disamping itu, jumlah kasus baru yang ditemukan pertahun cenderung meningkat dan sebaran kabupaten/kota juga semakin meluas. Sebelum tahun 2005, kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah resiko tinggi penyebaran HIV dan AIDS hanya di kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan kabupaten Aceh Tenggara. Namun sekarang hampir semua (20 dari 23) kabupaten/kota di Aceh sudah menjadi daerah penyebaran HIV dan AIDS. Permasalahan lain adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang HIV dan AIDS (DHS, 2008). Hanya 4.3 persen perempuan usia 15-24 tahun di Aceh memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS dan baru 66 persen pria serta 49,5 persen wanita yang pernah mendengar AIDS. Sedangkan persentase perempuan yang mengetahui bahwa HIV dan AIDS itu dapat ditularkan kepada anak mereka melalui ASI, persalinan dan kehamilan hanya 26 persen. Lebih lanjut, rata-rata 37.92 persen remaja usia 15-24 tahun di

Aceh yang belum menikah mempunyai pengetahuan yang benar tentang berbagai cara penularan HIV dan AIDS. Selain itu, baru sekitar 5 persen penduduk yang mengerti tentang *Voluntary Councelling and Testing* (VCT).

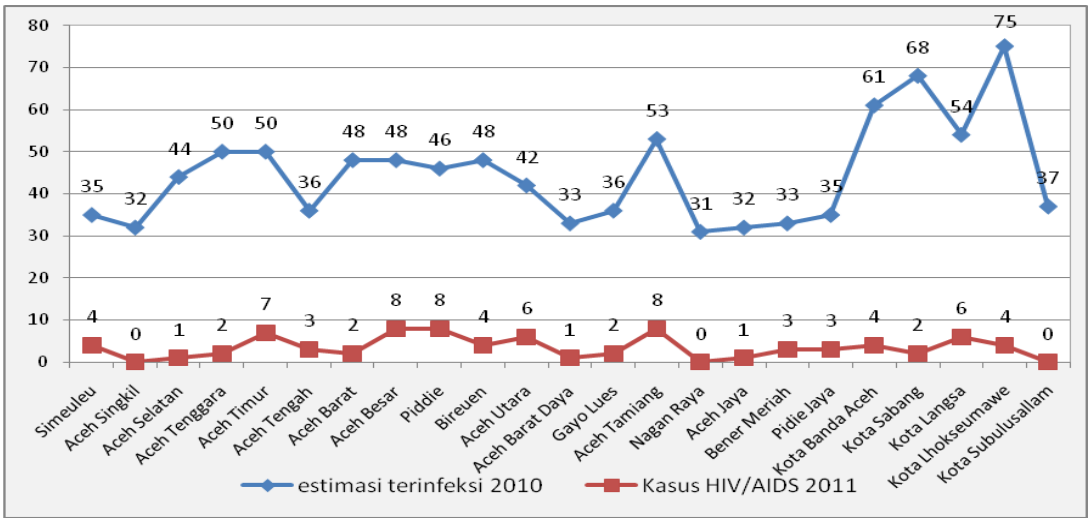

Sumber: Dinkes Aceh, (2011)

Gambar 2.19 Jumlah Kasus HIV/AIDS di Aceh sampai Tahun 2011

Penyakit Tidak Menular/PTM (*non-communicable disease*) sudah menjadi ancaman baru bagi kesehatan masyarakat Aceh. Hasil survey Riskesdas tahun 2007, Aceh berada diurutan teratas untuk beberapa jenis penyakit tidak menular, terutama penyakit Jantung, Stroke, Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Prevalensi penyakit jantung dan Stroke di Aceh secara berturut-turut sebesar 12.6 persen dan 16.6 persen, dua kali lipat dari prevalensi nasional masing-masing sebesar 7.2 persen dan 8.3 persen. Sekitar dua orang (1,7) dari 1000 penduduk Aceh diperkirakan pernah mendirita Stroke. Beberapa faktor resiko jantung dan stroke juga tinggi di Aceh. Prevalensi Hipertensi (hasil pemeriksaan tenaga kesehatan) yang merupakan faktor resiko untuk terjadi jantung Iskemik dan Stroke juga sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat Aceh mencapai 30,2 persen, sedangkan secara nasional prevalensi hipertensi sebesar 31,7 persen (Riskesdas, 2007). Hal yang sama dengan prevalensi Diabetes Mellitus yang mencapai 1.7 persen, sedangkan secara nasional prevalensi Diabetes Mellitus hanya 1.1 persen. Penderita penyakit Diabetes mempunyai resiko lebih tinggi untuk kejadian Jantung dan Stroke.

Gangguan Mental Emosional merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis apabila terus berlanjut. Hasil riskesdas tahun 2007 menunjukan prevalensi gangguan mental emosional di Aceh sebesar 14,1 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya 12,36 persen. Di Kabupaten Aceh Selatan, gangguan mental emosional mencapai 32,1 persen, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

E. Kesehatan Lingkungan

Kondisi lingkungan memberikan kontribusi yang sangat besar pada derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan lingkungan yaitu akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi yang layak, penggunaan bahan bakar memasak, dan penanganan sampah. Secara umum persentase masyarakat yang mempunyai akses terhadap air bersih (20 liter/orang/hari dari Sumber Terlindung dalam jarak 1 km atau Waktu Tempuh Kurang Dari 30 Menit) sebesar 45,5 persen dan menjalankan sanitasi dengan baik (Memiliki Jamban Jenis Latrin + Tangki Septik) di Aceh sebesar 32,5 persen. Kabupaten tertinggi dalam mengakses air bersih adalah Sabang 45,5 persen dan terendah Gayo Lues 0,4 persen. Dalam hal sanitasi, kabupaten tertinggi adalah Banda Aceh 76,5 persen dan terendah Gayo Lues 10,6 persen Dalam hal jarak dan waktu, pada umumnya rumah tangga di kabupaten/kota dapat menjangkau sumber air dalam waktu kurang dari 30 menit dan jarak kurang dari 1 km. Permasalahan yang cukup banyak dialami terkait dengan kualitas fisik air bersih adalah kekeruhan dan warna. Kabupaten yang paling tinggi mengalami masalah kualitas fisik (kekeruhan) adalah Aceh Besar (30,0%). Masih banyak rumah tangga yang mempunyai sarana pembuangan air limbah (SPAL) yang terbuka, paling tinggi terdapat di Langsa (87.3%) sedangkan yang tidak mempunyai SPAL, tertinggi di Pidie (48.3%).

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses yang baik terhadap jamban pribadi dengan septic tank hanya 30,88 persen dan tempat sampah yang sehat juga baru mencapai 27,22 persen, serta pengelolaan air limbah sehat hanya 32,60 persen (Profil Kesehatan Aceh, 2010). Riskesdas 2007 memperlihatkan kepemilikan penampungan sampah tertutup dan terbuka di dalam rumah di Aceh sebesar 5,6 persen dan 15,2 persen. Penampungan sampah di luar rumah yang tertutup 8,7 persen dan terbuka 26,0 persen. Masih banyak rumah tangga yang lantainya bukan tanah dengan kepadatan hunian tinggi. Proporsi tertinggi dalam penggunaan lantai tanah terdapat di Kabupaten Aceh Utara (26.4%). Kepadatan hunian <8 m2/kapita paling tinggi terjadi di Kabupaten Pidie (87.3%). Penggunaan lantai tanah lebih tinggi di pedesaan. Semakin rendah tingkat ekonomi, semakin tinggi jenis lantai tanahnya.

F. Perilaku

Tingginya masalah kesehatan saat ini sangat berkaitan dengan faktor sosial dan budaya, antara lain kesadaran individu dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga adalah 1). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 2). Pemberian ASI eksklusif 3). Menimbang anak balita setiap bulan, 4). Menggunakan air bersih, 5). Mencuci tangan pakai sabun, 6). Menggunakan jamban sehat 7). Mengkonsumsi sayuran dan buah setiap hari 8). Memberantas jentik di rumah sekali seminggu 9). Melakukan aktivitas fisik setiap hari, 10). Tidak merokok dalam rumah.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; Berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan ibu dan Anak (PWS-KIA) 2011 menunjukkan angka persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sudah mencapai 84,67 persen. Persentase persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan tertinggi di Kabupaten Aceh Singkil (99,41%) dan Kabupaten Aceh Tamiang (97,51%), sedangkan terendah di Kabupaten Aceh Selatan (59,5%), seperti disajikan pada **Gambar 2.20**.

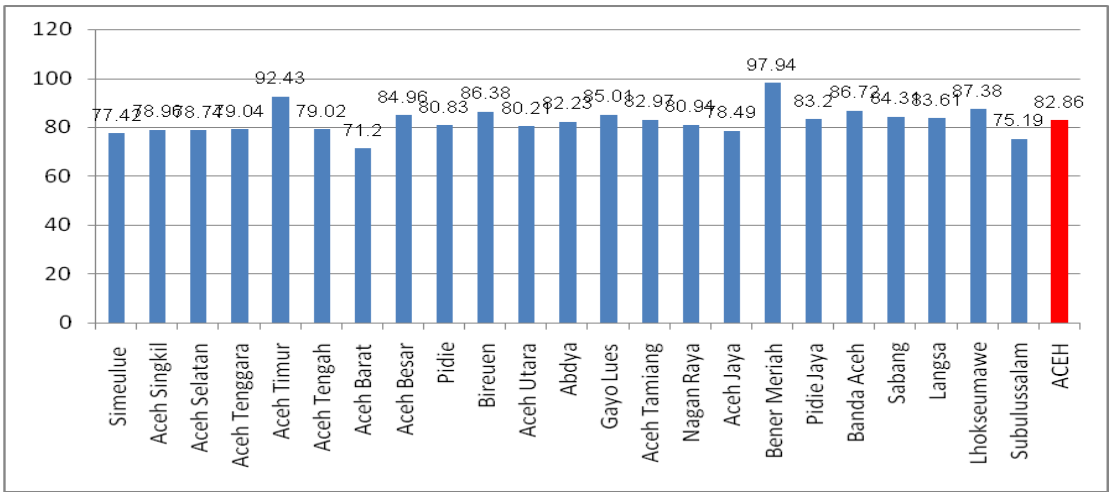

Sumber : Laporan PWS-KIA 2010

Gambar 2.20 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Aceh Tahun 2010

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif; (hanya air susu ibu sebagai makanan bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan) hanya 8,58 persen (Profil Kesehatan Aceh, 2010) atau 11,4 persen (DHS, 2007) atau 3 kali lipat lebih rendah dari cakupan nasional. Anak 6-24 bulan yang mendapatkan praktek pemberian makanan yang baik baru sebesar 34 persen. Pada tahun 2010 cakupan pemberian ASI Ekslusif di Aceh menurun menjadi 4,3 persen. Jika dilihat menurut Kabupaten/kota hampir semua kabupaten/kota mempunyai cakupan yang sangat rendah dan hanya 1 (satu) kabupaten yang angkanya sedikit tinggi, yaitu Aceh Selatan, yaitu 14,32 persen, seperti disajikan pada **Gambar 2.21**.

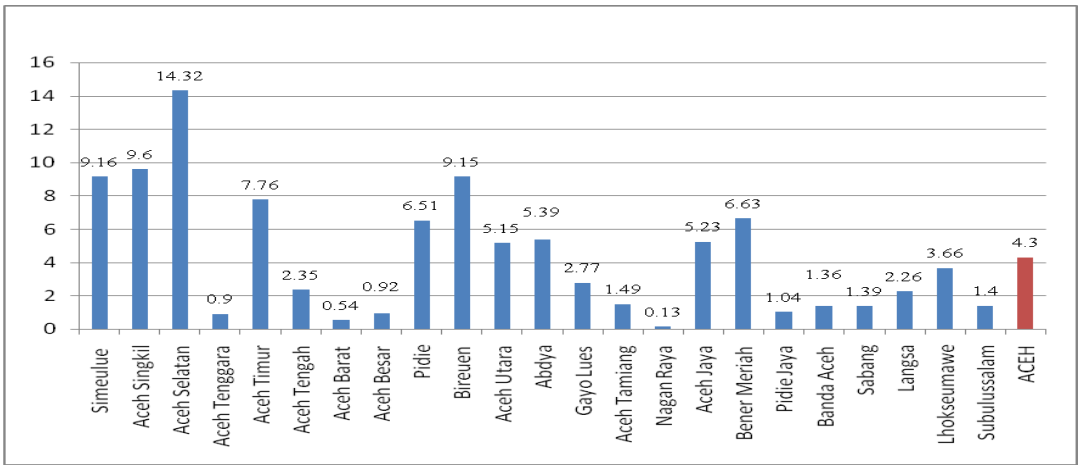

Sumber : Profil Kesehatan Aceh, 2010

Gambar 2.21 Persentase cakupan pemberian ASI Ekslusif di Aceh

Perilaku menimbang anak balita setiap bulan dapat dilihat pada **Gambar 2.22**, yaitu dari persentase cakupan indikator penimbangan, yaitu jumlah balita yang ditimbang dibandingkan dengan jumlah balita sasaran penimbangan (D/S) yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam menimbang balita. Hasil laporan Pencapaian Indikator Pembinaan Gizi Masyarakat menunjukkan rata-rata cakupan D/S di Aceh tahun 2009 adalah 53,9 persen dan 54,4 persen pada tahun 2010, angka ini jauh dari target Aceh yaitu 70 persen dan jika dibandingkan dengan 8 (depalan) indikator program perbaikan gizi masyarakat tahun 2010-2014, yaitu 85 persen anak ditimbang berat badannya (D/S), maka cakupan D/S Aceh masih sangat jauh berada di bawah target tersebut. Jika dilihat menurut kabupaten/kota terdapat tiga kabupaten yang mempunyai angka cakupan D/S sangat tinggi, yaitu Kabupaten Aceh Utara (96,1%), Kabupaten Aceh Tamiang (88,9%) dan Kota Lhokseumawe (85,2%). Sebaliknya masih banyak didapatkan kabupaten dengan cakupan D/S sangat rendah, yaitu Kabupaten Bener Meriah (17,1%), Nagan Raya (24,7%), Aceh Barat Daya (26,2%) dan Aceh Tengah (28,4%).

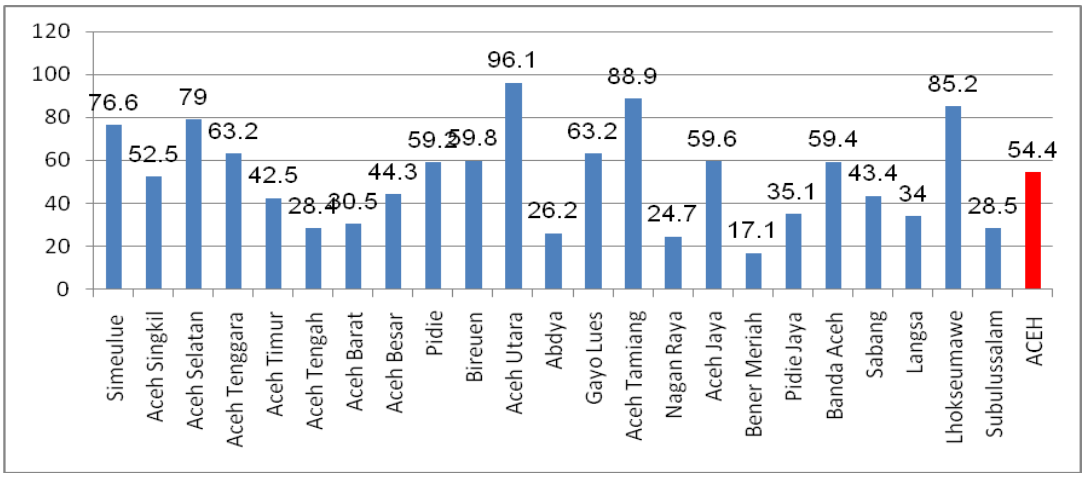

Sumber : Profile Kesehatan Aceh 2010

Gambar 2.22 Cakupan Penimbangan Balita (D/S) Tahun 2010 di Aceh

Berdasarkan perilaku merokok, persentase perokok tiap hari terbesar terdapat di Kabupaten Bener Meriah (32,9%), Aceh Barat Daya (31.0%) dan Aceh Barat (29,2%), sedangkan terendah di Nagan Raya (16.6%). Prevalensi perokok provinsi dan jumlah batang rokok, 18,5 batang per hari dan merupakan angka tertinggi di Indonesia (Riskesdas 2007).

Perilaku konsumsi sayuran dan buah-buah masih sangat rendah. Data Riskesdas 2007 menunjukkan 95,5 persen masyarakat Aceh kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Jika dilihat menurut kabupaten, Kota Langsa memiliki angka kecukupan sayur dan buah yang paling tinggi (19.2%). Sedangkan kabupaten yang memiliki angka kecukupan sayur dan buah paling rendah adalah Aceh Selatan (0.5%). Konsumsi sayuran dihitung dari jumlah hari konsumsi dalam seminggu dan jumlah porsi rata-rata dalam

sehari. Penduduk dikategorikan cukup konsumsi sayur dan buah apabila makan sayur dan/atau buah minimal 5 porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu.

Selanjutnya tingkat aktivitas fisik dilihat dari kebiasaan melakukan aktivitas fisik berat, sedang dan ringan. Penduduk yang tidak biasa melakukan aktivitas adalah penduduk yang tidak melakukan aktivitas fisik berat, sedang atau ringan atau melakukan aktivitas berat, sedang dan ringan tetapi kurang dari sepuluh menit. Secara umum prevalensi penduduk yang cukup melakukan kegiatan aktivitas fisik rutin di Aceh sebesar 62,9 persen. Prevalensi melakukan aktivitas fisik yang tertinggi adalah Kota Sabang (89.8%) dan terendah di kabupaten Nagan Raya (36,7%).

Penggunaan jamban sehat adalah salah satu indikator untuk menilai perilaku yang benar dalam hal Buang Air Besar (BAB). Dari hasil Riskesdas 2007 rata-rata penduduk Aceh BAB yang benar yaitu sebesar 61,6 persen. Kabupaten yang tertinggi adalah Banda Aceh (96,6%) dan terendah Aceh Barat Daya (26,0%). Sedangkan berperilaku benar dalam cuci tangan di Aceh adalah 16,0 persen, kabupaten tertinggi adalah Nagan Raya (47,1%) dan terendah Aceh Tenggara (2,0%).

Penggunaan air per orang per hari di Aceh pada umumnya lebih dari 100 liter. Apabila dibandingkan antar wilayah kabupaten/kota, persentase tertinggi masyarakat dengan penggunaan air lebih dari 100 liter adalah Kabupaten Aceh Singkil (79,2%) dan Aceh Barat (77,8%). Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang pemenuhan kebutuhan airnya di bawah rata-rata Nasional, sedangkan berdasarkan ketersediaan air bersih, secara umum di Aceh sebanyak 21,8 persen rumah tangga mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau. Kabupaten tertinggi yang mengalami kesulitan air bersih adalah Aceh Timur 60,8 persen terendah Banda Aceh 3,1 persen.

Hasil Riskesdas tahun 2007, menunjukkan 80,4 persen rumah tangga di Aceh belum menerapkan PHBS (kategori buruk), hanya 19,6 persen Rumah tangga yang menerapkan PHBS (kategori baik). Menurut Kabupaten, hanya 5 (lima) kabupaten/Kota di Aceh yang mempunyai persentase Rumah Tangga yang memenuhi kriteria baik dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agak tinggi, yaitu Kota Sabang (35,4%), Aceh Tengah (32%), Kota Banda Aceh (30,6%), Bener Meriah (30,2%), Bireuen (30,1%). Sedangkan persentase PHBS paling rendah di kabupaten Gayo Lues (1,5%) dan Nagan Raya (2,2%).

Dalam hal jarak dan waktu, pada umumnya rumah tangga di kabupaten/kota dapat menjangkau sumber air dalam waktu kurang dari 30 menit dan jarak kurang dari 1 km. Permasalahan yang cukup banyak dialami terkait dengan kualitas fisik air bersih adalah kekeruhan dan warna. Kabupaten yang paling tinggi mengalami masalah kualitas fisik (kekeruhan) adalah Aceh Besar (30,0%). Masih banyak rumah tangga yang mempunyai sarana pembuangan air limbah (SPAL) yang terbuka, paling tinggi terdapat di Langsa

(87.3%) sedangkan yang tidak mempunyai SPAL, tertinggi di Pidie (48.3%). Secara umum persentase masyarakat yang mempunyai akses terhadap air bersih (20 liter/orang/hari dari Sumber Terlindung dalam jarak 1 km atau Waktu Tempuh Kurang Dari 30 Menit) sebesar 45,5 persen dan menjalankan sanitasi dengan baik (Memiliki Jamban Jenis Latrin + Tangki Septik) di Aceh sebesar 32,5 persen. Kabupaten tertinggi dalam mengakses air bersih adalah Sabang 45,5 persen dan terendah Gayo Lues 0,4 persen. Dalam hal sanitasi, kabupaten tertinggi adalah Banda Aceh 76,5 persen dan terendah Gayo Lues 10,6 persen.

Jumlah rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencakup 10 indikator PHBS yang terdiri dari enam indikator individu dan empat indikator rumah tangga, didapatkan sebagian besar Rumah tangga di Aceh belum menerapkan PHBS. Hasil Riskesdas tahu 2007, menunjukkan 80,4 persen rumah tangga di Aceh belum menerapkan PHBS (kategori buruk), hanya 19,6 persen Rumah tangga yang menerapkan PHBS (kategori baik). Menurut Kabupaten, hanya 5 (lima) kabupaten/Kota di Aceh yang mempunyai persentase Rumah Tangga yang memenuhi kriteria baik dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agak tinggi, yaitu Kota Sabang (35,4%), Aceh Tengah (32%), Kota Banda Aceh (30,6%), Bener Meriah (30,2%), Bireuen (30,1%). Sedangkan persentase PHBS paling rendah di kabupaten Gayo Lues (1,5%) dan Nagan Raya (2,2%).

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan dibidang kesehatan Aceh yang memerlukan penanganan segera dalam lima tahun ke depan adalah: 1) rendahnya UHH; 2) tingginya angka kematian (bayi, ibu dan balita) yang belum mencapai target MDGs; 3) rendahnya status gizi (prevalensi balita kekurangan gizi, prevalensi balita pendek, prevalensi balita kurus, tingginya Kekurangan Energi Kronis (KEK)); 4) tingginya angka kesakitan (angka keluhan kesehatan, penyakit Ispa, diare, malaria, TBC, DBD, penyakit kusta, campak, pertusis, tetanus neonatorum, HIV/AIDS, penyakit tidak menular (stroke, jantung, hipertensi, diabetes melitus) dan gangguan mental emusional); 5) rendahnya kesehatan lingkungan; 6) rendahnya perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif, menimbang anak balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, mengkonsumsi sayuran dan buah setiap hari, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan merokok dalam rumah).

G. Keluarga Berencana

Masalah kependudukan pada hakekatnya menyangkut tiga aspek yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek mobilitas. Saat ini dari aspek kuantitas, Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km^2**.** Sementara itu dari aspek kualitas Aceh memiliki kualitas penduduk yang

rendah, tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia Aceh menempati peringkat ke-18 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010.

Kondisi di atas berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan diantaranya aspek sosial ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Besarnya dampak kependudukan ini memerlukan strategi yang memperhatikan perkembangan struktur penduduk, terutama penduduk usia muda dalam menyiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan daerah galcitas, kumuh, perkotaan dan kepulauan, dan menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin serta pengembangan pelayanan keluarga sejahtera yang komprehensif.

Pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB meningkatkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Tahun 2007 jumlah PUS 692.500 atau sebesar 60,98% dan pada Tahun 2011 meningkat sebesar 14,01% atau menjadi 808.235 PUS.

Tabel 2.31
Target dan Realisasi Akseptor KB
Tahun 2007 s.d. 2011

Tahun	Target		Realisasi				
	Akseptor baru	Pemakai Sekarang	Akseptor Baru	Persentase	Pemakai Sekarang	PUS (%)	Jumlah PUS
2007	114 800	304 250	108 898	94,86	422 286	60,98	692 500
2008	132 350	315 900	132 475	100.09	496 366	71,02	698 900
2009	145 148	452 755	179 350	123,56	558 237	80,65	692 200
2010	158 744	615 250	197 786	124,59	593 025	73,45	807 400
2011	149 527	652 340	182 619	122,13	606 081	74,99	808 235

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012)

2.2.2.3. Sosial

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh telah menunjukkan berbagai kemajuan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, atau dalam istilah konsep pelayanan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Aceh telah meningkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Kemajuan kondisi masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik jati diri bangsa.

Sekarang ini, Pemerintah Aceh masih dihadapkan pada kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, seperti: kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, kerasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi, sebagaimana terjabar dalam **Tabel 2.32**.

Tabel 2.32
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Jumlah (Jiwa)
1	Anak Terlantar (anak yatim, piatu dan yatim piatu)	117.584
2	Anak Jalanan	1.133
3	Anak Nakal	2.147
4	Anak Korban Tindak Kekerasan	3.139
5	Lanjut Usia Terlantar	25.296
6	Orang Dengan Kecacatan (ODK)	30.062
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	58.297
8	Korban Penyalahgunaan Napza	1.968
9	Fakir Miskin	359.152
10	Gelandangan dan Pengemis	1.433
11	Eks Penyakit Kronis	5.027
12	Komunitas Adat Terpencil	2.072
13	Mantan Warga Binaan LP (Eks Narapidana)	2.464.
14	Korban Bencana dan Musibah Lainnya	12.979
15	Tuna Susila	487
16	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	120.267
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.803
18	Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana	47.840
19	Perintis, Pahlawan, Pejuang Kemerdekaan	2.893
20	Korban Tindak Kekerasan	3.351

Sumber: Dinas Sosial Aceh (2011)

Berbagai progam dan kegiatan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti: pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Namun demikian, upaya-upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilaksanakan. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan hambatan tersebut, menimbulkan tantangan ke depan bagi Pemerintah Aceh adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

2.2.2.4. Perdamaian

Perdamaian merupakan kondisi yang silih berganti dengan konflik di Aceh selama hampir 5 (lima) dekade terakhir. Gerakan DI/TII pada 1953 hingga 1962 merupakan salah satu konflik politik antara Aceh dan pemerintah pusat. Tidak tersedia data yang cukup mengenai dampak dan kerugiaan akibatnya. Dalam rangkaian penyelesaiannya,

pemerintah mendorong berbagai kebijakan khusus termasuk kompensasi dan lapangan pekerjaan bagi para pelakunya.

Konflik yang berlangsung sejak 1976 hingga 2005 telah menyebabkan berbagai kehancuran baik moril maupun materil. Kekacauan selama 30 tahun tersebut menewaskan hampir 30 ribu orang, menghancurkan berbagai infrastruktur dan aset-aset produktif, serta mengacaukan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan Aceh menjadi provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia meski Aceh memiliki kekayaan alam melimpah. **Tabel 2.33** memperlihatkan berbagai kerugian yang timbul akibat konflik berkepanjangan tersebut.

Tabel 2.33
Total Kerugian Konflik sesuai Sektor

Sektor	Kerusakan (milyar rupiah)	Kerugian (milyar rupiah)	Biaya Konflik (milyar rupiah)
Sektor Produksi	3.323	65.612	68.934
Pemerintahan dan Administrasi	237	25.450	25.687
Sektor Sosial	1.497	1.699	3.178
Perumahan dan Infrastruktur	6.762	2.872	9.634
Total	**11.801**	**95.633**	**107.434**

Sumber: Pemerintah Indonesia dan Lembaga Donor (2009);
MSR-Multistakeholder Review of Post Conflict Programming in Aceh.
Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik ini. Dan akhirnya, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 3 (tiga) program utama reintegrasi (perumahan, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial). Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidak akuratan data. BRA di awalnya dibangun sebagai organisasi skala kecil, organisasi ini didesentralisasikan di bawah kepemimpinan paruh waktu dengan kapasitas terbatas untuk mendistribusikan dana reintegrasi dari Pemerintah Indonesia, target dan realisasi bantuan reintegrasi Aceh sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.34**.

Tabel 2.34
Target dan Realisasi Bantuan Reintegrasi Aceh
Periode 2005- 2011

Jenis Bantuan	Target	Realisasi	Tahun Akhir Bantuan	Status	
				Sisa	Lebih
Diyat (Orang)	29.435 *)	30.402	2009	967	-
Rumah (Unit)	29.378	29.628	2011	-	250
Korban Cacat (Orang)	14.932	6.505	2011	8.427	-
Pelayanan Medis (Paket)	5	4	2010	1	-
Beasiswa Anak Yatim	30.109	15.370	2009	14.739	-
Kegiatan Budaya (Paket)	5	5	2010	-	-
Total	**103.864**	**68.081**		**991.166**	**250**

**) Target penerima Diyat di tahun 2004.*
Sumber: Badan Reintegrasi Aceh, 2011

Upaya pemulihan konflik dan pembangunan perdamaian harus dilakukan secara komprehensif meliputi aspek reformasi sektor keamanan, keadilan transisional, dan pengembalian serta pemukiman kembali pengungsi. Khusus bantuan dana diyat dari angka realisasi sebesar 30.402 penerima belum sepenuhnya mendapat bantuan dimaksud bahkan hampir 1.110 penerima belum pernah menerima bantuan diyat sama sekali, penyediaan tanah pertanian bagi mantan kombatan, tapol/napol, dan masyarakat terimbas konflik masih belum terealisasi. Proses realisasi ini masih terkendala secara teknis dan kebijakan dibidang pertanahan yang harus diselesaikan Pemerintah Aceh sebelum program ini dapat berjalan.

Dari uraian sebelumnya upaya Pemerintah Aceh dalam hal memelihara keberlanjutan perdamaian ditempuh melalui: 1) Pengarusutamaan Perdamaian dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi pembangunan; 2) Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian; 3) Pencegahan, Mitigasi, dan Resolusi Konflik; 4) Promosi, Konsolidasi, dan Transformasi Pembangunan Perdamaian; 5) Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan; dan 6) Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat korban konflik.

2.2.2.5. Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan per kepala keluarga masih rendah. Rata-rata kepemilikan lahan per kepala keluarga hanya sekitar 0,25 – 0,6 ha/kk. Kecilnya lahan yang dimiliki masyarakat menyebabkan kesempatan berusaha di sektor pertanian belum mampu meningkat kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan pemanfaatan teknologi masih sederhana (tradisional) menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas komoditi yang dibudidayakan. Hasil penelitian di bidang agribisnis pertanian memberikan informasi bahwa kepemilikan lahan minimal per KK seluas 2 hektar untuk mendukung kehidupan petani yang layak.

Pemerintah Aceh berupaya untuk menyediakan lahan pertanian kepada masyarakat yang tidak mampu atau tergolong miskin seluas 2 hektar per KK. Namun upaya ini menghadi

kendala belum adanya informasi yang valid tentang lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Oleh karena itu, indentifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian sangat penting dilakukan. Sehubungan dengan hal ini, koordinasi lembaga terkait yaitu BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya yang dikoordinir oleh Bappeda untuk mencari solusi terhadap penyediaan lahan tersebut perlu dilakukan. Lahan yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian adalah lahan yang diterlantarkan oleh pemegang HPH dan HGU.

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI), IPM/HDI adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara.

Pada tahun 2010, IPM Aceh mencapai angka 71.70, dimana angka ini lebih tinggi dari tahun 2009 (71,31) dan tahun 2008 (70,59). Jika dilihat dari peringkatnya, Aceh menempati peringkat ke-18 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Bila diperhatikan IPM per Kabupaten/Kota, IPM Kabupaten/Kota di wilayah pesisir timur secara rata-rata lebih besar dari IPM rata-rata provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota di pesisir barat lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi. Sementara itu di wilayah tengah menunjukkan adanya variasi IPM antar kabupaten **(Tabel.2.35)**.

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Tahun 2006 – 2010

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Simeulue	66.38	67.97	68.60	68.92	69.28
2	Aceh Singkil	67.17	67.97	68.12	68.29	68.58
3	Aceh Selatan	68.41	68.87	69.18	69.64	69.97
4	Aceh Tenggara	70.58	70.96	70.99	71.23	71.60
5	Aceh Timur	68.84	69.40	69.55	70.19	70.55
6	Aceh Tengah	71.16	72.11	72.81	73.22	73.69
7	Aceh Barat	68.08	69.28	69.66	70.32	70.79
8	Aceh Besar	71.87	72.71	72.84	73.10	73.32
9	Pidie	69.99	70.76	71.21	71.60	71.92
10	Bireun	72.20	72.45	72.60	72.86	73.07
11	Aceh Utara	70.44	71.39	71.47	71.90	72.46
12	Aceh Barat Daya	67.52	68.37	69.38	69.81	70.29
13	Gayo Lues	66.61	67.08	67.17	67.59	67.86
14	Aceh Tamiang	68.73	69.17	69.81	70.50	70.79
15	Nagan Raya	66.88	67.64	68.47	68.74	69.18
16	Aceh Jaya	67.77	68.23	68.94	69.39	69.63
17	Bener Meriah	68.12	68.88	69.77	70.38	70.98

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
18	Pidie Jaya	69.40	69.96	71.23	71.71	72.38
19	Banda Aceh	75.44	76.31	76.74	77.00	77.45
20	Sabang	73.66	74.48	75.00	75.49	75.98
21	Langsa	71.51	72.22	72.79	73.20	73.85
22	Lhokseumawe	73.80	74.65	75.00	75.54	76.10
23	Subulussalam	67.80	68.28	68.42	68.85	69.26
Total		**69.41**	**70.35**	**70.76**	**71.31**	**71.70**

Pada periode 2005–2010, IPM Aceh secara rata-rata terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun demikian disparitas antar wilayah (kabupaten/kota) masih terjadi. Pada tahun 2010, IPM yang tertinggi di kota Banda Aceh (77,45) dan terendah di kabupaten Gayo Lues (67,86). Umumnya IPM yang tinggi di wilayah perkotaan dibanding dengan IPM di Perdesaan.

Disparitas sebaran IPM antar wilayah di Aceh masih tinggi. IPM kabupaten/kota di pesisir timur dan Banda Aceh dan sekitarnya lebih besar dari IPM Aceh, kecuali Aceh Timur dan Aceh Tamiang. IPM kabupaten/kota di pesisir barat relatif lebih kecil dari IPM Aceh. Beberapa IPM kabupaten di wilayah tengah lebih besar (Aceh Tengah dan Aceh Tenggara) dari IPM Aceh, namun masih ada beberapa kabupaten (Gayo Lues dan Bener Meriah) IPM nya lebih kecil dari IPM Aceh. Disparitas IPM menurut wilayah tersebut dapat mengidentifikasikan bahwa ada kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam rangka meningkatkan IPM Aceh maka Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (RAD-MDGs) Aceh Tahun 2011-2015. Rencana Aksi Daerah (RAD) ini memuat 8 (delapan) tujuan (*goals)*: Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar universal, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kesinambungan lingkungan, dan kemitraan dalam pembangunan. Oleh karena itu, sasaran pencapaian MDGs merupakan target yang harus dicapai Pemerintah Aceh pada tahun 2015.

2.2.2.7. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran di Aceh selama periode 2009 -2011 cenderung menurun. Pada tahun 2009 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh sebesar 8,71 persen dan selanjutnya terus menurun secara berturut-turut menjadi 8,37 persen (2010) dan 7,43 persen (2011). Namun TPT Aceh masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Sumatera Utara (6,37%) dan Nasional (6,14%). Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Aceh Utara

merupakan wilayah yang memiliki TPT tertinggi (8,68%), sebaliknya Kabupaten Bener Meriah merupakan wilayah yang memiliki TPT terendah (5,19%) dibandingkan dengan kabupaten lainnya **(Tabel.2.36)**.

Tabel 2.36
Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh
Tahun 2010 - 2011

No	Kabupaten/Kota	Tahun	
		2010	2011
1	Simeulue	12,25	7,36
2	Aceh Singkil	9,31	7,67
3	Aceh Selatan	11,34	6,41
4	Aceh Tenggara	9,90	7,69
5	Aceh Timur	6,13	7,97
6	Aceh Tengah	2,55	6,10
7	Aceh Barat	3,52	6,39
8	Aceh Besar	11,60	7,93
9	Pidie	7,56	6,92
10	Bireuen	7,32	7,65
11	Aceh Utara	12,78	8,68
12	Aceh Barat Daya	6,14	6,83
13	Gayo Lues	4,72	6,93
14	Aceh Tamiang	8,03	6,71
15	Nagan Raya	3,94	7,13
16	Aceh Jaya	7,78	6,29
17	Bener Meriah	2,25	5,19
18	Pidie Jaya	5,81	7,95
19	Banda Aceh	11,56	8,52
20	Sabang	10,02	6,06
21	Langsa	12,95	7,61
22	Lhokseumawe	11,83	7,63
23	Subulussalam	4,28	8,18
	Rata-rata Aceh	**8,37**	**7,43**
	Rata-rata Sumatera Utara	**7,43**	**6,37**
	Rata-rata Nasional	**7,14**	**6,14**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama,

Jumlah angkatan kerja di Aceh berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja 1,939 juta orang (Agustus 2010), meningkat menjadi 2,001 juta orang (Agustus 2011). Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang berkerja pada tahun 2010 sejumlah 1.776 juta orang mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 1.852 juta orang. Penduduk yang menganggur mengalami penurunan dari 162 ribu orang (tahun 2010) menjadi 149 ribu orang (2011). Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) mengalami kenaikan sebanyak 6 ribu orang dari 1,130 juta orang

pada tahun 2010 menjadi 1,136 juta orang pada tahun 2011. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari 63,17 persen (tahun 2010) menjadi 63,78 persen pada tahun 2011 **(Tabel 2.37)**.

Tabel 2.37
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama, 2009 – 2011 (Juta Orang)

Kegiatan Utama		2009	2010		2011	
		Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Penduduk 15+	3,037	3,077	3,069	3,105	3,138
2	Angkatan Kerja	1,898	1,933	1,939	2,069	2,001
	- Bekerja	1,733	1,767	1,776	1,898	1,852
	- Penganggur	0,165	0,166	0,162	0,171	0,149
3	Bukan Angkatan Kerja	1,139	1,144	1,130	1,036	1,136
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,5	62,83	63,17	66,63	63,78
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,71	8,60	8,37	8,27	7,43

3. Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama

Jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan yang bekerja juga meningkat. Pada tahun 2010 penduduk laki-laki yang bekerja sebesar 1.119 juta orang menjadi 1.166 juta orang pada tahun 2011 dan penduduk perempuan yang bekerja pada tahun 2010 sebesar 657 ribu orang menjadi 686 ribu orang pada tahun 2011. Jika dilihat dari sisi gender, TPT Perempuan pada Agustus 2011 mencapai 8,50 persen dimana angka ini lebih tinggi 1,70 persen dari TPT Laki-laki yang sebesar 6,80 persen, seperti yang disajikan pada **Tabel 2.38** dan **Tabel. 2.39**.

Tabel 2.38
Penduduk Laki-Laki Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama, 2009 – 2011 (Juta Orang)

Kegiatan Utama		2009	2010		2011	
		Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Penduduk 15+	1,497	1,516	1,513	1,534	1,550
2	Angkatan Kerja	1,194	1,190	1,207	1,255	1,252
	- Bekerja	1,104	1,102	1,119	1,165	1,166
	- Penganggur	0,090	0,089	0,088	0,090	0,085
3	Bukan Angkatan Kerja	0,302	0,326	0,306	0,279	0,299
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,79	78,53	79,77	81,80	80,73
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,52	7,43	7,31	7,21	6,80

Tabel 2.39
Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2009 – 2011 (Juta Orang)

Kegiatan Utama		2009	2010		2011	
		Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Penduduk 15+	1,540	1,561	1,555	1,570	1,587
2	Angkatan Kerja	0,704	0,742	0,731	0,814	0,750
	- Bekerja	0,628	0,665	0,657	0,733	0,686
	- Penganggur	0,076	0,78	0,074	0,081	0,064
3	Bukan Angkatan Kerja	0,836	0,818	0,824	0,756	0,838
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	45,70	47,58	47,02	51,82	47,23
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,74	10,47	10,12	9,89	8,50

4. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011 terutama di Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 88 ribu orang (10,92%) dan Sektor lainnya (Sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas, dan Air; Kontruksi; Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan) sekitar 11 ribu orang (5,42%). Sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan sekitar 23 ribu orang (12,55%).

Pada tahun 2011 Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan adalah sektor yang menampung tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 48,49 persen. Secara berurutan sektor lain yang menampung tenaga kerja paling banyak adalah Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan sebesar 19,36 persen, Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 16,15 persen, Sektor Lainnya sebesar 12,08 persen, dan terakhir Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,91 persen. Untuk lebih rinci sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.40**.

Tabel 2.40
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2009 – 2011

Kegiatan Utama	2009	2010		2011	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	847.095	869.110	809.788	903.447	898.225
Industri Pengolahan	80.772	75.827	77.828	124.369	72.509
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	264.453	271.815	314.323	282.781	299.183
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	331.508	355.092	361.971	393.921	358.704
Lainnya *)	208.733	194.826	212.344	193.386	223.852
Jumlah	**1.732.561**	**1.766.670**	**1.776.254**	**1.897.904**	**1.852.473**

**) Sektor Lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas,dan Air, Konstruksi, Transportasi, dan Keuangan.*

5. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Secara sederhana, pendekatan kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh katagori status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup katagori berusaha dibantu buruh tetap dan katagori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal.Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2011 sebesar 710 ribu orang (38,33%) bekerja pada kegiatan formal dan 1,1 juta orang (61,67%) bekerja pada kegiatan informal **(Tabel 2.41)**.

Dari 1.852 juta orang yang bekerja pada Februari 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/ karyawan/ pegawai sebesar 33,48 persen, diikuti berusaha sendiri 19,32 persen, kemudian pekerja keluarga/ tidak dibayar sebesar 18,52 persen, lalu berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebesar 17,53 persen. Untuk status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap dan bekerja bebas baik disektor pertanian maupun non pertanian nilainya dibawah lima persen.

Tabel 2.41
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2009 – 2011

Kegiatan Utama	2009	2010		2011	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Berusaha Sendiri	355.868	353.371	348.323	435.756	357.943
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh Tidak Dibayar	331.612	340.731	357.382	358.514	324.722
Berusaha dibantu buruh tetap	71.555	71.060	90.589	76.2960	89.781
Buruh/Karyawan/Pegawai	51.804	63.684	58.084	63.390	75.983
Pekerja Bebas di Pertanian	45.393	37.061	42.985	26.001	40.716
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	331.612	345.484	332.159	363.449	343.086
Jumlah	**1.732.561**	**1.766.670**	**1.776.254**	**1.897.904**	**1.852.473**

Sumber: BPS, 2012

6. Penduduk yang Bekerja dan Pengganggguran menurut Wilayah

Berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran menurut Wilayah, Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang menganggur (20.132 orang) sebaliknya Kota Sabang (847 orang). Namun tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Aceh Jaya sebesar 66,97 persen sebaliknya yang terendah di Kota Langsa sebesar 61,70 persen **(Tabel 2.42)**.

Tabel 2.42
Penduduk yang Bekerja, Pengangguran, Tingkat Partisipasi
Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
menurut Kabupaten/Kota di Aceh Agustus 2011

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan		TPAK	TPT
		Bekerja	Pengangguran		
1	Simeulue	33.217	2.639	66,35	7,36
2	Aceh Singkil	38.513	3.119	64,95	7,67
3	Aceh Selatan	86.232	5.902	64,13	6,41
4	Aceh Tenggara	69.889	5.822	64,00	7,69

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan		TPAK	TPT
		Bekerja	Pengangguran		
5	Aceh Timur	141.738	12.282	63,65	7,97
6	Aceh Tengah	73.406	4.772	65,24	6,10
7	Aceh Barat	75.845	5.176	65,45	6,39
8	Aceh Besar	148.633	12.802	64,21	7,93
9	Pidie	157.157	11.678	62,49	6,92
10	Bireuen	162.517	13.460	62,75	7,65
11	Aceh Utara	211.686	20.132	63,00	8,68
12	Aceh Barat Daya	53.664	3.936	64,25	6,83
13	Gayo Lues	31.998	2.383	65,24	6,93
14	Aceh Tamiang	103.805	7.470	64,75	6,71
15	Nagan Raya	61.607	4.732	66,10	7,13
16	Aceh Jaya	34.390	2.307	66,97	6,29
17	Bener Meriah	52.001	2.849	66,86	5,19
18	Pidie Jaya	55.494	4.793	63,10	7,95
19	Banda Aceh	95686	8.916	61,72	8,52
20	Sabang	13.120	847	65,96	6,06
21	Langsa	59.227	4.880	61,70	7,61
22	Lhokseumawe	68.405	5.649	62,07	7,63
23	Subulussalam	24243	2.160	64,54	8,18
	Total	**1.852.473**	**148.786**	**63,78**	**7,43**

Sumber: Badan Pusat Statistik,2011

Selanjutnya berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, jumlah pengangguran di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Tingkat pengangguran di perdesaan pada tahun 2011 sebanyak 111.594 orang sedangkan di perkotaan sebanyak 37.192 orang. Demikian juga bila dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di perdesaan sebanyak 1.342.574 orang sedangkan di perkotaan sebanyak 509.899 orang. Sebaran penduduk perkotaan dan perdesaan yang bekerja dan menganggur di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada **Tabel 2.43.**

Tabel 2.43
Penduduk Perkotaan dan Perdesaan yang bekerja, Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Prov. Aceh Agustus 2011

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan		Perdesaan	
		Bekerja	Pengangguran	Bekerja	Pengangguran
1	Simeulue	6.127	342	27.090	2.297
2	Aceh Singkil	8.931	687	29.582	2.512
3	Aceh Selatan	12.185	380	74.047	5.044
4	Aceh Tenggara	11.404	778	58.485	5.044
5	Aceh Timur	15.557	1.249	126.181	11.033
6	Aceh Tengah	18.436	688	54.970	4.084
7	Aceh Barat	20.523	1.210	55.322	3.966
8	Aceh Besar	41.385	3.547	107.248	9.255
9	Pidie	23.292	1.408	133.865	10.270
10	Bireuen	37.036	2.673	125.481	10.787
11	Aceh Utara	35.886	2.731	175.800	17.401
12	Aceh Barat Daya	9.541	459	44.123	3.477
13	Gayo Lues	5.310	239	26.688	2.144
14	Aceh Tamiang	33.261	2.053	70.544	5.417
15	Nagan Raya	5.784	87	55.823	4.645
16	Aceh Jaya	2.291	3	32.099	2.304
17	Bener Meriah	9.998	428	42.003	2.421
18	Pidie Jaya	4.112	167	51.382	4.626
19	Banda Aceh	95.686	8.916	-	-
20	Sabang	7.967	575	5.153	272
21	Langsa	49.299	4.149	9.928	731
22	Lhokseumawe	51.376	4.069	17.029	1.580
23	Subulussalam	4.512	354	19.731	1.806
	Total	**509.899**	**37.192**	**1.342.574**	**111.594**

Sumber: Badan Pusat Statistik,2011

Berdasarkan uraian sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh masih di atas Nasional dan Sumatera Utara, yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Dari sisi gender tingkat pengangguran terbuka di dominasi oleh perempuan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berupaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan kapasitas BLK, penyuluhan, peningkatan infrastruktur pendukung, pemasaran, pengembangan ekonomi lokal masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah serta promosi investasi.

2.2.3. Fokus Dinul Islam, Adat dan Budaya

2.2.3.1. Dinul Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Dalam implementasinya, pilar akidah dan akhlak merupakan sesuatu yang sudah baku dan tidak perlu dipersoalkan lagi seperti Rukun Iman, Rukun Islam, akhlak baik dan akhlak buruk. Namun, pilar syari'ah perlu mendapat pemahaman yang lebih mendalam bagi semua masyarakat. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dinul Islam melalui penerapan syari'at Islam di kalangan masyarakat Aceh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kehidupan yang dulunya sarat dengan akhlak dan sopan santun telah berubah menjadi suasana yang jauh dari tatakrama tuntutan agama Islam. Hal ini tercermin dari tingkah laku anak yang kurang menghargai orang tua, demikian juga sebaliknya orang tua kurang peduli terhadap perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma agama Islam.

Disisi lain, tindakan orang tua yang tergolong keras dalam mendidik anak dapat menjadi bumerang karena tergolong ke dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sering terjadi tindakan kekerasan yang pada hakikatnya disisi orang tua bertujuan untuk mendidik, namun dipihak anak dianggap sebagai pelanggaran HAM yang sering dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini mendapat perhatian berbagai pihak agar orang tua dan masyarakat dapat memahami pola pengasuhan dan pendidikan anak dengan baik sehingga tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum perlindungan anak. Begitu pula dengan anak yang perlu mendapat pendidikan etik (budi pekerti) mulai dari lingkungan terkecil (keluarga), sekolah, dan juga masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan syariat Islam di lingkungan masyarakat telah menjadikan mesjid dan menasah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan budaya Islam seperti dalail khairat, pengajian dan pengkajian agama secara rutin. Namun, pengajian rutin di kalangan rumah tangga tidak lagi dilaksanakan setelah shalat maghrib sebagaimana

yang telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Aceh telah mencanangkan kembali kegiatan tersebut.

Pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat menjadi fenomena umum di Aceh. Pasangan muda mudi non muhrim sering terlihat melakukan tindakan yang melanggar syari'at Islam diberbagai lokasi seperti ditempat-tempat wisata dan lokasi umum lainnya. Hal ini perlu perhatian serius dari semua lapisan masyarakat dan penegak hukum syari'at untuk memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada generasi muda agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Disamping itu, pengaruh negatif globalisasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari sikap dan perilaku masyarakat yang dulunya agamis dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi menjadi egois dan cenderung jauh dari norma agama. Berkembangnya media internet *online* di perkotaan dan perdesaan sering dimanfaatkan oleh muda-mudi sampai larut malam di lokasi-lokasi penyediaan jasa internet *online*. Arus informasi negatif yang tersedia melalui jasa internet sangat mudah diakses oleh kalangan muda-mudi. Disamping itu, kalangan muda-mudi juga memanfaatkan jasa internet ini bermain game online yang sering juga dijadikan sarana perjudian (judi *online*).

Implementasi dinul Islam dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Selanjutnya, kualitas pelajaran agama masih perlu ditingkatkan melalui praktek keagamaan di sekolah. Demikian juga dengan muatan dan kurikulum pelajaran yang mendukung dinul Islam masih kurang serta tingkat pemahaman tenaga pendidik terhadap dinul Islam masih sangat terbatas. Tenaga pendidik di sekolah umum belum mendapat standarisasi tentang internalisasi nilai-nilai dinul Islam ke dalam materi pembelajaran umum. Tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keagamaan siswa bukanlah sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, namun merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan kata lain, orang tua siswa dan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kualitas keagamaan siswa tersebut.

Imum meunasah, muazzin dan khadam meunasah mempunyai peran yang cukup sentral dalam masyarakat Aceh. Peran tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, baik menyangkut peningkatan pengamalan ajaran Islam, menghidupkan fungsi meunasah di gampong-gampong, maupun peningkatan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai ajaran islam dan pengamalannya sebagai manifestasi pelaksanaan Syariat islam di tingkat gampong, imum meunasah dan perangkatnya tersebut, selama ini bekerja secara tulus dan ikhlas setiap hari, tanpa mempertimbangkan aspek-

aspek jerih payah dan honor sebagaimana yang biasa diterima oleh pegawai negeri sipil atau pegawai swasta. Demikian pula halnya dalam meningkatkan kapasitas SDM keagamaan di gampong-gampong, mereka bahu-membahu dengan berbagai perangkat lainnya bekerja secara baik dan penuh tanggungjawab dalam mengemban misi yang amat mulia ini. Ditinjau dari aspek sosiologis dan psikologis, kegiatan yang dilakukan oleh imeum meunasah, muazzin dan khadam meunasah telah banyak menyita waktu, tenaga dan beban mental mereka masing-masing dalam menghadapi berbagai macam pola prilaku dari masing-masing kelompok masyarakat ketika berinteraksi dan bergaul secara manusiawi.

Saat ini di Aceh terdapat 6.474 imeum Meunasah, setiap gampong terdapat Meunasah yang dipimpin oleh imeum Meunasah sebagai orang yang memimpin aspek keagamaan di gampong. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi mereka mendapat pengakuan dan penghargaan terhadap jerih payah yang telah mereka korbankan, meskipun dalam kenyataannya, mereka sama sekali tidak mengharapkan imbalan, karena bagi mereka mengemban tugas-tugas keagamaan tersebut merupakan suatu ibadah. Salah satu apresiasi dan memberikan semangat bagi para Imeum Meunasah adalah dengan memberikan insentif secara berkelanjutan. Hal ini kita harapkan dapat berimplikasi pada kinerja dan tanggungjawab sebagai pemuka masyarakat, tidak saja pada porsi pekerjaan tetapi juga pada porsi anggaran untuk kesejahteraan mereka masing-masing. Disamping itu jika dikaitkan dengan beban tugas dan peran yang dijalankan Imeum Meunasah dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia sangat penting, khususnya bidang keagamaan sebagai pilar utama penopang dalam mensosialisasikan Syari'at Islam di tingkat gampong.

Upaya memperkuat keimanan masyarakat di daerah perbatasan dan daerah terpencil Pemerintah Aceh sejak tahun 2002 telah memprogramkan penempatan da'I di perbatasan dan daerah terpencil. Jumlah da'i yang tercatat hingga saat ini berjumlah 150 orang. Tujuan penempatan Da'i di daerah perbatasan dan daerah terpencil adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan masyarakat untuk memiliki ketahanan aqidah sebagai modall dasar dalam menjalani kehidupan.
2. Mendorong masyarakat untuk mengamalkan Syariat dalam segala aspek kehidupan.
3. Meningkatkan Syiar Islam guna membentengi pendangkalan aqidah, pemurtadan dan masuknya aliran sesat.
4. Pembinaan moral dan ahklak masyarakat.
5. Mempererat ukhuwah islamiyah dan silaturrahmi antar umat beragama.
6. Mendorong terwujudnya suasana lingkungan yang damai, tertib dan aman.
7. Menggairahkan kegiatan belajar mengajar ummat, menggerakkan/ menghidupkan lembaga pengajian.
8. Memberdayakan Remaja Mesjid dan Meunasah (pengkaderan umat yang berkelanjutan).

9. Memperkuat kehidupan adat, seni dan budaya yang berasaskan Islam dalam masyarakat.
10. Memotifasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan kehidupan beragama dapat di tempuh dengan cara eksternal dan internal. Secara eksternal, kerukunan kehidupan beragama dapat dilakukan dengan meningkatkan toleransi antar umat beragama dan menyusun peraturan yang sesuai dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Selanjutnya secara internal, agar tidak membicarakan masalah-masalah khilafiah ditempat umum dan terbuka demi menjaga kemashlahatan dan persatuan umat.

2.2.3.2. Budaya dan Pariwisata

1. Adat Istiadat

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat, adat istiadat yang bersendikan syara' yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Nilai-nilai adat, adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat (peradilan adat) dan adat istiadat dalam bentuk perilaku dan kreasi-kreasi untuk membangun kemudahan dalam kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Hubungan adat dengan syariat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana petuah narit maja "*Hukom ngon Adat lagei dzat ngon sifeut*". Dalam hubungan adat dengan syariat dimaksud, tidak dapat dipisahkan dimana sisi syariat sebagi penyaring lembaga adat dan pada sisi adat sebagai pilar pendukung terlaksananya syariat seperti petuah narit maja "*Hukom meunyoe hana meu adat tabeu, Adat meunyoe hana hukom bateu".*

Norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot, adat meulampoh, adat meugoe, adat mawah, adat treun u blang, adat peuleheuh (lumo, keubeu, kameng, keubiri), adat pasai (lumo, keubeu, kameng, keubiri) dan adat uroe peukan. Namun, pelaksanaan adat istiadat tersebut sudah mengalami kemunduran. Hal ini jelas terlihat di kalangan remaja dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari yang tidak peduli terhadap adat istiadat tersebut. Penyebab utama kemunduran tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat yang sudah berlaku secara turun temurun. Di samping itu, pengaruh globalisasi yang bernilai negatif melunturkan nilai-nilai adat di masyakat.

Aceh memiliki lembaga-lembaga adat, seperti Panglima Laot, Keujreun blang, petua sineubok, pawang glee, harya peukan, syahbanda, fungsi keuchik, imum meukim, tuha peut

gampong, tuha peut mukim, peuteuah meunasah/imum meunasah dan sekretaris gampong/mukim. Dalam rangka melestarikan adat istiadat di Aceh dapat ditingkatkan dengan cara penguatan lembaga adat dan sosialisasi adat istiadat kepada masyarakat. Penguatan lembaga adat tersebut dilakukan dengan cara pelatihan dalam bidang materi peradilan adat, administrasi peradilan adat, peningkatan kualitas perempuan dalam hal gender, HAM, perlindungan perempuan dan perlindungan anak (Diversi dan *Restoration Justice*) dan pendamping serta mediasi perempuan dalam hal penyelesaian peradilan adat/damai. Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adat maka perlu dilakukan sosialisasi adat istiadat dan pendampingan secara berkelanjutan. Demikian juga untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan masyarakat secara luas.

2. Seni Budaya

Aceh memiliki keragaman budaya dan seni yang tinggi sebagai akibat dari beragamnya etnis dan posisi geografis yang strategis sehingga bangsa lain mudah mencapai Aceh. Keragaman budaya Aceh juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya baik budaya benda (*Tangible)* maupun budaya tak benda (intangible). Peninggalan sejarah budaya benda dapat diuraikan mulai dari masa prasejarah, klasik, masa Islam, dan kolonial, serta setelah kemerdekaan. Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/bangunan cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh **(Tabel 2.44)**.

Tabel 2.44
Rekapitulasi Jumlah Situs/Bangunan Cagar Budaya
Di Aceh Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	Makam	Masjid	Tugu	Rmh Trad.	Monu-men	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/ Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Jlh
1	Aceh Barat	5	4	1	0	0	0	1	0	2	0	13
2	Aceh Barat Daya	4	0	1	0	0	0	0	0	2	1	8
3	Aceh Besar	58	10	2	0	0	11	1	0	4	0	86
4	Aceh Jaya	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	Aceh Selatan	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	Aceh Singkil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aceh Tamiang	18	0	0	3	0	0	0	4	2	2	29
8	Aceh Tengah	1	0	2	0	0	0	0	0	10	0	13
9	Aceh Tenggara	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
10	Aceh Timur	24	1	0	0	1	0	0	0	8	0	34
11	Aceh Utara	21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	23
12	Bener Meriah	3	0	1	1	0	0	0	0	3	0	8
13	Bireuen	26	3	2	1	0	0	2	7	1	0	42
14	Gayo Lues	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
15	Banda Aceh	30	4	4	0	2	0	0	6	6	0	52
16	Langsa	5	1	1	0	1	0	1	7	4	10	30

No	Kabupaten/ Kota	Makam	Masjid	Tugu	Rmh Trad.	Monu-men	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/ Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Jlh
17	Lhokseumawe	9	0	2	0	0	1	0	0	4	0	16
18	Sabang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nagan Raya	3	0	0	1	0	1	0	0	4	0	9
20	Pidie	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21	Pidie Jaya	39	8	2	1	0	5	1	1	9	3	69
22	Simeulue	4	0	0	0	0	10	1	0	3	0	18
23	Subulussalam	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Jumlah		**277**	**34**	**19**	**8**	**4**	**30**	**7**	**25**	**62**	**16**	**282**

Sumber: Database Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2011

Jumlah situs/bangunan cagar budaya yang rusak yaitu di Banda Aceh 30, Aceh Besar 26, Aceh Barat 7, dan Aceh Jaya 3. Jumlah keseluruhan 66 bangunan. Kerusakan mulai dari rusak ringan, berat, dan rusak total. Dari jumlah cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 10 bangunan cagar budaya yang baru memiliki SK menteri atau register nasional.

Kondisi cagar budaya di beberapa daerah sangat memprihatinkan khususnya wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Makam Syiah Kuala. Penataan nisan di kompleks ini belum dilakukan secara maksimal. Penataan makam juga menimbulkan konflik antara ahli waris dan pihak pelestari, sehingga penataan tidak sesuai dengan kode etik pelestarian cagar budaya. Begitu juga pada situs Kampung Pande, nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata, bahkan ada yang belum tersentuh. Nisan-nisan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande. Namun pada tahun 2011, tulang-tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi, dan kondisi situs tersebut sangat memprihatinkan. Hal yang sama juga terlihat pada situs Lamreh dan Ujung Pancu. Selayaknya kelestarian situs/bangunan cagar budaya mendapat perhatian khusus.

Menurut laporan BP3 (Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala) Aceh, hanya 60 (enam puluh) situs/bangunan cagar budaya penting yang memiliki juru pelihara dan mendapat perhatian pemerintah. Namun, cagar budaya lainnya yang sudah teregister belum mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Demikian juga situs/bangungan cagar budaya termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregisterasi perlu dilakukan pencataan dan pola pengelolaan situs/bangunan cagar budaya sebaiknya dilakukan berorientasi kawasan. Selama ini, pengelolaan situs/bangunan cagar budaya dilakukan oleh BP3 yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan untuk pelestarian situs/bangunan cagar budaya di Aceh.

Aceh memiliki Budaya Tak Benda *(Intangible)* yang beragam seperti tarian, adat istiadat, dan kegiatan spiritual. Atraksi budaya tak benda dapat mendukung keberadaan budaya benda. Budaya tak benda, seperti seni tari pada masing-masing daerah, memiliki

kekhasan tersendiri. Saat ini Aceh memiliki 1.133 sanggar (group) kesenian yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa Aceh memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian seperti tarian (rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus), sastra (pantun, syair, hikayat, seumapa) dan seni lukis (kaligrafi) serta dalail khairat dan meurukon.

Selain tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kegiatan adat istiadat yang berbeda pada masing-masing daerah seperti adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno, dan lain-lain. Kesemua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan lokal dan manca negara.

3. Pariwisata

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata dibagi kedalam 3 kelompok yaitu objek dan daya tarik wisata alam, objek dan daya tarik wisata budaya dan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Wisata minat khusus adalah wisata yang hanya diminati sebagian dari wisatawan seperti berburu, mendaki gunung, gua, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah. Objek wisata menurut jenisnya secara lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.45**.

Tabel 2.45
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis Di Aceh

No	Kab/Kota	Jumlah Objek	Jenis Objek		
			Alam	Budaya	Minat Khusus
1	Aceh Barat	43	25	16	2
2	Aceh Barat Daya	33	28	3	2
3	Aceh Besar	84	41	35	8
4	Aceh Jaya	55	46	9	0
5	Aceh Selatan	92	62	23	7
6	Aceh Singkil	5	3	0	2
7	Aceh Tamiang	26	16	7	3
8	Aceh Tengah	22	7	8	7
9	Aceh Tenggara	19	12	3	4
10	Aceh Timur	43	22	17	4
11	Aceh Utara	38	10	23	5
12	Bener Meriah	28	25	3	0
13	Bireuen	40	27	8	5
14	Gayo Lues	38	26	7	5
15	Banda Aceh	42	4	22	16
16	Langsa	11	6	4	1
17	Lhokseumawe	15	8	2	5
18	Sabang	22	17	5	0
19	Nagan Raya	25	14	9	2
20	Pidie	45	20	14	11
21	Pidie Jaya	50	15	34	1
22	Simeulue	39	32	1	6
23	Subulussalam	7	4	3	0
TOTAL		**822**	**470**	**256**	**96**

Sumber: Data Base Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2011

Fasilitas pendukung pariwisata antara lain 27 hotel bintang (jumlah kamar 1.422), 212 hotel non bintang (jumlah kamar 2.935), 35 restoran, 568 rumah makan, 107 Biro Perjalanan wisata dan 15 toko souvenir. Selanjutnya, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara setiap tahunnya meningkat **(Table 2. 46)**.

Tabel 2. 46
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2007 – 2011

No	Klasifikasi Kunjungan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Wisatawan Mancanegara	13.835	17.282	18.589	20.648	28.053
2	Wisatawan Nusantara	595.546	710.081	712.630	720.079	959.546

Sumber: Data Base Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2011

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilakukan dengan memberikan paket wisata gratis kepada warga asing. Namun, wisatawan tersebut diwajibkan menuliskan pengalamannya selama berada di Aceh dalam majalah yang ternama di negara mereka. Pengalaman ini telah dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi keterpurukan pariwisata pasca tsunami dan musibah bocornya reaktor nuklir. Pengalaman ini juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh jika semua potensi wisata sudah dalam keadaan baik dan masyarakat dapat menerima wisatawan sebagai tamu yang harus dihormati. Pengembangan pariwisata tidak akan terwujud jika pelaku pengelola pariwisata tidak melibatkan *stakeholder* seperti MPU, Dinas Syariat Islam, dan juga pengelola-pengelola objek pariwisata di seluruh Aceh.

Keragaman kebudayaan Aceh, baik budaya benda *(tangible)* maupun bukan benda *(intangible)* belum sepenuhnya dikelola untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya (1) pelestarian dan pengembangan objek wisata budaya, wisata alam, dan wisata minat khusus; (2) promosi objek dan daya tarik wisata dalam dan luar negeri; (3) peningkatan kapasitas pengelola objek dan daya tarik wisata; (4) meningkatkan kesiapan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya serta pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

2.2.3.3. Olah Raga dan Kepemudaan

1. Olah Raga

Dalam bidang olahraga terdapat 43 organisasi yang merupakan wadah berkumpul dan beraktivitasnya para atlet di berbagai kegiatan cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Aceh seperti club sepak bola, badminton, tenis meja, footsal, voly, renang, sepeda, tinju, panjat tebing, lari dan senam sehat. Club olah raga tersebut pada umumnya bernaung di bawah organisasi keolahragaan seperti yang disajikan pada **Tabel 2.47**.

Tabel 2.47
Organisasi Keolahragaan di Aceh

No	NAMA PENGDA	No	NAMA PENGDA
1	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PENGDA PGSI)	23	Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PENGDA PABBSI)
2	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PENGDA PJSI)	24	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PENGDA PBVSI)
3	Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PENGDA FORKI)	25	Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PENGDA PBSI)
4	Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (PENGDA PERKEMI)	26	Persatuan Olahraga Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PENGDA PELTI)
5	Ikatan Pencak Silat Indonesia (PENGDA IPSI)	27	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PENGDA PERCASI)
6	Taekwondo Indonesia (PENGDA TI)	28	Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (PENGDA PERPANI)
7	Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PENGDA KODRAT)	29	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PENGDA PERBASI)
8	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PENGDA PERTINA)	30	Persatuan Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (PENGDA ISSI)
9	Wushu Indonesia (PENGDA WI)	31	Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PENGDA PERSEROSI)
10	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PENGDA PRSI)	32	Persatuan Drum Band Indonesia (PENGDA PDBI)
11	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PENGDA PODSI)	33	Gabungan Brigade seluruh Indonesia (PENGDA GBSI)
12	Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PENGDA PORLASI)	34	Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PENGDA PERSANI)
13	Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PENGDA POSSI)	35	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PENGDA PTMSI)
14	Persatuan Ski Air Seluruh Indonesia (PENGDA PSASI)	36	Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PENGDA PSTI)
15	Federasi Aero Sport Indonesia (PENGDA FASI)		NAMA ORGANISASI DI LUAR PENGDA
16	Federasi Panjat Tebing Indonesia (PENGDA FPTI)	37	Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)
17	Ikatan Motor Indonesia (PENGDA IMI)	38	Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI)
18	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PENGDA PASI)	39	Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI)
19	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PENGDA PSSI)	40	National Paralimpic Committee Indonesia (NPC)
20	Persatuan Penembak Indonsia (PENGDA PERBAKIN)	41	Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI)
21	Persatuan Basebal dan Softball Seluruh Indonesia (PENGDA PERBASASI)	42	Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI)
22	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PENGDA IKASI)		

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2009

Potensi atlet dan pelatih yang didukung prasarana olahraga (sekolah dan gedung olah raga dapat dilihat pada **Tabel 2.48**. Namun, potensi ini belum dapat bersaing di level nasional. Hal ini dapat dilihat dari prestasi olah raga seperti sepakbola, badminton, atletik, voly, tinju dan cabang olahraga lainnya masih belum memuaskan. Demikian juga minat masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai pekerjaan utama masih kurang karena olahraga belum menjamin kehidupan yang layak di masa depan. Sementara itu, beberapa atlet yang berasal dari Aceh yang berdomisili di daerah lain dapat menunjukkan prestasi yang gemilang seperti atlit Anggar dan Sepakbola yang di rekrut oleh provinsi lain. Hal ini mengindikasikan bahwa atlit tersebut lebih mendapat jaminan baik untuk pengembangan karirnya dan juga untuk kehidupan masa depannya.

Beberapa penyebab prestasi olahraga Aceh belum dapat bersaing di level nasional dan internasional antara lain: (1) belum profesionalnya pengelolaan keolahragaan, (2) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung (3) belum optimalnya pembinaan atlit, (4) sistem rekruitmen atlit yang belum profesional, (5) rendahnya kualitas pelatih, (6) belum profesionalnya pengelolaan sekolah olahraga (7) kurangnya kompetisi olahraga antar daerah untuk mencari atlit berbakat dan (8) kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan olahraga.

Tabel 2.48
Atlet, Pelatih, Sekolah, Club dan Gedung Olah Raga

No	Jumlah Atlet/Pelatih/Sekolah/Club/gedung	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Atlet yang Ada	Orang	1.826
2	Jumlah Atlet Usia Dini	Orang	319
3	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	1.234
4	Jumlah Pelatih	Orang	181
5	Jumlah Atlet yang Menerima Penghargaan	Orang	20
6	Jumlah Pelatih Penerima Penghargaan	Orang	20
7	Jumlah Insan Olahraga Penerima Penghargaan	Orang	10
8	Jumlah Organisasi / Induk Olahraga Daerah / Kab / Kota	Unit	43
9	Jumlah Sekolah Olahraga	Unit	1
10	Jumlah Klub Olahraga	Klub	755
11	Jumlah Gedung Olahraga Milik Sekolah	Unit	56
12	Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta	Unit	5
13	Jumlah Gedung Olahraga Milik Masyarakat	Unit	48
14	Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka Menurut Cabang Olahraga	Unit	920
15	Jumlah Gedung Kepemudaan	Unit	5
16	Jumlah Stadion Olahraga	Unit	26
17	Jumlah Stadion Mini Olahraga	Unit	46
18	Jumlah Lapangan Olahraga Tertutup Menurut Cabang Olahraga	Unit	284
19	Jumlah Publik Space Olahraga	Unit	23
20	Koordinator Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Unit	1
21	Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta	Unit	5

Sumber : Dispora Aceh, 2012

2. Kepemudaan

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain.

Saat ini, organisasi pemuda di Aceh sebanyak 69 organisasi yang terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Organisasi kepemudaan tersebut diarahkan untuk dapat merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Organisasi kepemudaan tersebut antara lain; Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama, Pelajar Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Islam, Pemuda Muhammadiah, Gerakan Pemuda Alwashliah, Pemuda Panca Marga, Pemuda Muslimin Indonesia, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dan lain-lain **(Tabel 2.49)**.

Kualitas pemuda Aceh masih belum menggembirakan yang terlihat dari kurangnya prestasi yang diraih di bidang kepemudaan. Jumlah pemuda Aceh 1.336.994 orang saat ini, hanya 10 orang yang menerima penghargaan. Selanjutnya, pemuda yang berprestasi dalam bidang wirausaha, sosial, politik, akademik, hukum dan agama masih terbatas. Di sisi lain, pemuda cenderung memilih pekerjaan menjadi pegawai negeri dibandingkan menjadi pengusaha (wiraswasta). Pemuda dari desa lebih memilih pindah ke kota untuk mencari pekerjaan lain dari pada menjadi petani. Namun, pemuda yang pindah tersebut belum tentu

mendapat pekerjaan layak, bahkan banyak yang menjadi penganggur dan terlibat kriminilitas. Pemuda yang tinggal di desa lebih memilih menjadi pengangguran dari pada menjadi petani.

Di kota, pemuda lebih sering menghabiskan waktu dengan kegiatan yang kurang bermanfaat di warung kopi, khususnya di lokasi yang memiliki jasa internet. Lokasi tersebut sering digunakan untuk kegiatan yang tidak baik seperti judi online dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Bahkan, mahasiswa dan pelajar juga banyak terlihat di lokasi tersebut sampai larut malam. Jasa internet jika dimanfaatkan secara benar dapat membantu suksesnya pemuda karena internet dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan, peluang usaha, media komunikasi yang dapat mempercepat interaksi. Namun, pemanfaatan jasa internet yang salah dapat mempengaruhi mental dan moral pemuda karena rentan terhadap pengaruh negatif dari globalisasi. Dengan kata lain, arus globalisasi informasi yang tidak difilter secara baik dapat menurunkan kualitas pemuda sebagai penerus pemimpin bangsa di masa depan.

Tabel 2.49
Organisasi Kepemudaan

No	Organisasi Kepemudaan	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Pemuda yang Ada	Orang	1.336.994
2	Jumlah Organisasi / Induk Daerah / Daerah / Kab / Kota	Unit	69
3	Jumlah Organisasi Kepemudaan / politik (OKP)	OKP	69
4	Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa / Siswa	Unit	10
5	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penghargaan	Unit	69
6	Jumlah Pemuda yang Menerima Penghargaan	Orang	10
7	Jumlah Paguyuban	Unit	23

Sumber : Dispora Aceh, 2012

Kualitas pemuda Aceh yang masih rendah perlu ditingkatkan dalam rangka mengahadapi diberlakukannya Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) tahun 2015. Di masa AFTA tersebut pemuda yang tidak siap bersaing akan menjadi penganggur karena tenaga kerja asing akan bebas untuk bekerja di Aceh.

Kualitas pemuda dapat ditingkatkan dengan cara antara lain: (1) pembinaan moral yang berlandaskan akhlak dan teknologi, (2) peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan, (3) penertiban pengelolala jasa internet, (4) peningkatan inovasi, keterampilan berusaha dan perlindungan hak cipta, (5) peningkatan sosialisasi hukum dan bahaya narkoba/miras.

2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum maksimal. Hal ini tergambar dari sering terjadinya tindakan kekerasan rumah tangga, trafiking, pelecehan seksual dan penggunaan anak di bawah umur sebagai pekerja. Angka kekerasan terhadap terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2009 hanya ditemukan 310 kasus dan tahun 2010 sebanyak 411 kasus serta tahun 2011 sebanyak 1.956 kasus **(Tabel 2.50)**.

Tabel 2.50
Angka Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Aceh Barat	141	13	Bireuen	139
2	Aceh Barat Daya	24	14	Gayo Lues	20
3	Aceh Besar	142	15	Banda Aceh	72
4	Aceh Jaya	7	16	Langsa	88
5	Aceh Selatan	106	17	Lhokseumawe	131
6	Aceh Singkil	23	18	Sabang	27
7	Aceh Tamiang	251	19	Nagan Raya	24
8	Aceh Tengah	229	20	Pidie	116
9	Aceh Tenggara	48	21	Pidie Jaya	34
10	Aceh Timur	77	22	Simeulue	13
11	Aceh Utara	161	23	Subulussalam	10
12	Bener Meriah	73			
Jumlah		**1.282**			**674**

Sumber: Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011

Direktorat Reskrim Polda Aceh (2012) melaporkan bahwa pada Tahun 2010 kasus traficking anak yang ditangani berjumlah 3 kasus dan sudah mendapat vonis masing-masing tersangka 4 tahun penjara. Pada tahun 2011 kasus trafiking di Aceh meningkat menjadi 8 kasus. Data trafiking ini kemungkinan lebih besar lagi karena kasus perdagangan orang banyak yang tidak muncul kepermukaan karena korban enggan melapor dan korban belum menyadari bahwa dirinya itu diperdagangkan.

Sakernas (2007) melaporkan bahwa pada tahun 2005 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) anak usia 10-14 tahun rata-rata Indonesia mencapai 4,43 persen. Artinya, dari 100 anak usia 10-14 tahun terdapat 4 anak yang menjadi pekerja anak. Pada tahun yang sama, TPAK anak usia 10-14 tahun di Aceh mencapai 1,19 persen dan terendah dari provinsi lain di Indonesia. Selanjutnya, Dinas Sosial Aceh (2007) melaporkan bahwa pada tahun 2005, sejumlah 17.279 anak dikategorikan sebagai pekerja anak dari total 460.896 anak berusia 10-14 tahun, meningkat menjadi 19.299 orang pada tahun 2006. Selanjutnya tercatat sejumlah 736 orang yang diidentifikasi sebagai anak jalanan dan 50.994 orang sebagai anak terlantar.

Polda Aceh (2011) melaporkan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum 85 orang, meningkat menjadi 123 orang pada tahun 2010 **(Tabel 2.51)**.

Tabel 2.51
Situasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Tahun	Korban
2008	85
2009	58
2010	123

Sumber: Data Unit PPA Polda Aceh, 2011

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) masih terbilang rendah dibandingkan laki-laki. Pemerintah telah mengatur bahwa keterwakilan permumpuan pada setiap lembaga minimal 30 persen. Namun, hal tersebut belum terwujud sebagaimana mestinya seperti keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Aceh hanya 5,8 persen, dari 69 anggota DPRA hanya ada 4 perempuan yang menjadi anggota DPRA (KIP Aceh, 2010). Hal yang sama juga terjadi pada komposisi DPR Kabupaten/Kota, bahkan ada tiga kabupaten yang tidak memiliki wakil perempuan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum percaya sepenuhnya terhadap kemampuan dari kaum perempuan untuk menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif.

Kualitas sumberdaya perempuan perlu ditingkatkan melalui antara lain: 1) peningkatan pendidikan dan keterampilan; 2) peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota keluarga; 3) peningkatan peluang dan pendampingan usaha; 4) peningkatan kapasitas dalam berorganisasi dan 5) sosialiasi tentang persamaan hak di lembaga pemerintah. Selanjutnya, perlindungan anak dapat ditingkatkan melalui antara lain: 1) pengendalian pemanfaatan anak sebagai pekerja; 2) penegakan hukum terhadap trafficking dan tindakan kekerasan (KDRT); 3) pembinaan terhadap anak telantar, bermasalah hukum, korban KDRT, trafiking dan 4) sosialisasi secara luas tentang tanggung jawab masyarakat terhadap anak.

2.2.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pedesaan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tinggi angka kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, lemahnya lembaga ekonomi masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana dasar pedesaan, terbatasnya lapangan kerja, lemahnya organisasi masyarakat desa dan lemahnya struktur pemerintahan desa.

Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan sudah dilakukan pemerintah melalui antara lain: 1) pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa; 2) peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG); 3) pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMT-AS); 4) Pendistribusian Sarana Kerja Kantor Keuchik Untuk Gampong; 5) Bantuan Bagi Petani Garam dan Pengrajin Aren; 6) Bantuan Keuangan

Peumakmeu Gampong (BKPG) , Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG), Usaha Ekonomi Gampong-Simpan Pinjam (UEG-SP), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG).

Pada Tahun 2012, pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa telah dilakukan melalui: 1) pelatihan perencanaan pembangunan masyarakat gampong (KPMG) yang diikuti oleh kader posyandu (200 peserta yang mewakili 200 gampong), kader KPMG (100 orang yang mewakili 100 gampong), kader P3MG (80 orang yang mewakili 40 desa); 2) pelatihan manajemen pemerintah desa yang diikuti 250 orang mewakili 250 gampong. Selanjutnya, pendistribusian sarana kerja kantor keuchik untuk gampong telah dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja aparat desa. Sarana kerja tersebut antara lain: komputer PC Lengkap, meja dan kursi.

Untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan sebagai sarana penyebarluasan informasi TTG telah dilakukan lomba inovasi TTG setiap tahunnya. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang difokuskan untuk anak sekolah. Dalam hal ini Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk TK/SD/MI Se-Aceh telah dilakukan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sampai tahun 2012 telah melakukan pemberdayaan aparatur dan organisasi gampong melalui program dan kegiatan: BKPG, UEPG, PEPG, UEG-SP. Tujuan dari BKPG adalah untuk : 1) Penyertaan modal bagi Badan usaha Milik Gampong (BUMG); 2) Peningkatan infrastruktur ekonomi gampong dalam skala kecil; 3) peningkatan kualitas kesehatan yaitu untuk mendukung kegiatan posyandu; dan 4) peningkatan kualitas pendidikan yaitu untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta mendukung pusat kegiatan belajar masyarakat. Selanjutnya kegiatan UEPG ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi dan upaya pengembangan pada penciptaan akses bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan keterampilan berusaha, kemandirian masyarakat dalam aspek kehidupan dan peningkatan taraf hidup untuk lebih sejahtera. Demikian juga, Lembaga Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP) yang telah dibentuk di semua gampong/kelurahan di Aceh untuk membantu masyarakat Gampong dalam memperoleh pinjaman modal usaha yang mudah didapat, karena lembaga tersebut berada dimasing-masing Gampong yang pengelolaannya oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Aceh sudah menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan BKPG sebesar Rp.299.300.000.000 (2011) untuk 5,986 Gampong dan Rp.445.119.000.000 (2012) untuk 6,451 Gampong. Selanjutnya, dana yang sudah disalurkan untuk mendukung keigatan UEPG

sebesar Rp.7.590.000.000 (2011) untuk 69 Gampong dan untuk kegiatan UEG-SP Rp. Rp.1.200.000.000,- untuk 40 kelompok.

Uraian sebelumnya memberikan informasi bahwa dari sisi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki tujuan yang baik untuk memberdayaan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut masih belum optimal. Hal ini tergambar dari belum terbentuknya kemandirian ekonomi masyarakat, kinerja aparatur gampong masih rendah, infrastruktur gampong belum tuntas, lapangan kerja masih terbatas, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan.

Permasalahan utama belum berhasilnya program dan kegiatan tersebut disebabkan oleh antara lain: 1) sasaran kegiatan BKPG (infratruktur dan simpan pinjam perempuan), UEPG, PEPG dan UEG-SP belum tepat; 2) rendahnya kapasitas pengelola BKPG, UEPG, PEPG dan UEG-SP; 3) adanya kegiatan yang tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, beberapa solusi untuk meningkatkan keberhasilan program dan kegiatan tersebut antara lain adalah: 1) Evaluasi tentang manfaat dan keberlanjutan program dan kegiatan BKPG, UEPG, PEPG dan UEG-SP; dan 2) peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga oraganisasi desa.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Aceh memiliki otonomi khusus yang dimandatkan di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini pada hakikatnya memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi Aceh untuk berkembang dan melaksanakan percepatan pembangunan. Namun demikian setelah lima tahun berjalan sejak ditetapkannya Undang-undang tersebut, Aceh masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan Aceh belum menggembirakan, bahkan belum lebih baik dari pada provinsi lainnya yang tidak memiliki kekhususan.

Dengan regulasi yang ada, Pemerintah Aceh dapat lebih mengoptimalkan kedudukan, peran dan fungsinya dalam mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi khusus sebagai bentuk penerapan otonomi *asimetris*. Pemberian otonomi khusus kepada Aceh sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi khusus tersebut, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Untuk hal tersebut, Pemerintah Aceh mempunyai fungsi dalam fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong. Fasilitasi dimaksud dilakukan Pemerintah Aceh dengan mensinergikan antara regulasi yang bersifat khusus dengan regulasi yang bersifat umum. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh menempuh strategi melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya yang dimiliki baik dari dalam maupun dari luar Aceh. Strategi ini dibutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri.

A. Pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki

Pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki belum optimal yang disebabkan oleh masih banyaknya peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga menghambat pencapaian sasaran pembangunan. Di dalam naskah MoU Helsinki terdapat 71 butir kesepatakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejumlah poin penting dari 71 butir kesepakatan tersebut masih belum diselesaikan, diantaranya masalah pengaturan sistem pengelolaan bandara dan pelabuhan laut, serta pertanahan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk agar UUPA dapat diimplementasikan, yaitu; Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres) dan Qanun. Peraturan Pemerintah yang harus diselesaikan sebanyak 9 (sembilan), yang sudah ditetapkan sebanyak 3 (tiga), 2 (dua) PP sedang dalam pembahasan dan penyelesaian, 4 (empat) belum ada draft, terhadap peraturan yang telah ditetapkan belum didukung dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Peraturan presiden yang harus ada sebanyak 3 (tiga), 2 (dua) sudah ditetapkan menjadi Perpres dan 1 (satu) belum ada draft. Qanun yang harus ada sebanyak 48 substansi judul qanun, yang sudah ditetapkan menjadi qanun sebanyak 27 (dua puluh tujuh) substansi judul qanun dan 21 (dua puluh satu) belum ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, Pemerintah Aceh berupaya untuk: 1) membentuk tim percepatan penyelesaian aturan pelaksana UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tersebut; 2) membentuk tim sosialisasi UUPA Nomor 11 Tahun 2006 kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; 3) membentuk tim review UUPA Nomor 11 Tahun 2006 terhadap butir-butir Mou Helsinki yang belum tertampung di dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006; dan 4) membentuk tim koordinasi, pemantauan dan evaluasi OTSUS dan TDBH Migas Aceh.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh pada umumnya belum berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 terhadap pengelolaan keuangan tahun 2010 di Aceh yang pada umumnya masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, hanya 4 (empat) Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 (satu) Pemerintah Daerah (Kabupaten) yang memperoleh predikat Tidak Wajar (TW). Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh WTP adalah Kabupaten Aceh Tengah, Banda Aceh, Nagan Raya dan Lhokeseumawe. Sementara itu, Kabupaten Simeulue memperoleh predikat TW. Demikian juga, angka dugaan korupsi di Aceh yang tergolong tinggi yang menempatkan Aceh pada posisi lima besar daerah penyumbang kerugian negara akibat korupsi di Indonesia.

Dalam hal belanja pemerintah masih belum terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan belum efektifnya pelaksanaan kegiatan. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi belanja langsung (65%) dan belanja tidak langsung (35%). Belanja langsung ini pada hakikatnya ditujukan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat. Namun, dalam belanja langsung masih juga terdapat belanja tidak langsung seperti belanja yang digunakan aparatur untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester II BPK-RI tahun 2011, temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi harga standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. Dalam laporan ini juga diungkapkan bahwa penyebab kasus-kasus ketidakhematan ini pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai, tidak cermat, belum optimal dalam melaksanakan tugas, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

C. Organisasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Aparatur

Fungsi organisasi Pemerintah Aceh masih belum maksimal yang terlihat dari adanya tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola Pemerintahan belum dilaksanakan secara baik yang tergambar dari belum efisien dan efektifnya penggunaan anggaran, distribusi aparatur yang tidak merata dan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya, belum efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Selanjutnya, sumber daya aparatur yang masih lemah, hal ini tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berada dalam sistem yang terpadu (terintegrasi) sejak dari awal hingga implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Demikian juga dengan pengawasan belum memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dengan sistem dan siklus perencanaan serta penganggaran.

Organisasi Pemerintah Aceh belum memiliki institusi khusus untuk menjalankan fungsi kelitbangan. Kondisi ini membuat Aceh masih memiliki keterbatasan untuk meningkatkan daya saing daerah terkait masih minimnya invonasi untuk mendukung daya saing daerah. Untuk memaksimalkan peran kelitbangan tersebut, beberapa daerah di Indonesia telah mendirikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda/BPP) yaitu di 22 Provinsi, 33 Kabupaten dan 6 Kota. Ini sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2011 yang menyatakan agar daerah mendirikan Badan Penelitian dan Pengembangan untuk menunjang optimalisasi pembangunan daerah paling lambat dua tahun setelah diundangkannya peraturan menteri tersebut (pasal 60 ayat 1).

Efisiensi dan efektifivitas pelaksanaan tugas instansi belum didukung kebijakan, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan sistem elektronik pemerintahan (*e-government*), yang meliputi; kebijakan *e-office* (pengembangan *website*, e-administrasi umum/manajemen dokumen elektronik (e-arsip), administrasi keuangan elektronik/sistem keuangan elektronik, dan administrasi kepegawaian elektronik/simpeg), kebijakan *e-planning*, *monitoring* and *evaluation*, kebijakan *e-budgeting*, kebijakan *e-procurement*, kebijakan *e-performance* (SAKIP).

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata disemua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Dengan kata lain, pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan untuk melakukan distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh secara proporsional khususnya daerah kepulauan dan perbatasan. Oleh karena itu, Gubernur Aceh sebagai kepala Pemerintah Aceh perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara terpadu yang diatur melalui keputusan Gubernur.

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintahan, Pemerintah Aceh perlu melakukan antara lain: 1) penataan struktur organisasi pemerintah sesuai dengan beban kerja instansi; 2) menetapkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah secara tegas. Tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan melalui: 1) penggunaan anggaran yang efisien dan efektif; 2) distribusi aparatur yang merata dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahliannya; 3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas instansi. Selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dilakukan melalui antara lain: pendidikan, pelatihan sesuai dengan jenjang karier. Peningkatan sumber daya aparatur tersebut perlu mendapat dukungan pendanaan yang wajar.

D. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (*public reform*) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkan menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

SPM Pemerintah Provinsi mencakup 9 (sembilan) bidang urusan yaitu perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan ketahanan pangan (Permendagri nomor 32 Tahun 2012). Sementara, pelaksanaan SPM kabupaten/kota mencakup 15 (lima belas) urusan pemerintahan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan,

penanaman modal, kesenian, pemerintahan dalam negeri, kominfo dan ketahanan pangan. SPM ini juga merupakan indikator capaian yang diinginkan oleh MDGs yang harus dicapai sampai tahun 2015.

Dalam upaya pencapaian target untuk semua bidang urusan tersebut di atas perlu dilaksanakan segera antara lain: 1) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pablik; 2) sosialisasi SOP kepada aparatur dan masyarakat; 3) membuka akses informasi pembangunan secara luas kepada masyarakat dan 4) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1.2. Pendidikan

A. Pendidikan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

1. Rasio Ketersediaan TK/RA terhadap penduduk usia 4 – 6 tahun

Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 tahun masih belum merata sampai ke pedesaan. Jumlah lembaga TK/RA di Aceh tahun 2010 adalah sebanyak 1.603 buah dengan jumlah murid 74.563 orang (rata-rata TK/RA memiliki 55 orang murid), sementara jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebanyak 277.400 orang. Rasio tersebut di atas digunakan untuk mengukur ketersediaan lembaga TK/RA untuk setiap 10.000 penduduk usia 4-6 tahun. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung semua penduduk usia 4-6 tahun di suatu daerah.

Berdasarkan data tahun 2010, rasio ketersediaan TK/RA terhadap penduduk usia 4-6 tahun di Aceh adalah sebesar 58,78 yang berarti bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 4-6 tahun tersedia 58 sampai 59 unit TK/RA untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 173 siswa per lembaga TK/RA. Kondisi ini sangat tidak ideal karena dengan menggunakan asumsi rata-rata TK/RA minimal memiliki 3 (tiga) rombongan belajar dan tiap rombongan belajar maksimal memiliki 20 murid, maka seharusnya untuk setiap 10.000 penduduk usia 4-6 tahun tersedia 166 lembaga TK/RA.

Di beberapa kabupaten/kota, tingkat layanan TK/RA sangat terbatas, khususnya di Aceh Timur, Gayo Lues dan Pidie Jaya. Sebaliknya di beberapa kabupaten/kota lainnya ketersediaan layanan TK/RA relatif cukup baik, misalnya di Aceh Jaya, Aceh Barat dan Pidie. Dengan demikian maka perluasan akses TK/RA di sejumlah kabupaten/kota harus diprioritaskan, terutama memenuhi target pembangunan satu unit TK Negeri di setiap satu kecamatan dan pengembangan TK/SD Satu Atap. Selain itu perlu didorong partisipasi masyarakat untuk mendirikan TK/RA dengan memberikan dukungan operasional bagi TK/RA yang diselenggarakan masyarakat.

2. Rasio guru terhadap murid TK/RA

Secara keseluruhan rasio siswa-guru di Aceh saat ini sangat rendah. Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa rasio siswa-guru di TK/RA sebesar 1 : 8 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 8 siswa), sedangkan rasio idealnya adalah sebesar 1 : 20 (rata-rata setiap guru melayani sekitar 20 siswa sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009). Rasio ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan terjadi kelebihan jumlah guru TK/RA di Aceh. Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, distribusi guru TK/RA tidak merata. Sebagian lembaga pendidikan TK/RA terutama di perkotaan mengalami kelebihan guru sementara di perdesaan kekurangan guru.

B. Pendidikan Dasar

1. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar di suatu daerah, masing-masing penduduk 7 – 12 tahun di SD/MI dan penduduk usia 13 – 15 tahun di SMP/MTs.

Pada tahun 2010 rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun adalah sebesar 68,67 sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun adalah sebesar 43,98. Rasio ketersediaan SD/MI sebesar 68,67 mengandung arti bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun di Aceh tersedia 68 sampai 69 unit SD/MI untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 146 siswa per sekolah, sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs sebesar 43,98 berarti untuk setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia sekitar 43 sampai 44 unit SMP/MTs untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 228 siswa per sekolah.

Jika dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah SD/MI sebesar 180 dan standar nasional rasio siswa per sekolah SMP/MTs sebesar 270 (disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM Pendidikan Dasar), terlihat bahwa kapasitas satuan pendidikan dasar yang ada di Aceh untuk menampung anak usia sekolah masih belum dimanfaatkan secara optimal. Daya tampung sekolah-sekolah yang ada masih memungkinkan untuk menampung peningkatan jumlah anak usia sekolah sampai lima tahun yang akan datang. Semakin dekat nilai capaian kedua indikator ini kepada standar nasional akan mengindikasikan semakin efisiennya pemanfaatan sarana dan prasarana

satuan pendidikan dasar untuk mendukung kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

2. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa rasio siswa-guru di Sekolah Dasar (SD) dan Maderasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 1 : 11 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 11 siswa) dan di SMP/MTS sebesar 1 : 10 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 10 siswa). Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1 : 17 untuk SD/MI dan 1 : 15 untuk SMP/MTs, rasio guru-siswa pada jenjang pendidikan dasar di Aceh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan Aceh.

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Aceh adalah distribusi guru yang tidak merata, di samping rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru. Sejumlah sekolah mengalami kelebihan guru sementara sekolah yang lain terutama di pedesaan mengalami kekurangan guru. Di samping itu beberapa sekolah menengah kejuruan masih kekurangan guru untuk mata pelajaran kejuruan tertentu. Dari sisi kualifikasi, pada tingkat sekolah dasar tercatat 17 persen guru SD dan 30,18 persen guru MI yang berkualifikasi S1/D-IV. Sementara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), persentase guru SMP berkualifikasi S1/D-IV sebesar 70,30 persen dan guru MTs sebesar 73,48 persen.

C. Pendidikan Menengah

1. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan menengah terhadap penduduk usia 16-18 tahun juga terus membaik dari tahun ke tahun. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2010 adalah sebesar 26,65. Hal ini bermakna bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun di Aceh tersedia 26 sampai 27 unit SMA/MA/SMK untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 376 siswa per sekolah.

Dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah SMA/MA/SMK sebesar 384 (12 kelas dengan rasio siswa per kelas rata-rata 32), maka capaian rasio ini telah mengindikasikan bahwa kapasitas satuan-satuan pendidikan menengah di Aceh secara keseluruhan perlu segera ditingkatkan untuk dapat menampung lulusan SMP/MTs yang semakin bertambah. Peningkatan jumlah lulusan SMP/MTs tersebut sejalan dengan

keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun 1994 lalu.

2. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio siswa-guru pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun 2010 di Aceh sebesar 10,23. Rasio ini masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata nasional tahun 2010 sebesar 12. Rasio siswa-guru SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa jumlah guru sudah mencukupi. Namun khusus untuk mata pelajaran Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Sosiologi/Antropologi, dan Geografi jumlah gurunya masih kurang. Selanjutnya, khusus di SMK terdapat kekurangan guru untuk mata pelajaran kejuruan. Oleh karena itu, penyediaan guru untuk mata pelajaran TIK, Sosiologi/Antropologi, geografi dan kejuruan perlu dilakukan secara selektif. Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, distribusi guru pada jenjang pendidikan menengah juga belum merata. Oleh karena itu, distribusi guru perlu dilakukan khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan.

Berdasarkan uraian sebelumnya disimpulkan bahwa kapasitas tampung sekolah di Aceh untuk berbagai jenjang pendidikan sudah memadai kecuali untuk jenjang pendidikan TK/RA yang masih perlu ditingkatkan. Demikian juga rasio guru terhadap murid untuk berbagai jenjang pendidikan di Aceh sudah di atas Nasional **(Tabel 2.52)**.

Tabel. 2.52
Kapasitas Tampung Sekolah dan Rasio 2 2010

No	Jenjang Pendidikan	Kapasitas Tampung (Murid/Sekolah)		Rasio Guru dengan Murid	
		Aceh	Nasional	Aceh	Nasional
1	TK/RA	173	166	1 : 8	1 : 20
2	SD/MI	146	180	1 : 11	1 : 17
3	SMP/MTs	228	270	1 : 10	1 : 15
4	SMA/MA/SMK	376	384	1 : 10	1 : 12

Sumber: Data olahan, 2011

D. Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

1. Guru yang berkualitas S-1/D-IV

Guru berkualifikasi S1/D-IV untuk semua jenjang pendidikan (dasar dan menengah) di Aceh mencapai 47,15 persen pada tahun 2010, terjadi peningkatan dari tahun 2009 yang capaiannya sebesar 43,54 persen. Kualifikasi guru S1/D-IV secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan persentase nasional sebesar 42,60 persen. Pada akhir tahun

2015, target rencana strategi pendidikan nasional adalah semua guru harus memiliki kualifikasi S1/D-IV **(Gambar 2.23)**. Namun, disparitas guru berkualifikasi antara kabupaten/kota masih terjadi. Untuk semua jenjang, secara total persentase guru berkualifikasi S1/D-IV tertinggi di Banda Aceh (71,99 %) dan terendah di Simeulue (24,93%). Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2009, Banda Aceh tertinggi (69%) dan Simeulue (24%) (TKPPA, 2010).

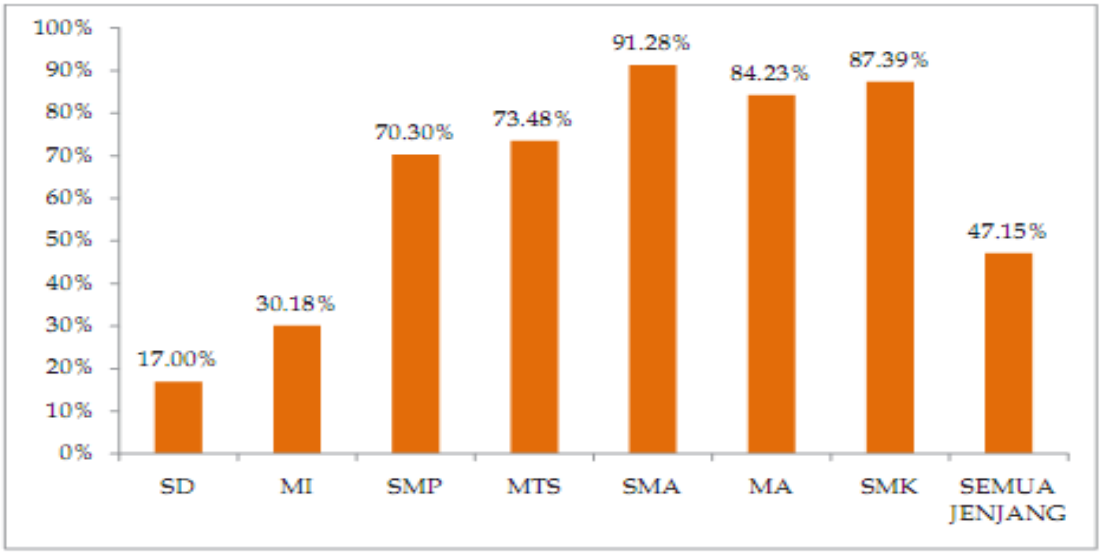

: PadatiWeb 2010.

Gambar 2.23 Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV

2. Guru yang bersertifikat Pendidik

Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang bersertifikasi S1/D-IV. Persentase guru bersertifikat pendidik di tingkat provinsi menurut jenjang pendidikan pada tahun 2009 adalah SD (4,76 %), MI (8,6 %), SMP (10,28 %), MTs (12,8 %), SMA (14,29 %), MA (7,66 %) dan SMK (9,9%). Namun, secara keseluruhan rata-rata persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik hanya 8,2 persen.

Dari uraian sebelumnya upaya yang harus dilakukan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh antara lain adalah: 1) peningkatan kualifikasi guru S1/D-IV dan sertifikasi guru mencapai 100 persen pada tahun 2015 untuk mengejar SPM pendidikan Nasional; dan 2) distribusi guru yang merata antara perdesaan dan perkotaan.

E. Pendidikan Berbasis Islami

Sesuai Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dimana ditegaskan bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh adalah sistem pendidikan Islami. Secara konseptual pendidikan Islami pada hakekatnya bertolak

dari pandangan bahwa pendidikan bersumber dari Allah SWT dan berpusat pada aktualisasi fitrah manusia secara menyeluruh. Pendidikan Islami bertolak dari keyakinan bahwa Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam bersumber pada satu sumber, yaitu Allah SWT sehingga karena itu tidak ada dikotomi antara ilmu wahyu dengan ilmu akal, atau antara "ilmu agama" dengan "ilmu umum". Karena itu pendidikan Islami adalah pendidikan yang bersifat holistik (kesatuan semua aspek kepribadian) dan terpadu (integrasi) antara pelajaran "umum" dan "agama", antara pengetahuan aqliyah dan naqliyah.

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan tujuan demikian maka pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal, dan moral saja, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya itu berkembang secara seimbang.

Adapun tujuan akhir pendidikan Islami mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) pembinaan iman dan taqwa kepada Allah swt; 2) mendidik muslim yang baik, yang berakhlak yang mulia; 3) menyadarkan manusia akan pentingnya ilmu pengetahuan; 4) menyadarkan manusia akan peranannya sebagai khalifah di bumi; 5) pembentukan Insan yang saleh yang dapat memadukan iman, ilmu, dan amal; 6) mempersiapkan manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat; 7) mengembangkan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial dan 8) pendidikan islami mencakup semua aspek kehidupan manusia, yaitu fisik, mental, akidah, akhlak, emosional, estetika, dan sosial.

Permasalahan dalam melaksanakan pendidikan berbasis islami adalah antara lain: 1) masih terjadinya dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum; 2) rendahnya kualitas guru agama yang memahami sains dan sebaliknya rendahnya kualitas guru umum yang memahami agama; 3) belum tersedianya kurikulum, silabus dan bahan ajar yang mengintegrasikan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama dan 4) belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan islami.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan Islami, pemerintah Aceh harus malakukan hal-hal sebagai berikut antara lain: 1) meningkatkan kapasitas guru umum dan guru agama; 2) menyediakan kurikulum, silabus dan bahan ajar yang terintegrasi dan 3) menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

F. Perguruan Tinggi

Aceh saat ini memiliki 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 60 (enam puluh) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 3 (tiga) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan 17 (tujuh belas) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Beberapa Perguruan Tinggi (PT) masih belum terdata dibawah DIKTI karena belum dialihkelolakan. Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan semua program studi harus dibina oleh Kemdikbud, termasuk PT kedinasan. Sebaran prodi diploma, sarjana dan pascasarjana menunjukkan bahwa 40 persen prodi berada di PTN dan sisanya berada di PTS.

Kondisi akreditasi prodi memperlihatkan bahwa 79 persen prodi memiliki status akreditasi yang masih berlaku dan 22 persen sudah kadaluarsa, dan diperkirakan sekitar 10 persen prodi lain belum pernah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), terutama prodi-prodi kedinasan kesehatan dan sejumlah sekolah tinggi atau akademi. Keadaan mutu berdasarkan peringkat akreditasi menunjukkan bahwa 2 persen prodi berperingkat A yang semuanya berada di PTN, sedangkan 33 persen memiliki akreditasi B dan 61 persen berakreditasi C. Sekitar 3 persen berstatus tidak terakreditasi karena kondisi mutu yang dibawah minimal.

Rendahnya mutu pendidikan tinggi berkatian erat dengan kualitas input pelajar yang memasuki perguruan tinggi. Hal ini tergambar dari kualitas lulusan pendidikan menengah (SMA/sederajat) berdasarkan hasil SNMPTN pada tahun 2011. Aceh memiliki nilai rata-rata untuk bidang IPA sebesar 44,86 persen yang berada pada peringkat 31 Nasional, sedangkan bidang IPS sebesar 43,19 persen yang berada peringkat 25 Nasional. Keadaan ini sungguh memperhatikan dikarenakan tidak jauh berbeda dengan kondisi pada beberapa provinsi yang selama ini dianggap masih terbelakang yaitu Papua dan Maluku, bahkan lebih rendah dibandingkan provinsi Nusa Tenggara.

Permasalahan rendahnya mutu pendidikan tinggi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung belajar mengajar; 2) rendahnya mutu tenaga pendidik dan 3) rendahnya kualitas input pelajar yang masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung peningkatan mutu PT antara lain: 1) meningkatkan kualitas lulusan SMA/sederajat; 2) melanjutkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa dan tenga pendidik dan 3) memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendukung PT.

G. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal yang dilaksanakan di Aceh adalah pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah peserta didik PAUD usia 0-4 tahun tercatat sebanyak 24.529 orang, dengan rincian Kelompok Bermain sebanyak 18.858 orang, Taman Penitipan Anak (TPA) sebanyak 1.365 orang, Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 3.235 orang. Jumlah ini belum termasuk peserta didik pada POS-PAUD dan Taman Pendidikan Al-quran. Data peserta didik menurut kelembagaan dan jenis kelamin adalah sebagaimana di sajikan pada **Tabel 2.53.**

Tabel 2.53
Data Peserta Didik PAUD menurut Kelembagaan dan Jenis Kelamin
Di Aceh Tahun 2012

No	Kelembagaan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	Kelompok Bermain	9.311	77.43	9.547	76.35	18.858
2	TPA	119	0.99	1.246	9.96	1.365
3	SPS	1.524	12.67	1.711	13.68	3.235
	Jumlah	**12.025**	**49.02**	**12.504**	**50.98**	**24.529**

Sumber: Pendidikan Luar Biasa & Luar Sekolah Dinas Pendidikan Aceh tahun 2011

Selanjutnya peserta didik pendidikan kesetaraan sebanyak 15.676 orang, terdiri dari Paket A sebanyak 3.546 orang, Paket B sebanyak 10.992 orang dan Paket C sebanyak 1.138 orang. Perincian menurut Jenjang dan Jenis Kelamin adalah sebagaimana di sajikan pada **Tabel 2.54.**

Tabel 2.54
Data Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan menurut Jenjang
Di Aceh Tahun 2011/2012

No	Jenjang	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	Paket A	1.742	22.36	1.804	22.88	3.546
2	Paket B	5.473	70.24	5.519	70.00	10.992
3	Paket C	577	7.41	561	7.12	1.138
	Jumlah	**7.792**	**49.71**	**7.884**	**50.29**	**15.676**

Sumber: Pendidikan Luar Biasa & Luar Sekolah Dinas Pendidikan Aceh tahun 2011

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan Pemerintah Aceh telah mengembangkan perpustakaan, tercatat 39 buah TBM yang aktif dan 2 buah TBM mobil. Namun budaya baca dan pembinaan perpustakaan belum menunjukkan hasil yang optimal karena terbatasnya jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang ada, lemahnya kemampuan personil, dan terbatasnya jumlah buku. Demikian juga hampir semua kabupaten/kota di Aceh telah membentuk lembaga perpustakaan dan kearsipan, namun belum tersedianya gedung yang memadai. Jumlah gedung pelayanan perpustakaan untuk mendukung pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan dapat dilahat pada **Tabel 2.55**.

Tabel 2.55
Jumlah Gedung Pelayanan Perpustakaan Umum dan Gampong
Tahun 2009-2011

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan			Sudah Memiliki Gedung Sendiri		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Perpustakaan Umum	14	19	19	3	8	9
2	Perpustakaan Gampong	779	807	876	-	25	38

Sumber : Badan Arpus Aceh, 2012

Sesuai dengan surat Gubernur Aceh No.413.4/24658/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Aceh memiliki 6.451 gampong. Jumlah perpustakaan gampong yang sudah terbentuk sebanyak 876 perpustakan dan sebanyak 38 unit (4%) sudah memiliki gedung sendiri, sedangkan yang lainnya masih menumpang pada gedung/rumah masyarakat. Oleh karena

itu, Pemerintah Aceh ke depan harus mengupayakan: 1) penyediaan sarana gedung perpustakaan gampong sebanyak 838 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan 2) melengkapi buku-buku perpustakaan.

2.3.1.3. Bidang pendidikan Dayah

A. Rasio Ketersediaan Dayah dan Santri

Pendidikan dayah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah yang berlandaskan nilai-nilai dinul Islam. Berdasarkan akreditasi dayah pada tahun 2011, jumlah lembaga dayah di Aceh sebanyak 517 dayah yang terdiri dari 411 Dayah Salafiyah (dayah tradisional) dan 106 Dayah Terpadu. Dari jumlah tersebut, dayah yang memiliki klaisifikasi tipe A berjumlah 49 dayah salafiyah dan 52 dayah terpadu. Untuk Tipe B, dayah salafiyah berjumlah 61 dayah dan 28 dayah untuk dayah terpadu. Untuk Tipe C, dayah salafiyah berjumlah 134 dayah dan 18 dayah terpadu. Sedangkan untuk Tipe D, dayah salafiyah berjumlah 155 dayah dan dayah terpadu berjumlah 8 dayah. Rasio ketersediaan dayah yang terakreditasi dengan santri adalah 1:324. Rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio ketersediaan sekolah menengah dan siswa yang memiliki rasio 1 : 302 (**Tabel 2.56).**

Tabel 2.56
Rekapitulasi Tipe Dayah Aceh Hasil Akreditasi Tahun 2011 Di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah dan Tipe Dayah									Jumlah
		Ma'had Aly dan Perbatasan	Tipe A		Tipe B		Tipe C		Tipe D		
			Salafiyah	Terpadu	Salafiyah	Terpadu	Salafiyah	Terpadu	Salafiyah	Terpadu	
1	Sabang	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3
2	Banda Ace	-	1	4	1	-	-	-	-	-	6
3	Aceh Besar	1	12	14	11	2	11	2	1	-	54
4	Pidie	-	3	-	3	4	24	-	34	-	68
5	Pidie Jaya	1	3	1	-	-	7	-	9	-	21
6	Bireuen	2	9	2	17	-	12	-	42	-	84
7	Lhokseumawe	-	4	5	2	-	2	-	-	-	13
8	Aceh Utara	2	5	5	7	3	21	1	12	-	56
9	Aceh Timur	-	1	1	2	-	8	-	11	1	24
10	Langsa	-	-	1	3	-	3	-	4	-	11
11	Aceh Tamiang	1	-	1	-	-	1	-	4	2	9
12	Bener Meriah	-	-	2	-	1	2	3	1	1	10
13	Aceh Tengah	-	-	3	1	-	5	-	1	1	11
14	Gayo Lues	-	1	1	1	2	-	-	-	-	5
15	Aceh Tenggara	1	-	5	-	5	1	5	3	1	21
16	Aceh Jaya	-	1	-	1	2	5	-	4	-	13
17	Aceh Barat	1	2	2	2	2	4	-	4	-	17
18	Nagan Raya	-	-	-	-	1	1	-	9	-	11
19	Aceh Barat Daya	-	1	2	2	-	10	-	4	-	19
20	Aceh Selatan	1	4	2	7	-	14	1	8	-	37
21	Subulussalam	1	-	-	-	6	-	1	3	1	12
22	Aceh Singkil	1	1	1	1	-	1	4	-	1	10
23	Simeulue	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
JUMLAH		**12**	**49**	**52**	**61**	**28**	**134**	**18**	**155**	**8**	**517**

Sumber: Badan Dayah Aceh, 2012

B. Rasio Ketersediaan Tengku/Guru dan Santri

Dari hasil kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah teungku/Ustadzah sebanyak 17.569 orang. Dengan demikian, rasio ketersediaan Teungku /guru dan santri 1:10. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio guru dan siswa 1 : 12 pada sekolah umum tingkat Nasional. Selanjutnya, Kabupaten/Kota dengan jumlah tengku/Ustadz terbanyak adalah kabupaten Aceh Utara dengan Jumlah 3.711 orang. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan Jumlah Teungku/Ustadz terkecil adalah Kabupaten Simeulue dengan jumlah 35 orang. Pada kegiatan pemuktakhiran data tahun 2011, juga didapat jumlah santri dayah di Aceh yaitu sebanyak 167.791 orang. Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah santri tertinggi yaitu 34.860 santri, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah Santri paling sedikit adalah Kota Sabang dengan santri sebanyak 416 santri (**Tabel 2.57**). Hal ini menggambarkan bahwa distribusi Teungku/Ustadz belum merata di Aceh.

Tabel 2.57
Rekapitulasi Jumlah Dayah Aceh Hasil Pemuktahiran Tahun 2011
Di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Dayah	Status Santri		Jumlah Santri	Status Guru/Teungku		Jumlah Guru/Teungku
			Menetap	Tidak Menetap		Menetap	Tidak Menetap	
1	Sabang	5	209	207	416	29	12	41
2	Banda Aceh	10	1.949	544	2.493	232	71	303
3	Aceh Besar	88	10.651	4.995	15.646	1.602	280	1.882
4	Pidie	73	4.312	11.893	16.205	1.181	603	1.784
5	Pidie Jaya	31	3.784	3.951	7.735	527	217	744
6	Bireuen	83	12.559	9.858	22.417	1.839	405	2.244
7	Lhokseumawe	22	4.493	1.577	6.070	354	99	453
8	Aceh Utara	184	17.012	17.848	34.860	3.209	502	3.711
9	Aceh Timur	99	8.122	10.870	18.992	1.297	312	1.609
10	Langsa	11	2.285	1.063	3.348	166	158	324
11	Aceh Tamiang	27	1.492	2.830	4.322	278	79	357
12	Bener Meriah	9	1.357	494	1.851	135	28	163
13	Aceh Tengah	10	1.127	363	1.490	148	8	156
14	Gayo Lues	19	1.350	612	1.962	178	68	246
15	Aceh Tenggara	20	2.740	515	3.255	391	269	660
16	Aceh Jaya	14	1.503	716	2.219	318	20	338
17	Aceh Barat	25	2.668	1.693	4.361	547	49	596
18	Nagan Raya	10	514	784	1.298	112	16	128
19	Aceh Barat Daya	30	1.590	2.695	4.285	335	134	469
20	Aceh Selatan	56	4.424	5.448	9.872	710	160	870
21	Subulussalam	14	928	1.308	2.236	211	12	223
22	Aceh Singkil	13	1.645	507	2.152	155	78	233
23	Simeulue	3	128	178	306	22	13	35
JUMLAH		**856**	**86.842**	**80.949**	**167.791**	**13.976**	**3.593**	**17.569**

Sumber: Badan Dayah Aceh, 2012

C. Kualifikasi Guru/Tengku

Guru/Teungku yang mengajar di dayah umumnya memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan ada beberapa yang memiliki kualifikasi S2. Kualifikasi Guru/Teungku yang berpendidikan S1/D-IV di Aceh berjumlah 2.346 orang (13,43%) dan pendidikan S2 berjumlah 172 orang (1,00%) dari total Guru/Teungku, dengan perbandingan laki-laki 1.343 orang dan wanita 1.003 orang untuk kualifikasi S1/D-IV dan perbandingan laki-laki 114 orang dan wanita 58 orang untuk kualifikasi S2.

Jumlah Guru/Teungku yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan beberapa kabupaten tidak memiliki Guru/Teungku yang berkualifikasi pendidikan S1/D-IV seperti pada Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Langsa dan Kota Sabang. Sementera itu, Guru/Teungku yang berkualifikasi pendidikan S2 terdapat 11 di kabupaten, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 73 orang, sedangkan jumlah yang paling sedikit di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam yang masing-masing berjumlah 1 orang.

Permasalahan di bidang pendidikan dayah dapat disimpulkan antara lain: 1) Daya tampung dayah yang terakreditasi belum memadai; 2) jumlah dayah yang terakreditasi masih kurang; 3) kualitas Guru/Teungku masih rendah; 4) distribusi Guru/Teungku belum merata. Dengan demikian upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dayah antara lain: 1) peningkatan daya tampung dayah yang terakreditasi sebanyak 1 (satu) ruangan untuk masing-masing dayah; 2) peningkatan jumlah dayah yang terakreditasi; 3) peningkatan kualitas Guru/Teungku; 4) pendistribusian Guru/Teungku secara merata.

2.3.1.4. Kesehatan

Aspek pelayanan umum bidang kesehatan difokuskan pada aspek fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang telah tersedia, kondisi mutu pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat, pembiayaan dan efisiensi pelayanan kesehatan serta aspek pemberdayaan masyarakat.

A. Fasilitas pelayanan kesehatan

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan puskesmas pembantu/Pustu). Hampir seluruh kecamatan sudah memiliki puskesmas, bahkan di beberapa kecamatan

memiliki 2 puskesmas. Dari 325 Puskesmas, 55 Puskesmas sudah mampu memberikan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), namun jumlah ini masih dibawah target 92 Puskesmas sesuai dengan standard Kepementerian Kesehatan (1 Puskesmas PONED/50.000 penduduk).

Selanjutnya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, jejaring pelayanan kesehatan dasar seperti Pustu, Poskesdes, Polindes dan Posyandu juga terus meningkat walaupun belum merata diseluruh daerah, terutama di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Jumlah Pustu meningkat dari 886 pada tahun 2007 menjadi 957 pada tahun 2011. Hal yang sama dengan jumlah Poskesdes/Polindes meningkat dari 1885 pada tahun 2007 menjadi 1932 pada tahun 2011 **(Tabel 2.58)**; namun jumlah Poskesdes/Polindes baru sekitar 30 persen dari jumlah desa yang ada di Aceh (6.450 desa).

Tabel 2.58
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh menurut kabupaten/kota
Tahun 2007-2011

No.	Kabupaten/Kota	Kecamantan	Puskesmas	Gampong	Puskesmas Pembantu	Polindes/ Poskesdes	Rumah Sakit (Pemerinta/ swasta)
1	Simeulue	8	8	137	110	8	1
2	Aceh Singkil	11	11	116	29	26	1
3	Aceh Selatan	18	22	248	55	56	1
4	Aceh Tenggara	16	18	385	53	84	1
5	Aceh Timur	24	26	511	62	164	2
6	Aceh Tengah	14	14	295	51	169	2
7	Aceh Barat	12	13	321	31	48	1
8	Aceh Besar	23	28	604	71	312	1
9	Pi d i e	23	26	727	70	79	2
10	Bireuen	17	18	609	45	198	3
11	Aceh Utara	27	28	852	88	0	1
12	Aceh Barat Daya	9	13	132	25	41	1
13	Gayo Lues	11	12	136	35	35	1
14	Aceh Tamiang	12	14	213	32	170	2
15	Nagan Raya	10	13	222	6	52	1
16	Aceh Jaya	9	8	172	26	91	1
17	Bener Meriah	7	10	232	35	112	1
18	Pidie Jaya	8	10	222	18	86	1
19	Banda Aceh	9	11	90	25	34	11
20	Sabang	2	6	18	13	1	2
21	Langsa	5	5	66	7	49	5
22	Lhokseumawe	4	6	68	21	43	8
23	Subulussalam	5	5	74	49	74	1
Jumlah	**2011**	**284**	**325**	**6.450**	**957**	**1932**	**51**
	2010	**280**	**316**	**6.423**	**951**	**1661**	**50**
	2009		**307**		**931**	**1418**	
	2008		**292**		**903**	**2348**	
	2007		**288**		**886**	**1885**	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2012

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit umum - RSU) juga sudah tersedia di seluruh kabupaten/kota. Sekarang ini ada 51 Rumah Sakit diseluruh Aceh yang terdiri dari 32 RSU pemerintah dan 19 RSU swasta; 15 diantaranya telah mampu

melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Umumya RSU di kabupaten/kota masih berstatus RSU Kelas C (baru memiliki empat pelayanan medik spesialis dasar (bedah, penyakit dalam, anak dan obstetric & ginekologi) dan empat pelayanan spesialis penunjang medik. Rumah sakit umum kelas B baru 5 RS (RSUD Meuraxa dan RS Ibu dan Anak di Banda Aceh, RSUD Cut Meutia di Kabupaten Aceh Utara, RSUD Datu Beru di Kabupaten Aceh Tengah dan RSUD di Kota Langsa). Hanya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin/RSUDZA yang mempunyai status RS kelas A. Disamping itu, Aceh juga memiliki 1 buah rumah sakit jiwa (RSJ Banda Aceh). Dari 51 rumah sakit yang ada, baru 8 yang sudah terakreditasi (dan hanya RSUDZA yang terakreditasi penuh).

B. Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan untuk semua jenis tenaga meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 2.83 memperlihatkan jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2009 dan 2010 menurut kategori ketenagaan yang dilaporkan pada profil kesehatan tahunan. Sampai tahun 2010, total jumlah tenaga kesehatan sekitar 20.456 tenaga (sekitar 5 tenaga kesehatan melayani orang 1000 orang penduduk). Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidang masing-masing 170 dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). **Tabel 2.59** menampilkan kondisi tenaga medis tahun 2011 per kabupaten/kota.

Tabel 2.59
Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk Tahun 2009 dan 2010

Jenis tenaga kesehatan		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Jumlah	Rasio per	Jumlah	Rasio per
1	Medis	1134	26,0	1575	35,0
	Dokter Umum	776	17,8	1025	22,8
	Dokter Spesialis	205	4,7	369	8,2
	Dokter Gigi	153	3,5	181	4,0
2	Kesehatan Masyarakat	805	18,4	923	20,5
3	Perawat	9068	207,8	9141	203,4
4	Bidan	5132	117,6	6347	141,2
5	Farmasi	364	8,3	637	14,2
6	Gizi	319	7,3	474	10,5
7	Teknis Medis	579	13,3	666	14,8
8	Sanitasi	619	14,2	783	17,4
Jumlah		**18020**	**413,0**	**20546**	**457,1**

Sumber: BPS, 2010 dan Profil Kesehatan Aceh, 2010 dan 2011

Jumlah dokter umum di Aceh tahun 2011 sebanyak 1.433 orang dengan rasio 31 per 100.000 penduduk, masih rendah dibandingkan dengan standar nasional 40 per 100.000 penduduk. Jumlah dokter yang bertugas di Puskesmas saat ini sudah mencapai 642 orang

atau sekitar dua orang per Puskesmas (Profil Kesehatan Aceh, 2011). Namun demikian, distribusinya belum merata diseluruh Puskesmas. Umumnya tenaga kesehatan bertugas di wilayah perkotaan. Di Kota Banda Aceh, Aceh Jaya dan Sabang yang rasio dokter umumnya misalnya telah mencapai standar nasional, bahkan di Kota Banda Aceh, rasio dokter umum per penduduk hampir mencapai 5 kali standar nasional. Sebaliknya masih banyak kabupaten/kota yang rasio dokter umumnya dibawah standar nasional.

Jumlah dokter spesialis di Aceh tahun 2011 sebanyak 352 orang dengan rasio 8 per 100.000 penduduk, masih jauh dari standar nasional 20 per 100.000 penduduk. Selain jumlah, distribusi tenaga spesialis juga umumnya bertugas di ibu kota provinsi atau kabupaten/kota. Sekitar 50 persen tenaga spesialis berdomisili di Banda Aceh, sisanya di 22 kabupaten/kota lainnya. Di Banda Aceh, dokter spesialis sudah mencapai rasio 160 per 100.000 penduduk atau empat kali lipat di atas standar nasional, sementara di beberapa kabupaten/kota ada yang belum memiliki dokter spesialis. Jumlah dokter gigi di Aceh tahun 2011 sebanyak 200 orang dengan rasio dokter gigi 4 per 100.000 penduduk, baru setengah dari standar nasional 9 per 100.000 penduduk **(Tabel 2.60).**

Tabel 2.60
Jumlah dan rasio tenaga kesehatan menurut kabupaten/kota
Di Aceh Tahun 2011.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	Dokter					
			Umum		Spesialis		Gigi	
			Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
1	Simeulue	82.521	15	18	1	0	2	2
2	Aceh Singkil	104.856	40	38	2	2	1	1
3	Aceh Selatan	206.881	45	22	11	5	12	6
4	Aceh Tenggara	183.108	22	12	6	3	3	2
5	Aceh Timur	368.728	43	12	13	4	24	7
6	Aceh Tengah	179.546	51	28	24	13	10	6
7	Aceh Barat	177.532	30	17	11	6	9	5
8	Aceh Besar	359.464	70	19	3	1	16	4
9	Pi d i e	387.787	69	18	21	5	8	2
10	Bireuen	398.201	63	16	16	4	15	4
11	Aceh Utara	541.878	167	31	0	0	15	3
12	Aceh Barat Daya	128.922	26	20	4	3	3	2
13	Gayo Lues	81.382	19	23	1	1	6	7
14	Aceh Tamiang	257.681	46	18	4	2	15	6
15	Nagan Raya	142.861	37	26	3	2	6	4
16	Aceh Jaya	78.54	35	45	1	1	5	6
17	Bener Meriah	125.076	41	33	4	3	3	2
18	Pidie Jaya	136	48	35	1	1	7	5
19	Banda Aceh	228.562	420	184	160	70	8	4
20	Sabang	31.355	22	70	4	13	7	22
21	Langsa	152.355	56	37	27	18	7	5
22	Lhokseumawe	175.082	58	33	35	20	15	9
23	Subulussalam	68.99	10	14	0	0	3	4
Jumlah		**4.597.308**	**4.597.308**	**31**	**352**	**8**	**200**	**4**

Sumber: IDI dan Badan Pusat Statistik 2012

C. Kualitas pelayanan kesehatan

Secara umum kualitas pelayanan kesehatan di Aceh belum begitu memuaskan. Walaupun tidak ada data dan penelitian yang valid, sebagian masyarakat tidak merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah. Hal ini tercermin masih banyak masyarakat lebih memilih berobat ke fasilitas swasta, praktek dan klinik sore hari walaupun pelayanan kesehatan milik pemerintah gratis. Sebagian masyarakat bahkan ada yang memilih berobat ke negara tetangga. Masyarakat banyak mengeluh, mereka tidak dilayani dengan sepenuh hati, dokter yang seharusnya ada di rumah sakit milik pemerintah sering tidak ada ditempat bahkan sering di rumah sakit atau klinik swasta. Walaupun biaya pelayanan kesehatan di Aceh sejak Juni 2010 ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), namun banyak pasien kecewa dengan pelayanan, obat-obatan tidak selalu tersedia dan kadang kala pasien di dorong untuk membeli obat-obat tertentu. Tingkat *responsiveness* yang rendah dan keluhan masyarakat lain terhadap kualitas pelayanan kesehatan sering menjadi salah satu berita utama media massa.

H. Aspek pemberdayaan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat diukur dari berbagai segi, salah satunya dapat dilihat dari aspek peran serta masyarakat dalam membina gampong siaga aktif, jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) dan jumlah kader kesehatan. Saat ini jumlah gampong siaga aktif baru hanya 705 (11%) dari 6.450 total gampong yang ada di Aceh. Sementara itu jumlah posyandu di Aceh tahun 2011 sudah memadai dengan jumlah posyandu 7.368 dari 6.450 desa, berarti ada 1 (satu) gampong yang memiliki lebih dari 1 (satu) posyandu. Sementara itu jumlah kader yang tercatat sudah mencapai 26.412 kader, artinya ada 3-4 kader per posyandu, namun demikian tingkat keaktifan kader cukup fluktuatif dan pengetahuan kader yang cukup variatif **(Tabel 2.61)**.

Tabel 2.61
Distribusi gampong siaga, posyandu dan kader tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Gampong	Gampong Siaga		Posyandu	Kader
			Aktif	Tidak		
1	Simeulue	137	31	106	159	538
2	Aceh Singkil	116	41	75	185	612
3	Aceh Selatan	248	0	248	291	1124
4	Aceh Tenggara	385	0	385	486	963
5	Aceh Timur	511	102	409	656	1516
6	Aceh Tengah	295	15	280	296	1112
7	Aceh Barat	321	0	321	337	1399
8	Aceh Besar	604	0	604	656	3241
9	Pi d i e	727	0	727	763	2757

No	Kabupaten/Kota	Gampong	Gampong Siaga		Posyandu	Kader
			Aktif	Tidak		
10	Bireuen	609	9	600	617	2469
11	Aceh Utara	852	0	852	943	3010
12	Aceh Barat Daya	132	9	123	213	637
13	Gayo Lues	136	127	9	144	338
14	Aceh Tamiang	213	22	191	288	1031
15	Nagan Raya	222	9	213	256	1122
16	Aceh Jaya	172	74	98	185	736
17	Bener Meriah	232	74	158	234	972
18	Pidie Jaya	222	69	153	226	1003
19	Banda Aceh	90	9	81	113	605
20	Sabang	18	9	9	35	108
21	Langsa	66	23	43	106	409
22	Lhokseumawe	68	17	51	100	369
23	Subulussalam	74	65	9	97	341
Total		**6.450**	**705**	**5.745**	**7.386**	**26.412**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2012

Dari uraian tersebut di atas bidang kesehatan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit umum yang ada di Aceh sebanyak 51 unit (RS pemerintah dan swasta) hampir seluruh kabupaten/kota masih dalam klasifikasi tipe C, untuk rumah sakit tipe B hanya ada di Kota Banda Aceh (RSUD Meuraksa dan RSIA), RSUD Cut Mutia (Kabupaten Aceh Utara), RSUD Datu Beru (Kabupaten Aceh Tengah), RSUD Kota Langsa. Sedangkan yang tergolong tipe A hanya RSUD Zainoel Abidin (Ibukota Aceh di Banda Aceh), untuk RSJ hanya ada 1 (satu) di Aceh. Selanjutnya fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Aceh seperti puskesmas sebanyak 325 unit, puskesmas pembantu sebanyak 957 unit dan polindes/poskesdes sebanyak 1.932 unit; 2) rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah kecuali tenaga perawat dan bidan, dokter umum di Aceh masih rendah dengan rasio 31/100.000 penduduk sedangkan Nasional 40/100.000 penduduk. Dokter spesial di Aceh sebanyak 8/100.000 penduduk untuk Nasional 20/100.000 penduduk, dokter gigi 4/100.000 penduduk untuk Nasional 9/100.000 penduduk. Pada umumnya dokter umum dan spesialis masih terkonsentrasi di Ibukota Provinsi; 3) kualitas pelayanan kesehatan di Aceh masih rendah.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah Aceh harus mengupayakan hal-hal sebagai berikut: 1) meningkatkan klasifikasi RSU daerah dari tipe C menjadi tipe B; 2) membangun RS umum regional (tipe A) sebagai RS rujukan dengan spesialis yang berbeda antar wilayah (spesialis jatung, saraf, bedah tulang, mata dan THT) dan RSJ regional; 3) peningkatan fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu; 4) menyediakan polindes/poskesdes sesuai kebutuhan; 4) penambahan dokter spesialis dan distribusi dokter umum, dokter spesialis, tenaga medis dan para medis secara merata.

2.3.1.5. Lingkungan Hidup

Sebagian peruntukan lahan dari luas wilayah daratan Aceh didominasi oleh kawasan hutan seluas 3.332.047,58 km^2 atau sekitar 57,7%. Dengan mempertahankan peruntukan wilayah hutan menjadi tantangan yang harus dihadapi guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan resapan gas rumah kaca dalam rangka mitigasi perubahan iklim radikal yang mulai dirasakan.

Kualitas udara di wilayah perkotaan khususnya Banda Aceh berdasarkan pengujian sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 secara umum masih cukup baik (di bawah baku mutu yang ditetapkan Pemerintah), khususnya pada kandungan Sulfur Dioksida (SO_2), Nitrogen Dioksida (NO_2), Carbon Monoksida (CO) dan Total Suspended Particel (TSP). Sementara kualitas udara di beberapa Kabupaten/Kota sebagaimana di sajikan pada **Tabel 2.62.**

Tabel 2.62
Kualitas Udara di Beberapa Ibukota Kabupaten/Kota

Para meter Analisis	Satuan	Lokasi Pemantauan						Baku Mutu
		Sabang	Langsa	Blangkeu jeuren	Sigli	Tapak tuan	Calang	
Debu	$\mu g/m^3$	18,22	72	16,32	42,55	49,74	89,29	230
SO_2	$\mu g/m^3$	193,8	4,27	99,08	174,2	345,6	237,1	900
NOx	$\mu g/m^3$	53,72	2,14	20,18	18,25	40,65	20,15	004
CO	$\mu g/m^3$	1736	3175	1731	729,5	2815	1913,5	30.000
Pb	$\mu g/m^3$	ta	tt	ta	ta	ta	ta	(-)

Sumber : Status Lingkungan Hidup Daerah Aceh, 2011

Permasalahan utama lingkungan hidup di Aceh dalam beberapa tahun terakhir adalah kerusakan hutan, akibat perambahan hutan (*illegal logging* dan *over cutting*). Aktivitas pertambangan illegal, perladangan berpindah dan kebakaran hutan juga merupakan penyebab utama dari kerusakan hutan. Luas kerusakan hutan pada tahun 2009 telah mencapai 31.294 ha, sedangkan luas lahan kritis sebesar 391.484,6 Ha, sebagaimana di sajikan pada **Tabel 2.63**.

Tabel 2.63
Luas Lahan Kritis di Aceh Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Simeulue	15.540,6
2	Kabupaten Aceh Singkil	16.635,9
3	Kabupaten Aceh Selatan	24.126,0
4	Kabupaten Aceh Tenggara	9.753,2
5	Kabupaten Aceh Timur	10.774,2
6	Kabupaten Aceh Tengah	68.026,3
7	Kabupaten Aceh Barat	2.121,1
8	Kabupaten Aceh Besar	46.399,7
9	Kabupaten Pidie	27.808,2
10	Kabupaten Bireuen	8.599,4
11	Kabupaten Aceh Utara	14.908,0
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	5.365,3
13	Kabupaten Gayo Lues	53.190,2
14	Kabupaten Aceh Tamiang	6.604,6

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
15	Kabupaten Nagan Raya	7.727,9
16	Kabupaten Aceh Jaya	34.615,6
17	Kabupaten Bener Meriah	31.007,8
18	Kabupaten Pidie Jaya	-
19	Kota Banda Aceh	-
20	Kota Sabang	4.234,0
21	Kota Langsa	4.046,8
22	Kota Lhokseumawe	-
23	Kota Subulussalam	-

Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Aceh, 2011

Deforestasi hutan pada kawasan APL mencapai 61.204 ha, dimana kemampuan untuk memulihkan hutan tersebut tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang dialami. Hal tersebut menyebabkan degradasi hutan yang memicu hilangnya atau punahnya sumberdaya hayati yang secara global berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada seluruh komponen lingkungan fisik, kimia, biologi, maupun sosial, ekonomi dan budaya. Luas kawasan terbuka akibat deforestasi mengakibatkan tingginya aliran sediman dari kawasan pegunungan ke wilayah yang lebih rendah yang biasanya didiami oleh banyak penduduk di Aceh. Hal ini berdampak juga pada menurunnya kualitas air permukaan yang biasanya digunakan oleh penduduk di Aceh untuk aktifitas sehari – hari dan aktifitas pertanian.

Jika kondisi di atas tidak segera ditangani akan berpotensi meningkatkan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Hutan hujan tropis yang berfungsi sebagai paru – paru dunia, memproduksi banyak oksigen sekaligus menyerap karbon dioksida yang sangat bermanfaat untuk menjaga planet bumi dari laju kerusakan lingkungan. Isu prioritas lainnya yaitu isu persampahan, illegal minning, perubahan iklim, kerusakan DAS, Pencemaran Air dan Udara, Kerusakan pesisir dan laut, tata ruang wilayah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan.

Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan, pemerintah Aceh harus mengupayakan beberapa hal antara lain: 1) perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemeliharaan cadangan Sumber Daya Alam (SDA); 2) peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup (LH); 3) peningkatan pengendalian polusi; 4) pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 5) pengendalian pencemaran dan perusakan LH dan 6) penguatan kelembagaan penataan ruang Aceh sehingga pengelolaan serta pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang Aceh menjadi lebih baik.

A. Persentase Penanganan Sampah

Penanganan persampahan masih terbatas dalam kawasan komersil, tingkat pelayanan di tempat fasilitas umum di perkotaan masih 25 persen. Sesuai dengan target MDG's untuk Aceh pada sektor persampahan ditargetkan akses pelayanan persampahan perkotaan sebesar 80 persen dan pedesaan 75 persen.

Dalam usaha mencapai target akses pelayanan tersebut dibutuhkan percepatan pembangunan pelayanan persampahan. Pelaksanaan dilakukan melalui pembangunan tempat penampungan sementara sampah dan tempat pemrosesan akhir sampah lokal maupun regional dan pengolahan sampah terpadu dengan menganut prinsip "*reuse*, *reduce*, dan *recycle*" (3R) di kabupaten/kota, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan sebanyak 49 unit, penyediaan prasarana dan sarana air limbah di 102 kawasan, serta pengembangan desa model sebanyak 15 unit tersebar di wilayah barat, timur, dan tengah.

B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air minum mengandung pengertian air bersih yang dapat dikonsumsi dengan aman bagi masyarakat untuk aktivitas sehari-hari antara lain untuk memasak dan kebutuhan personal lainnya. Persentase penduduk berakses air minum di Aceh masih sangat rendah, dimana akses terhadap air minum (air yang dapat langsung dikonsumsi) hanya bisa didapatkan dari air minum kemasan.

Secara umum penduduk masih mendapatkan air minum dari air ledeng, sumur, mata air, sungai, air hujan, sumur terlindung dan sumur tidak terlindung. Pada periode tahun 2006 – 2010 rumah tangga yang memanfaatkan air kemasan sebagai sumber air minum mengalami peningkatan dari 4,42 % menjadi 25,49. Selanjutnya pada periode yang sama rumah tangga yang memanfaatkan sumber air selain air kemasan mengalami penurunan seperti di sajikan pada **Tabel 2.64**.

Tabel 2.64
Sumber Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga (dalam persen)
Tahun 2005 – 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Air Kemasan	4,42	6,73	14,43	18,93	25,49
2	Leding Meteran	10,93	8,76	7,04	8,55	8,48
3	Leding Eceran		3,42	1,85	1,32	
4	Sumur Bor/Pompa	3,17	4,92	5,25	4,75	4,19
5	Mata Air Terlindung	4,68	3,55	4,15	5,81	4,7
6	Mata Air Tak Terlindung	3,07	3,16	3,2	1,95	2,81
7	Air Sungai	5,55	4,76	3,31	4,09	3
8	Air Hujan	1,61	1,14	1,22	0,78	0,63
9	Sumur Tak Terlindung	22,74	21,41	17,99	12,94	13,22
10	Sumur Terlindung	43,24	41,58	41,19	40,69	37,35
11	Lainnya	0,58	0,58	0,33	0,18	0,13

Sumber BPS, 2011

Permasalahan penduduk berakses air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar serta belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya sebagai berikut: 1) menjaga kelestarian lingkungan agar tetap mampu menyediakan pasokan air baku untuk layanan air minum; 2) memastikan sarana yang dibangun dapat diakses secara mudah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus; 3) pengembangan perencanaan yang lebih detail mencakup strategi pemenuhan air minum yang terukur dan dapat memandu semua pihak dalam mengoperasionalisasikannya.

C. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Pesatnya perkembangan di wilayah perkotaan atau permukiman di Aceh cenderung menyebabkan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi tidak sehat. Keadaan ini semakin diperburuk bila belum tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan primer maupun sekunder. Belum terciptanya jaringan infrastruktur yang mendukung pengembangan perekonomian pada kawasan desa potensial, kawasan agropolitan dan minapolitan.

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan persentase luas permukiman yang tertata di kawasan perkotaan dan perdesaan adalah: 1) meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman baik didalam permukiman itu sendiri ataupun jaringan infrastruktur yang menghubungkan permukiman tersebut dengan pusat – pusat kegiatan; 2) peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh bagi 36 kawasan permukiman kumuh yang terdapat di kabupaten/kota; 3) menyediakan prasarana jalan akses atau jalan poros yang menghubungkan 28 kawasan perumahan Rumah Siap Huni (RSH) yang terdapat di kabupaten/kota dengan sistem jaringan jalan kota atau infrastruktur jaringan permukiman lainnya; 4) mendukung pengembangan 24 kawasan desa potensial pusat pertumbuhan dengan desa-desa hinterlandnya dalam satu kesatuan infrastruktur dan ekonomi kawasan dan 5) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dan perikanan bagi kawasan agropolitan dan minapolitan.

2.3.1.6. Sarana dan Prasarana

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Sistem jaringan jalan di Aceh belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai. Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan jalan yang belum dapat menghubungkan antar kawasan dengan baik. Secara keseluruhan panjang jalan di Aceh yaitu 17.198,28 km yang terdiri dari jalan nasional

(1.810,36 km) dan jalan provinsi (1.833,33 km). Masing-masing jalan tersebut dikategorikan kedalam kondisi baik, sedang dan rusak berat yang secara rinci disajikan pada **Tabel 2.65**.

Tabel 2.65
Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2006 - 2010

No	Tahun		Panjang Jalan (km)	Kondisi Jalan (km)			
				Baik	Sedang	Rusak	Belum Tembus
1	2007	Nasional	1.789,78	1.163,26	306,01	313,51	Na
		Provinsi	1.701,82	442,47	621,08	618,27	Na
2	2008*	Nasional	1.789,78	1.163,26	306,01	313,51	Na
		Provinsi	1.701,82	442,47	621,08	618,27	Na
3	2009*	Nasional	1.789,78	1.163,26	306,01	313,51	Na
		Provinsi	1.701,82	442,47	621,08	618,27	Na
4	2010	Nasional	1.810,36	1.120,42	592,81	90,13	81,98
		Provinsi	1.833,33	820,08	547,63	375,62	70,00
5	2011	Nasional	1.810,36	1.120,42	592,81	90,13	81,98
		Provinsi	1.833,33	820,08	547,63	375,62	70,00

Sumber: BPS, 2012
**) 2008 dan 2009 informasi data tidak ada*

Bila ditinjau dari luas wilayah Aceh dan bentang alam mulai dari lintas pantai Timur – Utara hingga ke lintas Barat – Selatan dan menembus lintas Tengah, maka proporsi dan panjang jaringan jalan belum mencukupi aksesibilitas pergerakan orang dan barang. Proporsi jalan Nasional adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional, maka keberadaan dari segi panjang sudah mencukupi, hanya saja dari segi kondisi perlu peningkatan sesuai kebutuhan lalu lintas dan diperlukan penuntasan beberapa ruas jalan yang belum tembus (jalan Jantho – Keumala ,jalan Geumpang – Pameu, Jalan Sp.Lawe Deski – Muara Situlen – Gelombang, dan Jalan Trumon – Buluhseuma – Kuala Baru - Singkil) untuk saat ini dan prediksi ke depan. Demikian juga dengan kebutuhan jalan kabupaten/kota yang merupakan kewenangan dari masing-masing kabupaten/kota, sehingga setiap kabupaten/kota dapat memenuhi kebutuhan pelayanan minimal dari prediksi pergerakan yang terjadi antar kecamatan dan kecamatan/desa menuju ke kota/kabupaten.

Berbeda halnya dengan jalan Provinsi yang secara administrasi kewenangan di bawah pemerintah Aceh. Keberadaan lintas Tengah dan jaringan penghubung (jalan pengumpan/feeder road) antara pantai Barat dan pantai Timur melalui wilayah Tengah adalah merupakan keharusan agar disparitas dan kesenjangan dalam aksesibilitas di seluruh wilayah Aceh dapat teratasi.

Langkah strategis yang dilakukan didalam penyelesaian pembangunan jalan lintas tengah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan pembiayaan bersumber dari

APBN yang disesuai dengan perencanaan jalan di dalam RTRW Aceh, dengan prioritas sebagai berikut:

a. Pembangunan jalan lintas tengah jalan nasional dengan ruas:
   a. Jalan Sp. Seulimum – Jantho (9,58 Km)
   b. Jalan Jantho – Keumala (34,98 Km) *)[1]
   c. Jalan Keumala – Geumpang (66,99 Km)
   d. Jalan Geumpang – Pameu (48,13 Km) *)
   e. Jalan Pameu – Genting Gerbang (53,69 Km)
   f. Jalan Genting Gerbang – Sp. Uning (18,86 Km)
   g. Jalan Sp. Uning – Uwaq (68,08 Km)
   h. Jalan Uwaq - Bts. Gayo Lues (20,55 Km)
   i. Jalan Bts. Gayo Lues – Blangkejeren (46 Km)
   j. Jalan Blangkejeren – batas Aceh Tenggara (63,38)
   k. Jalan batas Gayo Lues – Kutacane (40,20 Km)
   l. Jalan Kutacane - Batas Sumatera Utara (33,96 Km)

b. Peningkatan jalan penghubung antar kabupaten/kota dengan ruas:
   a. Jalan Kreung Keukeuh – batas Bener Meriah (52,60 Km)
   b. Jalan Batas Aceh Utara – Bandara Rambele (29,73 Km)
   c. Jalan Rambele – Batas Aceh Tengah (14,97 Km)
   d. Batas Bener Meriah – Sp. Kebayakan (5,86 Km)
   e. Jalan Sp. Kebayakan - Sp.Kraft (52 Km)

Agar aksesibilitas antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh dan menuju ke Ibukota Provinsi di Banda Aceh dari semua wilayah terakomodir dengan pengurangan biaya operasi kendaraan dan penghematan waktu perjalanan, maka kondisi dan keberadaan jalan provinsi tersebut di atas perlu ditingkatkan.

Selanjutnya total penanganan jalan provinsi lainnya yang harus dibangun/ditingkatkan adalah sepanjang 707,15 km, sedangkan yang dipelihara sepanjang 1.576 km. Prioritas penanganan jalan provinsi adalah sebagai berikut :

1. Peureulak - Lokop - Pinding - Blangkejeren (138,90 km) *)
2. Babah Rot - Trangon - Blangkejeren (76,50 km)
3. Jantho - Lamno (45,50 km) *)[2]

[1] *Jalan belum tembus*
[2] *Jalan belum tembus*

4. Jeuram - Lhok Seumot – Celala - Genting Gerbang (48 km)
5. Sp. Kr. Geukuh - Bts. Bener Meriah (18,55 km)
6. Sp. Teritit - Pondok Baru - Samar Kilang – Peunaron (91,50 km)
7. Sp. Lw. Deski - Muara Situlen - Gelombang (71,55 km) *)
8. Trumon - Buluhseuma - Kuala Baru - Singkil (60 km)
9. Bener Meriah – Batas Aceh Utara (26,95 km)
10. Serafon – Lewak – Sibigo (84,70 km)
11. Ie Mirah – Lama Muda (45 km)

Panjang jembatan provinsi adalah 17.826,05 meter dan jembatan nasional 14.897,90 meter dengan total panjang keseluruhan adalah 32.723.95 meter. Kondisi baik jembatan adalah sepanjang 16.544,40 meter, sisanya sepanjang 16.179,55 meter terbagi atas kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kondisi ini diperlukan penanganan pembangunan maupun pemeliharaan jembatan, sehingga dicapai kondisi mantap jembatan. Selain itu, ada beberapa jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh provinsi baik yang mengalami rusak berat/putus maupun terbengkalai perlu ditangani sampai tuntas **(Tabel.2.66)**.

Tabel 2.66
Kondisi Jembatan Nasional dan Jembatan Provinsi
Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jembatan (Km)			
		Jumlah (buah)	Panjang *(m)*	Baik	
				Buah	Panjang (m)
1	Aceh Besar	147	3.520,44	63,00	1.428,00
2	Banda Aceh	9	516,100	-	-
3	Sabang	27	159,10	9,00	52,10
4	Pidie	234	4.101,92	85,00	1.246,70
5	Pidie Jaya	-	-	-	-
6	Aceh Jaya	311	8.542,56	283,00	7.376,80
7	Aceh Timur	118	2.663,78	72,00	1.726,50
8	Aceh Utara	150	2.948,20	129,00	2.598,40
9	Aceh Tamiang	-	-	-	-
10	Langsa	-	-	-	-
11	Lhokseumawe	-	-	-	-
12	Aceh Tengah	149	2.091,29	57,00	780,30
13	Bener Meriah	10	185,15	-	-
14	Bireuen	22	388,09	-	-
15	Aceh Selatan	29	290,92	1,00	30,30
16	Aceh Barat	142	1.585,37	5,00	46,00
17	Simeulue	190	2.314,27	-	-
18	Aceh Singkil	36	635,24	-	-
19	Aceh Barat Daya	10	146,00	-	-
20	Subulussalam	-	-	-	-
21	Nagan Raya	46	530,47	-	-
22	Aceh Tenggara	115	1.736,60	88,00	1.259,30
23	Gayo Lues	28	368,45	-	-
Jumlah		**1.773**	**32.723,95**	**792,00**	**16.544,40**

Sumber : Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, 2011

Beberapa jembatan yang perlu diprioritaskan pembangunannya adalah jembatan provinsi dan pembangunan jembatan strategis kabupaten 5.000 meter. Selanjutnya

pembangunan beberapa jembatan baru dan jembatan lanjutan yang terbengkalai yaitu: jembatan Lam Sie (200 m), jembatan Lampanah Tunong (310 m), jembatan Lamreng - limpok (310 m), jembatan Panca (120 m), jembatan Desa Lueng Sa - Matang Guru (120 m), jembatan Pulau Banyak (100 m), jembatan Ruas Jalan Kp. Aie (160 m), jembatan Berawang Kunyit (50 m), jembatan Sikiren (60 m), jembatan Ruas Jalan Trumon - Bulo Seuma - Kuala Baro (300 m).

Berdasarkan uraian sebelumnya upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang antara lain: 1) penyediaan perencanaan sistem jaringan jalan dan jembatan yang terintegrasi; 2) peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan dan 3) pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar lintas timur, barat dan tengah yang belum tembus.

Disamping itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan pemerintah Aceh juga sudah merencanakan pembangunan jalan *highway* yang telah direncanakan didalam RTRW Aceh, adapun ruas jalan lintas tengah tersebut: krueng raya – laweung – Tangse – Gempang – Pameu – Linge Isak – Blangkejeren – Kutacane – Lawe Pakam – Subulussalam – Singkil.

B. Sumber Daya Air

1. Irigasi

Potensi areal yang memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian beririgasi seluas 730.000 Ha. Kondisi saat ini yang memiliki jaringan irigasi seluas 384.171 Ha berada pada 1.176 Daerah Irigasi (DI). Berdasarkan klasifikasi jaringan irigasi terdiri dari: 1) Jaringan Irigasi Teknis seluas 116.862 Ha; 2) Jaringan Irigasi Semi Teknis seluas 65.597 Ha; dan 3) Jaringan Irigasi Sederhana seluas 201.712 Ha. Berdasarkan pemanfaatan terdiri: 1) Luas Baku seluas 384.171 Ha; 2) Luas Potensial seluas 278.449 Ha; dan 3) Luas Fungsional seluas 215.416 Ha, disajikan pada **Tabel 2.67**.

Tabel 2.67
Potensi Lahan Pertanian Tahun 2011

No	URAIAN	LUAS (HA)
1	**Irigasi**	384.171
	Irigasi Teknis	116.862
	Irigasi Semi Teknis	65.597
	Irigasi Sederhana	201.712
2	**Rawa**	311.160
	Rawa Lebak	236.055
	Rawa Pantai	75.105
3	**Sawah Tadah Hujan**	57.746

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2012

Berdasarkan kewenangan, Daerah Irigasi yaitu: kewenangan nasional seluas 120.921 Ha dengan 13 Daerah Irigasi, kewenangan provinsi seluas 76.647 Ha dengan 44 Daerah Irigasi dan kewenangan kabupaten/kota seluas 186.603 Ha dengan 1.119 Daerah Irigasi, disajikan **Tabel 2.68**.

Tabel 2.68
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/Kota (Ha)	TOTAL			
I	Pemerintah	19.360,00	101.561	120.921	Ha	13	DI
II	Pemerintah Propinsi	4.344,00	72.303	76.647	Ha	44	DI
III	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	186.603	186.603	Ha	1.119	DI
Total		**23.704**	**360.467**	**384.171**	**Ha**	**1.176**	**DI**

Sumber : Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya. Pada beberapa Daerah Irigasi, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah menurun, disebabkan kondisi saluran, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pada Daerah Irigasi disajikan pada **Tabel 2.69** dan **Tabel 2.70**.

Tabel 2.69
Kondisi Saluran Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2011

No	Kewenangan	Luas		Saluran	Panjang (m)	Kondisi Saluran					
		Baku	Fungsional			Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		(Ha)	(Ha)			(m)	(%)	(m)	(%)	(m)	(%)
1	Kewenangan Pusat	120.921	75.799	Primer	205.173	151.882,8	73	30.993,9	14,7	22.296,3	12,3
				Sekunder	989.676	747.365,9	74,3	139.325,0	14,2	102.985,5	11,5
2	Kewenangan Provinsi	76.647	27.655	Primer	179.448	59.919,6	33.4	19.385,7	10,8	100.143,0	55.8
				Sekunder	429.386	121.663,1	28.3	74.055,8	17.3	233.667,0	54.4
3	Kewenangan Kabupaten	186.603	111.962	Primer	304.682	107.715,8	35,8	64.629,5	21,1	132.336,6	43,1
				Sekunder	1.454.825	475.045,0	32,7	222.677,3	15,9	757.103,0	51,4

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2012

Tabel 2.70
Kondisi Bangunan Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2011

No	Daerah Irigasi Kewenangan	Luas		Bangunan	Jumlah (bh)	Kondisi Bangunan			
		Baku	Fungsional			Baik		Rusak	
		(Ha)	(Ha)			(bh)	(%)	(bh)	(%)
1	Kewenangan Pusat	120.921	75.799	Pada Saluran Primer	887	669	76,0	218	24,0
				Pada Saluran Sekunder	2.460	1.837	76,0	623	24,0
2	Kewenangan Provinsi	76.647	27.655	Pada Saluran Primer	381	117	30,7	264	69,3
				Pada Saluran Sekunder	996	385	38,7	611	61,3
3	Kewenangan Kabupaten	186.603	111.962	Pada Saluran Primer	1.316	412	31,5	904	68,6
				Pada Saluran Sekunder	3.652	1.328	36,9	2.324	63,1

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2012

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan jaringan irigasi Aceh belum

maksimal dengan angka Indeks Areal Terairi sebesar 56,07 persen, untuk mencapai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi masih memerlukan penyediaan jaringan irigasi sebesar 43,93 persen lagi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) belum berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal; 2) terbatasnya pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) belum optimalnya peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi; 5) belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan dan 6) terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi.

Ketersediaan air merupakan hal yang penting untuk meningkatkan intensitas taman mencapai 100 persen. Namun hal ini belum dapat dicapai karena belum berfungsinya jaringan irigasi teknis dan semi teknis secara maksimal. Disamping itu, pada daerah yang memiliki lahan potensial menjadi sawah berigasi belum didukung oleh jaringan irigasi yang memadai sehingga perlu ditingkatkan melalui penambahan saluran dan bangunan. Untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi perlu dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru. Ada beberapa lokasi yang mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti; D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kab. A. Barat) sedang dalam kegiatan pembangunan, D.I. Tripa seluas 17.000 Ha (Kab. Nagan Raya), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kab. A. Tamiang), D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kab. A. Timur), DI Jambo Aye seluas 14.000 Ha (Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur) dan Kr. Pase seluas 1.000 Ha (Kab. Aceh Utara). Mengingat daerah-daerah irigasi tersebut yang luasnya di atas 3.000 hektar yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat pembangunan daerah irigasi tersebut. Disamping itu juga ada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun baru jaringan irigasinya, seperti; D.I. Aneuk Gajah Rheut dan D.I. Mon Seuke Pulot, D.I. Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Lhok Naga di Kabupaten Pidie, D.I. Peunaron dan D.I. Jambo Reuhat di Kabupaten Aceh Timur, D.I. Tenggulon di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tillis (Suplesi) di Kabupaten Gayo Lues.

Semua daerah irigasi Teknis dan Semi Teknis fungsinya menurun, hal ini dikarenakan banyak saluran dan bangunan yang rusak. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Selanjutnya manjemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan O&P belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di lapangan yang selama ini dialokasikan berdasarkan harga satuan dan berdasarkan luas areal.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan kewenangan dan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun subtansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka kedua-duanya diperlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; Lembaga Adat, SKPA yang membidangi irigasi, Keujruen Blang dan Komisi Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan irigasi yang partisipatif perlu dibentuk Komisi Irigasi, keanggotaan Komisi ini terdiri dari; Lembaga Adat, SKPA terkait, dan Wakil Keujreun Blang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) belum berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal; 2) terbatasnya pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) belum optimalnya peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi; 5) belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan dan 6) terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) peningkatan fungsi jaringan irigasi sesuai potensi; 2) pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) rehabilitasi jaringan irigasi; 5) peningkatan dan perbaikan manajemen operasional dan pemeliharaan; 6) membangun waduk/embung sebagai sumber air potensial untuk irigasi.

2. Waduk/Embung (Aset Sumberdaya Air)

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air baku adalah dengan membangun sarana penampungan air di musim hujan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau, seperti; Waduk, Embung dan Situ. Pada saat ini telah selesai dibangun Waduk Keuliling di Aceh Besar diharapkan dapat menanggulangi kekurangan air pada D.I. Kreung Jreu dan beberapa Embung seperti; Embung Paya Sinara, Embung Sianjo-anjo dan Embung Rajui.

Ada beberapa Waduk yang masih dalam perencanaan seperti Waduk Rukoh/Tiro, Waduk Jambu Aye, Waduk Keureto dan Waduk Langsa. Mengingat penyediaan air untuk irigasi semakin krisis perlu kiranya didorong Pemerintah Pusat untuk dapat segera melakukan pembangunan Waduk-waduk tersebut. Disamping waduk, masih ada sumber air untuk irigasi dalam skala kecil seperti embung, ada beberapa embung dalam tahap

pembangunan seperti Embung Lubok di Kabupaten Aceh Besar untuk mengairi daerah irigasi Kr. Aceh, Embung Paya Sinara di Kota Sabang, Embung Sianjo-anjo di Kabupaten Aceh Singkil, Embung Rajui di Kabupaten Pidie dan Embung Maheng di Kabupaten Aceh Besar.

Saat ini telah tersedia 17 buah DED Embung yang terletak di 7 (tujuh) Kabupaten yaitu; Embung Kuta Malaka, Embung Mon Abeuk Indrapuri, Embung Desa Nya, Embung Tanoh Abe, Embung Twi Glumpang, Embung Lam Birah dan terletak di Kabupaten Aceh Besar, Embung Paya Penyet di Kabupaten Aceh Utara, Embung Paya Bener di Kabupaten Aceh Tengah, Embung Paya Kareung Di Kabupaten Bireuen, Embung Laweung di Kabupaten Pidie dan Embung Paya Trieng di Kabupaten Pidie Jaya Dan Embung Tanah Bara di Kabupaten Singkil.

Berdasarkan uraian sebelumnya, untuk mengatasi kekurangan air baku Pemerintah Aceh perlu melakukan hal-hal sebagai berikut antara lain: 1) mengimplementasikan pembangunan waduk/embung yang telah memiliki DED dan 2) mencari potensi sumber air baku lain untuk mengatasi krisis air di masa depan.

3. Rawa

Rawa merupakan potensi lahan pertanian dalam arti luas. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena tidak didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

4. Pantai

Aceh merupakan kawasan maritim dengan panjang garis pantai sepanjang 2.442 km. Kondisi pantai Aceh yang telah mengalami abrasi (kritis) sepanjang lebih kurang 231,5 km yang sudah dibangun sepanjang 14,34 km, secara rinci disajikan pada **Tabel 2.71**.

Tabel 2.71
Panjang Pantai yang telah ditangani sampai dengan 2011

Lokasi Kabupaten/Kota		Panjang Pantai (Km)	Tahun				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Sabang	4,00	-	0,08	0,08	0,176	-
2	Banda Aceh	8,00	-	-	0,65	-	0,16

Lokasi Kabupaten/Kota		Panjang Pantai (Km)	Tahun				
			2007	2008	2009	2010	2011
3	Aceh Besar	41,00	0,25	1,28	-	0,13	0,15
4	Aceh Jaya	36,50	-	0,08	-	0,45	-
5	Aceh Barat	31,50	-	0,33	0,60	0,21	0,32
6	Nagan Raya	5,00	-	-	-	-	-
7	Aceh Barat Daya	15,00	-	-	0,18	-	0,11
8	Aceh Selatan	19,00	-	0,85	2,33	1,54	0,26
9	Aceh Singkil	3,00	-	-	0,05	-	0,08
10	Aceh Pidie	26,50	0,96	1,40	0,33	0,40	0,38
11	Pidie Jaya	5,500	-	-	0,88	0,20	0,20
12	Bireuen	11,00	-	0,06	0,98	0,60	0,60
13	Lhokseumawe	7,00	-	-	0,50	0,18	0,15
14	Aceh Utara	17,00	-	-	0,20	-	-
15	Aceh Timur	11,00	-	-	-	0,25	0,09
16	Langsa	6,00	-	-	0,20	-	0,24
17	Simeulue	12,00	-	0,10	0,20	-	0,43
Jumlah		**259,00**	**1,21**	**4,173**	**7,145**	**4,129**	**3,147**

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2012

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi dengan potensi kerusakan harian yaitu terjadinya abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Disamping itu dari hasil pengamatan yang dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami, gelombang tsunami telah banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pantai secara signifikan bergeser berkisar antara 20 - 50 meter ke arah daratan dan juga terjadi penurunan daratan di beberapa Kabupaten/Kota yaitu; Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Pulau Simeulue.

Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh diperkirakan sepanjang 231,5 km. Untuk mengatasi abrasi pantai diperlukan kebijakan penanggulangan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan berbagai *stakeholder* baik masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hal – hal yang perlu dilakukan antara lain adalah: 1) pembangunan tanggul dan jetty pada daerah-daerah yang kritis dan 2) penanaman vegetasi jenis mangrove sesuai dengan karakteristik pantai.

5. **Sungai**

Aceh memiliki 9 (Sembilan) Wilayah Sungai (WS) yang terbagi atas 4 klasifikasi yaitu wilayah strategis nasional (35 DAS), lintas provinsi (11 DAS), lintas kabupaten (26 DAS) dan dalam kabupaten (1 DAS), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.24**.

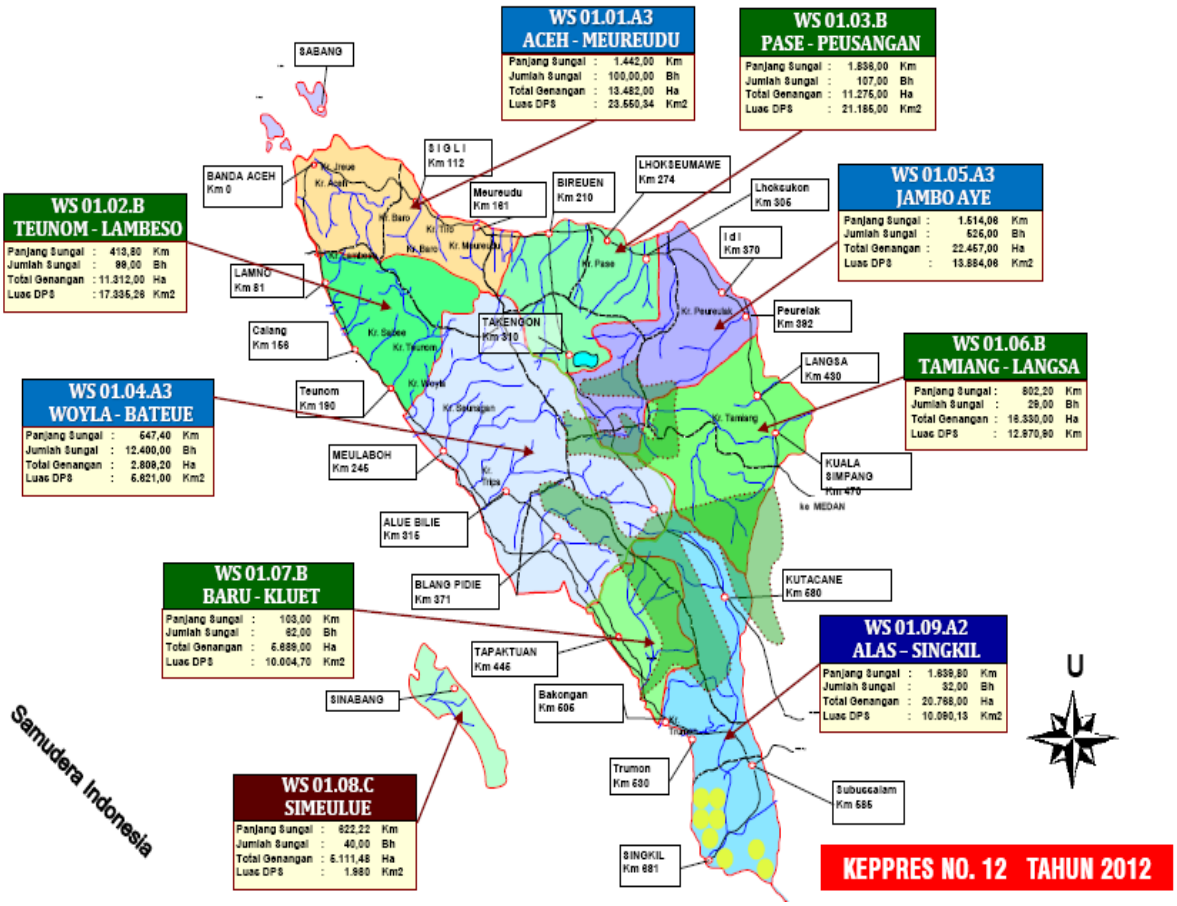

Gambar 2.24 Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Terhadap beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi diperlukan juga penanganan yang menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan yang sudah kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan pengurukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan O&P yaitu sungai yang telah dilakukan pembangunan yaitu, sungai Krueng Aceh, Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom. Disamping dilakukan kegiatan O&P juga perlu dilakukan penertiban pada bantaran sungai untuk mengamankan asset pemerintah seperti pada bantaran sungai Krueng Aceh.

Pada beberapa muara sungai, endapan sedimen yang terjadi telah menyebabkan hambatan aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai

yang muaranya sudah bermasalah antara lain; Krueng Aceh di Kabupaten Aceh Besar, Krueng Baro di Kabupaten Aceh Pidie, Krueng Ulim di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Barat, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Lawe Alas – Krueng Singkil di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil.

Berdasarkan uraian sebelumnya permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sendimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sendimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu.

C. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan, baik di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Pada tahun 2008 tercatat sekitar 56,05 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 56,62 persen. Rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebahagian besar adalah rumah tangga di daerah perkotaan yaitu sekitar 79,02 persen, sedangkan di perdesaan 48,03 persen. Penggunaan jenis kloset angsa di Aceh mengalami peningkatan dari 65,72 di tahun 2008 menjadi 66,01 pada tahun 2009 dari total rumah tangga. Jenis kloset angsa adalah jenis kloset yang baik dari sisi kesehatan lingkungan (**Gambar 2.25**).

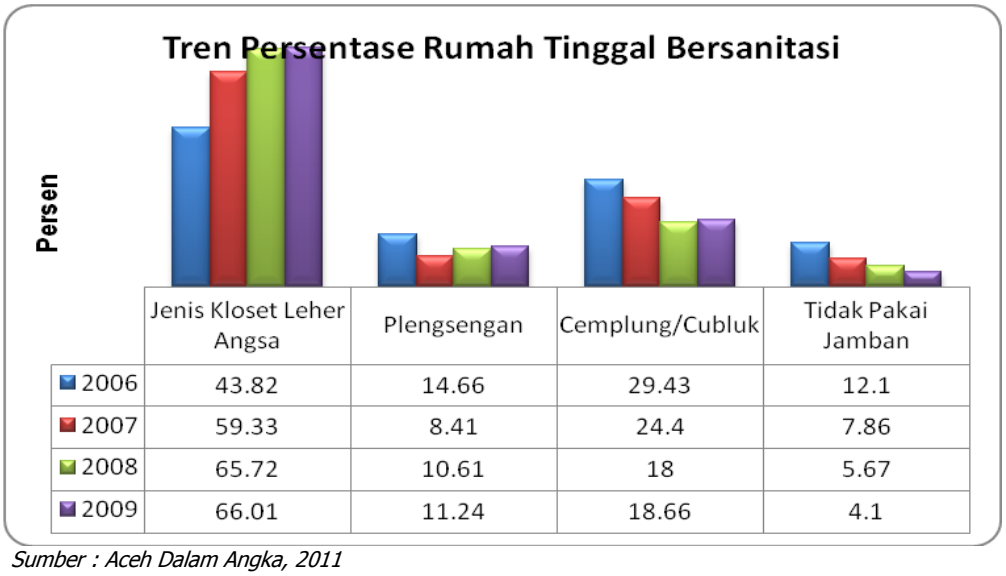

	Jenis Kloset Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	Tidak Pakai Jamban
2006	43.82	14.66	29.43	12.1
2007	59.33	8.41	24.4	7.86
2008	65.72	10.61	18	5.67
2009	66.01	11.24	18.66	4.1

Sumber : Aceh Dalam Angka, 2011

Gambar 2.25 Grafik Tren Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2010

Kondisi sanitasi saat ini sebagian besar tidak memenuhi syarat dengan utilitas yang buruk sehingga mengakibatkan tata kehidupan kurang sehat dan tidak nyaman. Kondisi fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Aceh adalah milik sendiri 48,41 persen, milik bersama 12,55 persen, umum 14,12 persen, dan lainnya 24,93 persen, selanjutnya pada akhir 2015 Aceh akan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Diperlukan penanganan segera sebagai salah satu pencapaian target MDG's berupa pembangunan infrastruktur air limbah/sanitasi seperti: pembangunan dan pengelolaan sanitasi sistem 'onsite' yaitu berupa pembangunan MCK pada 24 kawasan dan pembangunan sarana prasarana air limbah pendukung kawasan RSH pada 47 kawasan. Selain itu juga pembangunan dan pengelolaan sanitasi sistem '*offsite*' (baik pembangunan instalasi pengolahan air limbah maupun pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di kabupaten/kota) sejumlah 31 kawasan.

D. Prasarana Drainase dan Pengendalian Banjir

Pasca bencana tsunami, 90 persen drainase di Kota Banda Aceh dan Kota Meulaboh mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, demikian juga dengan beberapa kota lainnya, walaupun tidak separah di kedua kota tersebut. Kondisi ini menyebabkan kawasan perkotaan tergenang air akibat hujan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah desa yang mengalami banjir mencapai 1991 desa atau 31 persen dari total desa di wilayah Aceh. Banjir bandang dan gelombang pasang laut juga merupakan bencana yang melanda penduduk. Tercatat sekitar 134 desa di Aceh merupakan kawasan rawan gelombang pasang laut dan sekitar 526 desa rawan akan banjir bandang (Aceh info, 2010). Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas prasarana drainase dan pengendalian banjir yang ada saat ini belum memadai.

Sebagai upaya penanggulangan banjir yang ada di perkotaan diperlukan penanganan sistem banjir di perkotaan yaitu dengan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 78 kawasan. Untuk banjir yang terjadi dari bencana alam, diperlukan pembangunan 2 unit reservoir, pengendalian banjir pada daerah tangkapan air sepanjang 150.000 m, serta pembangunan tanggul pemecah ombak sepanjang 25.000 m.

E. Rasio Tempat Pembuangan Sampah TPS Per Satuan Penduduk

Menurut final MDGs Aceh, Bina Marga dan Cipta Karya (2010) jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di Aceh sebanyak 2,115 unit dan memiliki daya tampung sebanyak 3,095.2 m3/hari. Rasio daya tampung TPS terhadap total penduduk (4,293,915 jiwa) sebesar 0,72 m3/hari per 1.000 penduduk pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 10.931.207 jiwa, jumlah sampah 29.624 m3/hari sehingga 2,7 m3/hari per 1.000 penduduk.

F. Persentase Rumah Layak Huni/Rumah Sehat

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu parameter rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m2. Luas lantai rumah/tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga menunjukkan kondisi sistem kesehatan lingkungan keluarga atau rumah/tempat tinggal. Luas lantai juga menggambarkan tingkat kepadatan hunian atau luas ruang untuk tiap anggota keluarga. Pada tahun 2005 persentase rumah tangga yang menempati rumah/tempat tinggal kurang dari 19 m2 per rumah tangga sebesar 8,75 persen. Pada tahun 2009 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 2,85 persen. Sedangkan untuk rumah tangga dengan luas lantai 20-40 m2 pada tahun 2005 sebesar 51,36 persen, meningkat menjadi 53,43 persen pada tahun 2009 (BPS, 2009). Hal ini mengindikasikan bahwa persentase rumah tangga layak huni di Aceh semakin meningkat. Pemerintah Aceh pada tahun 2009 telah membangun rumah dhuafa untuk masyarakat yang tergolong fakir dan miskin sebanyak 11.205 unit dan rumah korban konflik sebanyak 15.670 unit (**Gambar 2.26**).

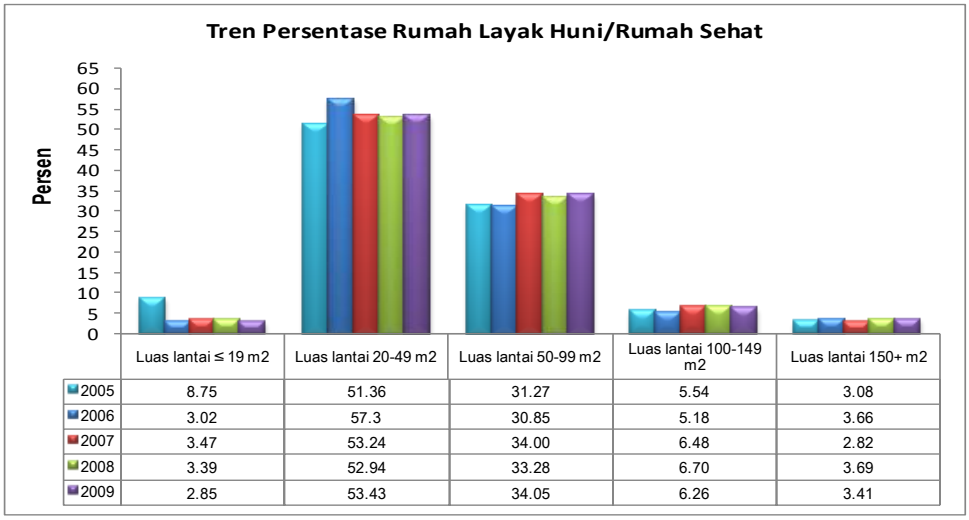

	Luas lantai ≤ 19 m2	Luas lantai 20-49 m2	Luas lantai 50-99 m2	Luas lantai 100-149 m2	Luas lantai 150+ m2
2005	8.75	51.36	31.27	5.54	3.08
2006	3.02	57.3	30.85	5.18	3.66
2007	3.47	53.24	34.00	6.48	2.82
2008	3.39	52.94	33.28	6.70	3.69
2009	2.85	53.43	34.05	6.26	3.41

Gambar 2.26 Grafik Presentase Rumah Layak Huni/Rumah Sehat

Sebagai bagian dari usaha pengentasan kemiskinan maka salah satu dari usaha pemerintah adalah langkah pembangunan rumah sehat sederhana sebanyak 5.000 unit yang tersebar di kabupaten/kota.

G. Rasio Kelistrikan

Rata-rata pertumbuhan permintaan tenaga listrik 5 tahun terakhir adalah 13 persen pertahun, dimana permintaan pada tahun 2005 sebesar 698,93 GWh dan menjadi 1,276.45 GWh pada tahun 2009. Permintaan terbesar adalah dari sektor rumah tangga 823,2 GWh (64,5 %), kemudian sektor bisnis sebesar 217,9 GWh (17,1 %), public 194,2 GWh (15,2 %), industry 41,2 GWh (3,2 %) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.72**.

Tabel 2.72
Persentase Konsumsi Listrik Aceh Tahun 2009

No	Jenis Pelanggan	GWh	%
1	Rumah Tangga	823.2	64.5
2	Bisnis	217.9	17.1
3	Publik	194.2	15.2
4	Industri	41.2	3.2
Jumlah		**1,276.5**	**100**

Sumber : PT. PLN Wilayah I Aceh Tahun 2010

Menurut BPS Tahun 2011, rasio desa yang belum berlistrik sebesar 2,86 persen dari seluruh desa yang ada di Aceh. Selanjutnya rasio elektrifikasi sebesar 95,84 persen, dengan total populasi 4.573.000 penduduk **(Tabel 2.73)**.

Tabel 2.73
Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Desa Berlistrik	Persentase Berlistrik
1	Aceh Barat	321	302	94,08
2	Aceh Barat Daya	132	132	100,00
3	Aceh Besar	604	600	99,34
4	Aceh Jaya	172	149	86,76
5	Aceh Selatan	248	241	97,18
6	Aceh Singkil	116	111	95,69
7	Aceh Tamiang	213	213	100,00
8	Aceh Tengah	268	262	97,76
9	Aceh Tenggara	385	369	95,84
10	Aceh Timur	511	510	99,80
11	Aceh Utara	852	840	98,59
12	Bener Meriah	232	208	89,66
13	Bireuen	609	609	100,00
14	Gayo Lues	136	118	86,76
15	Banda Aceh	90	90	100,00
16	Langsa	66	66	100,00
17	Lhokseumawe	68	68	100,00
18	Sabang	18	18	100,00
19	Nagan Raya	222	209	94,14
20	Pidie	727	727	100,00
21	Pidie Jaya	222	222	100,00
22	Simeulue	137	109	79,56
23	Subulussalam	74	66	89,19
TOTAL		**822**	**470**	**256,00**

Sumber: Aceh Dalam Angka, Tahun 2011

Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi untuk mengatasi defisit energi listrik di Aceh termasuk penyediaan energi terbaharukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen pada tahun 2015.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah perusahaan yang mengajukan proposal permohonan izin investasi baik jenis PMA maupun PMDN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan

yang telah mengajukan permohonan izin sejumlah 289 perusahaan yang terdiri dari PMA 121 buah dan PMDN 168 buah dan pada tahun 2010 menjadi 302 perusahaan yang terdiri dari PMA 134 buah dan PMDN 168 buah. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di Aceh sangat tinggi. Namun realisasi investasi masih rendah akibat terkendala oleh beberapa faktor diantaranya masih minimnya infrastruktur seperti ketersediaan sumber daya energi listrik, tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) serta permasalahan pertanahan (lahan usaha).

2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi di Aceh belum berkembang dengan baik. Hal ini diindikasikan oleh rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai USD 13.562.166.566,- yang dapat terealisasi hanya USD 2.304.311.771,- (17%), demikian juga dengan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari rencana investasi senilai Rp. 12.738.066.841.569,- yang terealisasi hanya Rp 6.303.047.045.730 (49,5%) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.74**.

Tabel 2.74
Realisasi Investasi PMA/PMDN
Tahun 2010

No	Jenis Invesatasi	Jumlah Investasi	Investasi		Persentase Realisasi Invesatasi
			Rencana	Realisasi	
1	Penanaman Modal Asing (PMA) USD	134	13.562.166.566	2.304.311.711	17,0
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) IDR	168	12.738.066.841.569	6.306.047.045.730	49,5

Sumber: Bappeda Aceh (data diolah), 2012

2.3.2.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN berupa tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (Indonesia). Dari sejumlah nilai investasi PMA yang direncanakan di Aceh, direncanakan akan mampu menyerap 745 orang tenaga kerja asing dan 43.280 orang tenaga kerja lokal (Indonesia), sedangkan realisasinya hanya 26 orang tenaga kerja asing (3,5%) dan 17.307 orang tenaga kerja lokal (40%). Sedangkan investasi PMDN direncanakan akan mampu menyerap tenaga kerja asing 2.062 orang dan 131.454 orang tenaga kerja lokal, sementara itu yang terealisasi hanya 10 orang tenaga kerja asing (0,5%) dan 53.942 orang tenaga kerja lokal (41%).

Rasio daya serap tenaga kerja yaitu perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Di Aceh rasio daya serap tenaga kerja pada PMA/PMDN yaitu 1 : 236 **(Tabel 2.75)**.

Tabel 2.75
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN
Tahun 2010

No	Jenis Invesatasi	Jumlah Investasi	Rencana Tenaga Kerja (Orang)		Realisasi Tenaga Kerja (Orang)		Persentase Realisasi Tenaga Kerja		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
			Asing	Indonesia/ Lokal	Asing	Indonesia/ Lokal	Asing	Lokal	
1	Penanaman Modal Asing (PMA) USD	134	745	43.280	26	17.307	3,50	40,0	1 : 236
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) IDR	168	2.062	131.454	10	53.942	0,50	41,0	
Total		**302**	**2.807**	**174.734**	**36**	**71.249**	**4,00**	**81,00**	

Sumber: Bappeda Aceh (data diolah), 2012

Beberapa faktor penyebab belum berkembangnya investasi di Aceh antara lain adalah: 1) belum optimalnya promosi investasi; 2) terbatasnya data ketersediaan lahan dan potensi investasi; 3) terbatasnya energi listrik; 4) lemahnya dukungan regulasi investasi dan 5) belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh harus melakukan beberapa hal: 1) peningkatan promosi investasi; 2) penyediaan data ketersediaan lahan dan potensi investasi; 3) peningkatan kapasitas energi listrik; 4) menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat menggambarkan pendapatan sebuah rumah tangga. Meningkatnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan meningkatnya pendapatannya **(Tabel 2.76)**. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita terhadap PDRB Aceh dengan Migas atas dasar harga berlaku tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari 32,29 persen pada tahun 2007 menjadi 40,86 persen pada tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengeluaran rumah tangga pada kurun waktu tersebut terutama pengeluaran untuk konsumsi makanan. Ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada jumlah pengeluarannya. Tingginya komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB menunjukkan ekonomi Aceh saat ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.76
Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Aceh Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011

NO	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Makanan	18,80	20,55	23,68	24,6	24,32
2	Bukan Makanan	13,49	12,85	14,81	15,63	16,54
Jumlah		**32,29**	**33,4**	**38,49**	**40,23**	**40,86**

Sumber: BPS, 2012

Pola konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun dapat memperlihatkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat bila porsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk non makanan meningkat. Sebaliknya, apabila sebagian besar pendapatan masyarakat dihabiskan untuk pengeluaran makanan maka dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif menurun.

Tabel 2.77 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum mengalami perbaikan, bahkan cenderung menurun yang tergambar dari pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk non makanan tahun 2007 (41,78%) cenderung menurun pada tahun 2011 (40,48%). Demikian sebaliknya, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan tahun 2007 (58,22%) cenderung meningkat pada tahun 2011 (59,52%). Perkembangan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat pada kurun waktu 2007 ke 2011 disebabkan tingginya angka inflasi yang bersumber dari harga-harga produk makanan.

Tabel 2.77
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2007 – 2011

JENIS PENGELUARAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Makanan (%)	58,22	61,53	61,52	61,15	59,52
Non Makanan (%)	41,78	38,47	38,48	38,85	40,48

Sumber: BPS, 2012

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh mengalami peningkatan dari 99,20 pada tahun 2008 menjadi 104,96 pada tahun 2011 (**Tabel 2.78)**. Sub sektor perkebunan rakyat memiliki NTP yang tertinggi dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Pada tahun 2008 NTP sub sektor perkebunan rakyat sebesar 103,50 meningkat menjadi 111,86 pada tahun 2011, selanjutnya NTP Sub sektor tanaman pangan merupakan nilai tertinggi kedua mengalami peningkatan yaitu dari 95,36 pada tahun 2008 menjadi 109,81 pada tahun 2011. Sementara itu, sub sektor peternakan merupakan NTP terendah dibandingkan dengan sub sektor lainnya, meskipun mengalami peningkatan dari 98,13 pada tahun 2008 menjadi 98,72 pada

tahun 2011 (BPS, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa sub sektor peternakan yang memiliki NTP lebih kecil dari 100 persen belum mampu meningkatkan nilai tukar petani. Oleh karena itu, sub sektor peternakan perlu mendapat perhatian dimasa yang akan datang.

Tabel 2.78
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Tahun 2009-2010

SUB SEKTOR	TAHUN				Rata-rata NTP Sub Sektor
	2008	2009	2010	2011	
Sub Sektor Tanaman Pangan	95,36	98,98	106,78	109,81	102,73
Sub Sektor Holtikultura	99,65	99,20	103,04	103,41	101,32
Sub Sektor Perkebunan Rakyat	103,50	101,05	113,32	111,86	107,43
Sub Sektor Peternakan	98,13	98,55	99,08	98,72	98,62
Sub Sektor Perikanan	99,36	98,98	101,54	101	100,22
Rata-rata	**99,2**	**99,35**	**104,75**	**104,96**	**102,07**

Sumber: BPS, 2012

2.4.1.3. Produktivitas Pertanian

A. Sub Sektor Tanaman Pangan

Produksi padi Aceh mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 1.533.368 Ton meningkat menjadi 1.772.961 ton pada tahun 2011. Demikian juga komoditas jagung mengalami peningkatan, sedangkan komoditas kedelai mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 63.436 ton menjadi 50.007 ton pada tahun 2011. Menurunnya produksi kedelai pada tahun 2010 dan 2011 disebabkan oleh berkurangnya luas tanam kedelai akibat tingginya curah hujan **(Tabel 2.79)**.

Tabel 2.79
Produksi Komoditas Pangan di Aceh
Tahun 2008-2011

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)				Produksi (Ton)			
		2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
1	Padi	360,717	359,375	352,281	380,686	1,533,368	1,556,859	1,582,391	1,772,961
2	Jagung	36,774	39,731	43,885	41,853	125,155	137,910	167,091	168,860
3	Kedelai	14,743	45,110	37,469	35,370	19,029	63,436	53,346	50,007

Sumber: Bappeda Aceh, 2012 (data diolah)

Produktivitas komoditi pangan (padi dan jagung) mengalami peningkatan, namun produktivitas kedelai tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, produktivitas padi Aceh (4,66 Ton/Ha) dan jagung (4,03 Ton/Ha) masih dibawah rata-rata nasional untuk produktivitas padi (4,90 Ton/Ha) dan jagung (4,20 Ton/Ha), sedangkan produktivitas kedelai (1,41 Ton/Ha) sudah diatas rata-rata nasional (1,30 Ton/Ha) sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.80**. Rendahnya produktivitas komoditi pangan Aceh disebabkan antara lain: 1)

belum memadai infrastruktur pertanian seperti irigasi, lining, jalan usaha tani; 2) sumberdaya petani dan penyuluh masih rendah; 3) terbatasnya sentuhan inovasi teknologi (pupuk, benih, penggunaan alat mesin pertanian yang tepat guna); dan 4) pengendalian hama penyakit yang belum terpadu.

Tabel 2.80
Perbandingan Produktivitas Komoditas Pangan Aceh dengan Nasional Tahun 2008-2011

No	Komoditi	Produktivitas Aceh (Ton/Ha)						
		Aceh				Nasional		
		2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Padi	4,25	2,33	4,49	4,66	4,9	5	4,90
2	Jagung	3,40	3,47	3,81	4,03	4,2	4,4	4,20
3	Kedelai	1,29	1,41	1,42	1,41	1,30	1,30	1,30

Sumber: Bappeda Aceh, 2012 (data diolah)

Untuk tercapainya target yang diinginkan sebagaimana disebutkan di atas perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut antara lain: 1) Peningkatan indeks tanam melalui optimalisasi penggunaan lahan dan penyediaan agro input; 2) Peningkatan luas tanam (termasuk integrasi dengan tanaman perkebunan) dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia; 3) Perbaikan sarana dan prasarana penunjang; 4) Peningkatan Fungsi Penyuluhan pertanian; 5) Peningkatan pengkajian teknologi dan penyediaan serta penggunaan varitas baru.

B. Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian nasional dan daerah, karena memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat, penyokong agroindustri nasional, serta ikut menambah cadangan devisa negara. Areal perkebunan di Aceh sampai dengan tahun 2011 adalah seluas 981.197 ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 712.713 ha (78,95%) dan perkebunan besar seluas 206.350 ha (21,03%), dengan jumlah komoditas yang diusahakan sebanyak 23 jenis. Berdasarkan jenis komoditas, kelapa sawit masih mendominasi luas areal perkebunan, yaitu 365.995 Ha (37,31%), sedangkan komoditas yang terkecil diusahakan adalah tanaman jarak hanya seluas 45 ha.

Berdasarkan kondisi tanaman, seluas 637.585 ha dari total luas areal tersebut merupakan tanaman menghasilkan yang terdiri dari perkebunan rakyat (481.732 ha) dan perkebunan besar (155.853 ha). Sedangkan sisanya seluas 252.110 ha merupakan tanaman belum menghasilkan yang terdiri dari perkebunan rakyat (222.609 ha) dan perkebunan besar (29.501 ha), serta seluas 118.957 ha merupakan tanaman tua dan telah rusak yang terdiri dari perkebunan rakyat (97.960 ha) dan perkebunan besar (20.995 ha).

Secara umum untuk perkebunan rakyat jumlah luas lahan masing-masing komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2007 (**Tabel 2.81**). Kelapa sawit merupakan komoditas yang mengalami peningkatan luas area paling tinggi yaitu sebesar 86.853 ha (89,98%) dari 96.515 ha (2007) menjadi 183.368 (2011), sedangkan kakao mengalami penambahan sebanyak 41.557 ha (89,51%) dari 46.425 ha (2007) menjadi 87.982 ha (2011). Pertumbuhan luas areal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan tren tanaman dikalangan petani akibat dari tingginya harga maupun permintaan pasar terhadap dua jenis komoditi ini.

Tabel 2.81
Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat
Tahun 2007-2011

No	Komoditas	Luas Tanaman (Ha)					Produksi (Ton)				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kelapa Sawit	96,515	113,734	140,441	173,217	183,368	616,413	663,790	998,982	797,049	1,081,142
2	Karet	101,988	104,777	109,104	112,214	122,660	56,113	61,580	63,603	61,509	69,971
3	Kopi	112,113	111,854	125,913	122,527	120,702	48,080	47,811	50,190	47,805	53,949
4	Kakao	46,425	71,873	75,130	81,533	87,982	17,705	26,697	26,466	29,677	37,249
5	Kelapa	112,289	105,757	103,960	103,865	107,471	65,603	54,432	58,008	67,059	63,767
6	Cengkeh	22,165	22,187	22,117	22,609	22,071	2,114	1,949	714	1,505	1,435
7	Pala	17,774	18,229	20,256	20,521	21,521	5,706	4,495	5,459	5,785	5,261
8	Pinang	35,320	35,684	37,895	42,057	42,183	9,158	14,982	22,396	28,657	28,077
9	Lada	1,020	974	1,022	921	896	252	182	217	205	261
10	Nilam	1,551	1,228	2,301	2,866	3,859	118	156	142	214	253
Total		**547,160**	**586,297**	**638,139**	**682,330**	**712,713**	**831,262**	**876,074**	**1,226,177**	**1,039,465**	**1,341,365**

Sumber: Bappeda Aceh, 2012 (data diolah)

Selain mengalami peningkatan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan jumlah luas areal diantaranya yang cukup mencolok yaitu kelapa yang mengalami penurunan seluas 4.818 ha (4,29%) dari 112.289 ha (2007) menjadi 107.471 ha (2011), sedangkan Lada mengalami penurunan sebanyak 124 ha (12%) dari 1.020 ha (2007) menjadi 896 ha (2011). Kondisi ini disebabkan karena Kelapa merupakan tanaman tahunan akibat banyaknya tanaman tua disamping itu harga pasar rendah sehingga petani melakukan konversi lahan ke tanaman lain dari tanaman tersebut menjadi perkebunan dengan jenis komoditi yang lebih menguntungkan (misal: kelapa sawit dan karet) diperkirakan juga menjadi penyebab turunnya luas areal tanam beberapa komoditas.

Pengembangan sektor perkebunan memberikan kontribusi cukup penting bagi nilai tambah petani, hal ini terlihat dari jumlah produksi yang dihasilkan pada sektor tersebut semakin meningkat. Komoditas yang banyak permintaan pasarnya dan harga ditingkat pasar tinggi sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dari suatu komoditas. Secara umum dapat dilihat komoditi nilam yang paling tinggi tingkat pertumbuhan produksinya dalam kurun lima tahun terakhir yaitu sebesar 118 ton (2007) menjadi 253 ton atau meningkat sebesar 114 persen ditahun 2011, dan komoditi kakao menempati

urutan kedua dimana produksinya sebesar 17.705 ton pada tahun 2007 menjadi 37.249 ton atau meningkat sebesar 110 persen pada tahun 2011. Selanjutnya komoditas kelapa sawit juga mengalami kenaikan sebesar 75,39% yaitu dari 616.413 ton (TBS) pada tahun 2007 menjadi 1.081.142 ton pada tahun 2011.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini 2007 -2011 ada beberapa komoditas perkebunan yang mengalami penurunan drastis dalam produksi, hal ini dapat dilihat dari data bahwa komoditas cengkeh sebesar 1.435 ton atau menurun sebanyak 67 persen ditahun 2011 jika dibandingkan dengan hasil produksi tahun 2007 yaitu sebesar 2.114 Ton (Tabel 2.81). Selain itu kelapa merupakan salah satu komoditi yang mengalami penurunan hasil produksi yaitu 65.603 ton pada tahun 2007 menjadi 63.767 ton pada tahun 2011 atau turun sebesar 2,8 persen Permasalahan penurunan produksi ini diakibatkan oleh usia tanaman yang sudah tua dan rusak yang sudah waktunya dilakukan peremajaan atau penanaman kembali (*replanting*). Selain itu juga faktor harga pasaran komoditas yang turun sehingga membuat petani kurang bergairah untuk melakukan pemeliharaan tanaman tersebut. Produktivitas perkebunan rakyat Aceh pada umumnya masih dibawah produktivitas nasional, kecuali untuk komoditas kelapa sawit yang berada di atas rata-rata nasional seperti yang disajikan pada **Tabel 2.82**.

Tabel 2.82
Perbandingan Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat Aceh dengan Nasional Tahun 2007-2011

No	Komoditas	Produktivitas (Ton/Ha) Aceh					Produktivitas (Ton/Ha) Nasional
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kelapa Sawit	6,39	5,84	7,11	4,60	5,90	2,54
2	Karet	0,55	0,59	0,58	0,55	0,57	0,77
3	Kopi	0,43	0,43	0,40	0,39	0,45	
4	Kakao	0,38	0,37	0,35	0,36	0,42	0,52
5	Kelapa	0,58	0,51	0,56	0,65	0,59	
6	Cengkeh	0,10	0,09	0,03	0,07	0,07	
7	Pala	0,32	0,25	0,27	0,28	0,24	
8	Pinang	0,54	0,42	0,59	0,68	0,67	
9	Lada	0,25	0,19	0,21	0,22	0,29	
10	Nilam	0,08	0,13	0,06	0,07	0,07	

Sumber: Bappeda Aceh, 2012 (data diolah)

Permasalahan perkebunan rakyat adalah rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) kurangnya pemeliharaan; 2) penggunaan bibit yang tidak direkomendasikan (bersertifikat); 3) rendahnya sumberdaya petani terkait teknologi pertanian; dan 4) belum intensifnya penyuluhan. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) meningkatkan pemeliharaan dan melaksanakan *replanting*; 2) penggunaan bibit unggul (bersertifikat); 3) peningkatan SDM petani dan penyuluh; dan 4) pengendalian hama dan penyakit yang terpadu.

C. Sub Sektor Peternakan

Selama periode 2006-2008 secara umum perkembangan populasi ternak mengalami peningkatan terkecuali untuk kerbau dan ayam buras. hal ini disebabkan terjadinya kasus flu burung yang menyerang ternak unggas dan penyakit SE (ngorok) pada ternak kerbau. Namun pada tahun 2009-2011 populasi ternak telah meningkat kembali seiring dengan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit yang dilakukan secara intensif. Ditinjau dari persentase populasi ternak, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik (ternak unggas) masih mendominasi jumlah populasi ternak sebesar 84,94 persen, sementara populasi ternak besar dan kecil lainnya hanya sebesar 15,06 persen (**Tabel. 2.83**).

Tabel 2.83
Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Tahun 2008-2011

No	JENIS TERNAK	TAHUN					Persentase Populasi
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Sapi Perah	33	32	35	41	37	0,00
2	Sapi Potong	639.828	641.093	669.996	671.086	701.284	4,08
3	Kerbau	297.136	280.662	290.772	297.212	303.156	1,82
4	Kuda	3.117	3.243	3.362	3.366	3.433	0,02
5	Kambing	675.879	697.426	807.506	746.475	768.869	5,48
6	Domba	134.577	157.081	193.852	164.251	168.994	1,38
7	Babi	227	333	302	414	422	0,00
8	Ayam Buras	11.125.945	8.904.869	7.999.580	7.799.480	8.189.454	49,84
9	Ayam Ras Petelur	137.950	181.887	232.364	306.380	327.827	2,28
10	Ayam Ras Pedaging	1.399.808	1.346.308	1.836.413	3.011.946	3.222.782	16,15
11	Itik	2.594.754	2.596.927	2.709.545	2.670.611	2.830.847	18,95
Total		**17.009.254**	**14.809.861**	**14.743.727**	**15.671.262**	**17.913.899**	

Sumber: Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2012

Usaha peternakan secara umum sampai saat ini masih merupakan usaha sampingan dari sistem usaha pertanian. Berdasarkan hasil pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2011 terdapat 164.123 rumah tangga yang mengusahakan peternakan sapi dan kerbau. Usaha peternakan masih merupakan usaha rumah tangga dengan skala kepemilikan 1 – 4 ekor sapi/kerbau sehingga produksi dan produktifitas ternaknya masih rendah. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor peternakan tahun 2011 sebesar 98,72 yang berarti usaha peternakan di Aceh belum mampu menutupi kebutuhan hidupnya. Hal ini menggambarkan pengelolaan usaha peternak belum efisien akibat mahalnya biaya produksi.

Produksi daging tahun 2011 sebanyak 27.237.677 kg dengan konsumsi 27.663.093 kg atau setara 6,018 kg/kapita/tahun. Kekurangan produksi daging sebesar 428.416 kg merupakan pemasukan daging dari luar provinsi. Disamping itu terdapat juga pengeluaran ternak sapi yang tercatat sebanyak 652 ekor dan kerbau tercatat sebanyak 207 ekor atau setara 121.119 kg daging serta pengeluaran tidak tercatat.

Produksi telur ayam ras tahun 2011 sebanyak 2.753.747 kg dengan konsumsi 25.566.247 kg atau setara 5,561 kg/kapita/tahun. Kekurangan produksi telur sebanyak

22.812.500 kg disuplai dari luar provinsi. Berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) III Tahun 1998, target konsumsi daging nasional adalah 10,3 kg/kapita/tahun sedangkan telur 6,5 kg/kapita/tahun. Konsumsi daging dan telur Aceh saat ini masih di bawah target konsumsi nasional, yaitu konsumsi daging masih kurang sebesar 4,145 kg/kapita/tahun dan konsumsi telur masih kurang sebesar 0,939 kg/kapita/tahun. Kekurangan tersebut setara dengan 19.054.689 kg daging dan 4.316.611 kg telur.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari hasil produksi dalam daerah, Aceh harus memproduksi 19.483.105 kg daging dan 27.129.111 kg telur. Dengan demikian, Aceh dapat berpredikat swasembada daging dan telur. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai dan mempertahankan swasembada daging dan telur dalam 5 tahun ke depan akan difokuskan pada pengembangan Kawasan Budidaya Sapi Potong, Inseminasi Buatan serta Kawasan Ayam Ras Petelur. Dengan upaya tersebut, diharapkan usaha peternakan dapat meningkatkan NTP sehingga peternak dapat lebih sejahtera.

Permasalahan utama di bidang peternakan antara lain: 1) rendahnya populasi, produksi dan produktivitas ternak berkaitan erat dengan terbatasnya ketersediaan dan rendahnya mutu bibit ternak serta pola pengembangan yang belum berorientasi pada bisnis; 2) terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); 3) jumlah serta kualitas sumber daya petugas pelaksanaan IB yang masih terbatas; dan 4) jumlah populasi induk betina produktif yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan IB. Selanjutnya, permasalahan pengembangan ternak unggas adalah : 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal.

Dalam rangka pencapaian swasembada daging, peningkatan populasi ternak besar dan kecil menjadi fokus pembangunan di bidang peternakan. Solusi yang diproritaskan dalam pencapaian swasembada daging melalui peningkatan produksi dan produktivitas ternak dengan tahapan; 1) Peningkatan peran Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) untuk pelaksanaan kawin suntik (IB) dalam peningkatan populasi dan produksi; 2) Optimalisasi fungsi BPTU sapi Aceh Indrapuri; 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular; 4) Pengembangan kawasan peternakan yang difokuskan pada suatu kawasan yang potensial dan sesuai karakteristik daerah; 5) Pelestarian dan pengembangan plasmanutfah sapi Aceh yang berlokasi di Pulau Aceh Kabupaten Aceh Besar dan Pulau Raya Kabupaten Aceh Jaya yang didukung oleh regulasi; 6) Peningkatan jumlah dan kapasitas petugas peternakan serta peternak; dan 7) Pengembangan kelembagaan petani peternak.

D. Sub Sektor Perikanan

Aceh memiliki garis pantai yang sangat panjang 1.677 km yang mengelilingi pulau Sumatera, ditambah 1.022 km garis pantai pulau-pulau kecil. Kondisi ini menggambarkan besarnya potensi kelautan baik berupa mineral maupun luasan zona penangkapan ikan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun) penduduk Aceh terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini terlihat pada tahun 2010 (38 kg/kapita/tahun), 2011 (40,28 kg/kapita/tahun, dan pada tahun 2012 konsumsi ikan ditargetkan akan mencapai 41 kg/kapita/tahun dimana angka konsumsi ikan perkapita di Aceh selama ini berada di atas rata-rata nasional (32,70 kg/kapita/tahun).

Produksi perikanan selama periode tahun 2005 – 2011 terus mengalami peningkatan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, sebagaimana tergambar pada **Tabel 2.84**. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, selar, tenggiri dan layang disamping itu juga terdapat ikan-ikan ekonomis lainnya seperti ikan kerapu, kakap, bawal putih, bawal hitam dan lobster. Produksi perikanan budidaya air payau didominasi oleh kelompok udang, kepiting dan bandeng, sedangkan budidaya laut didominasi oleh ikan kerapu, bawal dan kakap sementara budidaya air tawar didominasi oleh ikan nila, mujair, mas, lele dan udang galah.

Tabel 2.84
Produksi Perikanan Tahun 2005 – 2011

KATEGORI	TAHUN						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Perikanan Tangkap	***82.481,7***	***126.383,8***	***130.369,3***	***131.460,1***	***141.619,6***	***143.909,6***	***145.970,1***
- Laut	81.162,7	124.964,1	129.730,9	130.271,4	140.408,1	142.697,4	143.680,2
- Perairan Umum	1.319,0	1.419,7	638,4	1.188,7	1.211,5	1.212,2	2.289,9
Perikanan Budidaya	***26.847,0***	***32.265,0***	***35.665,6***	***37.636,1***	***38.212,3***	***44.604,1***	***37.273,5***
- Budidaya Tambak	14.848,5	19.596,0	26.450,2	25.748,8	25.771,2	30.936,7	26.286,4
- Budidaya Kolam	8.727,9	9.016,3	6.305,2	9.643,1	9.897,5	11.909,3	9.224,4
- Budidaya Karamba	347,5	29,2	4,1	128,2	124,1	116,6	265,6
- Budidaya Sawah	2.923,1	3.263,3	2.426,5	1.827,2	2.058,1	1.019,4	1.089,9
- Budidaya Jaring Apung	-	360,2	479,6	288,8	320,9	581,5	239,2
- Budidaya Laut	-	-	-	-	40,5	40,6	168,0
Total	**109.328,7**	**158.648,8**	**166.034,9**	**169.096,2**	**179.831,9**	**188.513,7**	**183.243,6**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011

Luas usaha budidaya perikanan di Aceh pada tahun 2007 seluas 46.406 ha meningkat menjadi 55.099 ha pada tahun 2011. Klasifikasi luas usaha budidaya perikanan untuk masing-masing jenis dapat dilihat pada **Tabel 2.85**.

Tabel 2.85
Luas Usaha Budidaya Perikanan Tahun 2007 – 2011

No	Klasifikasi	Luas Areal (Ha)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Budidaya Tambak	40,354.5	47,140.4	50,254.5	51,522.1	49,271.1
2.	Budidaya Kolam	3,444.5	3,675.3	3,587.0	3,780.0	3,495.2
3.	Budidaya Sawah	2,606.9	2,606.9	2,606.9	2,606.9	2,312.6
4.	Budidaya Keramba	0.2	0.2	0.8	0.5	20.0
TOTAL		46,406	53,423	56,449	57,910	55,099
Pertumbuhan (%)			15.12	5.66	2.59	-4.85

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011

Jumlah armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Aceh adalah kapal motor sebanyak 8.648 unit dengan ukuran dan persentase yang digunakan adalah lebih kecil dari 5 GT (74,98%), diikuti kapal motor berukuran 5-10 GT (13,54%), 10-20 GT (4,20%), 20-30 GT (4,95%), 30-50 GT (2,22%) dan 50-100 GT (0,12%). Disamping itu, Prasarana perikanan seperti Tempat Pendaratan Ikan (TPI) mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebanyak 31 unit meningkat menjadi 520 unit pada tahun 2011. Selanjutnya, fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) juga bertambah yaitu sebanyak delapan unit, untuk fasilitas *Cold Storage* bertambah lima unit, sedangkan jumlah Pabrik Es mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada pabrik es di beberapa Kab/Kota yang sudah tidak berfungsi lagi **(Tabel 2.86)**.

Tabel 2.86
Jumlah Prasarana Perikanan di Aceh Tahun 2007 – 2011

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas (unit)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pelabuhan Perikanan	18	18	26	26	26
2.	Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	31	31	31	520 *	520 *
3.	Cold Storage	8	8	8	13	13
4.	Pabrik Es	40	40	40	20	20
5.	Hatchery	143	143	143	143	143
6.	Balai Benih Ikan (BBI)	17	17	17	23	25
Total		**257**	**257**	**265**	**760**	**762**

** : Data hasil survey terbaru.*
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2011

Luas perairan laut seluas 295.370 km^2 terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas 56.563 km^2 dan zona ekslusif disekitar perairan Aceh seluas 238.807 km^2. Potensi lestari atau *maximum sustainable yield* (MSY) perairan teritorial dan perairan kepulauan sebesar 110.045 ton dan ZEE sebesar 162.655 ton, jadi secara total potensi lestari perairan keautan Aceh adalah sebesar 271.707 ton. Berdasarkan potensi tersebut, sektor perikanan Aceh lebih cenderung dikembangkan ke arah perikanan tangkap, karena

mempunyai potensi yang luar biasa. Tingkat pemanfaatan (jumlah produksi) tahun 2011 dari data tersebut diatas hanya sekitar 53,72 persen dari potensi yang tersedia, berarti ada 46,28 persen lagi yang belum dapat dioptimalkan. Sedang potensi untuk perikanan budidaya lebih cenderung kepada rehabilitasi dan pemeliharaan dan peningkatan produksi.

Untuk memanfatkan seluruh potensi yang tersedia ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: 1) minimnya penerapan dan implementasi ilmu pengetahuan; 2) belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi kelautan dan perikanan; 3) belum berjalan secara terpadu pembangunan kelautan dan perikanan dengan berbagai sector; 4) belum optimalnya pola pemberdayaan dan manajemen usaha nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan; 5) belum optimalnya implementasi dan penerapan manajemen mutu hasil perikanan; 6) belum optimalnya fungsi kelembagaan *stake holders* kelautan dan perikanan; 7) belum adanya pedoman umum dan tata ruang wilayah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan 8) kurangnya pengawasan dan pola penanganan bencana secara berkelanjutan di perairan dan kawasan pesisir.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang diuraikan sebelumnya beberapa solusi yang harus dilaksanakan ke depan, yaitu: 1) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dalam pengelolalan perikanan tangkap; 2) membangun berbagai fasilitas pendukung seperti normalisasi saluran tambak dan rehabilitasi tambak-tambak rakyat; 3) fungsionalisasi pelabuhan perikanan di Aceh yaitu pelabuhan perikanan Lampulo, pelabuhan perikanan Idi serta pelabuhan Labuhan Haji; 4) memperkuat SDM dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya; 5) penguatan penyuluh perikanan untuk mendampingi nelayan dan pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi perikanan; 6) adanya regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan perikanan dalam rangka pencegahan praktek *illegal fishing;* 7) membuka akses permodalan bagi nelayan/pembudidaya dengan lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya; 8) mengoptimalkan peran balai benih ikan dalam rangka penyediaan benih unggul dengan biaya murah; 9) pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang didukung fasilitas industri pengolahan hasil perikanan dengan memperkuat Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil dalam rangka peningkatan nilai tambah dan memenuhi standar mutu hasil perikanan.

E. Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan Aceh 2005-2009 cenderung semakin baik dan kondusif, walaupun kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi ketahanan pangan yang cenderung semakin baik, ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan berikut: a) beberapa produksi komoditas pangan penting mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2005, dan khusus beras mulai tahun 2008 sudah mencapai swasembada; b) harga-harga pangan lebih stabil kecuali harga daging sapi baik secara umum

maupun pada saat menjelang hari-hari besar nasional pada saat menjelang Puasa, Idul Fitri dan Idul Adha; dan c) proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun.

Produksi komoditas pangan penting selama lima tahun telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Berdasarkan hasil analisis NBM tahun 2011, bahwa rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita perhari untuk energi mencapai 3.334,28 kkal/kap/hari dan protein 92,42 gram/kap/hari, sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kapita/hari **(Tabel 2.87)**.

Tabel 2.87
Jumlah Ketersediaan Eergi, Protein dan Lemak Menurut Kelompok Bahan Makanan di Aceh Tahun 2011

No	Kelompok Bahan Makanan	(Kkal/kap/hari)	(gr/kap/hari)	Lemak (gr/kap/hari)
1	Padi-padian	2.198,10	54,21	10,01
2	Makanan Berpati	38,99	0,27	0,08
3	Gula	249,31	0,36	1,14
4	Needs	193,03	12,96	12,56
5	Buah-buahan	54,94	0,64	0,39
6	Sayur-sayuran	58,31	3,68	0,99
7	Daging	20,02	1,83	1,35
8	Telur	38,13	2,9	2,76
9	Susu	14,50	0,76	0,83
10	Ikan	80,83	14,68	1,75
11	Minyak	388,11	0,13	43,22
Total		**3.334,27**	**92,42**	**75,08**

Sumber: BKP-Luh Aceh, 2012 (data diolah)

Jumlah konsumsi pangan dalam bentuk total energi masyarakat Aceh Tahun 2010 mencapai 2.139 kkal/kap/hari, yang berarti telah memenuhi 107% dari sasaran angka kecukupan energi yang ditetapkan dalam susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional atau berdasarkan hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG VIII) Tahun 2004, yaitu 2.000 kkal/kap/hari. Proporsi energy yang di konsumsi tersebut masing-masing bersumber dari padi-padian 1375,3 kkal/kap/hari, umbi-umbian 19,8 kkal/kap/hari, pangan hewani 168,1 kkal/kap/hari, buah biji berminyak 77,6 kkal/kap/hari, minyak dan lemak 247,1 kkal/kap/hari, kacang-kacangan 28,6 kkal/kap/hari, gula 107,1 kkal/kap/hari serta sayur dan buah 74,5 kkal/kap/hari.

Walaupun jumlah konsumsi energinya melebihi angka kecukupan energi, namun secara kualitas masih rendah, hal ini tercermin dari skor mutu pangan yang baru mencapai 72,3 dari sasaran 100, hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, seimbang dan bergizi, karena didominasi oleh kelompok padi-padian sementara itu kelompok pangan lainnya seperti pangan hewani serta kelompok sayur dan buah proporsi masih dibawah sasaran skor PPH.

Jika dilihat dari sisi kerawanan Pangan, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Aceh Tahun 2010, menunjukkan bahwa dari 251 kecamatan yang dianalisis, terdapat 133 kecamatan atau sekitar 52,99 persen rentan terhadap kerawanan pangan. Penyebab utama kerawanan pangan prioritas 1, 2 dan 3 yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus *underweight* pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda empat, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan serealia masih meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.88**.

Tabel 2.88
Sebaran Kecamatan yang masuk dalam Daerah Rawan Pangan Prioritas 1 s/d 6 Per Kabupaten Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan						Jumlah
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	
1	Simeulue	-	-	-	8	-	-	8
2	Aceh Singkil	-	-	8	2	-	-	10
3	Aceh Selatan	-	-	-	1	-	14	15
4	Aceh Tenggara	3	-	-	1	12	-	16
5	Aceh Timur	14	-	-	3	7	-	24
6	Aceh Tengah	7	-	-	-	7	-	14
7	Aceh Barat	6	-	-	6	-	-	12
8	Aceh Besar	3	1	-	5	14	-	23
9	Pidie	23	1	-	-	-	-	24
10	Bireuen	1	-	-	-	16	-	17
11	Aceh Utara	26	-	-	-	1	-	27
12	Aceh Barat Daya	7	-	-	-	1	-	8
13	Gayo Lues	-	-	11	-	-	-	11
14	Aceh Tamiang	4	-	-	3	7	-	14
15	Nagan Raya	5	-	3	-	-	-	8
16	Aceh Jaya	-	-	-	6	-	-	6
17	Pidie Jaya	5	1	-	1	-	-	7
18	Bener Meriah	4	-	-	3	-	-	7
Aceh		**108**	**3**	**22**	**39**	**65**	**14**	**251**

Sumber: BKP-LUH Aceh, 2010 (diolah)

Ket: Rentan (Rawan Pangan);
- Prioritas 1 : Sangat Rentan
- Prioritas 2 : Rentan
- Prioritas 3 : Kurang rentan
- Prioritas 4 : Kurang Tahan
- Prioritas 5 : Tahan
- Prioritas 6 : Sangat Tahan

Permasalahan utama di bidang ketahanan pangan antara lain adalah: 1) belum lancarnya distribusi pangan; 2) harga pangan yang tidak stabil; 3) dukungan regulasi tentang ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota belum tersedia; 4) kurangnya data dan informasi yang akurat; 5) rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung; dan 6) rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan pangan.

Belum lancarnya distribusi pangan disebabkan oleh: 1) dukungan infrastruktur sarana jalan, dan jembatan untuk memperlancar distribusi pangan; 2) sarana transportasi yang belum memadai; 3) sistem transportasi, yakni sistem transportasi yang masih kurang efektif

dan efisien; 4) kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tempat tujuan; 5) masalah keamanan dan pungutan liar. Harga pangan yang tidak stabil disebabkan oleh: 1) kelangkaan pangan disuatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan; 2) peningkatan biaya distribusi pangan; dan 3) rendahnya produktivitas pangan.

Dukungan regulasi tentang ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota belum tersedia tergambar dari belum tersusunnya payung hukum yang dapat mengkoordinasikan pengelolaan cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota (lembaga di daerah yang akan mengelola cadangan pangan, siapa yang menetapkan kebutuhan cadangan pangan, dan berapa besaran volume cadangan akan dikelola oleh kabupaten/kota) dan alokasi anggaran untuk pengelolaan cadangan pangan di kabupaten/kota.

Kurangnya data dan informasi yang akurat disebabkan oleh tidak tersedianya pengelola data (SDM dan kelembagaan) yang terkait dengan ketersediaan pangan, harga pangan, dan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota/desa untuk dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan distribusi, stabilisasi harga dan pasokan pangan serta kondisi cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota/masyarakat. Selanjutnya, rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung tergambar dari terbatasnya sarana dan prasarana transportasi distribusi pangan dari sentra produksi ke pasar dan konsumen. Rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan disebabkan oleh: 1) kemampuan masyarakat yang relatif rendah; 2) kebiasaan makan; 3) ketersediaan pangan ditingkat lokal; 3) pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap gizi dan kesehatan relatif rendah.

Untuk mengatasi permasalahan dibidang ketahanan pangan Pemerintah Aceh telah melakukan upaya antara lain: 1) pengembangan desa mandiri pangan; 2) penanganan daerah rawan pangan; 3) pemberdayaan lumbung pangan masyarakat; 4) penguatan lembaga ekonomi pedesaan (LUEP); 5) penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM); dan 6) percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan harga, kualitas dan distribusi pangan, Pemerintah Aceh perlu melakukan: 1) koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang terkait dalam stabilisasi harga, pasokan pangan dan cadangan pangan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri; 2) pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan pasokan pangan serta harga yang terjangkau; 3) pemantauan dan pengembangan terhadap cadangan pangan masyarakat dan pemerintah; dan 4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM).

F. Penyuluhan

Tenaga Penyuluh Pertanian (PPL) di Aceh saat ini sebanyak 2.837 orang yang terdiri dari 1.016 orang PNS dan 1.821 orang Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB) yang tersebar di 23 Kab/Kota. Ketersediaan penyuluh perikanan pada 15 Kabupaten/Kota di Aceh sebanyak 103 orang, yang terbanyak terdapat pada kabupaten Aceh Utara yaitu 27 orang diikuti Kabupaten Bireuen 25 orang dan yang terendah di Kabupaten Simeulue hanya 1 orang. Tenaga penyuluh kehutanan sebanyak 79 orang yang tersebar di Propinsi dan 13 Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penyuluh pertanian PNS-THL, penyuluh kehutanan, penyuluh perikanan, BP3K per Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2012 dapat dilihat pada **Tabel 2.89**.

Tabel 2.89
Jumlah Penyuluh Pertanian PNS-THL, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Perikanan, BPP, Kec, Per-Kab/Kota Serta Penyuluh PNS Provinsi Tahun 2012 (Per Juli)

No	Kabupaten/Kota	PNS			THL-TB	BPP	Kecamatan
		Penyuluh Pertanian	Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Perikanan			
I	Provinsi	54	9				
II	Kabupaten/Kota	962	70	103	1821	253	274
1	Kota Banda Aceh	8		2	43	3	9
2	Aceh Besar	99	9	7	178	17	23
3	Pidie	62	4	3	206	23	21
4	Pidie Jaya	19	3	2	100	8	8
5	Bireuen	112	12	25	123	17	17
6	Aceh Tengah	54	8	5	115	14	14
7	Aceh Utara	111	9	27	125	22	27
8	Kota Lhokseumawe	3	-	2	14	2	4
9	Aceh Timur	87	-	9	131	20	24
10	Kota Langsa	17	-	2	21	3	5
11	Aceh Tamiang	34	-	3	60	11	12
12	Aceh Tenggara	59	-	9	132	16	16
13	Gayo Lues	14	1	3	83	11	11
14	Aceh Jaya	17	4	-	34	6	6
15	Aceh Barat	58	-	-	72	13	12
16	Nagan Raya	43	4	-	53	8	8
17	Simeulue	14	-	1	35	8	8
18	Aceh Barat Daya	22	2	-	61	6	9
19	Aceh Selatan	50	-	-	134	16	16
20	Aceh Singkil	26	-	-	41	12	10
21	Kota Subulussalam	5	7	-	0	5	5
22	Kota Sabang	11	-	-	3	2	2
23	Bener Meriah	37	7	3	57	10	7
Jumlah		1016	79	103	1821	253	274

Sumber: BKP-Luh Aceh, 2012

Permasalahan utama dalam hal penyuluhan adalah: 1) penempatan tenaga penyuluh tidak sesuai dengan profesinya; 2) belum maksimalnya koordinasi antar dinas yang menangani urusan penyuluhan dengan lembaga penyuluhan di Kabupaten/Kota; 3) penempatan tenaga penyuluh tidak sesuai proporsi berdasarkan potensi; 4) banyaknya tenaga penyuluh senior banyak beralih status dari fungsional ke struktural dan juga mulai memasuki masa usia pensiun; 5) belum optimalnya proses pendampingan dan pembinaan

kelompok-kelompok tani; 6) kurangnya kapasitas penyuluh; 7) terbatasnya jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 8) belum tersedianya pos penyuluh; dan 9) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyuluhan.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kepenyuluhan antara lain: 1) penempatan tenaga penyuluh sesuai dengan profesinya; 2) peningkatan koordinasi antar dinas yang menangani urusan penyuluhan di Kabupaten/Kota; 3) penempatan tenaga penyuluh perikanan sesuai proporsi; 4) penyediaan regulasi untuk mempertahankan status tenaga penyuluh sebagai tenaga fungsional; 5) mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan kelompok-kelompok tani; 6) peningkatan kapasitas penyuluh; 7) pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan pos penyuluh yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2.4.1.4. Produktivitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja per sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun, dari konteks produktivitas tenaga kerja per sektor, sektor pertanian memiliki nilai tambah yang sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan memperhitungkan migas, produktivitas tenaga kerja untuk sektor pertanian adalah 2,42 persen (Rp.10.941.135) di tahun 2010 dan turun menjadi 2,36 persen (Rp. 10.409.419) pada tahun 2011 **(Tabel 2.90)**.

Tabel 2.90
Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi Tahun 2009 dan 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000

No	Sektor	Total Tenaga Kerja		PDRB Migas per Sektor				Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor				Nilai Tambah
		2010	2011	2010		2011		2010		2011		
		Orang	Orang	Trilyun Rupiah	%	Trilyun Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	
1	Pertanian	809.788	898.225	8,86	26,76	9,35	26,89	10.941.135	2,42	10.409.419	2,36	-531.717
2	Pertambangan &Penggalian	11.591	11.739	2,61	7,88	2,61	7,51	225.174.705	49,90	222.335.804	50,32	-2.838.901
3	Industri Pengolahan	77.828	72.509	3,49	10,54	3,56	10,24	44.842.473	9,94	49.097.353	11,11	4.254.880
4	Listrik, Gas & Air Bersih	3.630	3.966	0,12	0,36	0,13	0,37	33.057.851	7,33	32.778.618	7,42	-279.233
5	Konstruksi	109.023	113.934	2,34	7,07	2,49	7,16	21.463.361	4,76	21.854.758	4,95	391.397
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	314.323	299.183	6,61	19,96	7,06	20,30	21.029.323	4,66	23.597.597	5,34	2.568.274
7	Pengangkutan & Komunikasi	74.456	69.173	2,43	7,34	2,62	7,54	32.636.725	7,23	37.876.050	8,57	5.239.325
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13.644	25.040	0,62	1,87	0,66	1,90	45.441.220	10,07	26.357.827	5,97	-19.083.392
9	Jasa - jasa	361.971	358.704	6,03	18,21	6,29	18,09	16.658.793	3,69	17.535.349	3,97	876.556
Jumlah				**33,11**	**100**	**34,77**	**100**	**451.245.586**	**100**	**441.842.776**	**100**	**6.944.346**

Sumber: BPS Aceh, 2012

Rendahnya produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian secara umum adalah disebabkan oleh: 1) rendahnya nilai tambah yang di hasilkan oleh produk pertanian; 2)

rendahnya kualitas sumberdaya petani maupun petugas di lapangan; 3) terbatasnya teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas; dan 4) belum optimalnya pemilihan produk yang berbasis kebutuhan atau permintaan pasar.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah: 1) peningkatan nilai tambah produk pertanian; 2) peningkatan kualitas sumberdaya petani dan petugas; 3) penyediaan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas; dan 4) mengoptimalkan pemilihan produk yang berbasis kebutuhan atau permintaan pasar.

2.4.1.5. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.4.1.5.1. Koperasi

Sektor Koperasi merupakan sektor yang cukup strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah koperasi di Aceh tahun 2011 mencapai 7.079 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut koperasi aktif sebanyak 3.583 unit (50,61%), koperasi tidak aktif sebanyak 3.496 unit (49,39%). Secara nasional jumlah koperasi sebanyak 188.181 unit, yang aktif 133.666 unit (71,03%), yang tidak aktif dan beku sebanyak 54.575 (28,97%). Selanjutnya persentase koperasi aktif di Aceh Tahun 2004-2011 disajikan pada **Tabel 2.91**.

Tabel 2.91
Persentase Koperasi Aktif di Aceh
Tahun 2004 – 2011

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Persentase Koperasi Tidak Aktif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2004	4.836	3.751	77,56	1.085	22,44
2	2005	5.011	3.004	59,95	2.007	40,05
3	2006	5.522	3.341	60,50	2.181	39,50
4	2007	5.800	3.910	67,41	1.890	32,59
5	2008	6.570	4.246	64,63	2.324	35,37
6	2009	6.592	3.663	55,57	2.929	44,43
7	2010	6.932	3.381	48,77	3.551	51,23
8	2011	7.079	3.583	50,61	3.496	49,39

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Tahun 2012

Koperasi yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota tersebut bergerak pada sektor perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor riil lainnya. Secara umum koperasi-koperasi tersebut berusaha di bidang koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha kecil menengah (masyarakat/anggota koperasi).

Sampai dengan tahun 2011 berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam penguatan kelembagaan, perluasan usaha serta membuka akses permodalan bagi sumber

daya - sumber daya yang produktif. Salah satunya melalui pemeringkatan koperasi dan telah dilaksanakan terhadap 527 Unit koperasi (14,70%) dari koperasi aktif dengan kriteria koperasi berkualitas sebanyak 67 Unit dan koperasi cukup berkualitas sebanyak 460 Unit. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah memberikan nilai positif dalam perkembangan perkoperasian di Aceh sehingga kemandirian koperasi sebagai pelaku ekonomi akan membantu pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah Aceh.

Dari uraian sebelumnya, faktor penyebab tidak aktifnya koperasi adalah disebabkan oleh: 1) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi; 2) rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina koperasi.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu: 1) peningkatan SDM melalui Diklat; 2) Sosialisasi Peraturan/ketentuan perkoperasian; 3) pendampingan terhadap Koperasi; dan 4) pembubaran koperasi yang tidak aktif.

2.4.1.5.2. Jumlah UMKM Aktif dan BPR

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh yang tersebar di 23 kabupaten/kota posisi 30 Desember 2011 sejumlah 55.783 unit. UMKM tersebut bergerak pada berbagai sektor seperti perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan dan transportasi. Sektor perdagangan/jasa memiliki usaha mikro 24.855 unit, usaha kecil 12.410 unit, usaha menengah 2.225 unit; sektor pertanian memiliki usaha mikro 4.007 unit, usaha kecil 330 unit, usaha menengah 36 unit; sektor pertambangan memiliki usaha mikro 175 unit, usaha kecil 29 unit dan usaha menengah 6 unit; sektor industri memiliki usaha mikro 7.988 unit, usaha kecil 467 unit dan usaha menengah 208 unit; sektor perikanan dan kelautan memiliki usaha mikro 1.931 unit, usaha kecil 245 unit, usaha menengah 2 unit; sektor transportasi memiliki usaha mikro 615 unit, usaha kecil 247 unit dan 7 unit usaha menengah **(Tabel 2.92)**. Sedangkan BPR yang aktif di Aceh sebanyak 15 unit terdiri dari 8 unit BPR Syariah dan 7 unit BPR konvensional.

Tabel 2.92
Perkembangan Sektor Usaha UMKM di Aceh
Posisi 30 Desember 2011

NO	KABUPATEN / KOTA	SEKTOR																		Jumlah
		Perdagangan / Jasa			Pertanian			Pertambangan			Industri			Perikanan dan Kelautan			Transportasi			
		Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	
1	Banda Aceh	1723	3099	357	54	11	3	4	-	-	184	37	7	6	3	-	28	9	-	**5.525**
2	Aceh Besar	603	1039	175	12	17	3	14	3	-	44	12	5	4	3	-	17	7	-	**1.958**
3	Pidie	501	648	56	11	12	3	5	3	-	65	29	9	3	4	-	32	6	-	**1.387**
4	Pidie Jaya	132	137	11	8	11	3	4	3	-	48	12	7	4	3	-	14	5	-	**402**
5	Bireuen	650	1140	187	273	17	3	8	7	-	1732	4	17	57	4	-	34	8	-	**4.141**
6	Lhokseumawe	670	264	251	9	10	12	9	3	-	1080	33	63	28	5	-	29	10	-	**2.476**
7	Aceh Utara	11088	1250	400	7	7	9	11	4	-	668	53	29	1305	106	-	31	12	-	**14.980**
8	Aceh Tengah	340	310	35	9	13	-	4	-	-	328	4	5	4	7	-	14	9	-	**1.082**
9	Bener Meriah	270	115	11	12	5	-	3	-	-	130	16	4	-	4	-	8	5	-	**583**
10	Aceh Timur	2089	399	130	334	9	-	7	-	-	330	15	10	54	9	-	23	10	-	**3.419**
11	Langsa	247	285	109	11	5	-	4	-	-	166	5	12	5	5	-	24	12	-	**890**
12	Aceh Tamiang	567	180	67	3	6	-	7	-	-	229	6	5	7	4	-	15	6	-	**1.102**
13	Aceh Barat	140	758	99	26	4	-	21	6	-	122	18	5	18	5	-	26	11	-	**1.259**
14	Aceh Jaya	115	250	23	5	7	-	5	-	-	19	12	3	14	8	-	14	7	-	**482**
15	Nagan Raya	1399	410	68	2994	158	-	30	-	-	1590	87	3	204	12	-	190	17	-	**7.162**
16	Aceh Barat Daya	898	620	40	3	7	-	4	-	-	257	5	4	9	7	-	17	7	-	**1.878**
17	Aceh Selatan	514	370	63	3	5	-	7	-	-	111	13	3	14	5	-	24	12	-	**1.144**
18	Subulussalam	526	72	5	72	3	-	4	-	-	29	4	3	5	10	-	20	4	-	**757**
19	Singkil	622	270	46	18	3	-	4	-	-	197	5	3	9	6	-	14	3	-	**1.200**
20	Aceh Tenggara	175	264	14	2	4	-	5	-	-	143	14	3	7	3	-	12	3	-	**649**
21	Gayo Lues	139	120	10	45	4	-	3	-	-	84	7	3	16	3	-	6	3	-	**443**
22	Sabang	587	137	25	2	3	-	3	-	-	265	6	3	19	6	-	13	14	-	**1.083**
23	Simelue	860	273	43	94	9	-	9	-	6	167	70	2	139	23	2	10	67	7	**1.774**
	Total	**24.855**	**12.410**	**2.225**	**4.007**	**330**	**36**	**175**	**29**	**6**	**7.988**	**467**	**208**	**1.931**	**245**	**2**	**615**	**247**	**7**	**55.783**

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Tahun 2012

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha-usaha produktif bagi masyarakat. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. Rendahnya produktivitas UMKM yang dapat mengakibatkan produk dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar regional bahkan internasional.

Faktor penyebab belum berkembangnya UMKM antara lain : 1) besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi; 2) terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan; 3) terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar; 4) rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia; dan 5) terbatasnya dukungan modal. Dengan demikian, upaya Pemerintah Aceh ke depan dalam mengembangkan UMKM adalah: 1) mendukung kepastian harga komoditi; 2) mendukung akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan; 3) meningkatkan sarana dan prasarana serta informasi pasar; 4) meningkatkan kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia; dan 5) menumbuhkan wirausaha yang berbasis agro industri, industri kreatif, dan inovasi.

2.4.1.5.3. Perbankan

Kinerja perbankan di Aceh semakin membaik sejak berkhirnya konflik dan pasca tsunami. Indikator-indikator utama perbankan seperti rasio kecukupan modal (CAR) dan

rasio kredit bermasalah (NPL) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. NPL tetap terjaga dibawah 5 persen, sedangkan CAR masih berada pada level 17 persen jauh berada dibawah level minimal yang ditetapkan BI (8%). Sejalan dengan perbankan nasional perbankan Aceh juga terus menunjukkan kinerja yang positif. Walaupun mencatat pertumbuhan total aset yang negatif namun penyaluran kredit memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Total aset tahun 2009 turun 2,85 persen (Rp. 27.79 Trilyun) dibanding tahun 2008 (Rp 28.55 Trilyun). Hal ini diperkirakan karena berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Dari sisi kredit perbankan Aceh mencatat pertumbuhan sebesar 31,56 persen, meningkat dari 9,38 Trilyun menjadi 12.34 Trilyun. Peningkatan terjadi pada semua jenis kredit dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang tumbuh 37,16 persen.

Disamping itu Kinerja Bank Syariah pun terus meningkat. Per November 2009 total aset perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari 1.74 Trilyun menjadi 1.78 Trilyun, atau tumbuh 2,15 persen, dari sisi pembiayaan juga mengalami peningkatan signifikan dari 0.54 Trilyun menjadi 0.81 Trilyun atau tumbuh 51,67 persen. Dalam mendukung pembiayaan UMKM di Aceh per November 2009 penyaluran kredit tumbuh 29,35 persen dengan porsi 63,74 persen dari total kredit yang disalurkan.

A. Industri dan Perdagangan Industri

Industri Aceh sebagian besar mengandalkan pada industri pengolahan dari migas, namun terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh. Sekor industri masih belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap PDRB, dimana kontribusi sektor industri migas terhadap PDRB pada tahun 2007 sebesar 8,53 persen, 2008 sebesar 7,83 persen, 2009 sebesar 7,00 persen, 2010 sebesar 5,59 persen dan tahun 2011 sebesar 5,24 persen. Sedangkan pada industri non migas distribusinya terhadap pembentukan PDRB yaitu pada tahun 2007 sebesar 3,95 persen, 2008 sebesar 4,24 persen, 2009 sebesar 7,00 persen, 2010 sebesar 4,95 persen dan tahun 2011 sebesar 4,99 persen.

Berdasarkan kontribusi nilai tambah PDRB selama lima tahun terakhir di atas, harapan besar tertumpu pada pengembangan industri non migas sedangkan industri migas dalam jangka panjang tidak dapat diandalkan karena cadangannya yang semakin menurun. Industri non migas yang akan dikembangkan tersebut pada umumnya terdiri dari industri kecil dan menengah berbasis pertanian perkembangannya dari tahun 2007 sampai dengan 2011 seperti terlihat pada **Tabel 2.93**. Terjadinya penurunan jumlah industri yang signifikan pada tahun 2010 disebabkan karena terjadinya pergeseran lapangan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2009 sehingga beberapa industri yang tergolong jasa dikeluarkan dari data industri pengolahan.

Tabel 2.93
Perkembangan Industri Tahun 2007 – 2011

No	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	**Unit Usaha**	**Unit**	**20.231**	**21.267**	**35.660**	**7.342**	**7.538**
	a. Industri Kecil & Menengah	Unit	20.223	21.259	35.652	7.342	7.538
	b. Industri Besar	Unit	8	8	8	-	-
2.	**Tenaga Kerja**	**Orang**	**75.548**	**80.249**	**112.161**	**31.741**	**26.336**
	a. Industri Kecil & Menengah	Orang	70.985	75.686	107.598	31.741	26.336
	b. Industri Besar	Orang	4.563	4.563	4.563	-	-
3.	**Investasi**	**Rp/ Juta**	**483.574**	**549.574**	**638.681**	**25.397**	**7.914**
	a. Industri Kecil & Menengah	Rupiah/ Juta	337.000	403.000	492.107	25.397	7.914
	b. Industri Besar	Rupiah/ Juta	146.574	146.574	146.574	-	-
4.	**Produksi**	**Rp/ Juta**	**-**	**-**	**-**	**20.661**	**7.491**
	a. Industri Kecil & Menengah	Rupiah/ Juta	-	-	-	20.661	7.491
	b. Industri Besar	Rupiah/ Juta	-	-	-	-	-
5.	**BB/ BP**	**Rp/ Juta**	**-**	**-**	**-**	**29.060**	**6.433**
	a. Industri Kecil & Menengah	Rupiah/ Juta	-	-	-	29.060	6.433
	b. Industri Besar	Rupiah/ Juta	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh

Jika dilihat dari potensi daerah industri agro mempunyai prospek yang sangat baik untuk pengembangan pada masa mendatang, dimana potensi-potensi industri agro mencakup industri pengolahan hasil pertanian (IPHP), industri peralatan dan mesin pertanian (IPMP) dan industri jasa sektor pertanian (IJSP). Industri agro di Aceh masih terkendala dengan kemampuan pengolahan produk. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar komoditas pertanian Aceh yang diekspor merupakan bahan mentah. Upaya yang harus dilakukan untuk pengembangan industri agro dengan strategi pengembangan produk unggulan daerah melalui program OVOP dan penerapan tehnologi tepat guna pasca panen serta membangun kerjasama dan sinergisitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani dan industri.

Permasalahan yang dihadapi Industri Kecil Menengah di Aceh adalah: 1) produk yang dihasilkan belum memiliki daya saing yang disebabkan karena rendahnya kualitas SDM perajin, teknologi yang digunakan masih tradisional, dan *packaging* masih sangat sederhana; 2) terbatasnya akses pasar, khusus industri kerajinan bahan baku masih belum mengoptimalkan sumber daya lokal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan pembinaan melalui pelatihan teknis, magang, pameran dalam dan luar negeri, bantuan mesin/peralatan dan sarana kerja. Namun demikian perlu pembinaan lebih lanjut dan berkesinambungan. Seiiring dengan meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru dibidang industri maka diperlukan peningkatan SDM aparatur Pembina, peralatan yang berteknologi dan perluasan akses pasar melalui pameran-pameran. Pertumbuhan industri di Aceh untuk masa mendatang perlu lebih ditingkatkan dengan upaya menggali potensi-potensi yang ada dan membangun kawasan-kawasan industri dimasing-masing wilayah. Untuk wilayah Banda

Aceh, dan Aceh Besar saat ini sedang dibangun kawasan industri di Ladong, Aceh Besar dengan luas area 55 Ha, yang diharapkan setelah sarana dan prasarananya dilengkapi akan adanya investor-investor yang akan berinvestasi dikawasan industri tersebut

B. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan konstribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi di Aceh. Sektor ini memberikan kontribusi PDRB sebesar 16,03 persen dan menempati urutan kedua setelah pertanian. Selama 3 dekade yang lalu, minyak dan gas merupakan produk utama yang menyangga perekonomian daerah, namun dengan semakin berkurangnya produksi migas, pembangunan diarahkan pada pengembangan komoditi non-migas. Pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan peternakan adalah komoditas utama yang dimiliki oleh daerah ini. Beberapa komoditas nonmigas telah diekspor dalam bentuk bahan mentah, sedangkan yang lainnya dipasarkan di dalam negeri. Berbagai tantangan dalam pengembangan ekspor nonmigas masih harus dicari pemecahannya, diantaranya masalah kualitas, kuantitas, jalur distribusi dan fasilitas serta infra struktur pemasaran. Program hilirisasi sangat perlu dikembangkan dengan tujuan agar komoditi daerah tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga diperoleh nilai tambah yang besar untuk mendukung perekonomian daerah. Disamping itu, perlu diperhatikan ketersediaan komoditas sesuai dengan standar ekspor dan dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan buyers, ketersediaan pelabuhan ekspor yang representatif termasuk semua fasilitas pendukungnya, ketersediaan dan dukungan lembaga pendukung ekspor seperti perbankan, *surveyor, freight forwarder* dan Perusahaan Pelayanan Jasa Kepabeanan (PPJK), serta ketersediaan eksportir yang handal dan profesional.

Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain. Akibat pemberlakuan ACFTA, misalnya, negara-negara ASEAN telah sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan China. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini akan membuat pasar kita jadi sasaran empuk bagi negara lain. Daya saing produk luar, terutama produk China, sangat tinggi sehingga mendominasi pasar dalam negeri. Tingginya daya saing produk luar negeri harus diantisipasi dengan peningkatan daya saing produk lokal.

Wadah kerjasama IMT-GT, yang dimulai tahun 1991 dan diresmikan dalam pertemuan di Langkawi pada bulan Juli 1993, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan ekonomi regional. Wadah ini dibentuk untuk kompleksitas sumberdaya yang dimiliki ketiga negara sub-wilayah ini. IMT-GT merupakan tindak lanjut dari pengembangan kerjasama di antara pengusaha-pengusaha swasta dari Indonesia, Malaysia, Thailand yang telah mempunyai hubungan historis karena posisi wilayahnya yang berdekatan.

Untuk mendukung ekpor/impor Indonesia wilayah barat, Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dengan undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang Badan pengelolaan

Kawasan Sabang, undang-undang nomor 26 tahun 2006 tentang penataan ruang menetapkan Sabang sebagai PKSN, demikian juga dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh bahwa Sabang sebagai hubport internasional. Namun sampai saat ini pelabuhan bebas Sabang belum berkembang secara optimal. Diperlukan kebijakan nasional yang mengarah kepada pengembangan Sabang sebagai pelabuhan utama berskala nasional untuk mendukung pengembangan pelabuhan bebas Sabang dimasa yang akan datang.

Masalah dan tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh sektor perdagangan adalah semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak lanjutan dari krisis global, yang akan berakibat pada melemahnya permintaan dunia dan aktivitas produksi global. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin ketat dan harga komoditas belum menggembirakan. Untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri khusunya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah ketersediaan pasar tradisional dalam mendukung peningkatan aktivitas jual beli baik antar desa, kecamatan maupun kabupaten/ kota. Sampai dengan tahun 2010 jumlah pasar tradisional yang telah dibangun melalui dana APBN dan APBA sebanyak 174 Unit sebagaimana terlihat pada **Tabel 2.94**.

Tabel 2.94
Perkembangan Pembangunan Pasar Tradisional 2009 – 2010

No	Kab/ Kota	Jumlah Pasar (Unit)	
		2009	2010
1	Banda Aceh	6	8
2	Aceh Besar	15	18
3	Pidie	10	11
4	Pidie Jaya	1	3
5	Bireuen	14	16
6	Aceh Utara	7	8
7	Lhokseumawe	8	8
8	Aceh Timur	4	6
9	Langsa	1	1
10	Aceh Tamiang	9	11
11	Subulussalam	3	2
12	Aceh Singkil	3	12
13	Gayo Lues	6	9
14	Aceh Tenggara	4	7
15	Aceh Tengah	2	4
16	Bener Meriah	2	3
17	Aceh Jaya	11	11
18	Aceh Barat	10	10
19	Aceh Barat Daya	4	4
20	Aceh Selatan	9	13
21	Nagan Raya	2	2
22	Simeulue	3	3
23	Sabang	2	4
Jumlah		**136**	**174**

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh tahun 2011.

Sejak tahun 1999 sumber daya fiskal Aceh mengalami peningkatan yang signifikan. Aceh merupakan salah satu daerah penerima manfaat desentralisasi. Selama beberapa

tahun terakhir Aceh telah menerima arus masuk pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat sumber daya keuangan Aceh diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pendapatan tersebut terutama karena adanya UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2008. Melalui UU tersebut Aceh mendapat hak berupa dana tambahan bagi hasil Migas dan dana otonomi khusus. Akan tetapi hak tersebut terbatas pada masa waktu 20 tahun. Penerimaan Aceh dari dana otonomi khusus yang dimulai sejak tahun 2008 terus meningkat.

Mendorong investasi swasta merupakan salah satu prioritas utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana melalui investasi swasta lapangan pekerjaan baru dapat tercipta, demikian juga peningkatan produktivitas serta terjadinya proses "*transfer of knowledge*". Penanganan yang menyeluruh terhadap isu keamanan dan solusi yang kreatif terhadap keterbatasan terhadap pasokan sumber daya listrik di Aceh adalah faktor penting yang dapat mendorong investasi. Akan tetapi rendahnya produktivitas tenaga kerja, minim tenaga kerja terampil dan relatif tingginya UMP masih menjadi masalah yang harus segera diatasi. Penetapan UMP Aceh 1,2 juta rupiah per bulan lebih tinggi dari nasional berdampak terhadap tingkat daya saing Aceh dalam menarik investasi di sektor formal.

C. Ekspor/Impor

Kinerja ekspor Aceh secara umum cenderung mengalami penurunan. Tahun 2005 nilai ekspor Aceh mencapai USD 3,19 milyar, dan terus menurun sampai tahun 2009 mencapai USD 930,19 juta. Pada tahun 2010 sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2009 yaitu mencapai USD 1,21 milyar dan kembali meningkat pada tahun 2011 yaitu USD 1,13 milyar. Menurunnya realisai ekspor Aceh disebabkan oleh menurunnya produksi migas Aceh yang selama ini menjadi andalan untuk ekspor Aceh, namun dilain sisi lain perkembangan ekspor non migas terus mengalami peningkatan terutama pupuk dan komoditas pertanian yaitu kopi serta disusul komoditas pertambangan seperti biji besi.

Negara tujuan ekspor utama Aceh masih didominasi oleh negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, Korea serta negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Begitu juga dengan impor, 87,25 persen berasal dari negara Asia Timur dan ASEAN. Sisanya 12,75 persen berasal dari negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Swiss dan Jerman serta dari Amerika Serikat. Selanjutnya realisasi ekspor Aceh per komoditas periode 2005-2011 secar rinci ditampilkan pada **Tabel 2.95**.

Sedangkan kinerja impor mengalami peningkatan. Tahun 2007 dan tahun 2008 nilai impor meningkat tajam dari USD 30,65 juta menjadi 384,24 pada tahun 2008. Peningkatan nilai impor tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya impor barang-

barang konsumsi rumah tangga, bahan makanan dan barang produk industri lainnya. Sedangkan impor barang modal masih sangat kecil. Kondisi ini tidak sehat dalam mendorong pengembangan industri daerah.

Tabel 2.95
Realisasi Ekspor Aceh Per Komoditi
Periode 2005 – 2011

NO	KOMODITI	NILAI PER TAHUN (US$)							JUMLAH (US$)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	NON MIGAS								
	A. Hasil Non Industri								
1	Kopi Arabica	10.368.258,87	16.898.569,53	18.064.022,70	26.609.432,18	22.666.034,84	29.748.958,33	62.556.286,11	186.911.562,56
2	Kopi Robusta	126.350,00	593.160,00	-	-	-	-	-	719.510,00
3	Getah Alam	-	-	-	17.726,04	266.666,00	-	-	284.392,04
4	Pinang	25.500,00	37.000,00	1.975,00	4,05	-	9.180,00	-	73.659,05
5	Blangkas	10.600,00	-	-	-	-	-	-	10.600,00
6	Magnesium Karbonat Alam	-	-	-	6.982,00	-	-	-	6.982,00
7	Tempurung Kelapa Sawit	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
8	Damar		10.400,00	16.700,00	48.815,00	-	-	-	75.915,00
9	Madu	-	-	-	72,57	-	-	-	72,57
10	Biji Coklat (Cocoa Beans)	-	-	-	-	-	1.166.080,30	-	1.166.080,30
11	Kelapa Bulat	-	-	-	-	-	15.922,17	36.780,00	52.702,17
12	Kopi Luwak	-	-	-	-	-	-	13.733,00	13.733,00
13	Ikan Tuna/ Kulit Ikan Tuna	-	-	-	-	-	-	3.633,64	3.633,64
	B. Hasil Industri								
14	Pasir Besi Curah	-	-	-	-	1.278.000,00	17.836.531,21	19.115.740,03	38.230.271,24
15	Sabut Kelapa	3.900,00	9.100,00	-	120.000,00	-	-		133.000,00
16	Arang Kayu	32.280,00	2.800,00	-	-	-	-		35.080,00
17	Akar Tongkat Ali dan M. Nilam	-	-	-	4.563,94	-	-		4.563,94
18	Ammoniac	11.563.249,57	4.813.170,68	2.791.262,76	3.334.990,42	2.988.411,62	8.265.336,91	7.662.169,52	41.418.591,48
19	Pupuk Urea	26.798.307,94	-	53.972.631,36	94.114.282,57	65.784.581,82	6.808.028,21	38.598.234,47	286.076.066,37
20	Pupuk Magnesium	-	-	11.820,00	17.040,00	-	-		28.860,00
21	Urea Formaldehyde	5.688.919,00	2.342.860,50	-	-	-	-		8.031.779,50
22	Tras Curah	-	-	-	66.501,48	42.125.524,00	85.500,00	21.600,00	42.299.125,48
23	Sapu/ Sikat Ijuk	-	1.500,00	-	-	-	-		1.500,00
24	Kulit Kayu Manis	-	-	-	-	4.420,00	-	16.860,00	21.280,00
25	Kertas	-	-	513.206,35	113.459,48	-	-		626.665,83
26	Kopi Instant dan Bubuk Kopi Gongseng	-	-	-	-	-	2.144,00		2.144,00
27	Kayu Olahan	-	-	-	-	-	-	21.152,30	21.152,30
	Jumlah Non Migas	***54.617.365,38***	***24.708.560,71***	***75.371.618,17***	***124.455.669,73***	***135.113.638,28***	***63.937.681,13***	***128.046.189,07***	***606.250.722,47***
	MIGAS								
1	A. LNG	2.946.480.750,00	2.809.417.965,00	2.536.366.202,51	1.972.761.512,04	825.499.625,15	1.159.273.662,69	1.026.238.088,04	13.276.037.805,43
2	A. Condensate	246.808.425,00	234.979.250,00	212.769.180,84	231.226.879,08	104.691.023,75	48.489.039,32	112.966.993,12	1.191.930.791,11
3	Keroserie	-	-	-	3.227.305,60	-	3.227.305,60	-	6.454.611,20
4	Naphtha	-	-	-	2.185.281,28	-	2.185.281,28	-	4.370.562,56
	Jumlah Migas	***3.193.289.175,00***	***3.044.397.215,00***	***2.749.135.383,35***	***2.209.400.978,00***	***930.190.648,90***	***1.213.175.288,89***	***1.139.205.081,16***	***14.478.793.770,30***

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2012

2.4.1.6. Sumberdaya Energi dan Mineral

Sumberdaya energi Aceh difokuskan kepada sumber energi terbaharukan untuk mengatasi krisis energi listrik. Pemerintah Aceh telah berupaya meningkatkan pelayanan listrik pada daerah terpencil yang belum terjangkau oleh PT.PLN antara lain pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTMH yang telah dibangun di beberapa Kabupaten seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Utara dan Aceh Timur. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga berupaya melakukan pengembangan energi skala besar seperti Power Plant Nagan Raya 2 x 100 MW, PLTA Peusangan 2 x 43 MW, PLTP Jaboi 1 x 50 MW, PLTP Seulawah Agam 1 x 180 MW dan PLTU Krueng Raya 1 x 100 MW.

Aceh memiliki sumberdaya mineral seperti mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, dan air tanah. Potensi pertambangan yang telah teridentifikasi, berdasarkan klasifikasi dahulu atau sebelumnya dikenal dengan bahan tambang strategis (golongan A), bahan tambang vital (golongan B), dan bahan tambang golongan C (bahan galian). Potensi bahan tambang golongan A dan B berupa migas, panas bumi, Batubara, Emas (Au), Tembaga (Cu), Perak (Ag), Seng (Zn), Timah Hitam (Pb), Molibdenum (Mo), Besi/Pasir Besi (Fe), Kromium (Cr), Nikel (Ni), Timah Putih (Sn), Mangan (Mn), Platina (Pt), Belerang (S) dan Air Raksa (Hg) menyebar di 10 (sepuluh) Kabupaten. Sedangkan potensi Mineral Galian Golongan C menyebar hampir di seluruh Aceh yaitu : Sirtu sungai, Sirtu darat, Pasir Kuarsa, Sirtu Kerikil, Batu Pasir, Batu Gunung, Batu Apung, Tanah Urug, Tanah Liat, Mika, Lempung, Kalsit, Batu Gamping, Serpentinit Berurat Magnesit, Magnesit, Serpentinit, Tufa Gampingan, Phosphat, Trass dan Marmer menyebar di 10 (sepuluh) Kabupaten. Potensi batubara terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Namun, sumberdaya mineral ini belum menjadi fokus pengembangan Pemerintah Aceh karena Aceh belum memiliki kesiapan infrastruktur pendukung dan sumberdaya manusia yang handal.

2.4.1.7. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pembangunan Aceh yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus yang sesuai dengan UU PA, dan lain-lain pendapatan yang sah harus dimanfaatkan secara optimal dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Secara khusus Pemerintah Aceh harus memanfaatkan ketersediaan dana pembangunan yang berasal dari TDBH Migas dan dana otsus secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) UUPA, Pemerintah Aceh mendapat Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TDBH Migas) sebesar 55 persen (55%) untuk minyak dan 40 persen (40%) untuk pertambangan-gas bumi. Selain mendapat TDBH Migas, berdasarkan Pasal 183 ayat (2) UU PA, Pemerintah Aceh juga mendapat dana otonomi khusus setara dua persen (2%) pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dan setara 1 persen (1%) pagu DAU Nasional untuk tahun 2023 sampai dengan 2027.

Penggunaan sumber dana pembangunan Aceh yang berasal dari TDBH migas dan dana otsus tersebut diatas dijabarkan dalam rencana induk bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh yang sesuai amanah Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Masing-masing rencana induk ini harus berpedoman dan mengacu kepada RPJP Aceh 2005-2025.

Kedua sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan Aceh dan kabupaten/kota yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan antara kabupaten/kota dalam wilayah Aceh. Secara rinci berbagai sumber pendanaan pembangunan Aceh ditampilkan pada **Tabel 2.96**.

Tabel 2.96
Perkembangan Sumber Pendanaan Pembangunan Aceh
Tahun 2007 – 2011

SUMBER DANA	2007	2008	2009	2010	2011
Dana Alokasi Khusus	800.688	1.005.049	1.040.297	812.759	912.603
Dana Alokasi Umum	5.666.371	6.348.755	6.833.513	6.992.339	8.453.163
Dana Bagi hasil	1.694.561	1.777.896	1.241.551	2.175.849	1.049.665
Pendapatan Asli Aceh	587.487	721.708	743.205	795.487	799.451
APBN	1.837.824	12.706.525	8.852.773	6.959.362	8.761.202
Dana Otsus	-	3.590.142	3.728.282	3.849.806	4.510.656
Total	**10.586.931**	**22.559.933**	**18.711.339**	**17.735.796**	**19.976.085**

Selanjutnya potensi sumber pendanaan pembangunan Aceh lainnya dapat berasal dari sektor swasta, hibah, pinjaman lunak (*soft loan*) dan pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

Faktor aksesibiltas daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun.

Kondisi ini diungkapkan dengan indeks aksesibilitas sebagaimana tertera pada **Tabel 2.97**. Selain itu, Indeks pelayanan transportasi jalan pada tahun 2006 menunjukkan lintas Timur mempunyai tingkat pelayanan lebih baik (43,43%) diikuti lintas Barat (35,49%) dan lintas Tengah 30,92 persen (Buku Rencana Induk Otsus Migas, 2010). Hal ini juga berpengaruh langsung terhadap mobilisasi barang dan logistik secara keseluruhan di Aceh.

Tabel 2.97
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Aceh

Kabupaten/ Kota	Luas (Km^2)	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km^2)	Indeks Mobilitas (Km/1000pddk)
Simeuleu	1.827,35	723,3	0,40	8,97
Aceh Singkil	1.858,03	629,43	0,34	6,14
Aceh Selatan	4.176,59	1.070,68	0,26	5,29
Aceh Tenggara	4.169,63	814,16	0,20	4,55
Aceh Timur	5.427,09	862,25	0,16	2,39
Aceh Tengah	4.454,04	1.125,76	0,25	6,41
Aceh Barat	2.758,72	758,76	0,28	4,37
Aceh Besar	2.902,56	1.651,98	0,57	4,70
Pidie	3.169,24	1.395,78	0,44	3,68
Bireuen	1.796,31	9.48,79	0,53	2,44
Aceh Utara	2.694,66	2.511,57	0,93	4,74
Aceh Barat Daya	1.882,05	663	0,35	5,26
Gayo Lues	5.549,91	812,11	0,15	10,21
Aceh Tamiang	2.119,73	819,07	0,39	3,25
Nagan Raya	3.544,91	325,73	0,09	2,33
Aceh Jaya	3.877,25	503,29	0,13	6,55
Bener Meriah	1.904,01	543,78	0,29	4,45
Banda Aceh	56,17	368,5	6,56	1,65
Sabang	122,09	155,49	1,27	5,07
Langsa	203,41	278,51	1,37	1,87
Lhokseumawe	153,44	236,36	1,54	1,38

Sumber : Buku Tataran Transportasi Wilayah Aceh Tahun 2012

Keberhasilan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah akan lebih meningkatkan jumlah arus penumpang dan barang. Berdasarkan data yang bersumber dari Dishubkomintel, telah terjadi peningkatan jumlah arus penumpang dan antara tahun 2007 - 2010. Kenaikan ini terjadi pada moda angkutan darat, laut dan udara. Berdasarkan data bandara internasional tahun 2007 jumlah orang yang terangkut adalah 12.083 penumpang, dan melalui bandara domestik sebesar 579.621 penumpang. Selanjutnya arus penumpang masuk dan keluar angkutan umum di Aceh tahun 2007 meliputi angkutan jalan raya adalah sebanyak 5.543.533 orang dan meningkat menjadi 6.857.290 orang pada tahun 2010.

Transportasi yang melayani jasa angkutan barang pada ketiga moda angkutan masih didominasi melalui moda angkutan darat. Secara rinci, grafik perkembangan arus angkutan tertera pada **Gambar 2.27**, **2.28** dan **2.29**.

** dilengkapi dengan grafik angkutan barang*
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2011

Gambar 2.27 Grafik Perkembangan Arus Angkutan Jalan Tahun 2007 – 2010

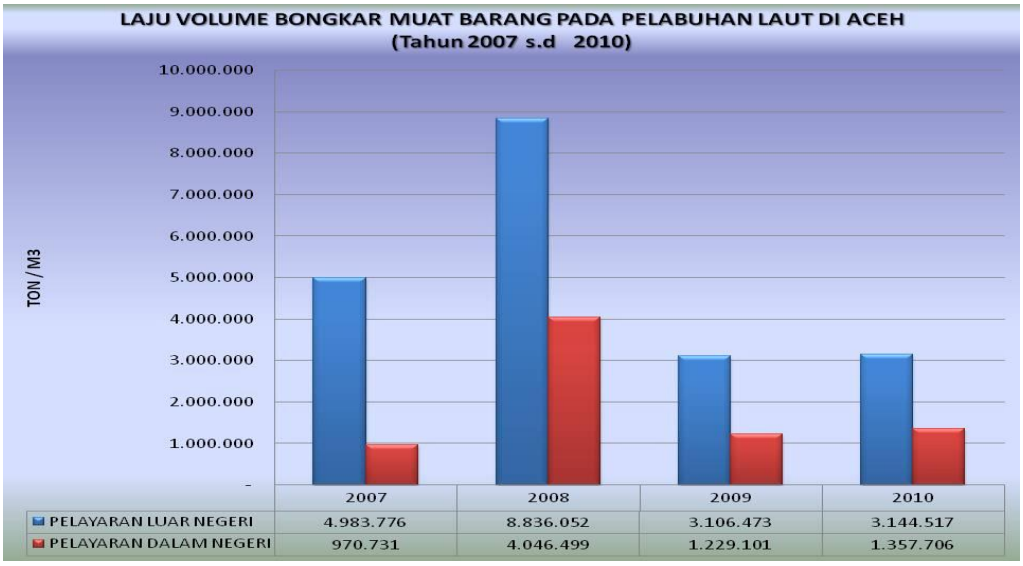

** dilengkapi dengan grafik angkutan penumpang*
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2011

Gambar 2.28 Grafik Perkembangan Arus Angkutan Laut Tahun 2007 – 2010

**dilengkapi dengan grafik angkutan barang*
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2011

Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Arus Angkutan Udara Tahun 2007 – 2010

Berdasarkan Indeks Pelayanan Logistik (Logistic Performance Index/LPI) menunjukkan bahwa mobilisasi barang dan logistik di wilayah Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Barat dan Tengah. Tinjauan terhadap LPI Aceh terhadap subdimensi khusus berkaitan dengan beberapa faktor berikut: kualitas layanan dokumen pengiriman barang dan kualitas infrastruktur, efisiensi proses retribusi/kepabeanan, kualitas perdagangan, kondisi infrastruktur transportasi, biaya pengiriman, ketepatan waktu dan keterjaminan kiriman barang. Berdasarkan tinjauan tersebut diperoleh hasil Index Performance Logistic seperti **Tabel 2.98**.

Tabel 2.98
Index Performance Logistic/IPL

Kota/ Kabupaten	Dimensi Indikator Kinerja Logistik							Total PoM EV	LPI
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Langsa	3,16	1,87	1,80	1,68	2,00	3,53	2,95	16,99	2,43
Lhokseumawe	3,28	2,09	2,67	2,87	2,77	3,69	3,16	20,52	2,93
Bireuen	3,68	2,82	2,50	4,35	1,05	2,00	2,80	19,20	2,74
Idi Rayeuk	3,21	2,76	1,60	3,13	2,70	2,58	3,02	19,00	2,71
Takengon	3,46	3,33	2,22	2,70	3,76	3,66	3,60	22,73	3,25
Blang Keujeren	2,97	2,53	1,40	1,34	1,60	3,45	3,14	16,43	2,35
Kutacane	2,93	1,83	1,18	1,34	1,96	3,59	3,36	16,18	2,31
Meulaboh	2,79	2,79	2,83	2,67	2,91	3,78	3,42	21,19	3,03
Blang Pidie	2,89	3,21	2,34	1,71	2,86	3,57	3,86	20,43	2,92
Labuhan Haji + Tapaktuan	2,32	3,46	2,36	2,02	2,79	4,49	3,94	21,87	3,12
Subulussalam/ Singkil	2,52	3,75	2,52	2,28	1,80	3,80	4,00	20,68	2,95
Simeulue	1,92	2,22	2,80	2,08	1,60	2,95	3,67	17,24	2,46
Banda Aceh	2,52	4,39	3,41	4,08	2,40	2,00	2,45	21,26	3,04
Sabang	2,60	1,71	0,88	1,54	2,80	3,64	3,00	16,17	2,31

Kota/ Kabupaten	Dimensi Indikator Kinerja Logistik							Total PoM EV	LPI
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Aceh	2,87	2,61	2,11	2,22	2,41	3,32	3,22		2,68
M e d a n	2,31	2,29	2,75	2,64	3,18	3,03	3,16	19,37	2,77

Keterangan:
I = Kualitas layanan dokumen pengiriman barang dan kualitas infrastruktur;
II = Efisiensi proses retribusi / kepabeanan;
III = Kualitas perdagangan;
IV = Kondisi infrastruktur transportasi;
V = Biaya pengiriman;
VI = Ketepatan waktu; dan
VII = Keterjaminan kiriman barang.
Sumber: Hasil Penelitian WFPLSU-Bappeda Aceh-Unsyiah Tahun 2012

IPL di atas menunjukan kemampuan layanan terhadap distribusi dan mobilisasi logistik antar simpul pergerakan logistik di Aceh dan terhadap Kota Medan. Performa ini dapat menggambarkan kemampuan dan daya dukung beberapa variabel utama terhadap layanan pergerakan logistik yang tersedia di simpul – simpul transportasi yang telah tersedia. Dalam hal ketersediaan prasarana Aceh memiliki 19 pelabuhan laut dan penyeberangan, 12 unit bandara dan 31 unit terminal bis yang tersebar di kabupaten/kota. Pelabuhan laut yang terbesar adalah Malahayati, Krueng Geukueh, Meulaboh dan Ulee Lheu sebagai pelabuhan penyebarangan dan angkutan. Bandara Sultan Iskandar Muda adalah bandara internasional yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan terminal bis berlokasi di seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.99**.

Tabel 2.99
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Transportasi Laut		Bandara	Terminal Bis			Terminal Barang
		Pelabuhan angkutan Laut/Peyeberangan	Pelabuhan Rakyat		Tipe A	Tipe B	Tipe C	
1	Sabang	2	-	1	-	-	-	-
2	Banda Aceh	1	-	-	1	-	-	1
3	Aceh Besar	2	3	1	-	-	1	1
4	Pidie	-	2	-	1	-	1	1
5	Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	1
6	Bireun	-	1	-	-	1	2	1
7	Aceh Utara	1	-	1	-	2	1	-
8	Lhoksuemawe	-	-	1	1	-	-	1
9	Aceh Timur	1	-	-	-	-	1	-
10	Langsa	1	-	-	1	-	-	-
11	Aceh Tamiang	-	-	-	-	1	-	-
12	Aceh Tengah	-	-	-	-	1	3	1
13	Bener Meriah	-	-	1	-	-	1	1
14	Gayo Lues		-	1	-	-	1	1
15	Aceh Tenggara	-	-	1	-	1	1	1
16	Aceh Jaya	1	-	-	-	-	-	-
17	Aceh Barat	2	-	-	1	-	-	1
18	Aceh Barat Daya	1	-	1	-	-	1	
19	Nagan Raya	-	-	1	-	1	-	-
20	Aceh Selatan	2	3	1	-	-	2	-
21	Subulussalam	-	-	-	-	1	-	-
22	Aceh Singkil	3	1	1	-	-	1	-
23	Simeulue	2	2	1	-	-	1	-
Jumlah		**19**	**12**	**12**	**5**	**9**	**17**	**11**

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2010

Kondisi pelabuhan laut dan udara ditinjau dari kelengkapan prasarana fasilitas pokok, fasilitas keselamatan dan fasilitas penunjang memiliki persentase yang bervariasi. Pelabuhan laut Malahayati dan Lhokseumawe memiliki persentase perlengkapan sarana dan prasarana yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelabuhan laut lainnya. Sementara itu Bandar udara internasional Sultan Iskandar Muda merupakan bandara bertaraf internasional dan memiliki persentase kelengkapan sarana dan prasarana yang terlengkap dibandingkan seluruh bandara lain di kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya kondisi masing-masing pelabuhan laut dan bandara yang terdapat di Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.100**.

Tabel 2.100
Kondisi Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2009

No	Jenis Pelabuhan / Bandaran	Kondisi Sarana dan Prasarana (%)	No	Jenis Pelabuhan / Bandaran	Kondisi Sarana dan Prasarana (%)
I. Pelabuhan Angkutan Laut			**II. Bandar Udara**		
1	Pelabuhan Malahayati	73,91	1	Bandara Sultan Iskandar Muda	87,07
2	Pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe	61,50	2	Bandara Point A Lhoksukon	30,73
3	Pelabuhan Kuala Langsa	45,22	3	Bandara Mailikulsaleh Lhokseumawe	28,90
4	Pelabuhan Meulaboh	38,04	4	Bandara Lasikin Sinabang	26,46
5	Pelabuhan Sabang	39,78	5	Bandara Teuku Cut Ali Tapak Tuan	28,90
6	Pelabuhan Calang	10,87	6	Bandara Kuala Batee Blang Pidie	25,00
7	Pelabuhan Susoh	39,35	7	Bandara Rambele Takengon	24,02
8	Pelabuhan Tapak Tuan	36,52	8	Bandara Alas Lauser Kuta Cane	26,46
9	Pelabuhan Singkil	14,35	9	Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya	35,61
10	Pelabuhan Sinabang	30,22	10	Bandara Maimun Saleh Sabang	49,27
11	Pelabuhan Idi	14,13	11	Bandara Hamzah Fansuri Singkil	26,83
			12	Bandara Blang Keujeuren Gayo Lues	2,44
III. Pelabuhan Penyeberangan					
1	Pelabuhan Ulee Lheue	98,83	5	Pelabuhan Singkil	43,75
2	Pelabuhan Balohan Sabang	59,38	6	Pelabuhan Pulau Banyak	48,96
3	Pelabuhan Lamteng Pulo Aceh	18,75	7	Pelabuhan Labuhan Haji	55,21
4	Pelabuhan Sinabang	47,92	8	Pelabuhan Meulaboh	0,00

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2010

Terdapat 5 (lima) unit terminal tipe A yang terletak di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Sigli (Kabupaten Pidie), dan Meulaboh (Kabupaten Aceh barat) yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Sementara itu terminal tipe B berjumlah 9 (sembilan) unit yang terletak di Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh jaya, Nagan Raya dan Subulussalam. Sedangkan terminal tipe C cukup banyak tersebar baik di Aceh Wilayah Timur, Tengah, Barat dan Selatan. Selanjutnya guna kelancaran distribusi angkutan barang, pada saat ini terdapat 11 buah terminal angkutan barang di Aceh yaitu di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.

Permasalahan di beberapa terminal adalah belum optimalnya pelayanan akibat kurangnya fasilitas - fasilitas pelengkap dan kurang disiplinnya para stakeholder pengguna terminal. Sebagai pendukung perekonomian maka perlu dilakukan pembangunan beberapa terminal baik tipe A dan tipe B. Pembangunan terminal tipe A dilakukan di Lhokseumawe (Cunda), Pidie Jaya, Langsa, Sigli, dan Banda Aceh. Untuk pembangunan gedung terminal tipe B dilakukan di Calang, Meulaboh, Subulussalam, Takengon, Lhoksukon, Peurelak dan Saree. Diperlukan juga rehabilitasi talud penahan tebing dan fasilitas jembatan timbang Jontor dan Seumadam.

Jaringan jalan kereta api Aceh merupakan bagian dari rencana pembangunan kereta api Sumatera lintas Timur (Sumatera Railways) yang juga telah dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), dengan menghubungkan Banda Aceh sampai dengan Lampung. Untuk Aceh jaringan kereta api menghubungkan Banda Aceh sampai batas Sumatera Utara yang direncanakan sepanjang 486 km. Sampai dengan tahun 2011 pembangunan jaringan kereta api Aceh baru mencapai 14,7 km atau tiga persen dari total yang direncanakan yaitu jalur Krueng Mane – Bungkah - Krueng Geukuh. Dari tahun 2009 hingga 2011 pembangunan difokuskan kepada prasarana dan fasilitas - fasilitas pendukung lainnya seperti stasiun, kantor administrasi, gudang serta jalan akses agar operasional kereta api dapat berjalan lancar. Hal inipun semestinya harus dilakukan evaluasi kembali terhadap trase yang telah selesai untuk dicari alternatif lain yang lebih sesuai dan terintegrasi dengan pusat produksi.

Permasalahan utama pada pembangunan perkeretaapian Aceh adalah masalah desain trase antara Banda Aceh sampai dengan batas Sumatera Utara dan masalah pembebasan lahan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, selain pembebasan tanah masih diperlukan penyelesaian Masterplan Perkeretaapian Aceh agar perencanaan trase dari Banda Aceh hingga batas Sumatera Utara terselesaikan, serta didukung dengan pembangunan sarana prasarana perkeretaapian di Bireuen dan Aceh Utara.

Jaringan angkutan penyeberangan yang saat ini beroperasi di Aceh terdiri dari 4 rute lintas penyeberangan, yaitu: Lintasan Balohan (Kota Sabang) – Ulee Lheue (Kota Banda Aceh), Lintasan Lamteng (Aceh Besar) – Ulee Lheue (Kota Banda Aceh), Lintasan Labuhan Haji (Aceh Selatan) – Sinabang (Simeulue), Lintasan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil) – Pulo Banyak (Kabupaten Aceh Singkil) – Sinabang (Kabupaten Simeulue), Lintasan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil) – Gunung Sitoli (Kabupaten Nias – Sumatera Utara).

Permasalahan utama angkutan penyeberangan yaitu: masih diperlukan peningkatan pelayanan terhadap sarana dan prasarana angkutan penyeberangan di wilayah Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Singkil dan Simeulue. Kendala operasional juga dialami dalam hal

pengaturan penjadwalan rute pelayanan kapal, keterbatasan jumlah kapal dan bervariasinya jumlah penumpang.

Permasalahan lainnya pada pelayanan angkutan perairan darat adalah ketersediaan prasarana dan sarana. Pelayanan fungsi angkutan sungai telah digunakan oleh masyarakat pada aliran sungai Tamiang, sungai Simpang Kiri dan Simpang Kanan di Singkil, Krueng Meureubo dan Suak Seumaseh di Aceh Barat. Aliran sungai-sungai tersebut telah dimanfaatkan sebagai bagian jaringan transportasi namun belum masih belum optimal terlayani. Saat ini hanya ditangani oleh fasilitas yang dibangun masyarakat dengan alat angkut yang tidak memadai. Demikian juga dengan angkutan danau di Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Solusi yang diharapkan didalam penyelesaian permasalahan adalah peningkatan pembangunan dermaga dan peningkatan sarana pada lintasan yang belum terlayani seperti peningkatan pengelolaan pelabuhan penyeberangan Singkil, Sinabang dan Labuhan Haji, serta pelabuhan Lamteng, Pulau Banyak, Ulee Lheue dan Balohan. Selain itu diperlukan pembangunan prasarana pelabuhan rakyat Kuala Raja (Bireuen), Meulingge (Aceh Besar), dan Kuala Idi (Aceh Timur), rehabilitasi dermaga danau Laut Tawar Tetunyu.

Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan suatu otoritas yang hanya mengelola pelabuhan penyeberangan di Aceh. Selanjutnya untuk mengatasi kendala operasional dan keterbatasan jumlah kapal diperlukan suatu sistem pengelolaan yang berada dalam suatu pengelolaan. Pengusahaan pengembangan jaringan transportasi laut Aceh, terdiri dari pelabuhan yang diusahakan dan dikelola oleh PT Pelindo (BUMN) dan pelabuhan yang tidak diusahakan dan dikelola oleh Kantor Pelabuhan (Kanpel) UPT Kementerian Perhubungan. Pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) di Aceh antara lain: pelabuhan laut Malahayati di Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar, pelabuhan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat; pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa, pelabuhan Sabang dan pelabuhan Balohan di Kota Sabang dan pelabuhan Krueng Geukeuh di Kota Lhokseumawe.

Pelabuhan yang dikelola oleh kantor pelabuhan (Kanpel) adalah pelabuhan Singkil, pelabuhan penyeberangan Singkil dan Pulo Banyak di Kabupaten Aceh Singkil, pelabuhan Susoh dan pelabuhan Surin di Kabupaten Aceh Barat Daya, pelabuhan Sinabang di Kabupaten Simeulue, pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya, pelabuhan Idi di Kabupaten Aceh Timur, pelabuhan Tapak Tuan di Kabupaten Aceh Selatan.

Permasalahan transportasi laut Aceh, hampir seluruh pelabuhan laut tersebut belum berfungsi secara optimal, terkait kelengkapan sarana dan prasarana kepelabuhanan. Beberapa pelabuhan telah memiliki fasilitas crain seperti pelabuhan Malahayati, pelabuhan

Krueng Geukuh dan pelabuhan Sabang untuk mendukung kegiatan ekspor-impor. Namun kegiatan ekspor-impor ini tidak didukung oleh ketersediaan komoditas ekspor dengan skala ekonomi yang memadai sehingga terjadi *trade imbalance* di provinsi ini.

Kinerja pelabuhan yang ada juga dirasakan belum berfungsi optimal diakibatkan tidak seimbangnya beban pekerjaan antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan penanganan terhadap pelabuhan Sabang, Malahayati, Krueng Geukuh, dan Kuala Langsa berupa pengerukan sedimentasi, perpanjangan dermaga, pembangunan *dolphin* dan *breasting dolphin* untuk kebutuhan tangker, peralatan keselamatan, dan peralatan navigasi. Sementara itu untuk fasilitas sisi darat diperlukan penanganan terhadap lapangan penumpukan, tangki penyimpanan, gudang, dan perkantoran. Sedangkan untuk pelabuhan Ulee lheue, Pulau Banyak, Meulaboh, Susoh, dan Tapaktuan diperlukan rehabilitasi dan pemeliharaan. Untuk pembangunan sarana perhubungan laut diperlukan *general overhaul* terhadap KM. Pulo Rondo + spv, operasional komprador perkapalan, dan subsidi angkutan laut perintis antar pulau.

Di sisi jaringan transportasi udara, berdasarkan kebutuhan pelayanan, jumlah Bandar udara sampai dengan sekarang telah mencukupi. Terdapat 10 bandar udara yang telah beroperasi dan 3 buah Bandar udara yang masih dalam tahap pembangunan yaitu Bandar udara di Kabupaten Gayo Lues, di Pulo Banyak-Kabupaten Singkil dan di Batee Gelungkue (Kabupaten Bireuen).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar udara Sultan Iskandar Muda dan Bandar udara Maimun Saleh, secara penggunaannya sudah berstatus sebagai Bandar Udara Internasional, sedangkan Bandar udara lainnya berstatus Bandar udara domestik. Bandar udara Sultan Iskandar Muda memiliki panjang landasan 3.000 x 45 m sudah dapat melayani pesawat berbadan lebar jenis 747-400 dan telah dapat melayani penerbangan jemaah haji embarkasi Aceh dan sebagai bandara transit untuk penerbangan jemaah haji wilayah timur Indonesia serta penerbangan ke luar negeri lainnya. Sementara itu, bandara lain pada umumnya hanya mampu melayani pesawat udara jenis Cassa-212.

Permasalahan dalam transportasi udara adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional dan keselamatan penerbangan. Hal ini ditunjukkan selain dari bandar udara Sultan Iskandar Muda bandara lainnya belum memiliki Sertifikat Bandar Udara, masih memiliki keterbatasan fasilitas navigasi, masih menggunakan teknologi telekomunikasi sederhana dalam mengatur arus lalu lintas udara yang berdampak kepada tingkat pelayanan serta keselamatan penerbangan. Permasalahan lainnya adalah persoalan manajemen rute untuk menjawab arah pengembangan wilayah di masa mendatang, dimana

menempatkan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda sebagai Bandar Udara Internasional Regional dengan hierarki sebagai Bandar udara Pengumpul Skala Tersier di Aceh belum berfungsi optimal. Berikut rute penerbangan pelayanan Bandar udara Aceh pada **Gambar 2.30**.

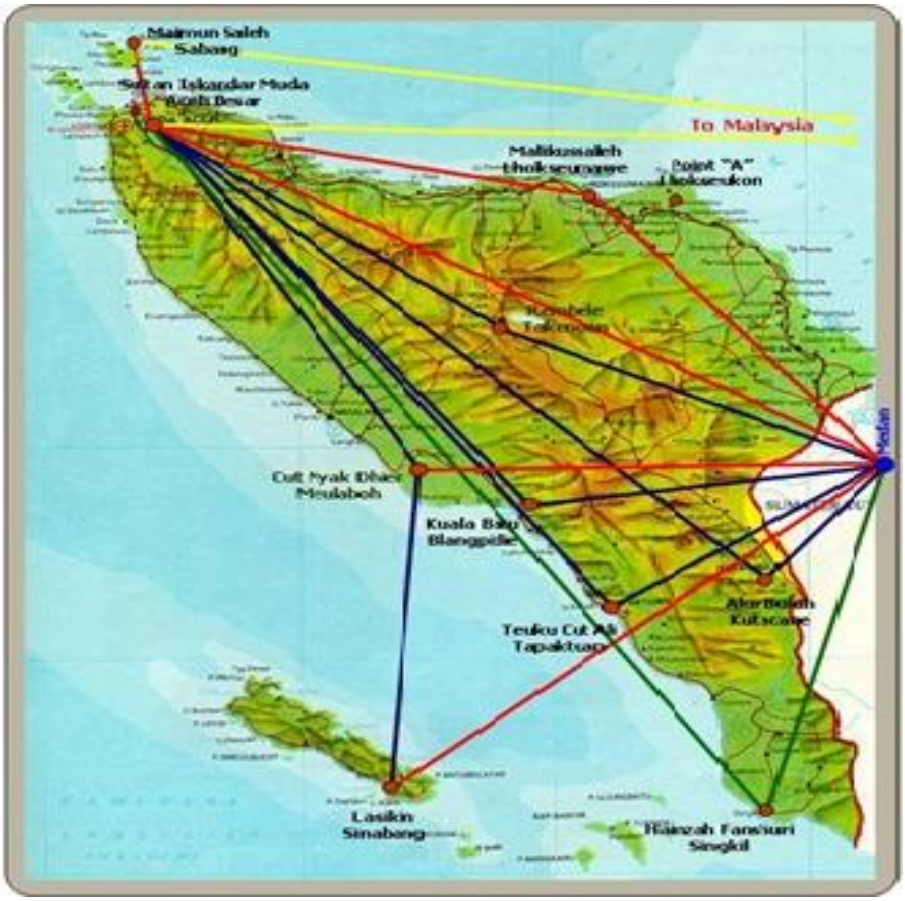

Gambar 2.30 Rute Penerbangan Wilayah Aceh

Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dan kelayakan yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan personil baik di Bandar udara maupun di perusahaan penerbangan. Sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa pelabuhan dan bandara yang dikelola oleh BUMD harus dikerjasamakan dengan Pemerintah Aceh. Selanjutnya didalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan diamanatkan Pelabuhan dan Bandar Udara dapat dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan/Bandara.

Maka, upaya peningkatan yang perlu dilakukan terhadap pelayanan transportasi udara adalah pembangunan prasarana bandara Gayo Lues, Cut Nyak Dhien, Lasikin, Hamzah Fansuri, Rembele, Malikussaleh, dan pembangunan gedung VIP bandar SIM; Pembentukan suatu lembaga yang dapat mendidik sumber daya manusia Aceh di bidang kedirgantaraan; Badan Usaha yang mengelola pelabuhan dan Bandar udara harus dikerjasamakan dengan

Pemerintah Aceh untuk menghilangkan dikotomi peraturan-peraturan tersebut sebelumnya di masa yang akan datang.

2.4.2.2. Penataan Wilayah

Dalam penataan wilayah difokuskan pada penataan daerah, penatapan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

A. Penataan Daerah

Dalam penataan daerah tidak terlepas dengan penegasan batas daerah yang merupakan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah, dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, sehingga dapat mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di wilayah perbatasan daerah, sekaligus mengantisipasi terjadinya perselisihan batas daerah yang berimplikasi pada penataan ruang daerah. Aceh mempunyai 39 (tiga puluh sembilan) segmen batas kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dan 10 (sepuluh) segmen batas kabupaten/kota terkait batas Aceh - Sumatera Utara. Selanjutnya dalam menjamin tertib administrasi wilayah pemerintahan perlu dilakukan pembakuan nama-nama rupa bumi, karena sebagian besar unsur rupa bumi yang merupakan bagian fisik alami maupun rupa bumi unsur buatan yang tersebar di wilayah Aceh masih belum bernama.

Selain itu, Aceh juga bersinggungan dengan kawasan perbatasan Negara, dari Selat Malaka, Laut Andaman, sampai dengan Samudera Hindia, sehingga dalam penataan wilayah juga tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Dalam hal ini Aceh dapat bersinergi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Fokus lainnya dalam penataan daerah yaitu kajian pengembangan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah dari sisi rentang kendali dan kualitas pelayanan di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim dan Gampong. Kajian pengembangan daerah dimaksudkan sebagai suatu upaya merespon terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Berdasarkan jenis dan fungsinya kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Aceh diperuntukkan sebagai Hutan Suaka Alam (HSA), Hutan Pelestarian Alam (HPA), Taman Buru (TB), Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (KLDK).

Kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Aceh antara lain adalah Taman Nasional Gunung Leuser (623.987 ha) yang secara administratif wilayahnya termasuk di dalam Kabupaten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara; Taman Lingge Isak (80.000 ha) di Kabupaten Aceh Tengah; Cagar Alam Jantho (16.640 ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan (6.220 ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie; Suaka Marga Satwa Rawa Singkil (102.500 ha) di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil; Taman Laut Pulau Weh Sabang (2.600 ha) di Kota Sabang (BPS, 2009).

Sedangkan penggunaan lahan untuk budidaya dan penggunaan lainnya adalah terdiri dari perkampungan (117.582 ha), industri (3.928 ha), pertambangan (115.049 ha), persawahan (311.849 ha), pertanian lahan kering semusim (137.665 ha), kebun (305.591 ha), perkebunan besar (691.050 ha), perkebunan kecil (51.461 ha), padang (padang rumput, alang-alang, semak) seluas 229.726 ha, hutan (lebat, belukar, sejenis) seluas 3.523.925 ha, perairan darat (kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau, rawa) seluas 204.292 ha dan tanah terbuka (tandus, rusak, land clearing) seluas 44.439 ha. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan hutan masih mendominasi yaitu 61,43 persen dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan lainnya (BPS, 2009).

Sementara itu, rencana tata ruang Aceh 2010-2030 (tahap finalisasi) menunjukkan bahwa luas kawasan lindung 3.690.244,13 ha ditambah dengan kawasan hutan produksi 173.376,89 ha, maka luas total hutan di Aceh adalah 3.688.872,73 ha, atau sebesar 68,62 persen dari luas wilayah Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya strategis Aceh seluas 353.946,81 ha yang terdiri dari hutan produksi (173.378,81 ha) dan pertanian pangan lahan basah (180.568,00 ha).

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

Sumber air rumah tangga terdiri dari dua kelompok yaitu sumber air terlindung (air kemasan, ledeng, pompa dan sumur terlindung) dan sumber air tidak terlindung (sumur tidak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai). Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air terlindung sebesar 66,6 persen dari total rumah tangga. Penggunaan sumur gali merupakan sumber air terbesar (60%) yang digunakan oleh rumah tangga di Aceh. Sisanya menggunakan sumber air Ledeng (23,6%), pompa (4%), air hujan (3,35%), air kemasan (3,2%), dan lainnya (Profil Kesehatan Aceh, 2009).

Data pembangunan prasarana air bersih telah ada di 23 kabupaten/kota dengan kapasitas terpasang saat ini 4.451,5 lt/dt yang terdiri dari sarana dan prasarana air bersih perkotaan dengan kapasitas 2.582 lt/dt, ibu kota kecamatan 93 IKK dengan kapasitas 849 lt/dt dan pedesaan 310 unit dengan kapasitas 1020,5 lt/dt. Sedangkan prasarana dan sarana

air bersih yang beroperasi 2.553,3 lt/dt, terdiri dari air bersih perkotaan 1.947 lt/dt, air bersih ibukota kecamatan (IKK) 478 lt/dt dan air bersih perdesaan 128,3 lt/dt. Selanjutnya, instalasi yang tidak beroperasi berkapasitas 676 l/dtk, terdiri dari 476 l/dtk rusak, 170 l/dtk dalam tahap pembangunan terdiri dari air bersih perkotaan 120 lt/dt dan air bersih ibukota kecamatan (IKK) 50 lt/dt dan 1.000,2 l/dtk tidak diketahui operasionalnya terdiri dari air bersih perkotaan 10 lt/dt, air bersih ibukota kecamatan (IKK) 165 lt/dt dan pedesaan 852 lt/dt.

Saat ini tingkat pelayanan air bersih perkotaan baru mencapai 27,4 persen sehingga masih diperlukan berbagai upaya agar target MDG's di akhir tahun 2015 dapat tercapai dimana 80% penduduk diperkotaan dan 60 persen penduduk perdesaan diharapkan telah mendapatkan kemudahan pelayanan air bersih/air minum dengan faktor kehilangan air fisik dan non fisik rata-rata 20 persen.

Permasalahan dalam penyediaan air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 % dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pengembangan sistem distribusi air minum pada 5 kawasan, 50 ibu kota kecamatan (IKK), 135 pedesaan, serta kawasan khusus seperti: kabupaten/kota pemekaran, kawasan perbatasan, kawasan Kapet, ataupun kawasan pelabuhan perikanan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan Aceh diselenggarakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Qanun Aceh yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. Berdasarkan perturan perudang-undangan tersebut maka ruang lingkup pengelolaan keuangan Aceh adalah meliputi:

1. Hak untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah, melaksanakan pembangunan dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Pengelolaan pendapatan;
4. Pengelolaan belanja;
5. Pengelolaan pembiayaan yang meliputi aspek kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu yang mencerminkan kualitas pengololaan keuangan Aceh dapat dilihat melalui kinerja pelaksanaan APBA dan neraca Aceh selama empat tahun terakhir (2008-2011).

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBA

Kinerja pelaksanaan APBA meliputi kinerja pengelolaan pendapatan dan belanja Aceh. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber penerimaan daerah provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Secara umum pendapatan Aceh masih sangat bergantung pada pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat sebagaimana tercermin pada struktur pendapatan Aceh. Dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan mendominasi pendapatan Aceh sampai rata-rata 87,77 persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Sebaliknya kontribusi Penadapatan Asli Aceh (PAA) dalam kurun waktu yang sama terhadap pendapatan Aceh masih tergolong sangat kecil hanya mencapai 11,87 persen. Ini sebuah kondisi yang tidak menggemberikan terhadap kemandirian fiskal Aceh.

Secara detil realisasi Pendapatan Aceh selama empat tahun terakhir (2008-2011) disajikan dalam **Tabel 3.1**. Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pendapatan rata-rata tumbuh sampai 5,96 %. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungan yaitu pendapatan dari dana otonomi khusus. Sedangkan pendapatan dari Penadapatan Asli Aceh (PAA) rata-rata pertumbuhannya sangat kecil yaitu hanya 2.72 persen. Walau pun demikian hal positif yang telah dicapai adalah realisasai pendapatan aceh terus mengalami peningkatan dan dapat melebihi target yang ditetapkan sejak tahun 2010. Kecilnya kontribusi PAA terhadap total pendapatan sejak tahun 2008 juga dipengaruhi oleh adanya penerimaan dana otsus yang sangat singnifikan terhadap total pendapatan.

Masih rendahnya kontribusi PAA jika dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari dana tranfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan dan otonomi khusus) mencerminkan bahwa belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber PAA masih didominasi oleh pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor, padahal sumber pendapatan tersebut bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Selama kurun waktu 2008-2009, capaian realisasi pendapatan terhadap target belum mengembirakan, tahun 2008 rasio efektivitasnya hanya -10,25 dan tahun 2009 hanya -7,09. Namun demikian tahun 2010 rasio efektifitas jauh lebih baik yaitu 0,17 sebagaimana disajikan pada Tabel **Tabel 3.2** dan **Gambar 3.1**.

Sementara itu pendapatan dari dana perimbangan tumbuh rata-rata 4,74 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan dari dana dan dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang secara berturut-turut tumbuh rata-rata 13.07 persen dan 11.13 persen. Pertumbuhan kedua sumber pendapatan tersebut dapat mengimbangi turunnya pendapatan dari dana bagi hasil sampai -16,02 persen. Pendapatan dari dana otonomi khusus tersebut yang meningkat setiap tahun seiring dengan tumbuhnya ekonomi nasional akan diperoleh sampai tahun 2027. Hal ini akan memberikan prospek yang baik terhadap kondisi fiskal Aceh di masa yang akan datang. Sedangkan penurunan dana bagi hasil yang drastis diakibatkan oleh menurunya penerimaan bagi hasil minyak dan gas bumi yang dipekirakan akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang dengan belum adanya sumber-sumber dari ladang minyak dan gas yang baru.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Target 2012* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	6.911.764.844.913,10	6.042.448.625.663,03	6.541.343.824.315,66	7.607.653.826.184,20	8.714.166.146.982	5,96
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	721.708.102.681,10	743.205.978.025,03	796.842.785.529,59	799.451.065.471,20	803.642.821.605	2,72
1.1.1.	Pajak daerah	464.317.354.502,00	462.151.772.869,00	521.326.091.588,00	586.128.576.595,00	622.118.656.181	7,59
1.1.2.	Retribusi daerah	12.201.890.114,00	12.040.362.913,00	7.493.489.473,21	9.416.062.290,22	21.095.694.260	14,67
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	66.796.142.319,73	75.104.468.183,00	98.845.196.792,36	66.014.699.636,59	102.000.000.000	11,16
1.1.4.	Zakat	14.314.166.205,00	22.649.354.923,00	23.453.583.646,00	7.097.968.006,63	8.961.710.458	-11,05
1.1.5.	Lain-lain PAD yang sah	164.078.549.540,37	171.260.019.137,03	145.724.424.030,02	130.793.758.942,76	49.466.760.706	-25,90
1.2.	Dana Perimbangan	6.190.056.742.232,00	5.298.885.947.638,00	5.713.330.175.378,00	6.773.424.189.713,00	7.448.527.155.377	4,74
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	2.031.965.789.232,00	1.012.728.723.638,00	1.212.091.519.378,00	1.495.510.221.213,00	1.010.743.974.377	-16,02
1.2.2.	Dana alokasi umum	557.327.156.000,00	509.686.224.000,00	621.074.916.000,00	716.646.172.000,00	911.080.707.000	13,07
1.2.3.	Dana alokasi khusus	10.620.900.000,00	48.189.000.000,00	30.356.900.000,00	50.611.300.000,00	50.413.710.000	47,60
1.2.4.	Dana Otonomi Khusus	3.590.142.897.000,00	3.728.282.000.000,00	3.849.806.840.000,00	4.510.656.496.500,00	5.476.288.764.000,00	11,13

No	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Target 2012* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	356.700.000,00	31.170.863.408,07	34.778.571.000,00	461.996.170.000,00	99,05
1.3.1	Hibah	-	-	-			
1.3.2	Dana darurat	-	-	-			
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	-	-	-			
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	3,590,142,897,000.00	3,728,282,000,000.00	3,849,806,840,000.00			
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-				
1.3.6	Lain-lain Pemerimaan						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Berlaku untuk kabupaten/kota;

Tabel 3.2
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Aceh (PAA)
Tahun 2008–2012

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	
2008	795.709.401.264,00	-	721.708.102.681,10	-	(10.25)
2009	795.872.000.000,00	0,02	743.205.978.025,03	2,98	(7.09)
2010	795.487.000.000,00	(0.05)	796.842.785.529,59	7,22	0.17
2011	797.284.999.424,00	0,23	799.451.065.471,20	0,33	
2012*	803.642.821.605,00	0,80	837.018.406.895,45	4,70	
Rata-rata Per Tahun		0,21		2,97	

**Target dan realisasi proyeksi*
Sumber : Diolah dari Buku Ringkasan APBA dan LKPJ 2008-2010.

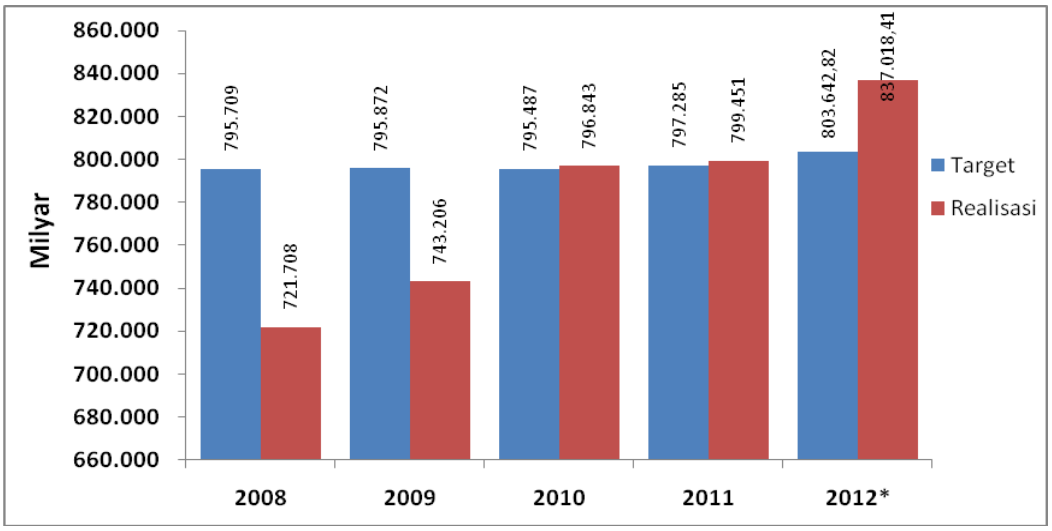

Gambar 3.1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Aceh (PAA)
Pada APBA Tahun 2008–2012

Setelah melihat kinerja pengelolaan pendapatan, aspek berikutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan APBA masa lalu adalah pengelolaan belanja aceh. Pengelolaan belanja aceh dalam periode tahun 2008-2011 tercermin pada realisasi belanja Aceh yang menunjukkan kenaikan setiap tahun. Tahun 2008 dan tahun 2009 realisasi belanja relatif rendah yaitu di bawah 80 persen. Hal ini disebabkan karena belum tersosialisasinya petunjuk pengelolaannya dengan baik pada tahun-tahun awal pelaksanaan program yang didanai oleh dana otonomi khusus (OTSUS) dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (TDBH Migas). Akan tetapi sejak tahun 2010 realisasi belanja mencapai menunjukkan tingkat realisasi belanja yang signifikan mencapai 91 persen, tahun 2011 mencapai 93 persen.

3.1.2. Neraca Aceh

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Aceh selama kurun waktu 2008-2010 seperti terlihat pada **Tabel 3.3** dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2008-2010, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Aceh mencapai 23,07 persen yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Aceh meningkat sebesar 23,07 pesen setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh dan juga menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pertumbuhan rata-rata aset lancar -17,98 persen, meskipun piutang dan persediaan meningkat masing-masing sebesar 10,79% dan 20,05 persen. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -18,46%. Pertumbuhan asset lancer yang negatif menunjukan bahwa kondisi aset Pemerintah Aceh berada pada kondisi yang belum memuaskan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas

atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2008-2010) Pemerintah Aceh tidak mempunyai kewajiban baik kepada pihak ketiga ataupun klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Aceh. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Aceh selama kurun waktu tersebut selalu dapat mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada tanpa melakukan pinjaman pada pihak ketiga **(Tabel 3.3)**.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2008-2010

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**	
1.1.	ASET LANCAR	**(17,98)**
1.1.1.	Kas	(18,46)
1.1.2.	Piutang	10,79
1.1.3.	Persediaan	20,05
1.2	**INVESTASI**	
1.3.	**ASET TETAP**	**34,71**
1.3.1.	Tanah	25,22
132.2.	Peralatan dan mesin	19,25
1.3.3.	Gedung dan bangunan	66,95
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	36,34
1.3.5.	Aset tetap lainnya	24,33
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	191,44
1.4.	**ASET LAINNYA**	
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	-
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-
1.4.4.	Aset tak berwujud	-
1.4.5.	Aset Lain-Lain	-
	JUMLAH ASET DAERAH	**23,07**
2.	**KEWAJIBAN**	
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Pokok Pinjaman	-
2.1.5	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Bunga Pinjaman	-
2.1.6	Utang Bagi Hasil Pajak-Retribusi kepada PEMKAB/PEMKOT	-
3.	**EKUITAS DANA**	
3.1.	**EKUITAS DANA LANCAR**	
3.1.1.	SILPA	(18,46)
3.1.2.	Cadangan piutang	13,10
3.1.3.	Cadangan persediaan	20,05
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan	-
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-
3.2.	**EKUITAS DANA INVESTASI**	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	34,41
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	16,32

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	21,37
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**22,94**

Sumber : Diolah dari Buku Ringkasan APBA dan LKPJ 2008-2010.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Aceh. Ekuitas Dana Pemerintah Aceh selama kurun waktu 3 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 22,94 persen yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup memadai.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Aceh, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBA. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik daerah, peningkatan keterampilan Aparat Pengelola Pendapatan daerah agar mendukung tingkat produktifitas yang tinggi, meningkatkan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi, otonomi khusus dan pemerataan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh selama tiga tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

a. Peningkatan pendataan objek dan subjek pajak yang lebih intensif dan akurat.
b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja dan pembentukan Kantor SAMSAT baru secara bertahap di setiap ibukota Kabupaten/Kota.
c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait (Kepolisian/Ditlantas, Jasa Raharja, DLLAJ, Pertamina serta Dinas Pertambangan dan Energi).
d. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak.
e. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak.

f. Menggali sumber-sumber pendapatan baru, sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Disamping itu beberapa kebijakan umum dan strategi untuk meningkatkan penerimaan Migas 2008 sebagai berikut:

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tim advokasi Migas yang harus bertindak proaktif terhadap perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak termasuk ketepatan dalam penyalurannya. Salah satu langkah pertama yang perlu segera ditempuh untuk merealisasikan kebijakan ini adalah mempercepat terbentuknya Badan Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Aceh serta melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
b. Mempercepat proses pencairan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan membentuk sistem pencaiaran keuangan yang lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama antara pemerintah dan pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
c. Mengatur prosedur dan mekanisme yang adil dan merata terhadap penerimaan dana otonomi khusus antara antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat ditempuh berpedoman pada Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tambahan Migas dan Penggunaan Dana Otsus yang rancangannya sedang dibahas bersama dengan DPR Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga mengamanatkan pengelolaan dana pendidikan secara khusus dan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan TDBH Migas dan Dana Otsus bidang pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat Aceh.

Paling sedikit 30% dari pendapatan Aceh yang berasal dari TDBH Migas dialokasikan untuk dana pendidikan Aceh dan paling sedikit 20 persen dari pendapatan pemerintah Aceh yang berasal dari Dana Otsus dialokasikan untuk dana pendidikan. Pengalokasian dana pendidikan tersebut dilakukan sebagai berikut: paling banyak 40 persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan pendidikan Pemerintah Aceh dan paling sedikit 60 persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan pendidikan kabupaten/kota. Pengalokasian dana tersebut dilakukan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2012.

3.2.1. Proporsi Pengunaan Anggaran

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2008	1.384.539.383.903,00	4.653.577.293.417,87	29,75
2	Tahun Anggaran 2009	2.246.634.504.003,25	5.968.184.532.281,00	37,64
3	Tahun Anggaran 2010	2.408.249.262.793,00	5.124.358.223.123,00	47,00
4	Tahun Anggaran 2011	2.739.530.705.870,00	6.153.774.145.977,54	44,52
5	Tahun Anggaran 2012*	2.797.800.000.000,00	9.511.939.653.801	29,41
	Rata-rata			37,66

Sumber : Diolah dari Buku Ringkasan APBA dan LKPJ 2008-2010.

Selama periode tahun 2008-2012, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 37,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relative masih lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja langsung). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun tahun 2008-2010 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.5 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa defisit riil anggaran Pemerintah Aceh meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Hal ini disebabkan meningkatnya belanja dan pengeluaran daerah secara signifikan yang tidak diimbangi oleh meningkatnya pendapatan daerah yang sebanding. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, hanya mengandalkan penerimaan dari SiLPA tahun sebelumnya. Apabila belanja dan pengeluaran daerah terus meningkat disertai dengan tingginya serapan anggaran sementara sumber pendapatan daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan maka tahun-tahun kedepan dikawatirkan keuangan daerah akan mengalami defisit. Keadaan ini mencerminkan pengolaan keuangan daerah yang belum memuaskan.

Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Aceh Tahun 2008-2013

No	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	6.911.764.844.913,10	6.042.448.625.663,03	6.541.343.824.315,66	7.607.653.826.184,20
	Dikurangi realisasi:				
2.	Belanja Daerah	5.715.623.665.304,00	7.642.806.651.794,25	7.532.607.485.916,00	7.374.632.649.255,50
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	322.493.012.016,87	572.012.384.490,00	-	(233.021.275.928,70)
	Defisit riil	0	-211.370.410.621.25	-991.263.661.600.66	0

Sumber : Diolah dari Buku Ringkasan APBA dan LKPJ

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah saat RPJMA tahun 2012-2017 dibuat, memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.6
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Aceh Tahun 2009 -2011

No	Uraian	2009	2010	2011	Laju Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung	1.134.636.987.737,25	1,100,071,261,049.00	1.252.275.027.517,00	5,06
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	720.793.003.818,25	787.604.618.674,00	811.505.285.361,00	6,11
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	313.843.983.919,00	162.466.642.375,00	236.584.907.172,00	(13,18)
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	204.184.834.984,00	42,89
B	Belanja Langsung	1.701.584.136.101,00	1.852.346.674.554,00	3.373.160.716.521	40,80
1	Belanja Pegawai	241.227.973.162,00	248.507.379.228,00	252.925.171.167,00	2,40
2	Belanja Barang dan Jasa	1.460.356.162.939,00	1.603.839.295.326,00	3.120.235.545.353,50	46,17
C	Pembiayaan Pengeluaran				
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		

No	Uraian	2009	2010	2011	Laju Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-		
	TOTAL (A+B+C)	2.836.221.123.838,25	2.952.417.935.603,00	4.625.435.744.038,00	27,70

Sumber: Diolah dari Buku Ringkasan APBA dan LKPJ 2008-2010

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu hingga tahun 2010, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2017 mendatang **(Tabel 3.7)**.

Tabel 3.7
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Aceh
Untuk Pendanaan Pembangunan
Pada Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Proyeksi (Rupiah)				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Pendapatan	9.237.016.115.801	9.791.237.082.749	10.378.711.307.714	11.001.433.986.177	11.661.520.025.347
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	776.955.092.304	500.698.560.405	514.596.782.158	544.665.404.494	577.304.969.534
	Total penerimaan	10.013.971.208.105	10.291.935.643.154	10.893.308.089.872	11.546.099.390.670	12.238.824.994.881
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (belanja bagi hasil kepada pemerintah kab/kot)	291.596.000.000	313.757.296.000	337.602.850.496	363.260.667.134	390.868.477.836
5.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	9.722.375.208.105	9.978.178.347.154	10.555.705.239.376	11.182.838.723.537	11.847.956.517.045

Sumber : Diolah dari Buku Ringkasan APBA dan LKPJ 2008-2010

Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Aceh untuk 5 (lima) Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMA pada tahun 2017, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2013 sebesar Rp. 9.722.375.208.105 atau sebesar 97,09 persen dari total penerimaan.
2. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp. 9.978.178.347.154,23 atau sebesar 96,95 persen dari total penerimaan.

3. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp. 10.555.705.239.375,6 atau sebesar 96,90 persen dari total penerimaan.
4. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. 11.182.838.723.536,6 atau sebesar 96,85 persen dari total penerimaan.
5. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp. 11.847.956.517.045 atau sebesar 96,81 persen dari total penerimaan.

Jika dibandingkan kapasitas riil tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,63 persen terhadap tahun 2013, kapasitas riil tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,79 persen terhadap tahun 2014, demikian juga tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,94 persen terhadap tahun 2015, kapasitas riil tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,95 persen terhadap tahun 2016. Hal ini disebabkan total pendapatan yang diterima setiap tahun mengalami kenaikan terutama proyeksi pendapatan dana Otsus/TDBH Migas sesuai dengan DAU Nasional.

Tabel 3.8
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Aceh

No	Uraian	Proyeksi (Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	9.722.375.208.105	9.978.178.347.154	10.555.705.239.376	11.182.838.723.537	11.847.956.517.045
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	6.179.950.612.059	6.057.951.091.994	6.484.084.856.442	6.953.291.613.051	7.453.644.557.292
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	355.673.045.190	359.229.775.642	362.822.073.398	366.450.294.132	370.114.797.074
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
II	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)**	**5.824.277.566.869**	**5.698.721.316.352**	**6.121.262.783.044**	**6.586.841.318.919**	**7.083.529.760.218**
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	3.898.097.641.236	4.279.457.030.802	4.434.442.456.332	4.595.997.404.617	4.764.426.756.827
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Langsung	2.681.903.586.784	2.825.575.704.580	2.977.101.813.958	3.136.921.541.496	3.305.499.779.989
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama (SKPA)	478.846.922.864	512.366.207.465	548.231.841.987	586.608.070.926	627.670.635.891
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)**	**2.203.056.663.920**	**2.313.209.497.116**	**2.428.869.971.971**	**2.550.313.470.570**	**2.677.829.144.098**
IV	**Total Rencana Pengeluaran Periotas III (Belanja Tidak Langsung)**	**1.695.040.977.316**	**1.966.247.533.687**	**2.005.572.484.360**	**2.045.683.934.048**	**2.086.597.612.728**

Sumber: Data diolah, 2012

Tabel 3.9
Alokasi Pendanaan Kapasitas Riil Keuangan Aceh
Tahun 2012-2017

No	Jenis Dana	Proyeksi									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Prioritas I	5.824.277.566.869	59,91	5.698.721.316.352	57,11	6.121.262.783.044	57,99	6.586.841.318.919	58,90	7.083.529.760.218	59,79
2	Prioritas II	2.203.056.663.920	22,66	2.313.209.497.116	23,18	2.428.869.971.971	23,01	2.550.313.470.570	22,81	2.677.829.144.098	22,60
3	Prioritas III	1.695.040.977.316	17,43	1.966.247.533.687	19,71	2.005.572.484.360	19,00	2.045.683.934.048	18,29	2.086.597.612.728	17,61
Total		9.722.375.208.105	100	9.978.178.347.154	100	10.555.705.239.376	100	11.182.838.723.537	100	11.847.956.517.045	100

Sumber: data diolah, 2012

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah derah dalam membiayai:

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan *(dedicated)* Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMA dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPA yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPA termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
c. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Dalam rangka mengimplementasikan program priortas I, II dan III agar tepat sasaran maka Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya sebagai berikut:

1. Komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya;
2. Melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Melakukan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Pemerintah Aceh agar melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan potensial;
3. Memberikan insentif dan disinsentif kepada investor.
4. Memanfaatkan zakat/infaq/sedakah sebagai Pendapatan Asli (PAD).

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU SRATEGIS

Aceh untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2012-2017.

4.1. Permasalahan dan Tantangan Aceh

4.1.1. Belum Optimalnya pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud MoU Helsinki

UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. Namun masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga menghambat pembangunan Aceh. Oleh karena itu, penyelesaian peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah serta peraturan lainnya menjadi program prioritas.

Penyelesaian peraturan pemerintah dan peraturan presiden merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Aceh hanya memiliki kewajiban dalam penyiapan draf PP dan Perpres. Oleh karena itu, draft PP dan Perpres yang belum ada harus disiapkan segera oleh Pemerintah Aceh melalui pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian PP dan Perpres. Demikian juga terhadap qanun-qanun yang belum selesai, perlu segera dituntaskan agar implementasi reformasi birokrasi segera dapat terwujud.

4.1.2. Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Praktek KKN mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan telah memicu biaya ekonomi tinggi. Pratik KKN menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan produktifitas masyarakat. Selain itu, proses pembangunan juga akan berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dari pada kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang penetapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahanan yang *clean* dan *clear government* serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat luas untuk pemberantasan KKN sangat diperlukan.

4.1.3. Masih Lemahnya Organisasi, Tata Laksana, dan SDM Aparatur

Efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme pelaksanaan roda pemerintahan sangat tergantung dari struktur organisasi, tatalaksana, dan juga dukungan sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu dilakukannya kajian yang mendalam mengenai kebutuhan struktur organisasi pemerintahan yang akan dituangkan dalam ukuran yang tepat (*right sizing*). Struktur organisasi yang ideal juga perlu didukung oleh penempatan sumber daya aparatur yang tepat, memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini perlu dijaga mulai dari perekrutan, penempatan, sampai dengan pengaturan reward dan punishment. Dalam rangka mendorong terwujudnya reformasi birokrasi maka diperlukan pengembangan dan penyempurnaan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dan evaluasi pengeluaran anggaran secara berkala. Oleh karena itu maka diperlukan mekanisme pemantauan kinerja setiap lembaga pemerintahan daerah.

4.1.4. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal

Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh belum maksimal, terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dinul Islam di kalangan masyarakat Aceh. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum, kuatnya pengaruh negatif globalisasi yang umumnya tidak sejalan dan bertentangan dengan tuntunan Dinul Islam. Hal tersebut telah mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah yang negatif. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai dinul Islam perlu dilaksanakan sejak usia dini baik di lingkungan formal dan informal. Disamping itu, perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik perlu ditingkatkan.

4.1.5. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh

Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 19,38 persen, masih lebih besar dari penduduk miskin tingkat nasional yang hanya sebesar 12,49 persen. Disamping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 3,48 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,94 (BPS, 2011). Di sisi lain, sebaran penduduk miskin Aceh lebih dominan berada di pedesaan (80,14%), sedangkan diperkotaan hanya 19,86 persen. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja,

peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi menjadi prioritas di masa yang akan datang. Demikian juga dengan dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan masyarakat dan penguatan kelembagaannya perlu ditingkatkan.

4.1.6. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 7,43 persen, sementara angka pengangguran terbuka nasional hanya sebesar 6,80 persen. Jika dilihat dari sisi gender, keberadaan pengangguran terbuka perempuan tahun 2011 mencapai 8,50 persen lebih tinggi 1,70 persen dibandingkan pengangguran terbuka laki-laki sebesar 6,80 persen. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan masyarakat sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja perlu mendapat perhatian secara serius. Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, peningkatan kapasitas dan manajemen BLK sangat diperlukan. Demikian juga dengan lulusan sekolah menengah kejuruan perlu difasilitasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

4.1.7. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh belanja pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan Aceh. Pihak swasta masih sangat tergantung pada anggaran belanja pemerintah (APBN, APBA dan APBK). Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal, nasional maupun asing untuk berinvestasi di Aceh. Oleh karena itu, sinkronisasi investasi pembangunan menjadi penting untuk tercapainya sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya dan keunikan lokal.

4.1.8. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum berkembang dengan baik

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. Misalnya pada tahun 2010, data Kementerian Koordinator Perekonomian

menunjukkan bahwa daya serap Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Propinsi Aceh hanya sebesar 0,8% dari total plafon nasional sebesar Rp 24 trilliun. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh adalah terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian berusaha, persaingan pasar yang kurang sehat, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar. Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan bahkan pasar internasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro kecil menengah yang berbasis agro industry, industri kreatif, dan inovatif yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM.

4.1.9. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam masih belum optimal dalam rangka membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian masih sangat rendah jika dilihat dari produksi dan produktivitas. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya kepemilikan lahan per kepala keluarga. Rata-rata kepemilikan lahan perkepala keluarga hanya sekitar 0,25 – 0,6 ha/kk dengan Indeks Penanaman (IP) sekitar 1,28 pertahun, sedangkan rata-rata produktivitas padi baru mencapai 4,6 ton/ha. Disamping sektor pertanian, sektor-sektor lain yang bergerak dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam juga mengalami persoalan yang sama, seperti: pemanfaatan energi baru terbarukan, sumber daya kelautan dan kehutanan sehingga belum mampu memperkuat nilai tambah masyarakat terhadap produk yang dihasilkannya.

Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan hutan, pemanfaatan sumber daya air, usaha pertambangan, usaha perkebunan, dan kelautan serta pengelolaan kawasan pesisir yang belum tepat sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya bencana alam.

4.1.10. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah

Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah hanya sebesar 5,02 persen pada tahun 2011, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 6,5 persen (Bank Indonesia, 2011). Disamping itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi Aceh pada

periode 2007-2011 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Hal ini menggambarkan bahwa pondasi struktur ekonomi Aceh masih lemah dan labil.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah, rendahnya minat investasi swasta pada sektor produktif dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produksi dan nilai tambah dari produk unggulan daerah yang belum secara nyata meningkatkan struktur ekonomi Aceh. Berdasakan kondisi tersebut di atas, peningkatan produk dan nilai tambah komoditi unggulan daerah menjadi prioritas pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh ke arah yang lebih baik.

Untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana yang diuraikan di atas salah satu konsep yang dapat digunakan adalah kerangka kerja sistem inovasi. Pengembangan teoretik dari sistem inovasi didasarkan pada hipotesis bahwa proses inovasi tidak terjadi dalam suatu area yang terisolasi dari lingkungannya, tetapi merupakan hasil dari interaksi-interaksi yang bersifat sistemik. Sebuah sistem inovasi mencakup sistem riset iptek, berbagai unsur dari lingkungan ekonomik, sistem perbankan, sistem pendidikan dan pelatihan, sektor-sektor publik, serta kondisi sosio-kultural masyarakat. Ukuran bagi kinerja dari sebuah sistem inovasi ditentukan dengan berfokus pada nilai-nilai tambah ekonomik atau sosial (sebagai *outcome*) dari inovasi.

4.1.11. Kualitas Sumberdaya Manusia Masih Rendah

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) Aceh masih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian rata-rata nasional yang direpresentasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Demikian juga dengan daya saing SDM Aceh masih tergolong rendah, yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan SDM kejuruan yang memiliki keterampilan (*skill*), rendahnya daya saing lulusan SMA/sederajat untuk memasuki Perguruan Tinggi jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi masih sedikit dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Hal ini tergambar dari angka rasio ketergantungan hidup mencapai 54,89 persen pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 55,59 persen pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 56 penduduk usia tidak produktif.

Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Aceh yang dapat dilihat dari masih tingginya proporsi masyarakat Aceh yang mengalami keluhan kesehatan yaitu 30% dari jumlah penduduk Aceh. Penyakit-penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, deman berdarah dan HIV-AIDS belum tuntas tertangani, sementara penyakit tidak menular seperti

diabetes, hypertensi dan stroke sudah menjadi ancaman baru ditengah-tengah masyarakat. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu pada saat melahirkan masih tinggi. Demikian juga dengan masalah gizi. Prevalensi gizi kurang dan buruk serta balita pendek masih tinggi. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik memberi dampak negatif terhadap situasi kesehatan masyarakat. Disisi lain tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat juga masih rendah.

4.1.12. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Masih Rendah

Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan yang penggunaannya diatur sesuai dengan pola ruang. Pola ruang wilayah Aceh terdiri dari kawasan lindung seluas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya seluas 2.934.602 Ha (52,3%). Hutan Aceh pada tahun 2008 seluas 3.523.925 Ha (60,37%) dan pada tahun 2010 seluas 2.291.080 ha (40,36%). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (*deforestasi*) sebesar 20,01%. Terjadinya deforestasi akibat adanya kebijakan yang lebih mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek lingkungan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor perilaku manusia juga menjadi permasalahan utama dalam kerusakan lingkungan, dimana sering sekali menganggap sungai dan sepadan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan kegiatan usaha pertnian yang dapat mengakibatkan penyempitan, sedimentasi dan penurunan kualitas air.

Pembangunan yang tidak terpadu (*fragmented*) selama ini telah berakibat perubahan drastis negatif terhadap kondisi lingkungan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan (pertambangan mineral, batubara, migas, dan galian C) telah mengubah bentang alam tanpa terkendali. Terlebih lagi sumber daya alam terbarukan oleh deforestasi intensif (*legal and illegal logging*) untuk pembangunan fisik infrastruktur, transportasi, industri, perkebunan, pertanian, telah mengakibatkan penyusutan drastis tutupan vegetasi hutan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan punahnya keanekaragaman hayati.

Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap bencana, khususnya bencana alam. Tingkat resiko bencana alam yang terjadi setiap tahunnya sangat tinggi, terutama bencana banjir dan kekeringan. Sangat terbatasnya investasi infrastruktur tampungan penyimpanan air, telah berdampak pada keseimbangan hidrologi DAS, fluktuasi debit air di sungai menjadi sangat besar terutama pada musim hujan terjadi bencana banjir dan tanah longsor, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan. Sedangkan dalam hal penanggulangan bencana juga masih sangat lemah, terutama belum sistematis penaganannya, masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi

masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, lemahnya koordinasi penanggulangan baik dalam fase tanggap darurat maupun dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.1.13. Penanganan pasca konflik yang terisolasi dari pembangunan reguler

Berbagai dukungan pasca konflik yang berlangsung sejak 2005 sampai dengan saat ini telah menimbulkan ekslusifitas tersendiri. Banyak mantan kombatan dan korban konflik mengklaim bahwa mereka belum menerima bantuan. Namun disisi lain, sebagai kelompok, mantan kombatan dan warga sipil korban konflik tersebut sesungguhnya telah menerima bantuan reintegrasi yang lebih besar dibandingkan dengan warga sipil bukan korban. Bantuan yang bersifat tunai yang lebih mudah diakses bagi mantan kombatan dan warga sipil korban konflik dibandingkan dengan warga sipil bukan korban telah mengakibatkan perbedaan mencolok dalam upaya pembangunan kesejahteraan yang lebih luas.

Di satu sisi proses perdamaian di Aceh dimotori oleh Pemerintah (pusat dan daerah). Kondisi ini menyediakan banyak peluang unik namun juga terbatas berbagai keterbatasan dalam efektifitas program dan strategi pemerintah. Pemerintah tidak memiliki mata anggaran dan kelembagaan khusus untuk penangganan pasca konflik sehingga mendorong kelembagaan yang bersifat sementara (adhoc) untuk mengambil peran yang lebih dominan dengan menggunakan infrastruktur dan suprastruktur instansi yang lebih permanen. Namun disisi lain, perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program-program pasca konfik menjadi sesuatu yang terpisahkan dari perencanaan tahunan pemerintah bahkan hingga saat ini pemerintah tidak memiliki rancang bangun terpadu komprehensif yang diimplementasikan untuk memperkokoh proses perdamaian Aceh.

Pengalaman yang terbatas dikalangan birokrasi pemerintahan dalam penanganan pasca konflik telah mengakibatkan kepemilikan yang terbatas akan isu penguatan perdamaian itu sendiri. Upaya-upaya konsolidasi dan promosi perdamaian yang seharusnya menjadi keseharian birokrasi pemerintahan tidak sepenuhnya mampu diimplementasi dalam berbagai instasi dan organisasi, hal ini bahkan berdampak kepada minimnya ketersediaan system dan mekanisme bantuan reintegrasi yang dikembangkan.

4.1.14. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Masih Rendah

Berdasarkan data pada tahun 2011 yang bersumber dari BPP dan PA, terdapat 466 anak korban kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Badan PP PA Kabupaten /Kota. Dari unit PPA Polda, tahun 2010 terdapat 123 kasus anak berhadapan dengan hukum. Penanganan korban kekerasan yang dilakukan ditingkat masyarakat dan di pelayanan lainnya tidak terekam dengan baik, sehingga diyakini masih lebih banyak lagi anak dan perempuan korban kekerasan yang tidak terdeteksi. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan terdapat 1.956 kasus.

Menurut data dari Dinas Sosial Aceh terdapat 13.000 anak terlantar. Makin meningkatnya kasus pencabulan dan perkosaan serta traficking anak dan perempuan yang ditemukan menunjukkan masih lebih besar jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak tertangani dan direkam dengan baik.

4.1.15. Perencanaan dan Penganggaran belum Responsif Gender dan belum Berbasis Pada Pemenuhan Hak Anak

Perencanaan dan penganggaran di Aceh masih belum responsive gender dan belum berbasis pada pemenuhan hak anak. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan perempuan dan anak dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat gampong sampai dengan tingkat provinsi, sehingga kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan dan anak belum semuanya terakomodir dalam program-program pembangunan. Dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak pada tahun 2010 hanya 0.15% dari total RAPBA, sementara permasalahan perempuan dan anak yang harus diselesaikan sangat besar. Sementara itu dana yang dialokasikan untuk program perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak pada tahun 2007 hanya 0,08% dari RAPBA 2007. Hal ini tidak signifikan dengan angka kematian ibu di Aceh yang masih relatif tinggi (238/100.000) kelahiran hidup melebihi rata-rata angka kematian ibu nasional (228/100.000) kelahiran hidup, dan target MDG's 2015 sebesar 102/100.000 kelahiran hidup. Dalam bidang pendidikan sebagian besar dana dialokasikan untuk sekolah-sekolah formal, sedangkan perempuan dan anak masih banyak yang belum mempunyai akses pada pendidikan formal.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Aceh 2012 – 2017

4.2.1. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan Belum Optimal;

Isu strategis pembangunan di bidang reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu: 1) Pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki; 2) pengelolaan keuangan daerah; 3) organisasi, tata kelola dan sumber daya aparatur; dan 4) kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki belum berjalan secara optimal, hal ini diindikasikan dengan belum selesainya beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk agar UUPA dapat diimplementasikan, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah (PP); 2) Peraturan presiden (Perpres); dan 3) Qanun. Peraturan Pemerintah yang harus diselesaikan sebanyak 9 (sembilan), yang sudah ditetapkan sebanyak 3 (tiga), 2 (dua) PP sedang dalam pembahasan dan penyelesaian, 4 (empat) belum ada draft, terhadap peraturan yang telah ditetapkan belum didukung dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Peraturan presiden yang harus ada sebanyak 3 (tiga), 2 (dua) sudah ditetapkan menjadi Perpres dan 1

(satu) belum ada draft. Qanun yang harus ada sebanyak 48 substansi judul qanun, yang sudah ditetapkan menjadi qanun sebanyak 27 (dua puluh tujuh) substansi judul qanun dan 21 (dua puluh satu) belum ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

Pengelolaan keuangan daerah di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh pada umumnya belum berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 terhadap pengelolaan keuangan tahun 2010 di Aceh yang pada umumnya masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, hanya 4 (empat) Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 (satu) Pemerintah Daerah (Kabupaten) yang memperoleh predikat Tidak Wajar (TW). Selanjutnya, pemerintah Aceh masih belum efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi belanja langsung (65%) dan belanja tidak langsung (35%).

Organisasi dan tata kelola Pemerintah Aceh masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini terlihat dari adanya tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola pemerintahan belum dilaksanakan secara baik yang tergambar dari belum efisien dan efektifnya penggunaan anggaran, distribusi aparatur yang tidak merata dan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya, belum efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, sumber daya aparatur yang masih lemah, hal ini tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan publik belum maksimal yang terlihat dari pelayanan yang diberikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM Pemerintah Provinsi mencakup 9 (sembilan) bidang urusan yaitu perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan ketahanan pangan (Permendagri Nomor 32 Tahun 2012). Sementara, pelaksanaan SPM kabupaten/kota mencakup 15 (lima belas) urusan pemerintahan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian, pemerintahan dalam negeri, kominfo dan ketahanan pangan.

4.2.2. Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya Belum Optimal;

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dinul Islam melalui penerapan syari'at Islam di kalangan masyarakat Aceh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan

masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Dalam hal ini, implementasi Qanun Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan dinul islam belum maksimal. Demikian juga dengan kerukunan kehidupan beragama menjadi isu penting untuk meningkatkan toleransi antar ummat beragama yang didukung oleh peraturan yang sesuai dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

4.2.3. Ketahanan Pangan Belum Mantap dan Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah;

Isu strategis ketahanan pangan terkait dengan kerawanan pangan. Tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 251 kecamatan yang dianalisis, terdapat 133 kecamatan atau sekitar 52,99 persen rentan terhadap kerawanan pangan. Produksi dan produktivitas komoditi pangan padi dan jagung masih rendah. Hal ini tergambar dari produktivitas padi Aceh (4,66 Ton/Ha) dan jagung (4,03 Ton/Ha) masih dibawah rata-rata nasional untuk produktivitas padi (4,90 Ton/Ha) dan jagung (4,20 Ton/Ha), sedangkan produktivitas kedelai (1,41 Ton/Ha) sudah diatas rata-rata nasional (1,30 Ton/Ha). Demikian juga dengan nilai tambah produk pertanian masih rendah yang diindikasikan oleh belum berkembangnya agroindustri.

4.2.4. Tingkat Kemiskinan Tinggi;

Tingkat kemiskinan di Aceh masih tergolong tinggi pada tahun 2011 sebesar 19,57 diatas rata-rata nasional dan Sumatera Utara yang besarannya adalah sebesar 12,49 dan 11,33. Penduduk miskin di Aceh periode 2007-2011 masih sangat terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Angka kemiskinan pada tahun 2011 untuk perkotaan 218.080 jiwa (13,69%) sedangkan di pedesaan sejumlah 864.900 jiwa (21,87%). Pemerintah Aceh mempunyai target menurunkan angka kemiskinan mencapai 9,50 persen pada tahun 2017.

4.2.5. Pembangunan Infrastruktur Antar Sektor dan Antar Wilayah Belum Terintegrasi;

Sistem jaringan jalan di Aceh belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai. Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan jalan yang belum dapat menghubungkan antar kawasan dengan baik. Tahun 2011 kondisi jalan nasional di Aceh kondisi baik 1.120,42 km, sedang 592,81 km dan rusak 90,13 km, serta belum tembus 81,98 km. Untuk jalan provinsi kondisi baik 820,08 km, sedang 547,63 km, rusak 375,62 km dan belum tembus 70,00 km. Pemerintah Aceh menargetkan sampai tahun 2017, semua jalan nasional dapat ditembuskan dan kondisi dalam kondisi mantap. Jalan provinsi dan jalan penghubung (*feeder road*) antar lintas pantai Timur – Utara hingga ke lintas Barat – Selatan dan menembus lintas Tengah akan ditingkatkan menjadi kondisi mantap. Selanjutnya total penanganan jalan provinsi lainnya yang harus dibangun/ditingkatkan adalah sepanjang 488,54 km, sedangkan yang dipelihara sepanjang 665,69 km. Pembangunan

jaringan transportasi belum memenuhi aspek keterpaduan antar moda darat, laut dan udara. Demikian juga dengan, efektifitas pengelolaan jaringan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik, teknologi informasi dan komunikasi belum terintegrasi secara optimal.

4.2.6. Mutu Pendidikan Masih Rendah;

Pemerintah Aceh yang telah berhasil meningkatkan AMH, APS, angka rata-rata lama sekolah, APK dan APM, namun belum dapat meningkatkan jumlah lulusan sekolah menengah yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri dalam dan luar Aceh. Hal ini berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi tenaga pendidik (guru), capaian peringkat Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) Guru Aceh tahun 2012 berada pada urutan ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia. Selanjutnya capaian kompetensi lulusan Sekolah Menengah di Aceh masih rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Nilai rataan yang dicapai lulusan Sekolah Menengah di Aceh untuk kelompok IPA hanya mencapai 44,86 (peringkat ke-31 dari 33 Provinsi), sedangkan kelompok IPS mencapai 43,19 (peringkat ke-25 dari 33 Provinsi).

Dari sisi kualifikasi, pada tingkat sekolah dasar tercatat 17 persen guru SD dan 30,18 persen guru MI yang berkualifikasi S1/D-IV. Sementara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), persentase guru SMP berkualifikasi S1/D-IV sebesar 70,30 persen dan guru MTs sebesar 73,48 persen.

Demikian juga dengan Guru/Teungku yang mengajar di dayah, kualifikasi Guru/Teungku yang berpendidikan S1/D-IV di Aceh berjumlah 2.346 orang (13,43%) dan pendidikan S2 berjumlah 172 orang (1,00%) dari total Guru/Teungku. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan Aceh difokuskan pada: 1) peningkatan kualitas guru dan guru/tengku dayah; 2) pendistribusian guru yang merata sesuai kebutuhan.

4.2.7. Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Rendah;

Usia harapan hidup (UHH) Aceh sebesar 68.7 di tahun 2010 masih berada dibawah angka nasional (69,43). Rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah. Jumlah dokter umum di Aceh tahun 2011 sebanyak 1.433 orang dengan rasio 31 per 100.000 penduduk, masih rendah dibandingkan dengan standar nasional 40 per 100.000 penduduk. Namun demikian, distribusinya belum merata diseluruh Puskesmas. Rasio dokter spesialis Aceh sebesar 8 per 100.000 penduduk pada tahun 2011 masih jauh dari standar nasional 20 per 100.000 penduduk. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih rendah yang tergambar dari 80,4 persen rumah tangga di Aceh belum menerapkan PHBS (kategori buruk), hanya 19,6 persen rumah tangga yang menerapkan PHBS (kategori baik).

Angka kematian bayi (AKB) 25 per 1.000 kelahiran hidup belum mencapai target MDGs (15 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015). Angka kematian balita (AKABA) di Aceh sebesar 45 per 1.000 kelahiran hidup masih lebih tinggi dari rata-rata

nasional, yaitu; 44 per 1.000 kelahiran hidup dan belum mencapai target MDGs 32 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) di Aceh masih sebesar 238 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan rata-rata AKI nasional sudah mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup, dan target MGDs 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Prevalensi Balita gizi buruk sebesar 23,7% pada tahun 2010 masih di atas angka rata-rata nasional yang telah mencapai 17,9%. Angka balita kurus juga terjadi penurunan di Aceh, pada tahun 2007 prevalensinya 18,3% turun menjadi 14,2% pada tahun 2010. Prevalensi KEK pada wanita usia 15-45 tahun di Aceh adalah 12,3% sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka KEK rata-rata Nasional (13,6%).

Seperempat (25%) wanita usia subur (WUS) di Aceh terlalu kurus atau dua kali lipat dari pada kondisi nasional (13.6%). Rata-rata kecukupan konsumsi energi penduduk umur 13-15 tahun (usia pra remaja) berkisar 67,9 persen- 84,7 persen. Kecukupan energi dan protein usia 13-15 tahun di Aceh adalah 22%. Angka ini adalah angka terendah di Indonesia. Prevalensi Pneumonia di Aceh sekitar 3,97 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sekitar 2.85 persen. Prevalensi Diare di Aceh sekitar 17,3 persen, angka ini dua kali lebih tinggi dari angka nasional (9%). Malaria masih endemis hampir diseluruh Aceh, prevalensi malaria di Aceh 3,7 persen masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang hanya sebesar 2.85 persen.

Prevelensi Tuberkulosis (TBC) di Aceh diperkirkan sebesar 1.45 persen, lebih tinggi dari prevelensi nasional yang hanya 0.99 persen. Prevelensi DBD di Aceh 1.1 persen, lebih tinggi daripada angka nasional sebesar 0,11 persen. Angka kesakitan DBD di Aceh sebesar 57,2 per 100.000 penduduk, masih lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan dibawah atau sama dengan 50 per 100.000 penduduk.

Penyakit Kusta juga masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Aceh, dimana Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Sumatera yang masih tergolong sebagai daerah endemis tinggi kusta (prevalensi di atas 1 per 10.000 penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah penderita kusta terdaftar mencapai 594 atau prevalensi 1,2 per 10.000 penduduk. Proporsi anak diantara kasus baru kusta yang ditemukan masih tinggi, yaitu 8,7 persen, sedangkan target nasional kurang dari 5 persen.

Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), seperti campak, pertusis dan tetanus neonatorum masih cukup tinggi kejadiannya di Aceh. Pada tahun 2011 dilaporkan terjadi sebanyak 708 kasus campak klinis, 93 kasus pertusis dan 3 kasus tetanus neonatorum. Jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS di Aceh sampai dengan 2011 sebanyak 112 kasus yang tercatat. Namun sekarang hampir semua (20 dari 23) kabupaten/kota di Aceh sudah menjadi daerah penyebaran HIV dan AIDS.

Penyakit Tidak Menular/PTM (*non-communicable disease*) sudah menjadi ancaman baru bagi kesehatan masyarakat Aceh. Aceh berada diurutan teratas untuk beberapa jenis

penyakit tidak menular, terutama penyakit Jantung, Stroke, Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Prevalensi penyakit jantung dan Stroke di Aceh secara berturut-turut sebesar 12.6 persen dan 16.6 persen, dua kali lipat dari prevalensi nasional masing-masing sebesar 7.2 persen dan 8.3 persen. Gangguan Mental Emosional di Aceh sebesar 14,1 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya 12,36 persen. Di Kabupaten Aceh Selatan, gangguan mental emosional mencapai 32,1 persen, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah Aceh harus mengupayakan hal-hal sebagai berikut: 1) meningkatkan klasifikasi RSU daerah dari tipe C menjadi tipe B; 2) membangun RS umum regional (tipe A) sebagai RS rujukan dengan spesialis yang berbeda antar wilayah (spesialis jatung, saraf, bedah tulang, mata dan THT) dan RSJ regional; 3) peningkatan fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu; 4) menyediakan polindes/poskesdes sesuai kebutuhan; 5) penambahan dokter spesialis dan distribusi dokter umum, dokter spesialis, tenaga medis dan para medis secara merata; dan 6) menurunkan AKI, AKABA dan AKB, penyakit menular dan penyakit tidak menular.

4.2.8. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Belum Optimal;

Aceh memiliki sumberdaya alam yang melimpah, seperti sumberdaya energi dan mineral. Namun pemanfaatan sumberdaya alam tersebut belum optimal. Sejalan semakin menurunnya sumber energi fosil (minyak dan gas bumi), maka Pemerintah Aceh menfokuskan pengembangan energi terbaharukan untuk mengatasi krisis energi listrik. Pemerintah Aceh memiliki sumber energi skala besar seperti Power Plant Nagan Raya 2 x 100 MW, PLTA Peusangan 2 x 43 MW, PLTP Jaboi 1 x 50 MW, PLTP Seulawah Agam 1 x 180 MW dan PLTU Krueng Raya 1 x 100 MW. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan listrik pada daerah terpencil yang belum terjangkau oleh PT.PLN dilakukan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTMH yang telah dibangun di beberapa Kabupaten seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Selain sumberdaya energi, Aceh juga memiliki sumberdaya mineral seperti bahan tambang golongan A dan B berupa migas, panas bumi, Batubara, Emas (Au), Tembaga (Cu), Perak (Ag), Seng (Zn), Timah Hitam (Pb), Molibdenum (Mo), Besi/Pasir Besi (Fe), Kromium (Cr), Nikel (Ni), Timah Putih (Sn), Mangan (Mn), Platina (Pt), Belerang (S) dan Air Raksa (Hg) menyebar di 10 (sepuluh) Kabupaten. Namun, sumberdaya mineral ini belum menjadi fokus pengembangan Pemerintah Aceh karena Aceh belum memiliki kesiapan infrastruktur pendukung dan sumberdaya manusia yang handal.

4.2.9. Bina Keberlanjutan Perdamaian Belum Optimal;

Perdamaian merupakan kondisi yang silih berganti dengan konflik di Aceh selama hampir 5 (lima) dekade terakhir. Konflik yang berlangsung sejak 1976 hingga 2005 telah

menyebabkan berbagai kehancuran baik moril maupun materil. Berbagai infrastruktur dan aset-aset produktif masyarakat lainnya tidak dapat berfungsi secara optimal. Kondisi ini menyebabkan Aceh menjadi provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh terus memelihara keberlanjutan perdamaian yang ditempuh melalui: 1) Pengarusutamaan Perdamaian dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi pembangunan; 2) Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian; 3) Pencegahan, Mitigasi, dan Resolusi Konflik; 4) Promosi, Konsolidasi, dan Transformasi Pembangunan Perdamaian; 5) Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan; dan 6) Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat korban konflik.

4.2.10. Kualitas Lingkungan dan Penanganan Resiko Bencana Masih Rendah;

Isu utama lingkungan hidup di Aceh dalam beberapa tahun terakhir adalah kerusakan hutan, akibat perambahan hutan (*illegal logging* dan *over cutting*). Aktivitas pertambangan illegal, perladangan berpindah dan kebakaran hutan juga merupakan penyebab utama dari kerusakan hutan. Luas kerusakan hutan pada tahun 2009 telah mencapai 31.294 ha, sedangkan luas lahan kritis sebesar 391.484,6 Ha. Selanjutnya, berdasarkan catatan kebencanaan lima tahun terakhir, Aceh mangalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung dan longsor. Banjir bandang melanda beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tamiang (Krueng Tamiang), Kabupaten Pidie (Krueng Tangse), Kabupaten Pidie Jaya (Krueng Meureudu), Kabupaten Aceh Jaya (Krueng Teunom), Kabupaten Aceh Tenggara (Sungai Lawe Sigala-gala), Kabupaten Aceh Singkil (Kreung Singkil). Banjir bandang telah menimbulkan kerugian harta benda dan merenggut jiwa manusia akibat dari rusaknya lingkungan. Demikian juga tanah longsor terjadi pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya. Bencana longsor ini pada umumnya terjadi pada wilayah perbukitan dan pegunungan.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Aceh antara lain: belum sistematis dalam penanganan penanggulangan bencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam penanganannya, masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, masih lemahnya koordinasi dalam penanggulangan bencana (fase tanggap darurat), terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kebencanaan serta masih lemahnya kemitraan dan keterpaduan dalam penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana diperlukan beberapa penanganan prioritas yang dibagi berdasarkan 4 fase kejadian, kejadian pra bencana, bencana, pasca bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Di sisi lain, Aceh yang rawan terhadap bencana alam juga memiliki dinamika sosial dan budaya unik yang rawan terhadap bencana sosial. Kompleksitas dari potensi

bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan kondisi kekinian Aceh, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah:

"ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI"

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi **Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki** yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.

Bermartabat kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan

efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

5.2. Misi

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut:

a. **Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.** Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Aceh;

b. **Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat** adalah membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. Mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat.

c. **Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia** adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi capaian *Millenium Development Goals* (MDGs), memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi.

Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah.

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya umur harapan hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs dan pengendalian penyakit tidak menular ditengah-tengah masyarakat;

d. **Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan** adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata;

e. **Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA** adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Aceh selama 2012-2017 ditetapkan berdasarkan 5 (lima) misi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya sasaran pembangunan Aceh ditetapkan sesuai dengan masing-masing tujuan pembangunan. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara rinci diuraikan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1: Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi	Meningkatnya jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh).
		Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian.
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari C^{++} menjadi B, indeks kepuasan masyarakat).
		Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada *website* pemerintah).
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan) dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran).
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan perdamaian.
		Meningkatnya pengarusutamaan perdamaian dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 2: Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat	Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan	Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.
		Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.
		Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.
Misi 3: Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal	Menurunnya angka kemiskinan Aceh dari 19,57 persen menjadi 9,50 persen.
		Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh dari 7,43 persen menjadi 5 persen.
		Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari 900 Miliyar menjadi 1,5 Triliyun.
		Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas dari 5,89 persen menjadi 7,3-8 persen (ADHK).
		Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat non migas (ADHK) dari 6,7 juta menjadi 8,5 juta.
		Meningkatnya sentra-sentra agribisnis dalam penyediaan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi.
		Meningkatnya profesionalisme Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		Meningkatnya investasi asing dari USD 2,3 M menjadi USD 10 M.
		Meningkatnya investasi dalam negeri dari Rp 6,3 T menjadi Rp 30 T.
		Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan kawasan pesisir.
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan pesisir.
		Meningkatnya peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan.
		Meningkatnya pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah.
		Tercapainya tujuan pembangunan millenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.
		Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.
		Tercapainya tujuan pembangunan millenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.
		Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan.
		Terjaminnya pelayananan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA).
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 4: Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan.
		Meningkatnya keselarasan dan keserasian program pembangunan Aceh antara RKPA, RPJMA, RPJPA, RTRWA dan dokumen lainnya.
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
		Meningkatnya kondisi mantap jalan provinsi dari 80 persen menjadi 100 persen.
		Berkurangnya panjang jalan provinsi yang belum tembus dari 70 km menjadi 0 km.
		Meningkatnya indeks areal terairi dari 56,07 persen menjadi 75 persen.
		Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.
Misi 5: Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA	Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh.
		Menurunnya jumlah daerah rawan pangan (kecamatan) dari 52,99 persen menjadi 20 persen.
		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah.
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan yang berkelanjutan.
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		Meningkatnya luasan areal pertanian yang baru.
		Meningkatnya eksplorasi sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
		Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole and growth center*) sebagai daya saing wilayah.
		Meningkatnya produk unggulan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan.

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012 – 2017 adalah mewujudkan Aceh yang Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki. Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dapat ditentukan dengan melakukan analisis SWOT berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh. Analisis SWOT dilakukan melalui FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Aceh. Hasil dari analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.

6.1. Analisis SWOT

6.1.1 Kekuatan (*Strong*)

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Nota kesepahaman Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;
6. Adanya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang KerjaSama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelakanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe;
17. Adanya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan perdamaian dan penyelesaian proses reintegrasi;
18. Tingginya perhatian dari berbagai pihak dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh;
19. Dinamika kehidupan, sosial dan budaya masyarakat Aceh yang Islami dengan penerapan syariat islam;
20. Letak geografis yang berada di lintas perdagangan laut yang strategis;
21. Potensi sumber daya alam yang cukup tersedia dan memiliki keanekaragaman sumber daya hayati terutama pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
22. Tersedianya pusat studi bencana;
23. Adanya rencana aksi daerah tentang pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs);
24. Tersedianya lembaga pendidikan formal dan nonformal serta pendidikan tinggi;
25. Undang-undang RI no. 40 tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
26. Undang-undang RI no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
27. Adanya objek wisata yang potensial;
28. Adanya beasiswa dan dana kesejahteraan guru dari Pemerintah Aceh;
29. Tersedianya sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan;
30. Adanya potensi komoditi unggulan dan objek wisata;

31. Adanya lembaga koordinasi pengelolaan sumberdaya air di Aceh (Dewan Sumber Daya Air Aceh);
32. Adanya potensi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
33. Adanya peran ulama dalam pengambilan kebijakan pembangunan;
34. Adanya tata ruang wilayah yang mengatur pengembangan kawasan strategis yang terintegrasi;
35. Adanya potensi lahan pertanian yang ditelantarkan;
36. Posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama pulau Sumatera.

6.1.2. Kelemahan (*Weakness*)

1. Rendahnya Pemahaman Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Stakeholder dan Masyarakat terhadap *Lex Specialis* Aceh yaitu MoU Helsinki Tahun 2005 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pelaksanaannya;
2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Aceh terhadap Sejarah dan Situs Aceh;
3. Belum terlaksananya regulasi peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan lainnya;
4. Rendahnya produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditas pertanian, perikanan dan kelautan;
5. Belum berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Rendahnya pendapatan masyarakat di bidang pertanian;
7. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah;
8. Rendahnya profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Pemerintah Aceh (BUMA);
9. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
10. Masih kurangnya profesionalisme aparatur Pemerintahan Aceh;
11. Belum berkembangnya ekonomi lokal masyarakat yang didukung oleh akses pasar;
12. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan;
13. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional;
14. Infrastruktur (jalan, irigasi, pelabuhan) belum memadai terutama di daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar dan pasca konflik;
15. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
16. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;
17. Penempatan pejabat belum sesuai dengan kopetensi dan profesionalisme;
18. Belum optimalnya pengembangan agroindustri dan kepariwisataan.
19. Kurangnya koordinasi antar stakeholder;

6.1.3. Peluang (*Opportunity*)

1. Masih tingginya dukungan lembaga di luar pemerintah untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
2. Perdagangan dan investasi langsung dengan pihak luar negeri;
3. Pintu gerbang ekspor Indonesia ke pasar Timur Tengah dengan memanfaatkan branding Aceh sebagai wilayah Syariah antara lain pengakuan Sertifikasi Halal;
4. Tingginya permintaan terhadap komoditas unggulan;
5. Tingginya distribusi barang dan jasa strategis;
6. Kerjasama regional strategis (IMT-GT);
7. Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI;
8. Adanya dukungan pemerintah dan luar negeri untuk mengantisipasi bencana dan melestarikan lingkungan;
9. Adanya komitmen kuat dari pemerintah terhadap pencapaian target MDGs 2015 dan keberlanjutan kerjasama dengan masyarakat internasional;
10. Adanya sumber-sumber pembiayaan dan bantuan teknis pendidikan dari Hibah Internasiaonal, Nasional dan dana bersumber dari APBA mencapai 20 persen;
11. Adanya jaminan kesehatan yang menjamin seluruh masyarakat Aceh (*universal coverage*);
12. Adanya komitmen pemerintah untuk menerapkan jaminan kesehatan secara nasional yang bersifat universal coverage mulai tahun 2014;
13. Masih tingginya minat investor untuk berinvestasi di bidang agroindustri dan pariwisata;
14. Pengembangan ekonomi berbasis syariah;
15. Adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMA);
16. Adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan modal untuk usaha mikro dan menengah serta akses pasar;
17. Adanya komitmen pemerintah untuk membangun daerah tertingal secara terintegrasi.

6.1.4. Ancaman (*Treat*)

1. Rendahnya Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap *Lex Specialis* Aceh yaitu MoU Helsinki Tahun 2005 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acehserta Peraturan Pelaksanaannya;
2. Lahirnya Produk Hukum Pemerintah yang tidak sesuai dengan Jiwa dan Semangat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

3. Belum Terakomodirnya secara keseluruhan poin-poin pada MoU Helsinki ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
4. Intervensi atau pengaruh kampanye hitam pada isu lingkungan/sumber daya alam Aceh terhadap pembangunan Aceh;
5. Belum transparan dan akuntabelnya pelaksanaan peraturan dan Undang-undang;
6. Rendahnya kepercayaan berbagai stakeholder terhadap keberlanjutan perdamaian dan penyelesaian proses reintegrasi;
7. Meningkatnya degradasi sosial dan budaya dalam tatanan kehidupan;
8. Meningkatnya degradasi moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dinul islam;
9. Infiltrasi budaya asing yang negatif;
10. Instabilitas perekonomian global;
11. Pelanggaran batas territorial;
12. Masih adanya Wilayah rawan bencana;
13. Sumber daya alam yang semakin terdegradasi;
14. Perubahan iklim global (climate change);
15. Beredarnya produk luar (impor) dan persaingan sumber daya manusia global;
16. Belum optimalnya penguatan keberlangsungan perdamaian;
17. Adanya persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang rendah;
18. Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular yang menyebabkan kematian.

6.2. Strategi Pembangunan Aceh

Strategi pembangunan Aceh untuk periode lima tahun mendatang ditetapkan dengan memadukan antara kekuatan dan peluang (S-O), kekuatan dan ancaman (S-T), kelemahan dan peluang (W-O) dan kelemahan dan ancaman (W-T) diuraikan sebagai berikut.

6.2.1. Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Pelaksanaan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui pelayanan terpadu yang didukung teknologi;
2. Peningkatan pertumbuhan investasi asing dan dalam negeri serta peran lembaga otoritas investasi;
3. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana dan kelestarian lingkungan;
4. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015;
5. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang Kesehatan pada tahun 2015;
6. Peningkatan kualitas pendidikan berbasis keahlian dan kebutuhan pasar tenaga kerja;

7. Peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin;
8. Peningkatan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6.2.2. Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Percepatan penyelesaian dan penerapan berbagai peraturan pelaksana UUPA secara transparan dan akuntabel;
2. Pembangunan kepercayaan (*trust building*) kepada berbagai stakeholder dalam rangka keberlanjutan perdamaian (*peace sustainability*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan resolusi konflik serta penuntasan proses reintegrasi;
3. Peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;
4. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam;
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

6.2.3. Kelemahan-Peluang (W-O)

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kontinyuitas produk pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan unggulan untuk mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah produk berbasis pangsa pasar;
2. Peningkatan produk unggulan lokal masyarakat yang dapat bersaing di pasar lokal dan internasional;
3. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai daya saing wilayah;
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi areal pertanian;
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, PAD dan pendapatan perkapita masyarakat;
7. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur(jalan, irigasi, pelabuhan) terutama di daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar dan pasca konflik;
8. Pengembangan agroindustri dan kepariwisataan berdasarkan potensi wilayah;
9. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah;
10. Peningkatan kualitas SDM yang mendukung profesionalisme peran Badan Usaha Milik Pemerintah Aceh (BUMA) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh;
11. Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan menengah;
12. Pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal dan berkelanjutan;

13. Peningkatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan;

6.2.4. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Pengembangan dan peningkatan keahlian tenaga kerja lokal yang kompetitif untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
3. Penempatan pejabat yang sesuai dengan kopetensi dan profesionalismenya;
4. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

6.3. Rumusan Strategi Pembangunan Aceh (2012-2017)

Rumusan strategi pembangunan Aceh diperoleh darianalisis SWOT yang diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Selanjutnya rumusan strategi pembangunan Aceh 2012-2017 adalah sebagai berikut**(Tabel 6.1).**

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	**Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki**

Misi 1 : **Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi	1. Meningkatnya jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh). 2. Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian	1. Percepatan penyelesaian dan penerapan berbagai peraturan pelaksana UUPA secara transparan dan akuntabel.	Menyelesaikan dan menerapkan seluruh peraturan pelaksana UUPA secara transparan dan akuntabel.
	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang *good governance* dan *clean government* (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari C++ menjadi B, indeks kepuasan masyarakat). 4. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada website pemerintah).	2. Pelaksanaan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui pelayanan terpadu yang didukung teknologi. 3. Penempatan pejabat yang sesuai dengan kopetensi dan profesionalismenya. 4. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah.	Melaksanakan reformasi birokrasi dan tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.	Menyediakan ruang dialog publik yang bebas dan demokratis.

Misi 1 : **Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan)dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran).		
	6. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian. 7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan perdamaian.	6. Pembangunan kepercayaan (*trust building*) kepada berbagai stakeholder dalam rangka keberlanjutan perdamaian (*peace sustainability*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan resolusi konflik serta penuntasan proses reintegrasi.	Melaksanakan sosialisasi tentang Keberlanjutan Perdamaian kepada masyarakat serta mendorong penuntasan kegiatan reintegrasi

Misi 2 : **Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan.	1. Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.	1. Peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan.	Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman dan penghayatan terhadap nilai budaya dan sejarah Aceh.
	2. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.	2. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.	Memperbaiki kurikulum pendidikan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah tentang penerapan dinul Islam.

Misi 2 : **Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	3. Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.	3. Peningkatan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Melibatkan ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi 3 : **Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal.	1. Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. 2. Meningkatnya sentra-sentra agribisnis dalam penyediaan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi. 3. Meningkatnya pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah.	1. Pengembangan agroindustri dan kepariwisataan berdasarkan potensi wilayah.	Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian, mengembangkan agro industri, perdagangan dan pariwisata.
	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas dari 5,89 persen menjadi 7,3-8 persen (ADHK). 5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan pesisir. 6. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari 900 milyar menjadi 1,5 Triliun.	2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, PAD dan pendapatan perkapita masyarakat.	Mendorong berkembangnya investasi swasta dan BUMA serta menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi untuk daerah terpencil dan pesisir.

<u>Misi 3</u> : Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	7. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat non migas (ADHK) dari 6,7 juta menjadi 8,5 juta.		
	8. Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh dari 7,43 persen menjadi 5 persen; 9. Menurunnya angka kemiskinan Aceh dari 19,57 persen menjadi 9,50 persen.`	3. Pengembangan dan peningkatan keahlian tenaga kerja lokal yang kompetitif untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan.	Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan kualitas tenaga kerja.
	10. Meningkatnya profesionalisme Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).	4. Peningkatan kualitas SDM yang mendukung profesionalisme peran Badan Usaha Milik Pemerintah Aceh (BUMA) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.	Mendorong pengembangan sektor usaha produktif dan penyertaan modal serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMA.
	11. Meningkatnya investasi asing dari USD 2,3 M menjadi USD 10 M. 12. Meningkatnya investasi dalam negeri dari Rp 6,3 T menjadi Rp 30 T. 13. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan.	5. Peningkatan pertumbuhan investasi asing dan dalam negeri serta peran lembaga otoritas investasi.	Meningkatkan promosi investasi dan memberi kemudahan investasi serta meningkatkan peran lembaga otoritas investasi.
	14. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.	6. Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan menengah.	Menyediakan akses modal dan pasar bagi usaha mikro dan menengah.
	15. Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.	7. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.	Meningkatkan kualitas dan distribusi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas secara proporsional serta menerapkan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun

Misi 3 : **Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	16. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.	8. Peningkatan kualitas pendidikan berbasis keahlian dan kebutuhan pasar tenaga kerja.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
	17. Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015. 18. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah. 19. Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan. 20. Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA).	9. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang Kesehatan pada tahun 2015 10. Peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis yang didukung sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar.
	21. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.	11. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.	Melakukan pencegahan (preventif) dan pengobatan (kuratif) terhadap penyakit menular dan tidak menular serta sosialisasi PHBS yang didukung tenaga penyuluh kesehatan yang memadai dan berkualitas.

<u>Misi 4</u> : Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan.	1. Peningkatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	Meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	2. Meningkatnya keselarasan dan keserasian program pembangunan Aceh antara RKPA, RPJMA, RPJPA, RTRWA dan dokumen lainnya; 3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah; 4. Meningkatnya kondisi mantap jalan provinsi dari 80 persen menjadi 100 persen; 5. Berkurangnya panjang jalan provinsi yang belum tembus dari 70 km menjadi 0 km; 6. Meningkatnya indeks areal terairi dari 56,07 persen menjadi 75 persen.	2. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur(jalan, irigasi, pelabuhan) terutama di daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar dan pasca konflik.	Memelihara dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
	7. Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.	Meningkatkan sosialisasi tentang adaptasi dan mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan.

<u>Misi 5</u> : Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA	1. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh. 2. Menurunnya jumlah daerah rawan pangan (kecamatan) dari 52,99 persen menjadi 20 persen. 3. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kontinyuitas produk pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan unggulan untuk mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah produk berbasis pangsa pasar.	Meningkatkan produksi, produktifitas, distribusi pangan serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
	4. Meningkatnya luasan areal pertanian yang baru.	2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi areal pertanian.	Mengidentifikasi dan memanfaatkan lahan terlantar untuk mengembangkan kawasan pertanian berbasis komoditi unggulan daerah.
	5. Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole and growth center*) sebagai daya saing wilayah.	3. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai daya saing wilayah.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dan kelembagaan serta SDM profesional untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi.
	6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.	4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana dan kelestarian lingkungan.	Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tentang kelestarian lingkungan.
	7. Meningkatnya produk unggulan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan.	5. Peningkatan produk unggulan lokal masyarakat yang dapat bersaing di pasar lokal dan internasional.	Meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi masyarakat dan dukungan terhadap permodalan serta akses pasar.
	8. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan yang berkelanjutan; 9. Meningkatnya eksplorasi sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.	6. Pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal dan berkelanjutan.	Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara lestari.

6.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, selama periode RPJM Aceh 2012-2017 arah kebijakan pembangunan Aceh untuk setiap tahunnya diuraikan sebagai berikut.

6.4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan untuk segera ditangani, antara lain: kemiskinan, pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi, pelabuhan)dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran juga difokuskan melalui pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Disamping itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Demikian juga upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan perdamaian, mengatasi permasalahan sosial dan budaya serta penerapan dinul islam menjadi fokus prioritas pada tahun pertama.

6.4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJM Aceh 2012-2017. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan, pengangguran,pangan, infrastruktur (jalan, irigasi, pelabuhan) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerahterus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Demikian juga pengembangan ekonomi masyarakat lokal terus dilanjutkan secara konsisten untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan RPJM Aceh 2012-2017 diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik yang mendukung keberlanjutan perdamaian. Pada tahap ini, peletakan dasar untuk mendukung pengembangan agroindustri telah dilakukan dengan memfasilitasi berkembangnya investasi sesuai dengan komoditi unggulan daerah.

6.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan dan pengangguran, permukiman layak huni, pangan, pengangguran,pangan, infrastruktur (jalan, irigasi, pelabuhan) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerahharus menunjukan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah tersebut. Agroindustri komoditas unggulan daerah sudah berkembang sehingga dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga dan lebih profesional untuk pencapaian target pembangunan milenium pada tahun 2015. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di ibukota provinsi melainkan dapat diakses di regional melalui pembangunan rumah sakit di 4 (empat) regional. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah diapresiasi oleh masyarakat yang terlihat dari

penyelenggaraan even budaya baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata. Demikian juga dengan karakter budaya yang dimiliki oleh masyarakat sudah menjadi jati diri dan kebanggaan masyarakat Aceh.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan Aceh.

Pada tahun ketiga ini investasi telah berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh yang didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan Badan usaha milik Aceh yang dikelola secara profesional. Selanjutnya investasi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya alam terbarukan sebagai potensi energi untuk mengatasi krisis energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

6.4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Aceh yang terintegrasi.

Arah kebijakan pembangunan Aceh ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi yang melibatkan para pemangku kepentingan termasuk dukungan terhadap kemudahan investasi yang terkait dengan pengembangan agroindustri. Pemerintah Aceh mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Aceh di tingkat global dan regional. Pada tahap ini, angka kemiskinan dan pengangguran Aceh diharapkan telah mengalami penurunan yang signifikan dan daerah-daerah yang mengalami rawan pangan sudah teratasi. Nilai tambah produk komoditas unggulan sudah menunjukkan hasil yang nyata. Akses jalan yang menjangkau wilayah terisolir sudah dapat diselesaikan secara baik. Selain itu, pencapaian target tujuan pembangunan milenium khususnya pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan tidak hanya dijaga agar tetap konsisten, melainkan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar dan dalam Aceh sehingga dapat menambah pendapatan Asli Aceh.

6.4.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)

Pada tahun kelima pelaksanaan RPJM Aceh 2012-2017 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir.Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasaruntuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode ketiga pelaksanaan RPJP Aceh 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya. Pada tahun kelima ini, target pembangunan Aceh sudah dapat dicapai secara menyeluruh sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Aceh perlu dijabarkan ke dalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Aceh. Berdasarkan analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan pada BAB VI maka pemerintah Aceh menyusun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Keberlanjutan Perdamaian; 3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; 4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; 5) Penanggulangan Kemiskinan; 6) Pendidikan; 7) Kesehatan; 8) Infrastruktur yang Terintegrasi; 9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan 10) Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan. Selanjutnya kebijakan umum yang disusun berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tersebut mengacu kepada arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya yang telah diuraikan pada BAB VI.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan acuan untuk menyusun program unggulan dengan target indikator kinerja menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJM Aceh ini hanya yang bersifat prioritas yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pedoman penyusunan RPJM Kabupaten/Kota. Selanjutnya operasional dan program prioritas pemerintah Aceh yang disertai dengan target capaian program dan pendanaannya untuk 5 (lima) tahun dituangkan dalam BAB VIII. Selanjutnya, penjelasan kebijakan umum dan program unggulan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh dijelaskan secara rinci pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Aceh

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal	Akhir		
I	**REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA**								
	1	Penuntasan Penyelesaian peraturan-peraturan pelaksana UUPA	1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	50 %	90 %	Wajib	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan/Dinas Syariat Islam/Sekretariat DPRA
	2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	Meningkatnya disiplin aparatur	60 %	90 %	Wajib	BKPP
			2	Program Pendidikan Kedinasan;	Meningkatnya jumlah aparatur yang berkapasitas	50 %	75 %	Wajib	BKPP
			3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75 %	90 %	Wajib	Bappeda
			4	Program peningkatan pelayanan publik;	Meningkatnya pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan	65 %	90 %	Wajib	BP2T
			5	Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur;	- Meningkatnya kinerja aparatur - Meningkatnya kesejahteraan aparatur	60 % 75 %	85 % 90 %	Wajib	BKPP/Biro Organisasi/Sekretariat KORPRI
			6	Program fasilitasi Pindah/Purna Tugas	Meningkatnya distribusi aparatur berdasarkan kompetensi	60 %	80 %	Wajib	BKPP
			7	Program penataan penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya penataan penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah	60 %	80 %	Wajib	Bito Tata Pemerintahan
			8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan *) Program Baru	Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan secara ditigal	60 %	80 %	Wajib	Arsip dan Perpustakaan
			9	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah*) Program Baru	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	60 %	80 %	Wajib	Arsip dan Perpustakaan
			10	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan*) Program Baru	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kearsipan	60 %	80 %	Wajib	Arsip dan Perpustakaan
			11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi*) Program Baru	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	60 %	80 %	Wajib	Arsip dan Perpustakaan
			12	Program Peningkatan SDM Kearsipan*) Program Baru	Meningkatnya kapasitas SDM kearsipan	60 %	80 %	Wajib	Arsip dan Perpustakaan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal	Akhir		
	3	Penguatan birokrasi pemerintahan dan penegakan supremasi hukum	1	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	50 %	75 %	Wajib	BKPP, Biro Organisasi, Sekretariat KORPRI
			2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong;	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	50 %	80 %	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat
			3	Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya;	Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan imum mukim	40 %	65 %	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat
			4	Program peningkatan kelembagaan dan aparatur;	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur	60 %	90 %	Wajib	Biro Tata Pemerintahan
			5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	60 %	90 %	Wajib	Sekretariat DPRA
			6	Program Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA;	Meningkatnya pelayanan lembaga DPRA kepada masyarakat	60 %	90 %	Wajib	Sekretariat DPRA
			7	Program penataan daerah otonomi baru;	Menigkatnya kualitas pelayanan pemerintah	70 %	100 %	Wajib	Biro Tata Pemerintahan
			8	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	60 %	80 %	Wajib	Biro Tata Pemerintahan, Perwakilan Medan,Biro Umum
			9	Program peningkatan pelayanan masyarakat di luar daerah;	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya	35 %	45 %	Wajib	KPP Jakarta
			10	Program peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi KORPRI;	Meningkatnya kapasitas lembaga KORPRI	45 %	68 %	Wajib	Sekretariat KORPRI
			11	Program pembinaan prestasi olahraga, seni dan Budaya bagi anggota KORPRI	Meningkatanya prestasi olahraga, seni dan budaya bagi anggota KORPRI	30 %	55 %	Wajib	Sekretariat KORPRI[RAV1][RAV2]
			12	Program pembinaan mental dan rohani bagi anggota KORPRI	Meningkatnya kualitas mental dan rohani bagi anggota KORPRI	80 %	90 %	Wajib	Sekretariat KORPRI[RAV3][RAV4]
	4	Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	1	Program pemilihan kepala daerah dan Pemilu	Meningkatnya kualitas PEMILU KADA dan legislatif	80 %	90 %	Wajib	Biro Tata Pemerintahan
			2	Program koordinasi peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya koordinasi kependudukan dan cacatan sipil	60 %	90 %	Wajib	Biro Tata Pemerintahan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal	Akhir		
	5	Penguatan pengawasan keuangan dan pembinaan administrasi anggaran secara transparan dan akuntabel	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Menurunnya Penyelewengan Keuangan Daerah dan Mencegah terjadinya KKN	30 %	5 %	Wajib	Inspektorat
			2	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pengawasan	60 %	90 %	Wajib	Inspektorat
			3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh	75 %	90 %	Wajib	DKA, Biro Administrasi pembangunan
			4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kab/kota - Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan kab/kota	75 % 65 %	90 % 90 %	Wajib	DKA, Biro Administrasi Pembangunan, KPP
	6	Penataan tatalaksana yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi	1	Program penataan administrasi kependudukan;	Meningkatnya validitas data dan informasi kependudukan secara elektronik	50 %	100 %	Wajib	Dinas Registrasi Kependudukan
II	**KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN**								
	1	Pengarusutamaan Perdamaian dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi pembangunan	1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peka Konflik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan peka konflik	40 %	65 %	Wajib	Badan KesbangLinmas
	2	Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian	1	Peningkatan kapasitas SDM Pol PP dan WH serta linmas	Meningkatnya kapasitas Pol-PP, WH dan Linmas	60 %	80 %	Wajib	Satpol PP dan WH
			2	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Meningkatnya pemahaman tentang UUPA pada masyarakat dan pemerintah	40 %	70 %	Wajib	Biro Humas
	3	Pencegahan, Mitigasi dan Resolusi Konflik	1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik	40 %	20 %	Wajib	Badan Kesbanglinmas, Satpol PP dan WH
			2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	15 %	50 %	Wajib	Badan Kesbanglinmas, Satpol PP dan WH
	4	Promosi, Konsolidasi, dan Transformasi Pembangunan Perdamaian	1	Program konsolidasi perdamaian Aceh	- Meningkatnya perdamaian di Aceh - Meningkatnya pemahaman Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Stakeholder dan masyarakat terhadap *Lex Specialis* Aceh - Meningkatnya pemahaman aparatur Pemerintah terhadap *Lex Specialis* Aceh - Meningkatnya sistem kemandirian pemerintahan rakyat Aceh	80 % 30 % 10 % 0 %	90 % 80 % 50 % 45 %	Wajib	Badan KesbangLinmas-Dinas Sosial Biro Hukum Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, BKPP

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal	Akhir		
	5	Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat - Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh	30 % 40 %	70 % 70 %	Wajib	Badan Kesbanglinmas
			2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan wawasan kebangsaan	30 %	70 %	Wajib	Badan Kesbanglinmas
			3	Program pembauran kebangsaan	Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik	30 %	70 %	Wajib	Badan Kesbanglinmas, Dinas Syariat Islam
			4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	30 %	70 %	Wajib	Badan Kesbanglinmas
			5	Program pengembangan data dan informasi	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	30 %	70 %	Wajib	Dishubkomintel/DRKA/Dinas Sosial/Kesbanglinmas/Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta
			6	Program Peningkatan kapasitas Pelayanan informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keamanan dan ketertiban	40 %	90 %	Wajib	Biro humas
	6	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat korban konflik	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Pemerataan kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Mantan Kombatan, Tapol/Napol dan Masyarakat Imbas Konflik.	40 %	90 %	Wajib	Dinsos
III	**DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA**								
	1	Peningkatan pengetahuan dan wawasan sejarah dan nilai-nilai budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat	1	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat;	Meningkatnya kelestarian adat istiadat	60 %	90 %	Wajib	Sekretariat MAA
			2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;	Meningkatnya sarana prasarana kebudayaan	45 %	75 %	Wajib	Disbudpar, KPP Jakarta
			3	Program Pengembangan Nilai Budaya;	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai Budaya kepada masyarakat	60 %	85 %	Wajib	Disbudpar, Sekretariat MAA
			4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;	Meningkatnya kelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya	55 %	80 %	Wajib	Disbudpar, Sekretariat MAA
			5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya;	Meningkatnya kelestarian keragaman budaya	60 %	80 %	Wajib	Disbudpar, KPP Jakarta, Perwakilan Medan, Sekretariat MAA

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal	Akhir		
			6	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;	Meningkatnya Kemitraan pengelolaan Budaya	55 %	80 %	Wajib	Disbudpar
			7	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat;	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan	60 %	80 %	Wajib	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			8	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat *) Program Baru	Meningkatnya Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	60 %	90 %	Wajib	Sekretariat MAA
			9	Program Pagelaran Seni Budaya Daerah *)Program Baru	Meningkatnya seni dan budaya daerah	60 %	80 %	Wajib	KPP Jakarta, Perwakilan Medan,
	2	Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Al-Qur'an;	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur'an	60 %	90 %	Wajib	Dinas Syariat Islam
			2	Program pembinaan lembaga sosial keagamaan; *) Program Baru	Meningkatnya kapasitas lembaga sosial keagamaan	50 %	75 %	Wajib	Dinas Syariat Islam/Baitul Mal
			3	Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi aparatur; *)=Program Baru	Meningkatnya pemahaman keagamaan bagi aparatur	60 %	80 %	Wajib	Dinas Syariat Islam
			4	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	60 %	90 %	Wajib	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			5	Program Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama	70 %	90 %	Wajib	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			6	Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama	Meningkatnya peran dan sumberdaya ulama	55 %	80 %	Wajib	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			7	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	Meningkatanya Kualitas pendidikan Agama	70 %	90 %	Wajib	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			8	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama	65 %	80 %	Wajib	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
	3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,	Menurutnya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	18 %	12 %	Wajib	Dinas Sosial
			2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,	Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat	50 %	85 %	Wajib	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
			3	Program Pembinaan Anak Terlantar,	Menurunnya jumlah anak terlantar	60	%	90	%	Wajib	Dinas Sosial
			4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma,	Meningkatnya pelayanan untuk penyandang cacat dan trauma	55	%	85	%	Wajib	Dinas Sosial
			5	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Meningkatnya pelayanan panti asuhan	60	%	95	%	Wajib	Dinas Sosial
			6	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana; PSK; Narkoba dan Penyakit sosial lainnya),	Meningkatnya ketrampilan penyandang penyakit sosial	45	%	80	%	Wajib	Dinas Sosial
			7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial	60	%	85	%	Wajib	Dinas Sosial
	4	Peningkatan kapasitas kelembagaan gampong dan mukim	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong;	Meningkatnya kapasitas lembaga gampong	6451	Gampong	6454	Gampong	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat
			2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong;	Meningkatnya kapasitas lembaga gampong	6451	Gampong	6454	Gampong	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat
			3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Gampong;	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	6451	Gampong	6454	Gampong	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	5	Peningkatan kualitas dan efektifitas penyebaran nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat	1	Program Penyediaan da'i perbatasan, perdesaan dan perkotaan; *) Program Baru	Meningkatnya kapasitas dan kuantitas da'i perbatasan, perdesaan dan perkotaan	150	Org	160	Org	Wajib	Dinas Syariat Islam
			2	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam;	Meningkatnya pemahaman wawasan dinul islam	50	%	85	%	Wajib	Dinas Syariat Islam
			3	Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi masyarakat; *) Program Baru	Meningkatnya pemahaman wawasan dinul islam	60	%	80	%	Wajib	Dinas Syariat Islam
			4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan	55	%	80	%	Wajib	Dinas Syariat Islam
			5	Program Pembinaan Syariat Islam *)Program Baru	Meningkatnya Pemahaman tentang syariat islam	65	%	85	%	Wajib	Dinas Syariat Islam/Baitul Mal
	6	Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana nilai-nilai Dinul Islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Meningkatnya pemahaman wawasan islam	23	Kab/Kota	23	Kab/Kota	Wajib	Dinas Syariat Islam
			2	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama;	Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan Aceh	70	%	95	%	Wajib	Majelis Permusyawaratan Ulama

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
			3	Program Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi antara Umara dan Ulama; *) Program Baru	Meningkatnya hasil pembangunan yang susuia dengan Dinul Islam	50	%	75	%	Wajib	Majelis Permusyawaratan Ulama
			4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama;	Meningkatnya Pelayanan Agama dan Lembaga Keagamaan	50	%	75	%	Wajib	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	Meningkatnya pelayanan peradilan mahkamah syariah	70	%	85	%	Wajib	Dinas Syariat Islam
	7	Penjaminan hak-hak kerukunan beragama dalam upaya peningkatan toleransi dan kedamaian	1	Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Meningkatnya toleransi beragama	65	%	90	%	Wajib	Dinas Syariat Islam
	8	Peningkatan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	1	Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda;	Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pemuda	45	%	60	%	Wajib	Dispora
			2	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan;	Meningkatnya jumlah pemuda yang memperoleh penghargaan	10	orang	20	orang	Wajib	Dispora
			3	Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;	Meningkatnya persentase jumlah wirausahawan muda terhadap seluruh wirausahawan	5	%	20	%	Wajib	Dispora
			4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;	Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	1.234	Orang	1.260	Orang	Wajib	Dispora
			5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	45	%	60	%	Wajib	Dispora
			6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;	Meningkatnya jumlah Stadion olahraga	26	Buah	31	Buah	Wajib	Dispora
			7	Program Pembinaan Kepemudaan.	Meningkatnya kualitas pemuda	55	%	80	%	Wajib	Dispora
	9	Peningkatan kualitas anak dan kapasitas perempuan	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;	Meningkatnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak	45	%	75	%	Wajib	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	45	%	75	%	Wajib	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;	Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak	60	%	85	%	Wajib	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
			4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;	-Meningkatnya produktivitas ekonomi perempuan -Meningkatnya peran serta gender dalam pembangunan	40 20	% %	60 40	% %	Wajib	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV	**KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PERTANIAN**										
	1	Fasilitasi dan pengembangan pengolahan hasil pertanian dan sistem usaha secara berkelanjutan	1	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Berkembangnya sentra industri potensial daerah Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB	10.343 4,96	IKM %	11.895 5,70	IKM %	Pilihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Fasilitasi pengembangan penanganan pasca panen pertanian melalui penguatan sistem pemasaran daerah	1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1. Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sektor peternakan 2. Meningkatnya konsumsi pangan asal hewan dan hasil ikutannya	98.72 6.155	Kg/Kap/ tahun	106 6.5	Kg/Kapita/Pertahun	Pilihan	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
			2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sektor Pertanian Tanaman Pangan 2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sektor Perkebunan pada level tinggi	109,05 112	NTP	112 114	NTP	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Perkebunan
			3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor non migas	93,7 Juta	US$	150 Juta	US$	Pilihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sector Perikanan	101	NTP	106	NTP	Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan 2. Kontribusi Sub sektor perdagangan terhadap PDRB	263 4 4 255 20	Pasar Pasar Induk Pasar Semi Modern Pasar Tradisional %	378 4 57 317 25	Pasar Pasar Induk Pasar Semi Modern Pasar Tradisional %	Pilihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			6	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya rasio pengawasan barang dan jasa yang memenuhi standar	5,56 : 1,73	Rasio	4,26:1	Rasio	Pilihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Peningkatan inovasi dan kreatifitas yang memberikan nilai tambah pada produksi masyarakat	1	Program Peningkatan Produksi (Pertanian/perkebunan)	Peningkatan produksi tahunan untuk komoditi Pangan Utama: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai	1.954.551 168.997 99.567	Ton	2.524.211 249.007 163.988	Ton	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
			2	Program Peningkatan Produksi (Pertanian/perkebunan)	Peningkatan Produksi komoditi unggulan : 1. Sawit 2. Karet 3. Kakao	 183.344 64.621 37.582	 Ton	 1.231.267 433.969 252.386	 Ton	Pilihan	Dinas Perkebunan
			3	Program Peningkatan Produksi Peternakan	- Peningkatan produksi daging 1. Ternak besar dan kecil 2. Unggas - Peningkatan produksi telur - Meningkatnya kemitraan dibidang peternakan	 15,89 13,04 27,82 5	 Ribu ton Ribu ton Ribu kg %	 19,67 16,77 35,79 25	 Ribu ton Ribu ton Ribu kg %	Pilihan	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
	5	Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap untuk menjadi kawasan minapolitan	1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	145.970	Ton	210.000	Ton	Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi budidaya perikanan	116.875	Ton	755.373	Ton	Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			3	Program pengembangan kawasan minapolitan; *) Program Baru	Terwujudnya kawasan minapolitan yang terpadu	-		2	kawasan	Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah 1. Meningkatnya ketersediaan energi 2. Meningkatnya Ketersediaan Protein 3.Berkurangnya daerah rentan pangan a. Prioritas 1 b. Prioritas 2 c. Prioritas 3 4. Berkurangnya konsumsi beras 5. Peningkatan Indeks Tanam 6. Peningkatan kepemilikan lahan petani	 3308 96,2 108 3 22 100.4 1.24 0.5	 Kkal/kap/hr g/kap/hr kec kec kec Kg/kap/th Ha/KK	 3474 101,1 58 0 0 88,31 1.5 0.65	 Kkal/kap/hr g/kap/hr kec kec kec Kg/kap/th Ha/KK	Pilihan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
			2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Terkendalinya penyebaran penyakit ternak/hewan: - Brucellosis - SE - ND	 539 256 18.120	 Kasus	 < 100 <100 <10.000	 Kasus	Pilihan	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
	7	Peningkatan inovasi teknologi untuk menciptakan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	1	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan POKMASWAS	426	Klp	641	Klp	Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan : a. Padi b. Jagung c. Kedelai	 52,75 39,08 14,60	 ku/ha	 59,03 45,12 18,84	 ku/ha	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
			3	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1. Penyuluh Ahli 2. Penyuluh terampil	5000	Org	6000	Org	Pilihan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
			4	Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Mengingkatnya jumlah kelompok tani yang dibina BPP 1. Poktan 2. Gapoktan	10.508 1.304	Kelompok kelompok	10.658 2.000	Klmpk Klmpk	Pilihan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
			5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produktivitas tiga komoditi unggulan : 1. Sawit 2. Karet 3. Kakao	1,66 0,92 0,50	Ton/Ha	11,15 6,18 1,50	Ton/Ha	Pilihan	Dinas Perkebunan
	8	Revitalisasi industri strategis	1	Program peningkatan kualitas kelembagaan *)Program Baru	Meningkatnya kualitas kelembagaan KAPET	45	%	75	%	Wajib	Biro Ekonomi
			2	Program pengembangan industri strategis *)=Program Baru	- Tersedianya regulasi pengembangan industri strategis - Meningkatnya fasilitasi pengembangan industri strategis	20 1	% Kawasan Industri	80 3	% Kawasan Industri	Wajib	Biro Ekonomi, Disperindag, BP2T, Bainprom
	9	Revitalisasi BUMA yang telah ada dan membentuk BUMA sesuai kebutuhan yang profesional, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	1	Program revitalisasi BUMA; *)=Program baru	Meningkatnya kemampuan BUMA	40	%	75	%	Wajib	Biro Ekonomi
	10	Peningkatan iklim investasi dan promosi potensi sumber daya alam	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investasi yang tercermin pada jumlah permohonan izin investasi	105	Perusahaan	466	Perusahaan	Wajib	Badan Invesatasi dan Promosi
			2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Meningkatnya informasi prosedur, regulasi dan perizinan investasi kepada masyarakat - Meningkatnya realisasi investasi	60 1,928	% Trilyun Rupiah	90 39,90	% Trilyun Rupiah	Wajib	Badan Invesatasi dan Promosi
			3	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah; *) Program Baru	Meningkatnya ketersediaan data potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	50	%	80	%	Wajib	Badan Invesatasi dan Promosi
V	**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**										
	1	Penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin;	1	Program pengembangan perumahan	Terbangunnya rumah layak huni untuk masyarakat	10.876	Unit	14.476	Unit	Wajib	Dinas Cipta Karya
	2	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan sistem produksi dan pemasaran hasil	2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terbinanya kesadaran masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir	14	Klp	48	Klp	Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Meningkatnya kelompok tani yang menerapkan prinsip agribisnis 2. Meningkatkan jumlah kelompok tani yang bankable	NA NA	Klp klp	100 100	Klp klp	Pilihan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
	3	Pengembangan kawasan industri wisata melalui pemanfaatan sumberdaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	28.053 959.546	Wisman Wisnu	45.000 1,2 juta	Wisman Wisnu	Wajib	Disbudpar
			2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	96	Lokasi	120	Lokasi	Wajib	Disbudpar
			3	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya persentase fasilitas pendukung pariwisata yang menjadi mitra	30	%	50	%	Wajib	Disbudpar
	4	Pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan hasil pemanfaatan sumber daya alam	1	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Meningkatnya kapasitas koperasi dan UKM	120 40 115 56%	KSP Koperasi UMKM Koperasi aktif	600 200 575 75%	KSP Koperasi UMKM Koperasi aktif	Pilihan	Dinas Koperasi dan UKM
	5	Perluasan areal pertanian serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terwujudnya pengembangan wilayah tujuan mobilitas penduduk yang tertata bagi masyarakat Aceh	400	KK	2000	KK	Wajib	Disnakermobduk
			2	Program Transmigrasi Lokal;	Pemerataan sebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan bagi PMKS, Mantan Kombatan, Tapol/Napol dan Masyarakat Imbas Konflik.	0	KK	2000	KK	Wajib	Disnakermobduk
	6	Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan	1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	70	%	80	%	Wajib	DPKA
			2	Program pengembangan wilayah perbatasan;	Meningkatnya integrasi pembangunan wilyah perbatasan	65	%	90	%	Wajib	Bappeda
	7	Peningkatan akses kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	- Meningkatkan pelayanan fasilitasi penempatan kerja - Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja	1.000 485	Orang Orang	10.000 3.000	Orang Orang	Wajib	Disnakermobduk
			2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Persentase kasus dan perusahaan yang tertangani	50	%	90	%	Wajib	Disnakermobduk
			3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas dan produktivitas 9 BLK dalam pembinaan tenaga kerja	30	%	70	%	Wajib	Disnakermobduk
VI	**PENDIDIKAN**										
	1	Penerapan pendidikan formal universal 12 tahun dan pendidikan untuk semua (education for all)	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan anak usia dini	55	%	80	%	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal	Akhir		
			2	Program Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	80,9 % 82,88 %	96 % 99 %	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD
			3	Program pendidikan menengah	Meningkatnya APK SMA/MA/SMK	98 %	100 %	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD
	2	Peningkatan kualitas lulusan pendidikan nonformal sesuai dengan standar nasional pendidikan	1	Program Pendidikan Nonformal	Meningkatnya angka melek huruf penduduk dewasa	96,95 %	97,9 %	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD
			2	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya jumlah siswa yang terlayani pada lembaga pendidikan luar biasa	20 %	45 %	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD
			3	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca di masyarakat	40 %	55 %	Wajib	MPD
	3	Peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk pencapaian standar nasional pendidikan	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50,68 %	70 %	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD
			2	Program manajemen pelayanan pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS	75 %	90 %	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD
			3	Program pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran berkarakter kearifan lokal *) Program Baru	Meningkatnya pemahaman terhadap pendidikan berbasis kearifan lokal	20 %	75 %	Wajib	Dinas Pendidikan/MPD
	4	Pengembangan Pendidikan Dayah	1	Program peningkatan sarana dan prasarana dayah	Meningkatnya jumlah dan mutu sarana prasarana dayah	50 %	75 %	Wajib	Badan Dayah
			2	Program peningkatan mutu tenaga pendidik dayah	Meningkatnya jumlah pengajar dayah yang memenuhi kualifikasi	30 %	55 %	Wajib	Badan Dayah
			3	Program pendidikan dayah dan pemberdayaan santri	Meningkatnya angka kelulusan santri	80 %	95 %	Wajib	Badan Dayah
			4	Program pembinaan manajemen dayah	Meningkatnya mutu, tata kelola, dan akuntabilitas manajemen pengelolaan Dayah	33 %	60 %	Wajib	Badan Dayah
			5	Program peningkatan kualitas dan pengembangan dayah	Terwujudnya Pengembangan Dayah	55 %	80 %	Wajib	Badan Dayah/MPD
			6	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Meningkatnya kualitas dayah dengan data yang akurat	50 %	75 %	Wajib	Badan Dayah
VII	**KESEHATAN**								

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
	1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan membangun 4 (empat) rumah sakit regional serta peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan	1	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	75	%	80	%	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUDZA, RSJ, RSIA
			2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata	Meningkatnya pelayanan kesehatan	75	%	80	%	Wajib	RSUDZA, RSJ, RSIA
			3	Program pelayanan medis	Meningkatnya pelayanan medis	75	%	80	%	Wajib	RSUDZA, RSJ, RSIA
			4	Program pelayanan penunjang medis/non medis	Meningkatnya pelayanan kesehatan	75	%	80	%	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUZA, RSJ ,RSIA
			5	Program penanggulangan krisis kesehatan dan ambulan terpadu	Meningkatnya penanganan kesehatan emergensi	n.a	%	50	%	Wajib	Dinas Kesehatan
			6	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	75	%	80	%	Wajib	Dinas Kesehatan
			7	Program upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	50	%	75	%	Wajib	Dinas Kesehatan, RSJ
			8	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan profesionalisme Tenaga Kesehatan	65	%	85	%	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUDZA, RSJ, RSIA
			9	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	60	%	80	%	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUDZA, RSJ, RSIA
			10	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	- Tersedianya akses jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh - Meningkatnya kualitas jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh	100 80	% %	100 100	% %	Wajib	Dinas Kesehatan
			11	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD *)Program baru	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada BLUD	75	%	95	%	Wajib	RSUDZA, RSJ, RSIA
	2	Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan dampak gizi buru dan pengendalian penyakit dalam pencapaian sasaran millenium development goals (MDGs)	1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya angka kematian ibu	238/100.000	lahir	102/100.000	lahir	Wajib	Dinas Kesehatan
			2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Menurunnya angka kematian balita	45/1000	lahir hidup	32/1000	lahir hidup	Wajib	Dinas Kesehatan
			3	Program perbaikan gizi masyarakat	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita	23.7	%	15	%	Wajib	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal	Akhir		
			4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Menurunnya angka kesakitan di masyarakat	30 %	15 %	Wajib	Dinas Kesehatan
	3	Peningkatan ketersedian obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan serta pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan	1	Program obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya buffer stok obat	10 %	15 %	Wajib	Dinas Kesehatan
			2	Program pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat dan makanan	55 %	85 %	Wajib	Dinas Kesehatan
			3	Program pengembangan obat asli Indonesia	Meningkatnya standarisasi tanaman obat tradisional	40 %	65 %	Wajib	Dinas Kesehatan
	4	Peningkatan pengetahuan dan paradiqma masyarakat terhadap pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat	1	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat	50 %	80 %	Wajib	Dinas Kesehatan/RSUZA/RSJ/RSIA
			2	Program pengembangan lingkungan sehat	Tersedianya lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	55 %	85 %	Wajib	Dinas Kesehatan
VIII	**INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI**								
	1	Pengembangan wilayah berbasis tata ruang	1	Program perencanaan tata ruang	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	60 %	80 %	Wajib	Dinas Cipta Karya
	2	Peningkatan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1	Program pemanfaatan ruang	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang	70 %	85 %	Wajib	Dinas Cipta Karya
			2	Program pengendalian pemanfaatan ruang;	Menurunnya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang	30 %	15 %	Wajib	Dinas Cipta Karya
			3	Program koordinasi dan pembinaan, perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang;	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi	60 %	85 %	Wajib	Biro Adminsitrasi Pembangunan
			4	Program kerjasama pembangunan;	Meningkatnya integrasi pembangunan antar sektor	70 %	90 %	Wajib	Bappeda
			5	Program perencanaan pembangunan daerah;	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	65 %	85 %	Wajib	Bappeda

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
			6	Program perencanaan pembangunan ekonomi;	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang ekonomi.	70	%	90	%	Wajib	Bappeda
			7	Program perencanaan pembangunan sosial budaya;	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang sosial budaya	65	%	85	%	Wajib	Bappeda
			8	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Meningkatnya data dan informasi tapal batas hutan	462	Km	896	Km	Wajib	Dinas Kehutanan
			9	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;	Meningkatnya koordinasi pembangunan prasarana dan sumber daya alam	70	%	90	%	Wajib	Bappeda
			10	Program inovasi daerah;	- Tersedianya Sistem inovasi daerah - Meningkatnya jumlah penelitian inovasi - Meningkatnya jumlah paten	0 0 0	Dok Penelitian Paten	1 25 5	Dok Penelitian Paten	Wajib	Bappeda
			11	Program pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional;	Meningkatnya kerjasama internasional	5	lembaga	10	lembaga	Wajib	Bappeda
	3	Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian	1	Program pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan sebagai aksesibilitas orang dan barang terhadap: - panjang jalan - Panjang jembatan	1.833 16.544	Km M	2.365 22.030	Km M	Wajib	Dinas Bina Marga
			2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya aksesibilitas pergerakan orang dan barang terhadap: - Panjang jalan - Panjang jembatan	820 16.544	Km M	1.833 39.856	Km M	Wajib	Dinas Bina Marga
	4	Peningkatan aksesibilitas dengan mempertahankan, meningkatkan dan membangun jalan/jembatan untuk mencapai kondisi mantap	1	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman yang diukur dengan mutu pekerjaan, panjang saluran drainase dan gorong-gorong	57	Km	114.5	Km	Wajib	Dinas Cipta Karya
			2	Program peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	- Meningkatnya efektivitas dan kualitas pembangunan kebinamargaan - Meningkatnya kontribusi pemanfaatan sarana prasarana kebinamargaan terhadap PAD	70 -	% %	90 2	% %	Wajib	Dinas Bina Marga
			3	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terarahnya Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang terintegrasi	50	%	90	%	Wajib	Dinas Cipta Karya
			4	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Meningkatnya infrastruktur pedesaan yang tertata	50	%	80	%	Wajib	Dinas Cipta Karya

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
	5	Peningkatan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman	1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	- Meningkatnya ketersediaan air minum yang berkualitas dan - Meningkatnya penanganan permasalahan air limbah	40 20	% %	60 40	% %	Wajib	Dinas Cipta Karya
			2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Kab/ Kota	(Kota Banda Aceh)	23	Kab/Kota	Wajib	Bapedal
	6	Pemantapan sarana penampungan air (waduk, embung, situ) dan peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk dapat melayani ketersediaan air areal persawahan	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian yang sesuai dengan teknologi pengairan, yang diukur dengan : - Panjang saluran irigasi - Luas areal pertanian yang terairi irigasi - Lokasi irigasi - Jumlah P3A	702.605 43.627 27 170	M Ha Lokasi Unit	1.118.955 90.047 92 180	M Ha Lokasi Unit	Wajib	Dinas Pengairan
			2	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian	17	Lokasi	71	Lokasi	Wajib	Dinas Pengairan
	7	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi (e-Aceh) yang mendukung percepatan pembangunan Aceh	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	72	%	90	%	Wajib	Dishubkomintel
			2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	55	%	85	%	Wajib	Dishubkomintel
			3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan sarana angkutan orang dan barang	47	%	75	%	Wajib	Dishubkomintel
			4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	75	%	100	%	Wajib	Dishubkomintel
			5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1.413	kasus	700	kasus	Wajib	Dishubkomintel
			6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor laik jalan	75	%	90	%	Wajib	Dishubkomintel
			7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya akses informasi	62	%	100	%	Wajib	Dishubkomintel
			8	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	50	%	80	%	Wajib	Dishubkomintel
			9	Program Kerjasama informasi dengan Mass Media	Meningkatnya akses data dan informasi	50	%	80	%	Wajib	Dishubkomintel
			10	Program Pengembangan Data dan Statistik;	Meningkatnya akses data dan informasi	55	%	85	%	Wajib	Dishubkomintel

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
			11	Program pengembangan data dan informasi;	Meningkatnya informasi dan data perencanaan kepada masyarakat	65	%	90	%	Wajib	Bappeda
			12	Program desiminasi dan informasi teknologi;	Meningkatnya informasi teknologi kepada masyarakat	75	%	90	%	Wajib	Bappeda
	8	Peningkatan kesiapsiagaan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai dengan standar internasional	1	Program pengaturan jasa konstruksi	Meningkatnya pemahaman manajemen jasa konstruksi	70	%	100	%	Wajib	Dinas Cipta Karya
			2	Program pemberdayaan jasa konstruksi	Meningkatnya profesionalisme jasa konstruksi	75	%	100	%	Wajib	Dinas Cipta Karya
			3	Program pengawasan jasa konstruksi	Meningkatnya profesionalisme jasa pengawasan konstruksi	80	%	100	%	Wajib	Dinas Cipta Karya
IX	**SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN**										
	1	Pengembangan seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berdaya guna sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah Aceh	1	Program pembinaan dan pengawasan Bidang pertambangan	Meningkatnya pengelolaan pertambangan secara lestari	60	%	85	%	Pilihan	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Meningkatnya ketersediaan energi terbarukan	10	%	30	%	Pilihan	Dinas Pertambangan dan Energi
			3	Program pengembangan minyak dan gas bumi	Meningkatnya koordinasi pengelolaan minyak dan gas bumi	75	%	90	%	Pilihan	Dinas Pertambangan dan Energi
			4	Program pemanfaatan geologi dan sumberdaya mineral	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral secara optimal dan lestari	50	%	85	%	Pilihan	Dinas Pertambangan dan Energi
			5	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan tanaman rakyat dan non kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat	3070	Ha	3486	Ha	Pilihan	Dinas Kehutanan
	2	Pembangunan sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai kawasan industri dengan memperhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana	1	Program peningkatan sarana perekonomian, potensi dan kerja sama investasi, pertambangan dalam pengembangan industri berbasis lingkungan hidup	Meningkatnya PAD	50	%	75	%	Wajib	Biro Ekonomi
X	**KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN**										

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja				Bidang Urusan	SKPA Penanggung Jawab
						Awal		Akhir			
	1	Peningkatan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana	1	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya kualitas Daerah Aliran Sungai	86.557	M	98.544	M	Wajib	Dinas Pengairan
	2	Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas kondisi lingkungan hidup	65	%	85	%	Wajib	Bapedal
			2	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	2	Kab/Kota	8	Kab/Kota	Wajib	Bapedal
			3	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan SDA	45	%	75	%	Wajib	Bapedal
			4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi lingkungan hidup melalui 14 diseminasi	60	%	90	%	Wajib	Bapedal
			5	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan RTH	60	%	90	%	Wajib	Bapedal
			6	Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan*)Program Baru	Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan	45	%	80	%	Wajib	Bapedal
			7	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut *)Program baru	Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	50	%	80	%	Wajib	Bapedal
			8	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas lingkungan	1415	Ha	1806	Ha	Pilihan	Dinas Kehutanan
			9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tersedianya tenaga pengaman hutan yang berkompeten.	1870	Org Pamhut	1870	Org Pamhut	Pilihan	Dinas Kehutanan
	3	Penanganan kondisi kejadian-kejadian pra bencana, bencana, pasca bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana	60	%	95	%	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana
			2	Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tersedianya regulasi kebencanaan	55	%	85	%	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana
			3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	50	%	75	%	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana
			4	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Meningkatnya penanganan darurat dan logistik bencana	60	%	80	%	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Program-program yang telah diuraikan pada BAB VII sebelumnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017. Program-program 5 (lima) tahun akan diikuti dengan pagu indikatif sesuai dengan rencana/proyeksi penerimaan tiap tahun. Besaran Pagu Indikatif untuk mendukung program-program tersebut ditentukan oleh besarnya proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

Selanjutnya pengeluaran terdiri dari belanja wajib dan mengikat serta prioritas lainnya yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai dan belanja rutin SKPA, tambahan pendapatan PNS, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah lainnya dan belanja tidak terduga pada setiap tahunnya. Proyeksi penerimaan dan indikasi total kebutuhan pendanaan untuk mendukung program-program disajikan pada **Tabel 8.1** dan uraian rinci plafon plafon anggaran belanja Pemerintah Aceh berdasarkan urusan pemerintah tahun 2013-2017 disajikan pada **Tabel 8.2**. Selanjutnya distribusi kebutuhan pendanaan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh dapat dilihat pada **Tabel 8.3**.

Tabel 8.1
Proyeksi dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan untuk Mendukung Program-program 2013-2017

No	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Proyeksi Penerimaan	10.013.971.208.105	10.291.935.643.154	10.893.308.089.872	11.546.099.390.670	12.238.824.994.881
2	Belanja wajib dan mengikat serta prioritas Lainnya	2,525,410,220,965	2,623,702,020,765	2,766,194,743,812	2,918,080,713,019	3,078,486,915,318
3	Total Belanja Langsung	**7,488,560,987,140**	**7,668,233,622,389**	**8,127,113,346,060**	**8,628,018,677,651**	**9,160,338,079,563**

8.2. Plafon Anggaran Belanja Pemerintah Aceh berdasarkan Urusan Pemerintah

Tabel 8.2
Plafon Anggaran Belanja Pemerintah Aceh
Berdasarkan Urusan Pemerintah Tahun 2013-2017

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
			URUSAN WAJIB					6,585,684,017,413		6,741,821,590,480		7,145,932,196,441		7,587,288,961,682		8,056,373,957,322		36.117.100.723.338	
1	**1**		**Pendidikan**					2,050,962,014,513		2,104,782,563,199		2,229,066,468,939		2,364,173,604,017		2,507,633,401,572		11.256.618.052.240	
1	1	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan anak usia dini	55	%	60,00	50.045.844.393	65,00	51.359.128.006	70,00	54.391.798.998	75,00	57.688.569.299	80,00	61.189.154.222	80	274.674.494.918	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	2	Program Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya angka kelulusan SD/MI	80,9	%	83,92	160.484.732.498	86,94	164.696.110.524	89,96	174.421.141.619	92,98	184.993.074.340	96,00	196.218.590.499	96	880.813.649.480	Dinas Pendidikan dan MPD
				Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs	82,88	%	86,10	383.513.777.665	89,33	393.577.797.280	92,55	416.817.910.873	95,78	442.081.883.291	99,00	468.907.737.945	99	2.104.899.107.054	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	3	Program pendidikan menengah	Meningkatnya APK SMA/MA/SMK	98	%	98,40	268.881.120.103	98,80	275.936.994.035	99,20	292.230.614.078	99,60	309.943.159.487	100,00	328.750.738.946	100	1.475.742.626.649	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	4	Program Pendidikan Nonformal	Meningkatnya angka melek huruf penduduk dewasa	96.95	%	97,14	38.968.278.276	97,33	39.990.868.701	97,52	42.352.262.910	97,71	44.919.298.476	97,90	47.645.034.630	97,9	213.875.742.993	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	5	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya jumlah siswa yang terlayani pada lembaga pendidikan luar biasa	20	%	25,00	66.773.856.867	30,00	68.526.110.487	35,00	72.572.463.210	40,00	76.971.191.434	45,00	81.641.860.086	45	366.485.482.084	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	6	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca di masyarakat	40	%	43,00	75.383.324.061	46,00	77.361.503.976	49,00	81.929.571.973	52,00	86.895.448.901	55,00	92.168.328.814	55	413.738.177.725	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50.68	%	54,54	416.109.617.303	58,41	427.029.004.282	62,27	452.244.355.951	66,14	479.655.579.501	70,00	508.761.433.747	70	2.283.799.990.783	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	8	Program manajemen pelayanan pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS	75	%	78,00	152.755.650.841	81,00	156.764.205.307	84,00	166.020.870.607	87,00	176.083.650.027	90,00	186.768.535.749	90	838.392.912.531	Dinas Pendidikan dan MPD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	1	9	Program pengembangan kurikulum. bahan ajar dan model pembelajaran berkarakter kearifan lokal	Meningkatnya pemahaman terhadap pendidikan berbasis kearifan lokal	20	%	31,00	103.374.832.195	42,00	106.087.554.396	53,00	112.351.847.839	64,00	119.161.665.534	75,00	126.392.483.264	75	567.368.383.229	Dinas Pendidikan dan MPD
1	1	10	Program peningkatan sarana dan prasarana dayah	Meningkatnya jumlah dan mutu sarana prasarana dayah	50	%	55,00	125.867.538.831	60,00	129.170.505.904	65,00	136.797.809.199	70,00	145.089.334.079	75,00	153.893.461.854	75	690.818.649.866	Badan Dayah
1	1	11	Program peningkatan mutu tenaga pendidik dayah	Meningkatnya jumlah pengajar dayah yang memenuhi kualifikasi	30	%	35,00	50.967.258.693	40,00	52.304.721.702	45,00	55.393.228.427	50,00	58.750.696.901	55,00	62.315.732.510	55	279.731.638.233	Badan Dayah
1	1	12	Program pendidikan dayah dan pemberdayaan santri	Meningkatnya angka kelulusan santri	80	%	83,00	27.139.608.136	86,00	27.851.795.193	89,00	29.496.397.324	92,00	31.284.219.173	95,00	33.182.568.661	95	148.954.588.486	Badan Dayah
1	1	13	Program pembinaan manajemen dayah	Meningkatnya mutu. tata kelola. dan akuntabilitas manajemen pengelolaan Dayah	33	%	38,40	46.703.380.778	43,80	47.928.952.759	49,20	50.759.077.614	54,60	53.835.663.105	60,00	57.102.450.838	60	256.329.525.094	Badan Dayah/MPD
1	1	14	Program peningkatan kualitas dan pengembangan dayah	Terwujudnya Pengembangan Dayah	55	%	60,00	42.169.124.189	65,00	43.275.709.970	70,00	45.831.068.586	75,00	48.608.959.897	80,00	51.558.587.426	80	231.443.450.068	Badan Dayah
1	1	15	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Meningkatnya kualitas dayah dengan data yang akurat	50	%	55,00	41.824.069.684	60,00	42.921.600.679	65,00	45.456.049.731	70,00	48.211.210.574	75,00	51.136.702.381	75	229.549.633.048	MPD
1	**2**		**Kesehatan**					1.001.397.120.811		1.029.193.564.315		1.089.330.808.987		1.154.609.939.067		1.223.882.499.488		5.498.413.932.668	
1	2	1	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	75	%	76,00	28.444.556.680	77,00	29.234.111.090	78,00	30.942.301.806	79,00	32.796.547.117	80,00	34.764.225.304	80	156.181.741.996	Dinas Kesehatan . RSUDZA. RSJ. RSIA
1	2	2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata	Meningkatnya pelayanan kesehatan	75	%	76,00	33.046.104.987	77,00	33.963.387.622	78,00	35.947.916.697	79,00	38.102.127.989	80,00	40.388.122.483	80	181.447.659.778	RSUDZA. RSJ. RSIA
1	2	3	Program pelayanan medis	Meningkatnya pelayanan medis	75	%	76,00	3.834.594.950	77,00	3.941.034.344	78,00	4.171.314.589	79,00	4.421.284.374	80,00	4.686.545.981	80	21.054.774.238	RSUDZA. RSJ. RSIA
1	2	4	Program pelayanan penunjang medis/non medis	Meningkatnya pelayanan kesehatan	75	%	76,00	12.828.904.514	77,00	13.185.004.918	78,00	13.955.423.520	79,00	14.791.714.847	80,00	15.679.166.033	80	70.440.213.833	Dinas Kesehatan . RSUZA. RSJ .RSIA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	2	5	Program penanggulangan krisis kesehatan dan ambulan terpadu	Meningkatnya penanganan kesehatan emergensi	n.a	%	10,00	15.222.072.160	20,00	15.644.601.304	30,00	16.558.737.624	40,00	17.551.034.893	50,00	18.604.035.637	50	83.580.481.618	Dinas Kesehatan
1	2	6	Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	75	%	76,00	68.109.440.073	77,00	69.999.998.937	78,00	74.090.198.496	79,00	78.530.120.387	80,00	83.241.653.109	80	373.971.411.000	Dinas Kesehatan
1	2	7	Program upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	50	%	55,00	11.512.287.158	60,00	11.831.841.341	65,00	12.523.192.670	70,00	13.273.656.272	75,00	14.070.029.251	75	63.211.006.692	Dinas Kesehatan . RSJ
1	2	8	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan profesionalisme Tenaga Kesehatan	65	%	69,00	20.767.921.397	73,00	21.344.390.354	77,00	22.591.573.459	81,00	23.945.393.850	85,00	25.382.033.781	85	114.031.312.841	Dinas Kesehatan . RSUDZA. RSJ. RSIA
1	2	9	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	60	%	64,00	37.051.693.470	68,00	38.080.161.880	72,00	40.305.239.933	76,00	42.720.567.745	80,00	45.283.652.481	80	203.441.315.509	Dinas Kesehatan . RSUDZA. RSJ. RSIA
1	2	10	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	- Tersedianya akses jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh	100	%	100,00	111.464.588.115	100,00	114.558.584.555	100,00	121.252.405.686	100,00	128.518.565.330	100,00	136.229.230.014	100	612.023.373.699	Dinas Kesehatan
				- Meningkatnya kualitas jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh	80	%	84,00	421.588.187.861	88,00	433.290.490.577	92,00	458.608.270.584	96,00	486.090.784.347	100,00	515.254.532.284	100	2.314.832.265.653	Dinas Kesehatan
1	2	11	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada BLUD	75	%	79,00	7.009.779.846	83,00	7.204.354.950	87,00	7.625.315.663	91,00	8.082.269.573	95,00	8.567.177.496	95	38.488.897.529	RSUDZA. RSJ. RSIA
1	2	12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya angka kematian ibu	238/100.000	Kelahiran	210,80	17.579.556.453	183,60	18.067.523.851	156,40	19.123.234.983	129,20	20.269.212.067	102,00	21.485.293.940	102/100.000	96.524.821.294	Dinas Kesehatan
1	2	13	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Menurunnya angka kematian balita	45/1000	Kelahiran	42,40	36.050.296.349	39,80	37.050.968.315	37,20	39.215.909.124	34,60	41.565.957.806	32,00	44.059.769.982	32/1000	197.942.901.576	Dinas Kesehatan
1	2	14	Program perbaikan gizi masyarakat	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita	23,7	%	21,96	31.463.875.891	20,22	32.337.239.545	18,48	34.226.750.473	16,74	36.277.819.329	15,00	38.454.361.680	15	172.760.046.919	Dinas Kesehatan
1	2	15	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Menurunnya angka kesakitan di masyarakat	30	%	27,00	24.023.620.209	24,00	24.690.459.756	21,00	26.133.158.458	18,00	27.699.211.521	15,00	29.361.067.390	15	131.907.517.334	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	2	16	Program obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya buffer stok obat	10	%	11,00	26.568.720.913	12,00	27.306.206.506	13,00	28.901.747.014	14,00	30.633.710.240	15,00	32.471.625.775	15	145.882.010.449	Dinas Kesehatan
1	2	17	Program pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat dan makanan	55	%	61,00	34.187.862.614	67,00	35.136.837.772	73,00	37.189.933.209	79,00	39.418.573.460	85,00	41.783.550.080	85	187.716.757.135	Dinas Kesehatan
1	2	18	Program pengembangan obat asli Indonesia	Meningkatnya standarisasi tanaman obat tradisional	40	%	45,00	29.912.735.993	50,00	30.743.043.630	55,00	32.539.403.421	60,00	34.489.356.485	65,00	36.558.597.317	65	164.243.136.846	Dinas Kesehatan
1	2	19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat	50	%	56,00	20.511.341.978	62,00	21.080.688.890	68,00	22.312.463.543	74,00	23.649.558.022	80,00	25.068.448.836	80	112.622.501.269	Dinas Kesehatan /RSUZA/RSJ/RSIA
1	2	20	Program pengembangan lingkungan sehat	Tersedianya lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	55	%	61,00	10.218.979.200	67,00	10.502.634.177	73,00	11.116.318.039	79,00	11.782.473.412	85,00	12.489.380.632	85	56.109.785.460	Dinas Kesehatan
1	**3**		**Pekerjaan Umum**					1.847.402.896.919		1.879.670.990.615		1.997.504.748.946		2.126.758.012.295		2.264.458.418.628		10.115.795.067.402	
1	3	1	Program pembangunan jalan dan jembatan	- panjang jalan	1.833	Km	1939,40	377.573.113.715	2.045,80	384.178.398.439	2.152,20	408.298.990.478	2.258,60	434.757.157.298	2.365,0	462.944.455.843	2.365	2.067.752.115.774	Dinas Bina Marga
				- Panjang jembatan	16.544	M	17641,20	701.773.733.326	18.738,4	714.035.619.966	19.835,6	758.812.488.431	20.932,8	807.928.772.708	22.030,0	860.254.974.208	22.030	3.842.805.588.638	
1	3	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	- Panjang jalan	820	Km	1022,60	129.458.319.297	1.225,20	131.717.087.888	1.427,80	139.965.458.395	1.630,40	149.013.194.973	1.833,0	158.652.232.091	1.833	708.806.292.644	Dinas Bina Marga
				- Panjang jembatan	16.544	M	21206,40	33.659.163.017	25.868,8	34.246.442.851	30.531,2	36.391.019.183	35.193,6	38.743.430.693	39.856,0	41.249.580.344	39.856	184.289.636.087	
1	3	3	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman yang diukur dengan mutu pekerjaan. panjang saluran drainase dan gorong-gorong	57	Km	274,60	12.021.129.649	492,20	12.230.872.447	709,80	12.996.792.565	927,40	13.836.939.533	1.145,00	14.731.992.980	1145	65.817.727.174	Dinas Cipta Karya

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	4	Program peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	- Meningkatnya efektivitas dan kualitas pembangunan kebinamargaan	70	%	74,00	21.318.536.264	78,00	21.690.498.765	82,00	23.048.798.384	86,00	24.538.733.533	90,00	26.126.041.043	90	116.722.607.988	Dinas Bina Marga
				- Meningkatnya kontribusi pemanfaatan sarana prasarana kebinamargaan terhadap PAD	n.a.	%	0,40	22.192.854.737	0,80	22.580.072.209	1,20	23.994.078.582	1,60	25.545.119.138	2,00	27.197.525.501	2	121.509.650.168	
1	3	5	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	- Meningkatnya ketersediaan air minum yang berkualitas dan	40	%	44,00	13.950.034.762	48,00	14.193.432.796	52,00	15.082.252.116	56,00	16.057.208.692	60,00	17.095.882.017	60	76.378.810.383	Dinas Bina Marga
				- Meningkatnya penanganan permasalahan air limbah	20	%	24,00	9.247.022.807	28,00	9.408.363.421	32,00	9.997.532.743	36,00	10.643.799.641	40,00	11.332.302.292	40	50.629.020.903	
1	3	6	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian yang sesuai dengan teknologi pengairan. yang diukur dengan :															Dinas Pengairan
				- Panjang saluran irigasi	702.605	M	785.875	98.203.382.209	869.145	99.916.819.527	952.415	106.173.797.725	1.035.685	113.037.152.186	1.118.955	120.349.050.343	1.118.955	537.680.201.991	Dinas Pengairan
				- Luas areal pertanian yang terairi irigasi	43.627	Ha	52.911	64.729.159.648	62.195	65.858.543.944	71.479	69.982.729.198	80.763	74.506.597.486	90.047	79.326.116.045	90.047	354.403.146.322	Dinas Pengairan
				- Lokasi irigasi	27	Lokasi	40	11.096.427.368	53,00	11.290.036.105	66,00	11.997.039.291	79,00	12.772.559.569	92,00	13.598.762.751	92	60.754.825.084	Dinas Pengairan
				- Jumlah P3A	170	Unit	172	1.847.129.116	174,00	1.879.357.537	176,00	1.997.046.423	178,00	2.126.140.773	180,00	2.263.671.881	180	10.113.345.730	
1	3	7	Program Pengembangan. pengelolaan. dan konservasi sungai. danau dan sumber daya air lainnya	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian	17	Lokasi	27	61.030.350.526	37,00	62.095.198.576	47,00	65.983.716.101	57,00	70.249.077.630	67,00	74.793.195.129	71	334.151.537.961	Dinas Pengairan
1	3	8	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya kualitas Daerah Aliran Sungai	86.557	M	88.954	57.331.541.403	91.351,8	58.331.853.208	93.749,2	61.984.703.004	96.146,6	65.991.557.774	98.544	70.260.274.212	98.544	313.899.929.599	Dinas Pengairan
1	3	9	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terarahnya Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang terintegrasi	50	%	58	37.173.031.684	66,00	37.821.620.951	74,00	40.190.081.625	82,00	42.788.074.556	90,00	45.555.855.215	90	203.528.664.031	Dinas Cipta Karya

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	3	10	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Meningkatnya infrastruktur pedesaan yang tertata	50	%	56	36.988.091.228	62,00	37.633.453.682	68,00	39.990.130.970	74,00	42.575.198.564	80,00	45.329.209.169	80	202.516.083.613	Dinas Cipta Karya
1	3	11	Program pengaturan jasa konstruksi	Meningkatnya pemahaman manajemen jasa konstruksi	70	%	76	9.802.029.116	82,00	9.973.053.393	88,00	10.597.584.658	94,00	11.282.640.495	100,00	12.012.467.076	100	53.667.774.738	Dinas Cipta Karya
1	3	12	Program pemberdayaan jasa konstruksi	Meningkatnya profesionalisme jasa konstruksi	75	%	80	5.363.273.228	85,00	5.456.850.784	90,00	5.798.568.991	95,00	6.173.403.792	100,00	6.572.735.329	100	29.364.832.124	Dinas Cipta Karya
1	3	13	Program pengawasan jasa konstruksi	Meningkatnya profesionalisme jasa pengawasan konstruksi	80	%	84	18.678.986.070	88,00	19.004.894.110	92,00	20.195.016.140	96,00	21.500.475.275	100,00	22.891.250.630	100	102.270.622.224	Dinas Cipta Karya
1	3	14	Program Pengembangan Perumahan	Terbangunnya rumah layak huni untuk masyarakat	10.876	Unit	720	65.136.028.652	720	66.272.511.935	720	70.422.620.638	720	74.974.924.670	720	79.824.737.346	14476	356.630.823.242	Dinas Cipta Karya
1	3	15	Program perencanaan tata ruang	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	60	%	64	55.685.571.343	68,00	56.657.164.519	72,00	60.205.142.175	76,00	64.096.961.437	80,00	68.243.124.404	80	304.887.963.879	Dinas Cipta Karya
1	3	16	Program pemanfaatan ruang	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang	70	%	73	1.682.958.151	76,00	1.712.322.143	79,00	1.819.550.959	82,00	1.937.171.535	85,00	2.062.479.017	85	9.214.481.804	Dinas Cipta Karya
1	3	17	Program pengendalian pemanfaatan ruang;	Menurunnya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang	30	%	27	1.461.029.603	24,00	1.486.521.420	21,00	1.579.610.173	18,00	1.681.720.343	15,00	1.790.503.762	15	7.999.385.303	Dinas Cipta Karya
1	**6**		**Perencanaan Pembangunan**					36.299.375.609		37.507.645.407		38.994.213.241		41.330.976.598		43.810.690.722		197.942.901.576	
1	6	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75	%	78	7.059.700.000	81	7.255.660.771	84	7.679.619.356	87	8.139.827.464	90	8.628.188.660	90	38.762.996.252	Bappeda
1	6	2	Program pengembangan data dan informasi;	Meningkatnya informasi dan data perencanaan kepada masyarakat	65	%	70	6.470.800.000	75	6.650.414.284	80	7.039.007.455	85	7.460.826.318	90	7.908.449.818	90	35.529.497.875	Bappeda
1	6	3	Program kerjasama pembangunan;	Meningkatnya integrasi pembangunan antar sektor	70	%	74	180.000.000	78	184.996.379	82	195.805.981	86	207.539.831	90	219.991.495	90	988.333.686	Bappeda
1	6	4	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya integrasi pembangunan wilyah perbatasan	65	%	70	700.000.000	75	719.430.364	80	761.467.704	85	807.099.342	90	855.522.481	90	3.843.519.891	Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	6	5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terarahnya Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang terintegrasi	40	%	50	1.450.000.000	60	1.490.248.611	70	1.577.325.958	80	1.671.848.637	90	1.772.153.711	90	7.961.576.918	Bappeda
1	6	6	Program perencanaan pembangunan daerah;	Meningkatnya integrasi pembangunan antar wilayah	65	%	69	7.320.444.447	73	7.523.642.875	77	7.963.260.035	81	8.440.465.567	85	8.946.863.997	85	40.194.676.922	Bappeda
1	6	7	Program perencanaan pembangunan ekonomi;	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang ekonomi.	70	%	74	4.579.677.023	78	4.706.798.153	82	4.981.823.068	86	5.280.363.303	90	5.597.166.644	90	25.145.828.191	Bappeda
1	6	8	Program perencanaan pembangunan sosial budaya;	Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang sosial budaya	65	%	69	3.852.874.879	73	3.959.821.680	77	4.191.199.697	81	4.442.361.114	85	4.708.887.253	85	21.155.144.623	Bappeda
1	6	9	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;	Meningkatnya koordinasi pembangunan prasarana dan sumber daya alam	70	%	74	3.517.000.000	78	3.614.623.700	82	3.825.831.307	86	4.055.097.694	90	4.298.389.381	90	19.310.942.082	Bappeda
1	6	10	Program pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional;	Meningkatnya kerjasama internasional	5	lembaga	6	340.000.000	7	349.437.605	8	369.855.742	9	392.019.680	10	415.539.491	10	1.866.852.519	Bappeda
1	6	11	Program desiminasi dan informasi teknologi;	Meningkatnya informasi teknologi kepada masyarakat	75	%	78	56.000.000	81	57.554.429	84	60.917.416	87	64.567.947	90	68.441.799	90	307.481.591	Bappeda
1	6	12	Program inovasi daerah;	- Tersedianya Sistem inovasi daerah	0	Dok	1	452.879.260	1	666.134.103	0	-	0	-	0	-	2	1.119.013.363	Bappeda
				- Meningkatnya jumlah penelitian inovasi	0	Peneliti an	5	120.000.000	5	123.330.920	5	130.537.321	5	138.359.887	5	146.660.997	25	658.889.124	Bappeda
				- Meningkatnya jumlah paten	0	Paten	1	200.000.000	1	205.551.533	1	217.562.201	1	230.599.812	1	244.434.995	5	1.098.148.540	Bappeda
1	**7**		**Perhubungan**					170.240.304.779		175.021.293.062		185.364.899.146		196.592.909.520		208.507.789.912		935.727.196.419	
1	7	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	72	%	76	14.682.466.712	80	15.090.017.671	84	15.971.748.879	88	16.928.870.319	90	17.944.543.364	90	80.617.646.945	Dishubkom intel
1	7	2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	55	%	61	10.141.258.155	67	10.422.755.778	73	11.031.772.232	79	11.692.861.121	85	12.394.391.916	85	55.683.039.201	Dishubkom intel

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	7	3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan sarana angkutan orang dan barang	47	%	53	548.455.140	58	563.678.973	64	596.615.537	69	632.368.261	75	670.308.146	75	3.011.426.056	Dishubkom intel
1	7	4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	75	%	80	72.750.961.187	85	74.770.357.828	90	79.139.296.247	95	83.881.789.869	100	88.914.404.053	100	399.456.809.184	Dishubkom intel
1	7	5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1413	kasus	1270	16.695.743.774	1128	17.186.936.261	985	18.249.624.830	843	19.403.175.939	700	20.627.295.177	700	92.162.775.981	Dishubkom intel
1	7	6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor laik jalan	75	%	78	6.984.737.515	81	7.178.617.503	84	7.598.074.340	87	8.053.395.790	90	8.536.571.387	90	38.351.396.536	Dishubkom intel
1	7	7	Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa	Meningkatnya akses informasi	62	%	70	40.318.287.361	77	41.465.186.445	85	43.946.487.724	92	46.639.946.492	100	49.498.176.757	100	221.868.084.779	Dishubkom intel
1	7	8	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	50	%	56	6.531.101.236	62	6.712.389.341	68	7.104.603.803	74	7.530.353.586	80	7.982.148.479	80	35.860.596.445	Dishubkom intel
1	7	10	Program Kerjasama informasi dengan Mass Media	Meningkatnya akses data dan informasi	50	%	56	783.968.229	62	805.729.355	68	852.809.268	74	903.914.631	80	958.146.350	80	4.304.567.833	Dishubkom intel
1	7	11	Program Pengembangan Data dan Statistik	Meningkatnya akses data dan informasi	55	%	61	803.325.469	67	825.623.907	73	873.866.287	79	926.233.511	85	981.804.284	85	4.410.853.458	Dishubkom intel
1	**8**		**Lingkungan Hidup**					18.025.148.174		18.525.484.157		19.607.954.561		20.782.978.903		22.029.884.990		98.971.450.786	
1	8	1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Kab/Kota	2	1.291.233.506	3	1.327.075.130	3	1.404.618.019	4	1.488.791.019	4	1.578.113.276	4	7.089.830.950	Bapedal
1	8	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas kondisi	65	%	69	6.088.011.894	73	6.257.000.874	77	6.622.606.340	81	7.019.471.991	85	7.440.615.774	85	33.427.706.873	Bapedal
1	8	3	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	2	Kab/Kota	3	1.973.753.725	3	2.028.540.515	3	2.147.071.025	3	2.275.736.190	3	2.412.272.406	3	10.837.373.861	Bapedal
1	8	4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan SDA	45	%	51	724.496.166	57	744.606.486	63	788.114.903	69	835.343.399	75	885.461.083	75	3.978.022.037	Bapedal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	8	5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi lingkungan hidup melalui 14 diseminasi	60	%	66	4.963.896.227	72	5.101.682.384	78	5.399.780.946	84	5.723.367.684	90	6.066.749.739	90	27.255.476.981	Bapedal
1	8	6	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan RTH	60	%	66	1.758.046.580	72	1.806.845.844	78	1.912.422.419	84	2.027.026.055	90	2.148.640.533	90	9.652.981.431	Bapedal
1	8	7	Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan Lindung/ konservasi laut dan hutan	Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan	45	%	52	648.905.334	59	666.917.430	66	705.886.364	73	748.187.241	80	793.075.860	80	3.562.972.228	Bapedal.Dinas Kehutanan. Dinas Kelautan dan Perikanan
1	8	8	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	50	%	56	576.804.742	62	592.815.493	68	627.454.546	74	665.055.325	80	704.956.320	80	3.167.086.425	Bapedal. Dinas Kelautan dan Perikanan
1	**10**		**Kependudukan dan Catatan Sipil**					36.242.266.320		35.977.839.422		38.490.849.288		41.237.016.746		44.156.814.296		196.104.786.071	
1	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya validitas data dan informasi kependudukan secara elektronik	50	%	60	36.242.266.320	70	35.977.839.422	80	38.490.849.288	90	41.237.016.746	100	44.156.814.296	100	196.104.786.071	Dinas Registrasi Kependudukan
1	**11**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					16,022,353,933		16,467,097,029		17,429,292,944		18,473,759,025		19,582,119,992		87.974.622.923	
1	11	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak	45	%	51	5.353.743.782	57	5.502.351.196	63	5.823.861.407	69	6.172.861.549	75	6.543.211.664	75	29.396.029.599	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	11	2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	45	%	51	4.871.890.643	57	5.007.122.940	63	5.299.696.259	69	5.617.285.332	75	5.954.302.817	75	26.750.297.991	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	11	3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak	60	%	65	1.773.781.979	70	1.823.018.021	75	1.929.539.559	80	2.045.168.955	85	2.167.871.943	85	9.739.380.457	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	11	4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	- Meningkatnya produktivitas ekonomi perempuan	40	%	44	3.061.596.293	48	3.146.579.050	52	3.330.438.142	56	3.530.017.648	60	3.741.806.368	60	16.810.437.501	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				- Meningkatnya peran serta gender dalam pembangunan	20	%	24	961.341.236	28	988.025.822	32	1.045.757.577	36	1.108.425.542	40	1.174.927.200	40	5.278.477.375	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**13**		**Sosial**					110,153,683,289		113,211,292,075		119,826,388,989		127,007,093,297		134,627,074,944		604.825.532.594	
1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Menurutnya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	18	%	16,80	30.273.129.008	15,60	31.113.440.312	14,40	32.931.442.908	13,20	34.904.889.292	12,00	36.999.060.640	12,00	166.221.962.160	Dinas Sosial
1	13	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat	50	%	57	23.348.896.916	64	23.997.007.721	71	25.399.187.034	78	26.921.256.198	85	28.536.437.467	85,00	128.202.785.336	Dinas Sosial
				Pemerataan kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Mantan Kombatan. Tapol/Napol dan Masyarakat Imbas Konflik.	40	%	50	27.538.420.822	60	28.302.823.019	70	29.956.597.247	80	31.751.773.324	90	33.656.768.736	90,00	151.206.383.148	Dinas Sosial
1	13	3	Program Pembinaan Anak Terlantar.	Menurunnya jumlah anak terlantar	60	%	66	9.541.109.584	72	9.805.948.486	78	10.378.924.012	84	11.000.890.383	90	11.660.905.353	90,00	52.387.777.818	Dinas Sosial
1	13	4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.	Meningkatnya pelayanan untuk penyandang cacat dan trauma	55	%	61	7.483.155.066	67	7.690.869.960	73	8.140.258.437	79	8.628.070.758	85	9.145.724.844	85,00	41.088.079.065	Dinas Sosial
1	13	5	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Meningkatnya pelayanan panti asuhan	60	%	67	8.388.215.028	74	8.621.052.271	81	9.124.792.624	88	9.671.604.043	95	10.251.866.478	95,00	46.057.530.445	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	13	6	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana; PSK; Narkoba dan Penyakit sosial lainnya).	Meningkatnya ketrampilan penyandang penyakit sosial	45	%	52	1.265.502.069	59	1.300.629.449	66	1.376.627.078	73	1.459.122.696	80	1.546.664.957	80,00	6.948.546.249	Dinas Sosial
1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial	60	%	65	2.315.254.796	70	2.379.520.858	75	2.518.559.648	80	2.669.486.604	85	2.829.646.469	85,00	12.712.468.374	Dinas Sosial
1	**14**		**Ketenagakerjaan**					73,101,989,819		75,131,130,195		79,521,149,056		84,286,525,552		89,343,422,463		401.384.217.085	Disnaker mobduk
1	14	1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi bidang Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk	70	%	73	387.814.746	75	398.579.577	78	421.869.149	80	447.150.038	85	473.977.477	85	2.129.390.986	Disnaker mobduk
1	14	2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas dan produktivitas 9 BLK dalam pembinaan tenaga kerja	30	%	38	18.990.077.924	46	19.517.198.101	54	20.657.615.763	62	21.895.541.997	70	23.209.197.981	70	104.269.631.766	Disnaker mobduk
1	14	3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	- Meningkatkan pelayanan fasilitasi penempatan kerja	1000	Orang	1800	9.453.084.946	1800	9.715.480.489	1800	10.283.169.841	1800	10.899.398.057	1800	11.553.323.842	10000	51.904.457.174	Disnaker mobduk
				- Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja	485	Orang	503	10.965.298.473	503	11.269.669.529	503	11.928.172.358	503	12.642.978.833	503	13.401.513.369	3000	60.207.632.563	Disnaker mobduk
1	14	4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Persentase kasus dan perusahaan yang tertangani	50	%	58	8.010.868.364	66	8.233.231.346	74	8.714.310.771	82	9.236.523.694	90	9.790.682.830	90	43.985.617.005	Disnaker mobduk
1	14	5	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terwujudnya pengembangan wilayah tujuan mobilitas penduduk yang tertata bagi masyarakat Aceh	400	KK	320	12.867.507.098	320	13.224.679.019	320	13.997.415.835	320	14.836.223.589	320	15.726.345.145	2000	70.652.170.686	Disnaker mobduk
1	14	6	Program Transmigrasi Lokal	Pemerataan sebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan bagi PMKS. Mantan Kombatan. Tapol/Napol dan Masyarakat Imbas Konflik.	0	KK	400	12.427.338.269	400	12.772.292.133	400	13.518.595.340	400	14.328.709.344	400	15.188.381.819	2000	68.235.316.904	Disnaker mobduk

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**15**		**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**					46.608.743.669		46.599.378.407		49.746.221.564		53.450.213.558		57.421.504.340		253.826.061.539	
1	15	1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kegiatan	70	%	73	1.283.599.857	75	1.274.234.595	78	1.363.238.386	80	1.460.499.968	85	1.563.911.043	85	6.945.483.849	Dinas Koperasi dan UKM
1	15	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Meningkatnya kapasitas koperasi dan UKM	113	KSP	120	4.890.736.219	125	4.890.736.219	130	5.220.687.423	137	5.609.865.825	139	6.027.223.119	139	26.639.248.806	Dinas Koperasi dan UKM
					267	Koperasi	720	13.645.419.239	730	13.645.419.239	740	14.566.000.987	750	15.651.829.832	760	16.816.279.313	3967	74.324.948.611	Dinas Koperasi dan UKM
					115	UMKM	207	13.715.329.062	230	13.715.329.062	240	14.640.627.243	250	15.732.019.135	260	16.902.434.460	1302	74.705.738.963	Dinas Koperasi dan UKM
					50,61	% Koperasi aktif	50,95	13.073.659.291	52,00	13.073.659.291	52,50	13.955.667.525	54,00	14.995.998.798	57,00	16.111.656.405	57,00	71.210.641.310	Dinas Koperasi dan UKM
1	**16**		**Penanaman Modal**					14,249,643,114		14,371,755,551		15,325,699,258		16,378,499,539		17,503,401,198		77.828.998.661	
1	16	2	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investasi yang tercermin pada jumlah permohonan izin investasi	105	Perusahaan	72	8.595.597.642	72	8.669.257.689	72	9.244.690.787	72	9.879.755.647	72	10.558.313.136	466	46.947.614.900	Badan Invesatasi dan Promosi
1	16	3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Meningkatnya informasi prosedur. regulasi dan perizinan investasi kepada masyarakat	60	%	66	1.364.143.728	72	1.375.833.769	78	1.467.156.500	84	1.567.942.947	90	1.675.631.788	90	7.450.708.733	Badan Invesatasi dan Promosi
				- Meningkatnya realisasi investasi	1,928	Trilyun Rupiah	10,00	712.482.156	30,00	718.587.778	33,00	766.284.963	36,30	818.924.977	39,90	875.170.060	39,90	39,90	Badan Invesatasi dan Promosi
1	16	4	Program penyiapan potensi sumberdaya. sarana dan prasarana daerah; *) Program Baru	Meningkatnya ketersediaan data potensi sumberdaya. sarana dan prasarana daerah	50	%	56	1.424.964.311	62	1.437.175.555	68	1.532.569.926	74	1.637.849.954	80	1.750.340.120	80	7.782.899.866	Badan Invesatasi dan Promosi
1	16	5	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi bidang penanaman modal	40	%	48	2.152.455.277	56	2.170.900.760	64	2.314.997.083	72	2.474.026.014	80	2.643.946.095	80	11.756.325.230	Badan Invesatasi dan Promosi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	**17**		**Kebudayaan**					54,075,444,524		55,576,452,473		58,823,863,685		62,348,936,710		66,089,654,972		296.914.352.364	Disbudpar
1	17	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai Budaya kepada masyarakat	60	%	65,00	3.133.321.202	70,00	3.220.294.875	75,00	3.408.461.288	80,00	3.612.716.401	85,00	3.829.466.757	85,00	17.204.260.523	Disbudpar. Sekretariat MAA
1	17	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kelestarian benda. situs. dan kawasan cagar budaya	55	%	60,00	4.375.082.635	65,00	4.496.524.703	70,00	4.759.263.041	75,00	5.044.466.166	80,00	5.347.116.503	80,00	24.022.453.049	Disbudpar. Sekretariat MAA
1	17	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya kelestarian keragaman budaya	60	%	64,00	5.517.420.409	68,00	5.670.571.104	72,00	6.001.910.643	76,00	6.361.580.546	80,00	6.743.253.142	80,00	30.294.735.843	Disbudpar. KPP Jakarta. Perwakilan Medan. Sekretariat MAA
1	17	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Kemitraan pengelolaan Budaya	55	%	60,00	3.398.404.354	65,00	3.492.736.116	70,00	3.696.821.658	75,00	3.918.357.026	80,00	4.153.444.751	80,00	18.659.763.905	Disbudpar
1	17	5	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Meningkatnya sarana prasarana kebudayaan	45	%	51,00	2.780.711.068	57,00	2.857.897.107	63,00	3.024.888.103	69,00	3.206.157.247	75,00	3.398.515.475	75,00	15.268.169.000	Disbudpar. KPP Jakarta
1	17	6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	28053	Wisman	31.442	4.109.952.538	34.832	4.224.035.215	38.221	4.470.851.604	41.611	4.738.771.414	45.000	5.023.081.134	45.000	22.566.691.905	Disbudpar
					959.546	Wisnu	1.007.637	3.785.281.117	1.055.728	3.890.351.673	1.103.818	4.117.670.458	1.151.909	4.364.425.570	1.200.000	4.626.275.848	1.200.000	20.784.004.665	Disbudpar
1	17	7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	96	Lokasi	101	10.655.516.597	106	10.951.288.833	110	11.591.188.225	115	12.285.800.622	120	13.022.905.714	120	58.506.699.991	Disbudpar
1	17	8	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya persentase fasilitas pendukung pariwisata yang menjadi mitra	30	%	34,00	5.090.545.938	38,00	5.231.847.595	42,00	5.537.551.895	46,00	5.869.394.681	50,00	6.221.537.846	50	27.950.877.955	Disbudpar
1	17	9	Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	25	%	28	2.967.310.473	31	3.049.676.076	34	3.227.872.989	37	3.421.306.186	40	3.626.572.598	40,00	16.292.738.323	Disbudpar
1	17	10	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Meningkatnya kelestarian adat istiadat	60	%	66,00	8.261.898.193	72,00	8.491.229.176	78,00	8.987.383.781	84,00	9.525.960.851	90,00	10.097.485.204	90,00	45.363.957.206	Sekretariat MAA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	**18**		**Kepemudaan dan Olah Raga**					77,107,578,302		79,247,904,452		83,878,472,292		88,904,965,308		94,238,952,461		423.377.872.815	
1	18	1	Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda;	Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pemuda	45	%	48	1.975.548.320	51	2.030.384.924	54	2.149.023.205	57	2.277.805.356	60	2.414.465.716	51	10.847.227.521	Dispora
1	18	2	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan;	Meningkatnya jumlah pemuda yang memperoleh penghargaan	10	orang	12	3.859.546.840	14	3.966.678.840	16	4.198.457.529	18	4.450.053.879	20	4.717.041.557	14	21.191.778.645	Dispora
1	18	3	Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;	Meningkatnya persentase jumlah wirausahawan muda terhadap seluruh wirausahawan	5	%	8	1.672.248.651	11	1.718.666.365	14	1.819.090.486	17	1.928.101.122	20	2.043.780.450	11	9.181.887.074	Dispora
1	18	4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;	Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	1234	Orang	1239	513.160.722	1244	527.404.864	1250	558.221.881	1255	591.673.830	1260	627.172.192	1244	2.817.633.490	Dispora
1	18	5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	45	%	48	23.143.529.298	51	23.785.939.578	54	25.175.785.878	57	26.684.467.527	60	28.285.442.304	51	127.075.164.585	Dispora
1	18	6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;	Meningkatnya jumlah Stadion olahraga	26	Buah	27	37.198.129.347	28	38.230.662.474	29	40.464.534.491	30	42.889.408.174	31	45.462.622.745	28	204.245.357.229	Dispora
1	18	7	Program Pembinaan Kepemudaan.	Meningkatnya kualitas pemuda	55	%	60	8.745.415.125	65	8.988.167.408	70	9.513.358.821	75	10.083.455.419	80	10.688.427.498	65	48.018.824.271	Dispora
1	**19**		**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**					57,079,635,886		58,664,033,166		62,091,856,112		65,812,766,527		69,761,302,471		313.409.594.162	
1	19	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan wawasan kebangsaan	30	%	38,00	1.464.989.795	46,00	1.505.654.488	54,00	1.593.632.022	62,00	1.689.131.857	70,00	1.790.473.864	70	8.043.882.026	Badan Kesbanglinmas
1	19	2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	15	%	22,00	4.055.708.591	29,00	4.168.285.582	36,00	4.411.844.441	43,00	4.676.228.193	50,00	4.956.785.539	50	22.268.852.347	Badan Kesbanglinmas. Satpol PP dan WH
1	19	3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	30	%	38,00	4.934.702.468	46,00	5.071.678.275	54,00	5.368.023.654	62,00	5.689.707.308	70,00	6.031.069.858	70	27.095.181.563	Badan Kesbanglinmas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
				- Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh	40	%	46,00	2.023.228.012	52,00	2.079.388.093	58,00	2.200.889.698	64,00	2.332.779.996	70,00	2.472.738.642	70	11.109.024.441	Badan Kesbanglinmas
1	19	4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	30	%	38,00	1.048.624.275	46,00	1.077.731.633	54,00	1.140.705.027	62,00	1.209.062.803	70,00	1.281.602.345	70	5.757.726.082	Badan Kesbanglinmas
1	19	5	Program pembauran kebangsaan	Meningkatnya pemahaman pembauran dan harmonisnya hubungan antar umat beragama dan/atau antar etnik	30	%	38,00	1.819.671.535	46,00	1.870.181.364	54,00	1.979.458.723	62,00	2.098.079.570	70,00	2.223.957.010	70	9.991.348.201	Badan Kesbanglinmas. Dinas Syariat Islam
1	19	6	Program konsolidasi perdamaian Aceh	- Meningkatnya perdamaian di Aceh	80	%	82,00	5.176.092.138	84,00	5.319.768.358	86,00	5.630.609.994	88,00	5.968.029.370	90,00	6.326.090.271	90	28.420.590.132	Badan KesbangLinmas. Dinas Sosial
				- Meningkatnya pemahaman Pemerintah Aceh. Pemerintah Kabupaten/Kota. Stakeholder dan masyarakat terhadap Lex Specialis Aceh	30	%	40,00	1.220.945.494	50,00	1.254.836.088	60,00	1.328.157.946	70,00	1.407.749.008	80,00	1.492.209.027	80	6.703.897.563	Biro Hukum
				- Meningkatnya pemahaman aparatur Pemerintah terhadap *Lex Specialis* Aceh	10	%	18,00	2.004.722.878	26,00	2.060.369.299	34,00	2.180.759.610	42,00	2.311.443.594	50,00	2.450.122.130	50	11.007.417.510	Biro Tata Pemerintahan. Biro Organisasi. BKPP
				- Meningkatnya sistem kemandirian pemerintahan rakyat Aceh	n.a.	%	25,00	7.647.903.282	30,00	7.860.191.202	35,00	8.319.473.360	40,00	8.818.025.296	45,00	9.347.075.990	45	41.992.669.129	Biro Tata Pemerintahan. Biro Organisasi. BKPP
1	19	7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik	40	%	36,00	24.950.480.121	32,00	25.643.047.132	28,00	27.141.406.870	24,00	28.767.880.128	20,00	30.493.852.378	20	136.996.666.629	Badan Kesbanglinmas. Satpol PP dan WH
1	19	8	Peningkatan kapasitas SDM Pol PP dan WH serta llnmas	Meningkatnya kapasitas Pol-PP. WH dan Linmas	60	%	64,00	732.567.297	68,00	752.901.653	72,00	796.894.768	76,00	844.649.405	80,00	895.325.416	80	4.022.338.538	Satpol PP dan WH
1	**20**		**Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian**					454,628,704,365		467,137,103,942		494,198,864,044		523,574,472,580		554,747,124,770		2.491.486.269.702	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	20	1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	60	%	64,00	27.935.247.416	68,00	28.037.473.550	72,00	30.388.269.583	76,00	32.209.314.014	80,00	33.341.224.040	80	151.911.528.602	Biro Tata Pemerintahan. Perwakilan Medan.Biro Umum
1	20	2	Program penataan daerah otonomi baru	Menigkatnya kualitas pelayanan pemerintah	70	%	76,00	649.225.145	82,00	653.352.004	88,00	706.234.257	94,00	748.555.982	100,00	776.944.310	100	3.534.311.698	Biro Tata Pemerintahan
1	20	3	Program penataan penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya penataan penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah	60	%	64,00	2.260.918.576	68,00	2.323.676.391	72,00	2.459.452.110	76,00	2.606.836.993	80,00	2.763.238.101	80	12.414.122.172	Biro Tata Pemerintahan
1	20	4	Program pemilihan kepala daerah dan Pemilu	Meningkatnya kualitas PEMILU KADA dan legislatif	80	%	82,00	703.095.904	84,00	4.835.013.223	86,00	764.835.462	88,00	810.668.916	90,00	5.749.635.708	90	12.863.249.213	Biro Tata Pemerintahan
1	20	5	Program peningkatan kelembagaan dan aparatur	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur	60	%	66,00	2.575.124.626	72,00	2.646.604.067	78,00	2.801.248.909	84,00	2.969.116.274	90,00	3.147.252.872	90	14.139.346.749	Biro Tata Pemerintahan
1	20	6	Program koordinasi peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya koordinasi kependudukan dan cacatan sipil	60	%	66,00	5.783.426.026	72,00	5.943.960.415	78,00	6.291.274.482	84,00	6.668.284.773	90,00	7.068.358.550	90	31.755.304.246	Biro Tata Pemerintahan
1	20	7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama. Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Meningkatnya Pelayanan Agama dan Lembaga Keagamaan	50	%	55,00	3.618.606.429	60,00	3.719.050.485	65,00	3.936.359.898	70,00	4.172.249.811	75,00	4.422.570.216	75	19.868.836.839	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
1	20	8	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan. Kebudayaan dan Adat Istiadat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan	60	%	64,00	13.295.258.525	68,00	13.340.107.854	72,00	14.462.728.546	76,00	15.329.420.583	80,00	15.863.609.247	80	72.291.124.756	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
1	20	9	Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	60	%	66,00	3.329.982.890	72,00	3.422.415.432	78,00	3.622.392.036	84,00	3.839.467.142	90,00	4.069.821.750	90	18.284.079.249	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
1	20	10	Program Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama	70	%	74,00	16.915.594.229	78,00	17.014.621.905	82,00	18.400.969.568	86,00	19.503.664.247	90,00	20.233.218.227	90	92.068.068.176	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	20	11	Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama	Meningkatnya peran dan sumberdaya ulama	55	%	60,00	3.672.671.589	65,00	3.774.616.368	70,00	3.995.172.574	75,00	4.234.586.890	80,00	4.488.647.302	80	20.165.694.723	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
1	20	12	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	Meningkatanya Kualitas pendidikan Agama	70	%	74,00	2.075.192.032	78,00	2.132.794.512	82,00	2.257.416.731	86,00	2.392.694.462	90,00	2.536.247.766	90	11.394.345.502	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
1	20	13	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama	65	%	68,00	696.268.196	71,00	697.069.490	74,00	757.408.207	77,00	802.796.576	80,00	828.931.679	80	3.782.474.147	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
1	20	14	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan	50	%	58,00	28.932.990.160	66,00	29.406.826.552	74,00	31.439.483.375	82,00	33.374.459.755	90,00	35.130.404.262	90	158.284.164.103	Biro Hukum. Biro Tata Pemerintahan/Dinas Syariat Islam/Sekretariat DPRA
1	20	15	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Meningkatnya pemahaman tentang UUPA pada masyarakat dan pemerintah	40	%	46,00	4.398.195.166	52,00	4.520.278.783	58,00	4.784.405.106	64,00	5.071.114.892	70,00	5.375.364.060	70	24.149.358.006	Biro Humas
1	19	16	Program Peningkatan kapasitas Pelayanan informasi. Komunikasi. Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keamanan dan ketertiban	40	%	50,00	2.397.660.643	60,00	2.464.214.099	70,00	2.608.201.635	80,00	2.764.500.468	90,00	2.930.360.833	90	13.164.937.678	Biro humas
1	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh	75	%	78,00	2.390.551.294	81,00	2.456.907.411	84,00	2.600.468.007	87,00	2.756.303.396	90,00	2.921.671.965	90	13.125.902.073	DKA. Biro Administrasi pembangunan
1	20	18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kab/kota	75	%	78,00	1.198.694.483	81,00	1.231.967.440	84,00	1.303.953.051	87,00	1.382.093.612	90,00	1.465.014.398	90	6.581.722.983	DKA. Biro Administrasi Pembangunan. KPP
				- Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan kab/kota	65	%	70,00	2.841.179.999	75,00	2.920.044.515	80,00	3.090.666.872	85,00	3.275.877.868	90,00	3.472.419.089	90	15.600.188.343	DKA. Biro Administrasi Pembangunan. KPP
1	20	19	Program peningkatan sarana dan prasarana	Meningkatnya pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan	65	%	70,00	390.246.671	75,00	401.079.006	80,00	424.514.623	85,00	449.954.045	90,00	476.949.715	90	2.142.744.060	Biro Adminsitrasi Pembangunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	20	20	Program koordinasi dan pembinaan. perencanaan. pemanfaatan serta pengendalian ruang	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi	60	%	65,00	3.229.439.898	70,00	3.319.081.601	75,00	3.513.020.263	80,00	3.723.541.167	85,00	3.946.940.621	85	17.732.023.550	Biro Adminsitrasi Pembangunan
1	20	21	Peningkatan Sarana Perekonomian. Potensi dan Kerja sama Investasi. Pertambangan dalam Pengembangan Industri Perdagangan Berbasis Lingkungan Hidup	Meningkatnya PAD	50	%	55,00	15.955.479.252	60,00	16.031.560.378	65,00	16.945.327.030	70,00	17.831.952.487	75,00	18.620.944.348	75	85.385.263.495	Biro Ekonomi
1	20	22	Program peningkatan kualitas kelembagaan *)Program Baru	Meningkatnya kualitas kelembagaan KAPET	45	%	51,00	3.584.013.802	57,00	3.683.497.648	63,00	3.898.729.658	69,00	4.132.364.545	75,00	4.380.291.973	75	19.678.897.625	Biro Ekonomi. Biro Tata Pemerintahan
1	20	23	Program pengembangan industri strategis *)=Program Baru	- Tersedianya regulasi pengembangan industri strategis	20	%	32,00	5.232.038.597	44,00	5.377.267.759	56,00	5.691.469.167	68,00	6.032.535.584	80,00	6.394.466.633	80	28.727.777.740	Biro Ekonomi. Disperinda g. BP2T. Bainprom
				- Meningkatnya fasilitasi pengembangan industri strategis	1	Kawasan Industri	1	7.392.704.141	1	7.458.967.198	2	8.041.864.926	2	8.523.780.927	3	8.869.953.850	3	40.287.271.043	Biro Ekonomi. Disperinda g. BP2T. Bainprom
1	20	24	Program revitalisasi BUMA; *)=Program baru	Meningkatnya kemampuan BUMA	40	%	47,00	4.128.233.495	54,00	4.242.823.607	61,00	4.490.737.829	68,00	4.759.849.339	75,00	5.045.423.661	75	22.667.067.932	Biro Ekonomi
1	20	25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	50	%	55,00	7.189.043.437	60,00	7.388.594.479	65,00	7.820.320.570	70,00	8.288.960.325	75,00	8.786.268.971	75	39.473.187.782	BKPP. Biro Organisasi .
1	20	26	Program Pembinaan. Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur;	- Meningkatnya kinerja aparatur	60	%	65,00	5.051.787.115	70,00	5.192.012.918	75,00	5.495.389.622	80,00	5.824.705.795	85,00	6.174.167.783	85	27.738.063.232	BKPP/Biro Organisasi
				- Meningkatnya kesejahteraan aparatur	75	%	78,00	4.961.661.374	81,00	5.099.385.497	84,00	5.397.349.849	87,00	5.720.790.901	90,00	6.064.018.358	90	27.243.205.978	BKPP/Biro Organisasi
1	20	27	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peka Konflik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan peka konflik	40	%	45,00	659.729.275	50,00	678.041.818	55,00	717.660.766	60,00	760.667.234	65,00	806.304.609	65	3.622.403.701	Badan Kesbang Linmas
1	20	28	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	60	%	66,00	36.242.378.690	72,00	37.155.754.993	78,00	39.424.858.408	84,00	41.787.428.565	90,00	44.184.378.787	90	198.794.799.443	Sekretariat DPRA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	20	29	Program Peningkatan. Pembinaan. Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA;	Meningkatnya pelayanan lembaga DPRA kepada masyarakat	60	%	66,00	1.357.867.683	72,00	1.395.558.917	78,00	1.477.103.410	84,00	1.565.620.163	90,00	1.659.551.900	90	7.455.702.073	Sekretariat DPRA
1	20	30	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Menurunnya Penyelewengan Keuangan Daerah dan Mencegah terjadinya KKN	30	%	25,00	5.896.428.275	20,00	6.041.573.858	15,00	6.414.199.571	10,00	6.798.576.259	5,00	7.184.437.185	5	32.335.215.147	Inspektorat
1	20	31	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pengawasan	60	%	66,00	2.644.866.328	72,00	2.718.281.636	78,00	2.877.114.700	84,00	3.049.528.391	90,00	3.232.489.434	90	14.522.280.489	Inspektorat
1	20	32	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya	35	%	37,00	6.405.752.293	39,00	6.444.619.873	41,00	6.968.247.844	43,00	7.385.826.373	45,00	7.663.726.001	45	34.868.172.384	KPP Jakarta
1	20	33	Program Pagelaran Seni Budaya Daerah *)Program Baru	Meningkatnya seni dan budaya daerah	60	%	64,00	2.644.866.328	68,00	2.718.281.636	72,00	2.877.114.700	76,00	3.049.528.391	80,00	3.232.489.434	80	14.522.280.489	KPP Jakarta. Perwakilan Medan.
1	20	34	Program Pengembangan data dan Informasi	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	30	%	38,00	18.326.578.546	46,00	18.592.134.552	54,00	19.935.853.837	62,00	21.130.527.838	70,00	22.109.143.406	70	100.094.238.178	Dishubkomintel/DRKA/ Dinas Sosial/ Kesbanglinmas/Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta
1	20	35	Program fasilitasi Pindah/Purna Tugas	Meningkatnya distribusi aparatur berdasarkan kompetensi	60	%	64,00	4.935.265.376	68,00	5.072.256.807	72,00	5.368.635.991	76,00	5.690.356.339	80,00	6.031.757.829	80	27.098.272.343	BKPP
1	20	36	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya jumlah aparatur yang berkapasitas	50	%	55,00	5.668.745.617	60,00	5.807.571.261	65,00	6.166.523.870	70,00	6.536.058.368	75,00	6.906.169.138	75	31.085.068.253	BKPP
1	20	37	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	60	%	66,00	9.389.507.916	72,00	9.650.138.710	78,00	10.214.010.049	84,00	10.826.093.802	90,00	11.475.621.588	90	51.555.372.066	BKPP
1	20	38	Program Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik	70	%	72,00	19.715.202.377	74,00	20.262.450.315	76,00	21.446.414.123	78,00	22.731.609.810	80,00	24.095.426.941	80,00	108.251.103.565	DPKKA
1	20	39	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan	55	%	60,00	9.250.175.434	65,00	9.460.624.973	70,00	10.062.442.641	75,00	10.665.443.581	80,00	11.250.258.202	80	50.688.944.831	Dinas Syariat Islam

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	20	40	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Meningkatnya pemahaman wawasan islam	23	Kab/Kota	23	9.626.148.376	23	9.847.034.045	23	10.471.430.144	23	11.098.940.029	23	11.709.762.922	23	52.753.315.516	Dinas Syariat Islam
1	20	41	Program Peningkatan Pemahaman. Penghayatan. dan Pengamalan Al-Qur'an;	Meningkatnya pemahaman. penghayatan. dan pengamalan Al-Qur'an	60	%	66,00	3.404.814.484	72,00	3.499.324.176	78,00	3.703.794.668	84,00	3.925.747.900	90,00	4.161.279.052	90	18.694.960.282	Dinas Syariat Islam
1	20	42	Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Meningkatnya toleransi beragama	65	%	70,00	651.202.519	75,00	664.647.008	80,00	708.385.267	85,00	750.835.892	90,00	790.375.950	90	3.565.446.637	Dinas Syariat Islam
1	20	43	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam;	Meningkatnya pemahaman wawasan dinul islam	50	%	57,00	14.556.064.814	64,00	14.589.597.469	71,00	15.834.247.503	78,00	16.783.129.050	85,00	17.349.460.428	85	79.112.499.264	Dinas Syariat Islam
1	20	44	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	Meningkatnya pelayanan peradilan mahkamah syariah	70	%	73,00	2.438.944.351	76,00	2.455.698.664	79,00	2.653.110.507	82,00	2.812.100.544	85,00	2.920.234.563	85	13.280.088.629	Dinas Syariat Islam
1	20	45	Program Penyediaan da'i perbatasan. perdesaan dan perkotaan; *) Program Baru	Meningkatnya kapasitas dan kuantitas da'i perbatasan. perdesaan dan perkotaan	150	Org	152	2.524.563.805	154	2.594.639.795	156	2.746.248.291	158	2.910.819.694	160	3.085.458.701	160	13.861.730.286	Dinas Syariat Islam
1	20	46	Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi masyarakat; *) Program Baru	Meningkatnya pemahaman wawasan dinul islam	60	%	64,00	2.930.129.639	68,00	3.011.463.189	72,00	3.187.427.269	76,00	3.378.436.719	80,00	3.581.131.113	80	16.088.587.928	Dinas Syariat Islam
1	20	47	Program Pembinaan Syariat Islam *)Program Baru	Meningkatnya Pemahaman tentang syariat islam	65	%	69,00	9.483.432.762	73,00	9.746.670.689	77,00	10.316.182.529	81,00	10.934.389.060	85,00	11.590.414.183	85	52.071.089.223	Dinas Syariat Islam/Baitul Mal
1	20	46	Program pembinaan lembaga sosial keagamaan; *) Program Baru	Meningkatnya kapasitas lembaga sosial keagamaan	50	%	55,00	3.140.800.361	60,00	3.222.036.434	65,00	3.416.597.199	70,00	3.621.339.864	75,00	3.831.537.761	75	17.232.311.619	Dinas Syariat Islam/Baitul Mal
1	20	49	Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi aparatur; *)=Program Baru	Meningkatnya pemahaman keagamaan bagi aparatur	60	%	64,00	7.725.068.811	68,00	7.939.498.665	72,00	8.403.414.871	76,00	8.906.997.078	80,00	9.441.385.768	80	42.416.365.193	Dinas Syariat Islam
1	20	50	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan Aceh	70	%	75,00	6.807.295.262	80,00	6.996.249.868	85,00	7.405.050.704	90,00	7.848.805.039	95,00	8.319.705.906	95	37.377.106.778	Majelis Permusyawaratan Ulama
1	20	51	Program Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi antara Umara dan Ulama; *) Program Baru	Meningkatnya hasil pembangunan yang susuia dengan Dinul Islam	50	%	55,00	9.925.787.663	60,00	10.201.304.329	65,00	10.797.381.059	70,00	11.444.423.846	75,00	12.131.049.273	75	54.499.946.168	Majelis Permusyawaratan Ulama

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	20	52	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan	65	%	70,00	3.626.055.453	75,00	3.726.706.277	80,00	3.944.463.029	85,00	4.180.838.529	90,00	4.431.674.227	90	19.909.737.514	BP2T
1	20	53	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana	60	%	67,00	13.341.149.028	74,00	13.593.334.987	81,00	14.512.648.740	88,00	15.382.332.290	95,00	16.164.738.469	95	72.994.203.515	Badan Penanggulangan Bencana
1	20	54	Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tersedianya regulasi kebencanaan	55	%	61,00	5.051.976.343	67,00	5.192.207.399	73,00	5.495.595.466	79,00	5.824.923.976	85,00	6.174.399.053	85	27.739.102.237	Badan Penanggulangan Bencana
1	20	55	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	50	%	55,00	38.392.222.055	60,00	38.922.127.818	65,00	41.763.481.680	70,00	44.266.195.944	75,00	46.284.890.161	75	209.628.917.658	Badan Penanggulangan Bencana
1	20	56	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Meningkatnya penanganan darurat dan logistik bencana	60	%	64,00	10.231.153.394	68,00	10.052.009.195	72,00	11.129.561.262	76,00	11.796.510.247	80,00	11.953.512.502	80	55.162.746.600	Badan Penanggulangan Bencana
1	20	57	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi KORPRI	Meningkatnya kapasitas lembaga KORPRI	45	%	50,00	500.000.000	55,00	550.000.000	60,00	570.000.000	65,00	580.000.000	68,00	600.000.000	68,00	2.800.000.000	Sekretariat KORPRI
1	20	58	Program Pembinaan prestasi olahraga Seni dan Budaya bagi anggota KORPRI	Meningkatnya prestasi olahraga seni dan budaya bagi anggota KORPRI	30	%	35,00	850.000.000	40,00	900.000.000	45,00	950.000.000	50,00	1.000.000.000	55,00	1.050.000.000	55,00	4.750.000.000	Sekretariat KORPRI
1	20	59	Program Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota KORPRI	Meningkatnya kualitas mental dan rohani anggota KORPRI	80	%	83,00	3.500.000.000	85,00	3.700.000.000	87,00	3.850.000.000	89,00	3.950.000.000	90,00	4.000.000.000	90,00	19.000.000.000	Sekretariat KORPRI
1	**21**		**Ketahanan Pangan**					98.692.429.540		101.131.606.110		107.137.965.496		113.662.206.699		120.586.898.077		541.211.105.922	
1	21	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya ketersediaan energi	3308	Kkal/kap/hr	3341,20	9.012.574.087	3374,40	9.262.742.079	3407,60	9.803.977.281	3440,80	10.391.489.452	3474,00	11.014.942.495	3474	49.485.725.394	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				2. Meningkatnya Ketersediaan Protein	96,2	g/kap/hr	97,18	8.111.316.679	98,16	8.336.467.871	99,14	8.823.579.553	100,12	9.352.340.506	101,10	9.913.448.246	101,1	44.537.152.855	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				3.Berkurangnya daerah rentan pangan														-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
				a. Prioritas 1	108	kec	98	6.308.801.861	88	6.483.919.455	78	6.862.784.097	68	7.274.042.616	58	7.710.459.747	58	34.640.007.776	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				b. Prioritas 2	3	kec	2	8.111.316.679	2	8.336.467.871	1	8.823.579.553	1	9.352.340.506	0	9.913.448.246	0	44.537.152.855	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				c. Prioritas 3	22	kec	18	9.012.574.087	13	9.262.742.079	9	9.803.977.281	4	10.391.489.452	0	11.014.942.495	0	49.485.725.394	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1	21	2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan ketahanan pangan	70	%	75	1.109.674.698	80	1.101.578.410	85	1.178.522.369	88	1.262.605.205	90	1.352.004.291	90	6.004.384.972	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1	21	3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Meningkatnya kelompok tani yang menerapkan prinsip agribisnis	NA	Klp	20	4.695.219.742	40	4.825.548.068	60	5.107.511.709	80	5.413.583.949	100	5.738.380.063	100	25.780.243.531	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				2. Meningkatkan jumlah kelompok tani yang bankable	NA	klp	20	1.466.183.949	40	1.506.881.789	60	1.594.931.036	80	1.690.508.715	100	1.791.933.329	100	8.050.438.818	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1	21	4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya kemampuan teknologi petani	200	Dempl ot	57	7.457.013.970	57	7.402.606.912	57	7.919.670.318	57	8.484.706.978	57	9.085.468.832	285,00	40.349.467.010	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1	21	5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1. Penyuluh Ahli	5000	Org	520	6.420.149.735	540	6.598.358.086	5600	6.983.909.539	5800,00	7.402.426.610	6000	7.846.546.332	6.000	35.251.390.301	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				2. Penyuluh terampil	20	%	32	3.605.029.635	44	3.705.096.832	56	3.921.590.912	68	4.156.595.781	80	4.405.976.998	80	19.794.290.158	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1	21	6	Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Mengingkatnya jumlah kelompok tani yang dibina BPP															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
				1. Poktan	10.508	Kelompok	10538	18.025.148.175	10568	18.525.484.158	10598	19.607.954.562	10628	20.782.978.903	10658	22.029.884.991	10.658	98.971.450.788	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				2. Gapoktan	1.304	kelompok	1443	15.357.426.245	1582	15.783.712.502	1721	16.705.977.287	1860	17.707.098.026	2000	18.769.462.012	2.000	84.323.676.071	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1	**22**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					425,718,739,447		435,911,555,981		462,060,727,135		490,548,432,508		520,824,582,445		2.335.064.037.516	
1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong;	Meningkatnya kapasitas lembaga gampong	6.451	Gampong	6.454	21.040.374.228	6.454	21.544.135.643	6.454	22.836.510.856	6.454	24.244.463.870	6.454	25.740.807.502	6.454	115.406.292.099	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong;	Meningkatnya kapasitas lembaga gampong	6.451	Gampong	6.454	20.778.710.897	6.454	21.276.207.409	6.454	22.552.510.323	6.454	23.942.953.682	6.454	25.420.688.412	6.454	113.971.070.724	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Gampong	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	6.451	Gampong	6.454	341.168.699.681	6.454	349.337.167.829	6.454	370.292.972.434	6.454	393.122.865.737	6.454	417.386.008.860	6.454	1.871.307.714.540	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong;	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	50	%	56,00	25.870.682.364	62,00	26.490.093.948	68,00	28.079.164.004	74,00	29.810.345.436	80,00	31.650.209.613	80	141.900.495.364	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	5	Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya;	Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan imum mukim	40	%	5.00	16,860,272,276	5.00	17,263,951,152	5.00	18,299,569,518	5.00	19,427,803,783	5.00	20,626,868,058	65	92.478.464.788	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	**24**		**Kearsipan**					7,526,232,923		7,471,320,838		7,993,183,831		8,563,465,384		9,169,803,748		40.724.006.724	
1	24	1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan secara digital	60	%	64	1.839.704.197	68	1.826.281.546	72	1.953.845.169	76	2.093.244.172	80	2.241.456.863	80	9.954.531.948	Arsip dan Perpustakaan
1	24	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	60	%	64	4.123.553.914	68	4.093.468.087	72	4.379.392.029	76	4.691.844.056	80	5.024.051.278	80	22.312.309.364	Arsip dan Perpustakaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	24	3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kearsipan	60	%	64	427.957.753	68	424.835.334	72	454.509.583	76	486.937.016	80	521.414.716	80	2.315.654.402	Arsip dan Perpustakaan
1	24	4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	60	%	64	692.144.162	68	687.094.215	72	735.086.940	76	787.532.439	80	843.293.876	80	3.745.151.632	Arsip dan Perpustakaan
1	24	5	Program Peningkatan SDM Kearsipan	Meningkatnya kapasitas SDM kearsipan	60	%	64	442.872.897	68	439.641.656	72	470.350.110	76	503.907.701	80	539.587.015	80	2.396.359.379	Arsip dan Perpustakaan
2			**URUSAN PILIHAN**					893.026.681.203		916.633.611.992		970.719.718.546		1.029.521.903.818		1.091.962.738.075		4.901.864.653.634	
2	**1**		**Pertanian**					494.036.601.419		506.232.687.097		536.447.063.612		569.341.260.321		604.290.682.208		2.710.348.294.658	
2	2	1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan. dokumen statistik dan dokumen pelaporan SKPA	70	%	75,00	5.700.154.430	75,00	5.849.413.746	80,00	6.195.839.814	85,00	6.572.915.956	90,00	6.973.536.662	90	31.291.860.609	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan. Dinas Perkebunan.
2	2	2	Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah															
				1.Berkurangnya daerah rentan pangan															
				a. Prioritas 1	108	kec	98	15.892.594.711	88	16.284.650.905	78	17.256.684.089	68	18.314.932.805	58	19.439.301.257	58	87.188.163.768	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				b. Prioritas 2	3	kec	2	12.537.329.714	2	12.846.614.501	1	13.613.430.791	1	14.448.260.680	0	15.335.251.021	0	68.780.886.707	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				c. Prioritas 3	22	kec	18	10.065.794.991	13	10.314.109.213	9	10.929.759.893	4	11.600.016.376	0	12.312.150.709	0	55.221.831.182	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
				2. Berkurangnya konsumsi beras	100,4	Kg/kap /th	97,98	14.334.901.389	95,56	14.688.530.672	93,15	15.565.291.207	90,73	16.519.816.964	88,31	17.533.981.811	88	78.642.522.043	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				3. Peningkatan Indeks Tanam	1,24		1,29	20.760.891.666	1,34	21.273.044.422	1,40	22.542.835.541	1,45	23.925.252.155	1,50	25.394.042.623	1.5	113.896.066.407	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				4. Peningkatan kepemilikan lahan petani	0,5	Ha/KK	0,53	19.772.277.777	0,56	20.260.042.307	0,59	21.469.367.182	0,62	22.785.954.433	0,65	24.184.802.498	0.65	108.472.444.197	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2	1	3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian / perkebunan)	1. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan :															
				a. Padi	52,75	ku/ha	54,01	17.300.743.055	55,26	17.727.537.018	56,52	18.785.696.284	57,77	19.937.710.129	59,03	21.161.702.186	59	94.913.388.673	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				b. Jagung	39,08	ku/ha	40,29	14.829.208.333	41,50	15.195.031.730	42,70	16.102.025.387	43,91	17.089.465.825	45,12	18.138.601.873	45,12	81.354.333.148	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				c. Kedelai	14,6	ku/ha	15,45	5.140.792.222	16,30	5.267.611.000	17,14	5.582.035.467	17,99	5.924.348.153	18,84	6.288.048.649	18,84	28.202.835.491	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2	1	4	Program Peningkatan Produksi (Pertanian / perkebunan)	Peningkatan produksi tahunan untuk komoditi Pangan Utama:															Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				1. Padi	1.954.551	Ton	2.068.483	24.863.639.305	2.182.415	25.477.003.201	2.296.347	26.997.729.231	2.410.279	28.653.337.700	2.524.211	30.412.389.141	2.524.211	136.404.098.578	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				2. Jagung	168.997	Ton	184.999	10.044.317.111	201.001	10.292.101.492	217.003	10.906.438.528	233.005	11.575.264.852	249.007	12.285.879.669	249.007	55.104.001.652	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
				3. Kedelai	99.567	Ton	112451	9.886.138.889	125335	10.130.021.153	138219	10.734.683.591	151103	11.392.977.217	163988	12.092.401.249	163.988	54.236.222.099	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2	1	5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Terkendalinya penyebaran penyakit ternak/hewan:															Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				- Brucellosis	539	Kasus	450,80	12.021.544.889	362,60	12.318.105.722	274,40	13.053.375.247	186,20	13.853.860.295	98,00	14.704.359.919	< 100	65.951.246.072	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
				- SE	256	Kasus	224,40	10.380.445.833	192,80	10.636.522.211	161,20	11.271.417.771	129,60	11.962.626.077	98,00	12.697.021.311	<100	56.948.033.204	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
				- ND	18120	Kasus	16356,00	9.045.817.083	14592,00	9.268.969.355	12828,00	9.822.235.486	11064,00	10.424.574.153	9300,00	11.064.547.143	<10.000	49.626.143.220	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
2	1	6	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan produksi daging				-											Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
				1. Ternak besar dan kecil	15,89	Ribu ton	16,65	31.141.337.499	17,40	31.909.566.633	18,16	33.814.253.312	18,91	35.887.878.232	19,67	38.091.063.934	19,67	170.844.099.611	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
				2. Unggas	13,04	Ribu ton	13,79	27.681.188.888	14,53	28.364.059.229	15,28	30.057.114.055	16,02	31.900.336.206	16,77	33.858.723.497	16,77	151.861.421.876	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
				- Peningkatan produksi telur	27,82	Ribu kg	29,41	27.186.881.944	31,01	27.857.558.172	32,60	29.520.379.875	34,20	31.330.687.346	35,79	33.254.103.435	35,79	149.149.610.771	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
				- Meningkatnya kemitraan dibidang peternakan	5	%	9,00	8.615.770.042	13,00	8.828.313.435	17,00	9.355.276.750	21,00	9.928.979.644	25,00	10.538.527.688	25	47.266.867.559	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
2	2	7	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1. Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sektor peternakan	98,72	NTP	100,18	18.024.136.797	101,63	18.468.776.241	103,09	19.571.180.184	104,54	20.771.363.035	106,00	22.046.533.714	106	98.881.989.972	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
				2. Meningkatnya konsumsi pangan asal hewan dan hasil ikutannya	6,1	Kg/Kap/tahun	6,20	13.252.578.405	6,30	13.579.507.742	6,40	14.390.070.536	6,50	15.272.527.073	6,50	16.210.119.791	6.5	72.704.803.546	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
2	2	8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Pekebunan	1. Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sektor Pertanian Tanaman Pangan	109,05	NTP	109,64	12.784.483.186	110,23	13.099.865.030	110,82	13.881.797.881	111,41	14.733.085.111	112,00	15.637.561.052	112	70.136.792.259	Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Perkebunan
				2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sektor Perkebunan pada level tinggi	112	NTP	112,40	9.865.287.455	112,80	10.108.655.334	113,20	10.712.042.442	113,60	11.368.947.622	114,00	12.066.896.459	114	54.121.829.313	Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Perkebunan
2	2	9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertani an/ Perkebunan	Peningkatan Produktivitas tiga komoditi unggulan :				-											Dinas Perkebunan
				1. Sawit	1,66	Ton/ Ha	3,56	24.790.119.711	5,46	25.401.669.943	7,35	26.917.899.321	9,25	28.568.612.300	11,15	30.322.462.382	11,15	136.000.763.656	Dinas Perkebunan
				2. Karet	0,92	Ton/ Ha	1,97	16.986.092.214	3,02	17.405.124.020	4,08	18.444.038.407	5,13	19.575.100.428	6,18	20.776.831.583	6,18	93.187.186.651	Dinas Perkebunan
				3. Kakao	0,5	Ton/ Ha	0,70	30.826.686.658	0,90	31.587.153.635	1,10	33.472.595.434	1,30	35.525.268.531	1,50	37.706.193.332	1,50	169.117.897.590	Dinas Perkebunan
2	2	10	Program Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan)	Peningkatan Produksi komoditi unggulan :				-											
				1. Sawit	183.344	Ton	392.929	16.312.129.166	602.513	16.714.534.903	812.098	17.712.227.925	1.021.682	18.798.412.407	1.231.267	19.952.462.061	1.231.267	89.489.766.463	Dinas Perkebunan
				2. Karet	64.621	Ton	138.491	11.863.366.666	212.360	12.156.025.384	286.230	12.881.620.309	360.099	13.671.572.660	433.969	14.510.881.499	433.969	65.083.466.518	Dinas Perkebunan
				3. Kakao	37.582	Ton	80.543	32.129.951.388	123.504	32.922.568.748	166.464	34.887.721.671	209.425	37.027.175.954	252.386	39.300.304.059	252.386	176.267.721.821	Dinas Perkebunan
2	**2**		**Kehutanan**					75,104,784,061		77,189,517,324		81,699,810,674		86,595,745,430		91,791,187,462		412.381.044.950	
2	2	1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan tanaman rakyat dan non kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat	3.070	Ha	3153,20	6.362.563.587	3236,40	6.539.173.481	3319,60	6.921.266.694	3402,80	7.336.029.836	3486,00	7.776.165.983	3.486	34.935.199.580	Dinas Kehutanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
2	2	2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tersedianya tenaga pengaman hutan yang berkompeten.	1.870	Org Pamhut	1870	49.193.714.918	1870	50.559.217.464	1870	53.513.464.494	1870	56.720.307.063	1870	60.123.327.222	1.870	270.110.031.161	Dinas Kehutanan
2	2	3	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya kualitas lingkungan	1.415	Ha	1493,20	14.108.819.054	1571,40	14.500.446.894	1649,60	15.347.728.643	1727,80	16.267.455.108	1806,00	17.243.445.552	1.806	77.467.895.252	Dinas Kehutanan
2	2	4	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Meningkatnya data dan informasi tapal batas hutan	462	Km	548,80	5.439.686.501	635,60	5.590.679.484	722,40	5.917.350.843	809,20	6.271.953.423	896,00	6.648.248.705	896	29.867.918.957	Dinas Kehutanan
2	**3**		**Energi dan Sumberdaya Mineral**					65,090,812,853		66,897,581,681		70,806,502,584		75,049,646,039		79,552,362,467		357.396.905.623	
2	3	1	Program pembinaan dan pengawasan Bidang pertambangan	Meningkatnya pengelolaan pertambangan secara lestari	60	%	65,00	5.820.620.765	70,00	5.982.187.593	75,00	6.331.735.327	80,00	6.711.170.271	85,00	7.113.817.028	85	31.959.530.984	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Meningkatnya ketersediaan energi terbarukan	10	%	14,00	38.578.824.079	18,00	39.649.682.065	22,00	41.966.469.416	26,00	44.481.347.903	30,00	47.150.073.293	30	211.826.396.756	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	3	Program pengembangan minyak dan gas bumi	Meningkatnya koordinasi pengelolaan minyak dan gas bumi	75	%	78,00	12.692.708.506	81,00	13.045.028.428	84,00	13.807.268.004	87,00	14.634.680.978	90,00	15.512.710.681	90	69.692.396.597	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	4	Program pemanfaatan geologi dan sumberdaya mineral	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral secara optimal dan lestari	50	%	57,00	7.998.659.502	64,00	8.220.683.595	71,00	8.701.029.837	78,00	9.222.446.888	85,00	9.775.761.465	85	43.918.581.287	Dinas Pertambangan dan Energi
2	**5**		**Kelautan dan Perikanan**					200.549.767.180		206.107.083.433		218.153.277.737		231.229.588.322		245.105.880.139		1.101.145.596.812	
2	5	1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terbinanya kesadaran masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir	14	Klp	6,00	16.313.042.013	7,00	16.765.853.931	7,00	17.745.506.636	7,00	18.808.922.108	7,00	19.937.391.688	48	89.570.716.377	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	70	%	75,00	270.343.018	78,00	268.370.570	80,00	287.115.940	83,00	307.600.509	85,00	329.380.242	85,00	1.462.810.278	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
2	5	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan POKMASWAS	426	Klp	43,00	12.559.383.199	43,00	12.908.002.322	43,00	13.662.235.267	43,00	14.480.957.024	43,00	15.349.763.827	641	68.960.341.639	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi budidaya perikanan	116.875	Ton	244.575	43.005.665.119	372.274	44.199.401.865	499.974	46.782.035.819	627.673	49.585.491.461	755.373	52.560.447.623	755.373	236.133.041.887	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	145.970	Ton	158.776	92.105.843.904	171.582	94.662.486.852	184.388	100.193.750.679	197.194	106.197.951.450	210.000	112.569.457.324	210.000	505.729.490.209	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	6	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Tukar Petani sub sector Perikanan	101	NTP	102,00	22.275.930.235	103,00	22.894.257.993	104,00	24.232.002.070	105,00	25.684.126.624	106,00	27.225.084.443	106	122.311.401.364	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	7	Program pengembangan kawasan minapolitan	Terwujudnya kawasan minapolitan yang terpadu	Na	Kawasan	1,00	14.019.559.691	1,00	14.408.709.900	1,00	15.250.631.326	2,00	16.164.539.147	2,00	17.134.354.993	2	76.977.795.057	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	**7**		**Industri**					58.244.715.691		60.206.742.457		63.613.063.938		67.305.663.706		71.222.625.799		320.592.811.591	
2	7	1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan persentase realisasi capaian kinerja terhadap rencana program yang ditetapkan	70	%	75	1.283.599.857	78	1.274.234.595	80	1.363.238.386	82	1.460.499.968	85	1.563.911.043	85,00	6.945.483.849	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	7	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor non migas	93.7 Juta	US$	95 Juta	3.898.601.164	97 Juta	4.006.817.220	99 Juta	4.240.941.252	100 Juta	4.495.083.477	150 Juta	4.764.772.773	150 Juta	21.406.215.886	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	7	3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan	263 4 4 255	Pasar Pasar Induk Pasar Semi Modern Pasar Tradisional	23 4 11 12	36.865.797.300	23 4 11 12	37.889.105.667	23 4 11 12	40.103.020.033	23 4 11 12	42.506.229.637	23 4 11 12	45.056.454.835	378,00 4 57 317	202.420.607.472	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2. Kontribusi Sub sektor perdagangan terhadap PDRB	20	%	21,00	3.404.750.211	22,00	3.499.258.119	23,00	3.703.724.751	24,00	3.925.673.793	25,00	4.161.200.498	25	18.694.607.371	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												SKPA Penanggung Jawab
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA		
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
2	7	4	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Berkembangnya industri potensial daerah	10.343	IKM	10653	13.711.604.908	10964	14.092.207.012	11274	14.915.634.724	11585	15.809.467.572	11895	16.757.980.364	11.895	75.286.894.580	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB	4,96	%	5,66	6.809.500.422	5,67	6.998.516.237	5,68	7.407.449.501	5,69	7.851.347.586	5,70	8.322.400.997	5,70	37.389.214.742	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	7	5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya rasio pengawasan barang dan jasa yang memenuhi standar	5.56 : 1.73	Rasio	5,30 : 1	3.404.750.211	5,04 : 1	3.499.258.119	4,78 : 1	3.703.724.751	4,52 : 1	3.925.673.793	4,26 : 1	4.161.200.498	4,26 : 1	18.694.607.371	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			JUMLAH					7,488,560,987,140		7,668,233,622,389		8,127,113,346,060		8,628,018,677,651		9,160,338,079,563			

8.3. Distribusi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Aceh

Tabel 8.3
Distribusi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Aceh
Tahun 2013-2017

Prioritas Pembangunan Aceh		2013		2014		2015		2016		2017		Total	RATA-RATA
		Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%		
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;	2.503.492.802.026	25,00	2.521.524.232.573	24,50	2.528.336.807.659	23,21	2.655.602.859.854	23,00	2.753.735.623.848	22,50	12.999.350.219.614	23,64
2	Keberlanjutan Perdamaian;	41.057.281.953	0,41	97.773.388.610	0,95	108.933.080.899	1,00	115.460.993.907	1,00	122.388.249.949	1,00	479.461.694.929	0,87
3	Dinul Islam, Adat dan Budaya;	316.441.490.176	3,16	283.028.230.187	2,75	272.332.702.247	2,50	265.560.285.985	2,30	281.492.974.882	2,30	1.430.687.305.280	2,60
4	Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk;	775.081.371.507	7,74	771.895.173.237	7,50	1.143.797.349.437	10,50	1.420.170.225.052	12,30	1.723.226.559.279	14,08	5.731.546.683.413	10,42
5	Penanggulangan Kemiskinan;	1.327.852.582.195	13,26	1.337.951.633.610	13,00	1.181.923.927.751	10,85	1.191.557.457.117	10,32	1.140.658.489.523	9,32	6.240.699.813.578	11,35
6	Pendidikan;	1.702.375.105.378	17,00	1.749.629.059.336	17,00	1.851.862.375.278	17,00	1.962.836.896.414	17,00	2.080.600.249.130	17,00	9.347.303.685.536	17,00
7	Kesehatan;	649.906.731.406	6,49	668.975.816.805	6,50	762.531.566.291	7,00	808.226.957.347	7,00	856.717.749.642	7,00	3.737.821.791.428	6,80
8	Infrastruktur yang Terintegrasi;	2.387.330.736.012	23,84	2.524.611.813.266	24,53	2.684.111.113.344	24,64	2.745.662.435.101	23,78	2.876.123.873.797	23,50	13.228.084.239.213	24,06
9	Sumber Daya Alam Berkelanjutan	180.251.481.746	1,80	202.751.132.170	1,97	217.866.161.797	2,00	230.921.987.813	2,00	244.776.499.898	2,00	1.074.390.082.443	1,95
10	Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan	130.181.625.705	1,30	133.795.163.361	1,30	141.613.005.168	1,30	150.099.292.079	1,30	159.104.724.933	1,30	714.793.811.247	1,30
Total		10.013.971.208.105	100,00	10.291.935.643.154	100,00	10.893.308.089.872	100,00	11.546.099.390.670	100,00	12.238.824.994.881	100,00	54.984.139.326.682	100,00

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ACEH

Penetapan indikator kinerja Aceh dimaksudkan sebagai alat ukur spesifik kuantitatif yang menggunakan target tingkat capaian kinerja suatu program. Indikator kinerja Aceh meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Uraian target indikator kinerja Aceh secara rinci disajikan pada **Tabel 9.1**.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Aceh

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
A	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	1.1. Pertumbuhan PDRB	%	5,20	5,5-6,0	5,8-6,3	6,2-6,7	6,5-6,9	7,0-7,5	7,0-7,5
	1.2. Laju inflasi Aceh	%	0,22	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
	1.3. PDRB per kapita	Juta	7,59	8,05	8,56	9,13	9,76	10,49	10,49
	1.4. Indeks Gini	%	0,29	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
	1.5. Indeks ketimpangan Williamson	%	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,7
	1.6. Persentase penduduk di bawahgaris kemiskinan	%	19,48	17,5	15,5	13,5	11,5	9,5	9,5
	1.7. Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	104	120	145	160	180	190	190
B	**Fokus Kesejahteraan Sosial**								
1.	**Pendidikan**								
	1.1. Angka melek huruf Dewasa	%	96,95	97,1	97,3	97,5	97,8	98,00	98,00
	1.2. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,9	9,7	10	10,5	11	11,5	11,5
	1.3. Angka partisipasi kasar								
	-SD/MI/Paket A	%	108,5	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105
	-SMP/MTS/Paket B	%	100,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	-SM/MA/Paket C	%	84,22	87,00	88,00	90,00	91,00	93,00	93

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.4. Angka pendidikan yang ditamatkan								
	- Belum/tidaktamat SD/sederajat	%	20,31	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	15,00
	- Tamat SD/sederajat	%	27,55	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	20,00
	- Tamat SMP/Sederajat	%	21,32	20,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	- Tamat SMA/Sederajat	%	23,8	26,00	28,00	30,00	32,00	33,00	33,00
	- Diploma I/II/III	%	3,08	5,43	7,01	7,59	7,16	7,74	7,74
	- Diploma IV/SI	%	3,74	5,36	5,77	6,18	6,6	7,01	7,01
	- S2/S3	%	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25
	- SLTP+	%	52,14	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00
	1.5. Angka partisipasi murni								
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,42	97,50	97,80	98,25	98,60	99,08	99,08
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,58	79,00	79,50	80,00	80,50	90,20	90,20
	- Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	%	62,42	64,50	67,50	70,50	74,50	77,50	77,5
2.	**Kesehatan**								
	2.1. Umur harapan hidup	Tahun	68,90	69,00	69,20	70,40	71.60	72,35	72,35
	2.2 Angka kematian bayi	/1000 LH	25	20	18	15	12	12	12
	2.3. Angka kematian anak balita	/1000 LH	45	40	35	30	25	20	20
	2.4. Angka kematian ibumelahirkan	/100.000 LH	158	143	123	102	100	100	100
	2.5. Prevalensi gizi kurang dan buruk	%	23,7	20	18	15	14	14	14
C	**Fokus Seni Budaya dan**								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Olahraga								
1.	**Kebudayaan**								
	1.1. Jumlah grup kesenian	sanggar	50	50	50	50	50	50	50
	1.2. Jumlah gedung	buah	4	4	4	4	4	4	4
2.	**Pemuda dan Olahraga**								
	2.1. Jumlah klub olahraga	Klub	755	755	755	755	755	755	755
	2.2. Jumlah gedung olahraga	Unit	109	109	109	109	109	109	109
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
A	**Fokus Pelayanan Urusan Wajib**								
1.	**Pendidikan**								
	1.1. Pendidikan dasar								
	A SD/MI								
	- Angka partisipasi sekolah	%	99,19	99,41	99,48	99,56	99,63	99,71	99,71
	- Rasio guru terhadap murid	rasio	1:11	1:12	1:13	1:14	1:15	1:16	1:16
	- Rasio guru terhadapmurid per kelas rata-rata	rasio	1:23	1:23	1:23	1:23	1:23	1:23	1:23
	B SMP/MTs								
	- Angka partisipasi sekolah	%	99,19	99,41	99,48	99,56	99,63	99,71	99,71
	- Rasio guru terhadap murid	rasio	1:11	1:12	1:13	1:14	1:15	1:16	1:16
	- Rasio guru terhadapmurid per kelas rata-rata	rasio	1:27	1:27	1:27	1:27	1:27	1:27	1:27
	1.2. Pendidikan menengah								
	- Angka partisipasi sekolah	%	94,99	95,60	95,87	96,14	96,41	96,69	96,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Rasio guru terhadap murid	rasio	1:9	1:10	1:11	1:12	1:13	1:14	1:14
	- Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	rasio	1:30	1:29	1:28	1:27	1:26	1:25	1:25
	- Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	95,84	96	96,5	97	97,5	98	98
	1.3. Angka Putus Sekolah								
	- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	8	7	6	5	4	3	3
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	17	16	14	13	12	10	10
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	14	13	12	11	10	9	9
	1.4. Angka Kelulusan								
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	80,9	83,00	86,00	91,00	96,00	100	100
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	82,88	85	88	92	96	99	99
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	83,03	87	91	94	97	97	93
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	105,52	106	107	108	109	110	110
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	164,66	165	166	167	168	169	169
	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	50,68	53	55	57	59	61	61
2.	**Kesehatan**								
	2.1. Rasio dokter umum per satuan penduduk	/100.000 pddk	19	20	30	40	40	40	40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2.2.	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	/100.000 pddk	8	10	12	15	18	20	20
	2.3.	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	/100.000 pddk	4	5	6	7	8	9	9
	2.4.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	33,51	50	70	90	95	100	100
	2.5.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	82,9	85	87	90	91	92	92
	2.6.	Cakupan kunjungan bayi	%	91	93	95	96	97	98	98
	2.7.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat	%	66	70	75	80	85	90	90
	2.8.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.9.	Cakupan pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.10.	Cakupan pemberian ASI eksklusif	%	33,2	50	60	70	75	80	80
	2.11.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	62	70	80	85	90	95	95
	2.12.	Cakupan penemuan kasus baru penyakit TB BTA +	%	54,9	60	65	70	75	80	80
	2.13.	Angka kesuksesan pengobatan TB	%	85	87	89	91	93	95	95
	2.14.	Angka kejadian (IncidentRate) DBD	/100.000 pddk	57,2	45	30	20	15	15	15
	2.15.	Cakupan prevalensi penyakit kusta	/10.000 pddk	1,2	1	<1	<1	<1	<1	<1
	2.16.	Cakupan kabupaten/kota yang	kab/kota	0	7	17	23	23	23	23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	memasuki tahap eliminasi malaria								
	2.17. Desa siaga aktif	%	45	50	55	60	70	80	80
	2.18. Akses sanitasi dasar	%	44	50	55	60	65	70	70
3.	**Pekerjaan Umum**								
	3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	59,11	60,63	71,69	77,17	82,65	88,12	88,12
	3.2. Rasio Jaringan Irigasi	%	52,63	56,56	60,25	64,25	69,74	75,34	75,34
	3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	0,372	0,374	0,376	0,378	0,380	0,383	0,38
	3.4. Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	52,50	55,13	60,64	63,70	67,04	70,00	70,00
	3.5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1.000 penduduk	%	55,00	57,75	61,53	64,88	66,00	70,00	70,00
	3.6. rumah layak huni	Unit/KK	0,201	0,202	0,203	0,204	0,205	0,21	0,21
	3.7. permukiman layak huni	%	93,50	93,83	94,44	95,00	95,50	95,95	95,95
	3.8. Panjang jalan	Km/orang	0,0038	0,0039	0,0040	0,0041	0,0042	0,0043	0,0043
	3.9. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%	52,00	57,20	60,06	65,07	70,43	75,00	75,00
	3.10. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	69,50	73,28	76,96	80,64	84,32	88,00	88,00
	3.11. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran	%	30,43	34,99	41,99	50,39	60,47	66,52	66,52

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		air tidak tersumbat								
	3.12.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	30	40	50	60	70	80	80,00
	3.13.	Lingkungan Pemukiman	%	2,07	2,17	2,28	2,40	2,52	2,64	2,64
4.	**Perumahan**									
	4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	%	45,22	52,00	59,80	68,77	75,65	87,00	87,00
	4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	%	88,48	90,00	91,50	93,00	94,50	96,00	96
	4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	52,50	55,13	60,64	66,70	70,04	77,04	77,04
	4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	%	6,50	6,18	5,56	5,00	4,50	4,05	4,05
	4.5.	Rumah layak huni	%	78,78	81,16	83,54	85,92	88,3	90,68	90,68
5.	**Penataan Ruang**									
	5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	8	10	15	20	25	30	30
6.	**Perencanaan Pembangunan**									
	6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPAyg telah ditetapkan dgn PERDA	dok	1	1	1	1	1	1	1
	6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMAyg telah ditetapkan dgnQanun	dok	0	1	1	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	6.3.	TersedianyaDokumen Perencanaan: Penjabarandokumen RPJMA kedalamRenstrasetia p SKPA	dok	0	1	1	1	1	1	1
	6.4.	Penjabaran DokumenRenstraked alam Renja SKPA	dok	1	1	1	1	1	1	1
	6.5.	PenjabaranDokumen Renja SKPA kedalam RKPA	Dok	0	1	1	1	1	1	1
	6.6.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPAyg telah ditetapkan dgnPergub	dok	1	1	1	1	1	1	5
7.	**Perhubungan**									
	7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang/tahun	8.280.783	8.480.783	8.680.783	8.880.783	9.080.783	9.280.783	9.280.783
	7.2.	Rasio ijin trayek	izin/armada	3.621	3.921	4.221	4.521	4.821	5.121	5.121
	7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	45.028	45.328	45.628	45.928	46.228	46.528	46.528
	7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	57	62	67	72	77	82	82
	7.5.	Angkutan darat	%	0,0488	0,0518	0,0547	0,0574	0,0601	0,0627	0,063
	7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,404	0,400	0,396	0,392	0,388	0,384	0,384
	7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Hari	1	1	1	1	1	1	1
8.	**Lingkungan Hidup**									
	8.1.	Persentase	%	74,15	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penanganan sampah								
	8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	%	35,8	40,00	50,00	68,50	70,00	70,00	70
	8.3.	PemantauanPencemaran status mutu air	%	30,43	47	55	60	65	75	75
	8.4.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	77,34	79,00	82,00	85,00	90,00	92,00	92
	8.5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	77,34	79	82	85	90	92	92
	8.6.	Penegakan hukum lingkungan	%	33,85	40	47	55	65	75	75
	8.7.	PemantauanPencemaran Udara	%	17,39	17,39	34,78	52,17	69,56	86,95	86,95
	8.8.	Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	75	78	80	82	85	90	90
9.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**									
	9.1.	Proporsi anak balita berakte kelahiran	%	25	30	50	70	90	100	100
	9.2.	Proporsi pasangan berakte nikah	%	n.a	85	95	100	100	100	100
	9.3.	Kepemilikan KTP	%	80	85	100	100	100	100	100
	9.4.	Ketersediaan databasekependudukan skala provinsi	%	40	60	80	100	100	100	100
	9.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	80	95	100	100	100	100	100
	9.6.	Kepemilikan Akte Kematian	%	20	25	30	50	80	90	90
10.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
	10.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	25,8	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	30,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	10.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja upahan non pertanian)	%	74,2	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	70,00
	10.3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	33,4	35,6	37,8	39,5	40,8	41,9	41,9
	10.4.	Persentase kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yang mendapat pendampingan	%	10	30	40	50	60	70	70
	10.5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	25	35	45	55	65	75	75
11.	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**									
	11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	11.2.	Cakupan peserta KB aktif	%	47,1	50	52	54	56	58	58
12.	**Sosial**									0
	12.1.	Jumlah Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	unit	240	240	240	240	240	240	240
	12.2.	jumlah PMKS	Org	829.697	663.758	580.788	497.818	331.879	165.939	165.939
	12.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	20	20	30	40	60	80	80
13.	**Ketenagakerjaan**									0
	13.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	2.082.131	2.164.998	2.262.365	2.364.098	2.469.316	2.571.913	2.571.913

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	13.2.	Penyelesaian sengketa pengusaha-pekerjaper tahun	kasus	218	230	250	270	290	300	300
	13.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,7	66,94	68,54	70,18	71,83	72,77	72,77
	13.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	6.447	6.661	6.755	6.832	6.978	7.007	7007
	13.5.	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,43	7,22	7,10	7,00	6,8	6,50	6,50
	13.6.	Keselamatan dan perlindungan	Kegiatan	40	22	23	25	21	18	18
	13.7.	PenyelesaianPerselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	18	20	22	24	26	28	28
	13.8.	Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian	Orang	826.819	810.283	794.077	778.195	762.632	747.379	747.379
										0
14.	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**									0
	14.1.	Populasi Koperasi	Unit	7.079	7.327	7.681	8.092	8.552	9.062	9.062
	14.2.	Persentase koperasi aktif	%	52,80	52,95	54,19	55,82	57,79	60,01	60,01
	14.3.	Jumlah Anggota Koperasi	0rang	458.913	481.858	505.951	531.249	557.811	585.702	585.702
	14.4.	Jumlah Penyebaran BPR/LKM	Unit	26	28	31	32	35	37	37
	14.5.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UNIT	80.692	82.306	83.516	84.727	85.130	85.534	85.534
	14.6.	Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	Triliun	11,05	13,81	14,50	18,13	22,66	28,33	28,33
15.	**Penanaman Modal**									
	15.1.	Peningkatan Jumlah	Perusahaan	105	69	80	91	105	121	466

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penanam modal asing/dalam negeri.								
	15.2.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	1:104	1:130	1:140	1:150	1:160	1:170	1:170
	15.3.	Jumlah nilai rencana investasi.	Rupiah	3.158.652.086.174	6.350.000.000.000	7.302.500.000.000	8.397.875.000.000	9.657.556.250.000	11.106.189.687.500	42.814.720.937.500
	15.4.	Jumlah nilai realisasi investasi.	Rupiah	1.928.000.000.000	10.000.000.000.000	30.000.000.000.000	33.300.000.000.000	36.300.000.000.000	39.900.000.000.000	39.900.000.000.000
16.	**Kebudayaan**									
	16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	15	34	27	27	27	27	27
	16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	paket	2	2	5	5	5	6	6
	16.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	53	53	58	63	68	73	73
17.	**Kepemudaan dan Olahraga**									
	17.1.	Jumlah organisasi pemuda	OKP/ Paguyuban	92	100	110	120	130	140	140
	17.2.	Jumlah organisasi olahraga	Pengprov	45	45	45	45	45	45	45
	17.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	25	30	35	40	45	50	50
	17.4.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	32	35	37	39	41	43	43
	17.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	24	24	24	24	24	24	24
	17.6.	Lapangan olahraga	Unit	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
18.	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**									0
	18.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	40	60	80	80	80	80	80
	18.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	%	70	80	90	90	90	90	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								0
	19.1. Persentase indikasi penyimpangan anggaran	%	na	5,0	4,5	4,2	4,0	3,9	3,9
20.	**Ketahanan Pangan**								0
	20.1. Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	1	1	1	1	1	1	1
	20.2. Ketersediaan pangan utama	Ton	83	120	150	170	200	220	220
	20.3. Pola Konsumsi Pangan Harapan	Skor PPH	77,8	80,6	83,4	86,1	88,9	91,7	91,7
	20.4. Daerah Rawan Pangan	Klp/Desa	1.025	825	625	425	225	25	25
	20.5. Kelembagaan Pangan Masyarakat								
	- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	GAPOKTAN	67	75	83	93	105	119	119
	- Lumbung Pangan Masyarakat	Klp	94	102	114	130	150	174	174
	- Desa Mandiri Pangan	Desa	176	207	237	270	333	393	393
	20.6. Jumlah tenaga Penyuluh								0
	- Tenaga Penyuluh Pertanian, Perkebunan & Peternakan + THL-TBPP	Org	2.837	2.849	2.882	2.945	3.047	3.178	3.178
	- Tenaga Penyuluh Kehutanan	Org	79	85	88	95	108	120	120
	- Tenaga Penyuluh Perikanan	Org	98	106	110	115	125	140	140

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									0
	21.1.	Pembinaan kelembagaan mukim	mukim	767	767	767	767	767	767	767
	21.2.	Kelompok Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP)	kelompok	6	29	35	38	42	45	45
	21.3.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG)	kelompok	13	33	35	38	40	45	45
	21.4.	Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG)	kelompok	6	36	40	45	48	50	50
	21.5.	PKK aktif	PKK Gampong	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
	21.6.	Posyandu aktif	gampong	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
	21.7.	Penyediaan Alokasi Dana Gampong (ADG) / Alokasi Dana PeumakmueGampong / BKPG	gampong	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
	21.8.	Pengembangan dan PemanfaatanTeknologi Tepat Guna (TTG)	Posyan tekdes	9	12	18	23	28	33	33
22.	**Kearsipan**									0
	22.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Berkas	31.222	43.711	61.195	85.673	119.942	167.919	167.919
	22.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	92	129	180	252	353	495	495
23.	**Komunikasi dan Informatika**									0
	23.1.	Jumlah jaringan komunikasi	Unit/stasion	29	32	35	38	41	44	44
	23.2.	Website milik pemerintah daerah	Domain	24	24	24	24	24	24	24

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24.	**Perpustakaan**									
	24.1.	Jumlah perpustakaan	Unit	611	703	723	730	735	740	740
	24.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	950.318	1.140.382	1.368.458	1.642.150	1.970.579	2.364.695	2.364.695
	24.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Explr	452.292	633.209	849.813	919.701	1.000.492	1.150.285	1.150.285
B	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**									
1.	**Pertanian**									
	1.1.	Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun								
		- Padi	Ton	1.954.551	2.251.702	2.402.801	2.561.583	2.689.662	2.924.211	2.924.211
		- Jagung	Ton	168.997	190.738	205.328	220.250	235.835	249.007	249.007
		- Kedele	Ton	99.567	108.203	120.380	134.215	148.387	163.988	163.988
	1.2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar								
		- Padi	Ku/Ha	52,75	55,25	56,15	57,01	58,11	59,03	59,03
		- Jagung	Ku/Ha	39,08	42,01	43,07	44,00	44,87	45,12	45,12
		- Kedele	Ku/Ha	14,60	15,11	16,01	17,00	17,90	18,84	18,84
	1.3.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	27,77	28,00	29,00	30,00	31,00	31,00	31,00
	1.4.	Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	persen	10,94	11,07	11,27	11,64	11,68	11,7	11,7
	1.5.	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	persen	6,29	6,31	6,32	6,63	6,73	7,1	7,1
	1.6.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap	persen	4,53	4,57	5,42	5,78	5,79	6,21	6,21

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
					2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PDRB								
	1.7.	Perluasan areal luas baku lahan sawah	Hektar	363.111	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	438.111
	1.8.	Produksi Daging per tahun	kg							
		-Sapi	kg	10.287.522	10.431.918	10.703.826	10.975.734	11.247.642	11.519.550	11.519.550
		-Kerbau	kg	4.262.700	4.117.950	4.225.200	4.332.450	4.439.700	4.546.950	4.546.950
		-Kambing	kg	1.796.320	1.844.740	1.892.820	1.940.900	1.988.980	2.037.060	2.037.060
		-Domba	kg	429.282	428.616	439.776	450.936	462.096	473.256	473.256
		-Ayam Buras	kg	4.666.739	4.789.983	4.914.840	5.039.697	5.164.554	5.289.411	5.289.411
		-Ayam Ras Petelur	kg	62.536	63.434	65.088	66.742	68.395	70.049	70.049
		-Ayam Ras Pedaging	kg	6.762.070	7.114.353	7.299.798	7.485.243	7.670.688	7.856.133	7.856.133
		-Itik	kg	1.198.900	1.211.431	1.243.008	1.274.585	1.306.163	1.337.740	1.337.740
	1.9.	Produksi telur pertahun	kg	15.271.106	15.840.826	16.244.111	16.647.396	17.050.681	17.453.966	17.453.966
	1.10	Populasi ternak pertahun	ekor	16.822.004	17.324.775	17.771.291	18.221.189	18.671.673	19.123.168	19.123.168
		-Sapi Potong	ekor	476.725	493.410	508.213	526.000	544.410	563.464	563.464
		-Kerbau	ekor	135.438	140.178	145.084	150.164	155.416	160.855	160.855
		-Kuda	ekor	3.486	4944	5261	5801	6133	6645	6.645
		-Kambing	ekor	788.158	821.157	842.301	863.445	884.589	905.733	905.733
		-Domba	ekor	173.170	180.325	184.972	189.619	194.266	198.913	198.913
		-Ayam Buras	ekor	8.553.941	8.839.872	9.065.081	9.290.290	9.515.499	9.740.708	9.740.708
		-Ayam Ras Petelur	ekor	344.291	354.872	363.887	372.902	381.917	390.932	390.932
		-Ayam Ras Pedaging	ekor	3.410.196	3.433.432	3.522.058	3.610.684	3.699.310	3.787.936	3.787.936
		-Itik	ekor	2.936.123	3.056.543	3.134.391	3.212.239	3.290.087	3.367.935	3.367.935
2.	**Kehutanan**									
	2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	1.415	276	327	350	405	448	3.221

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2.2. Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	165.305	123.979	99.183	79.346	63.477	50.782	50.782
	2.3. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	persen	1,57	1,55	1,50	1,40	1,28	1,25	1,25
3.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
	3.1. Pertambangan tanpa ijin	%	17,24	17,00	15,00	13,00	11,00	9,00	9,00
	3.2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	7,89	7,90	7,91	7,92	7,93	7,94	7,94
	3.3. Kontribusi sektor energi terhadap PDRB	%	0,37	0,42	0,47	0,52	0,57	0,62	0,62
4.	**Kelautan dan Perikanan**								
	4.1. Produksi perikanan	Ton	251.418	279.353	307.288	335.224	363.159	391.094	391.094
	4.2. Konsumsi ikan	Kg / Kap/Thn	41,31	41,51	41,76	42,06	42,36	42,66	42,66
	4.3. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	persen	4,45	4,47	4,49	4,55	4,57	4,71	4,71
	4.4. Cakupan bina kelompok nelayan	Kelp	40	50	60	70	80	90	90
	4.5. Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	129.312,3	143.680	158.048	172.416	186.784	201.152	201.152
	4.6. Nilai Tukar Nelayan	NTN	109,10	109,35	109,6	109,85	110,10	110,35	110,35
5.	**Perdagangan**								
	5.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Milyar	16,03	16,05	16,5	16,57	17,10	17,50	17,50
	5.2. Ekspor Non Migas	US$	93,7 Juta	95 Juta	97 Juta	99 Juta	100 Juta	150 Juta	150 Juta
	5.3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha	UNIT	30,433	32,259	34,195	36,246	38,421	40,726	40,73

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	informal								
	5.3 Rasio pengawasan barang dan jasa yang memenuhi standar	Rasio	5,56 : 1,73	5,30 : 1	5,04 : 1	4,78 : 1	4,52 : 1	4,26 : 1	4,26 : 1
6	**Perindustrian**								
	6.1. Kontribusi sektor Industri non migasterhadap PDRB	%	4,96	5,66	5,67	5,68	5,69	5,70	5,70
	6.2. Pertumbuhan Industri MenengahdanBesar	UNIT	50	3	3	3	3	3	65
	6.3. Berkembangnya industry potensialdaerah	Unit	10.343	10.653	10.964	11.274	11.585	11.895	11.895
	6.4. Cakupan bina industri kecil menengah	Org	150	250	400	400	400	400	400
7.	**Ketransmigrasian**								
	7.1. Transmigrasi Lokal	KK	41.985	235	842	884	928	975	45.849
8.	**Pariwisata**								
	8.1. Kunjungan Wisata	Orang	1.185.119	1.422.142	1.706.571	2.047.886	2.457.463	2.948.955	2.948.955
	Wisatawan Nusantara	Orang	1.151.455	1.381.746	1.658.095	1.989.715	2.387.658	2.865.189	2.865.189
	Wisatawan Mancanegara	Orang	33.664	40.396	48.476	58.171	69.805	83.766	83.766
	8.2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rupiah	3.589.020.000.000	4.306.824.000.000	5.168.188.800.000	6.201.826.560.000	7.442.191.872.000	8.930.630.246.400	8.930.630.246.400
	Wisatawan Nusantara	Rupiah	3.454.365.600.000	4.145.238.720.000	4.974.286.464.000	5.969.143.756.800	7.162.972.508.160	8.595.567.009.792	8.595.567.009.792
	Wisatawan Mancanegara	Rupiah	134.654.400.000	161.585.280.000	193.902.336.000	232.682.803.200	279.219.363.840	335.063.236.608	335.063.236.608
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012-2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**								
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Persen	4,97	5,1	5,3	5,5	5,6	5,7	5,7
	1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	5,75	5,85	5,95	6,1	6,12	6,3	6,3
2.	**Pertanian**								0
	2.1. Nilai tukar petani	Persen	104,12	106	108	110	115	117	117
B	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**								
1.	**Lingkungan Hidup**								
	1.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	45,22	52,00	59,80	68,77	75,65	87,00	87,00
2.	**Komunikasi dan Informatika**								
	2.1. Rasio ketersediaan daya listrik	%	82,00	83,00	87,00	92,00	95,00	100,00	100
	2.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	88,48	90,00	91,50	93,00	94,50	96,00	96

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima (5) tahun (2012-2017) sesuai dengan visi misi gubernur terpilih "**ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI"**.Dokumen RPJMA merupakan penjabaran dari visi dan misi gubernur terpilih sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) setiap tahunnya.

Selanjutnya, RPJMA menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Selain itu, RPJMA menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK) di Aceh.

10.1. Pedoman Transisi

Pada masa berakhirnya periode Gubernur Aceh (2012-2017) dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka RPJM Aceh (2012-2017) dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Aceh periode berikutnya terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (SKPA) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPA, pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan menjadi rujukan untuk kabupaten/kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/kota masing-masing serta menjadi pedoman bagi masyarakat dan dunia swasta dalam proses pembangunan.Untuk maksud tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (SKPA) berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJMA. Renstra tersebut harus mendapat persetujuan Bappeda sebelum ditetapkan oleh Gubernur danpenyusunan Renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010.
2. Dalam hal pelaksanaan RPJMA (2012-2017) harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan. Selanjutnya bila diperlukan dapat dilakukan Evaluasi Paruh Waktu untuk penyesuaian atau revisi terhadap program dan kegiatan maupun target-target RPJMA yang telah ditetapkan. Hasil revisi RPJMA tersebut menjadi pedoman bagi SKPA dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyesuaikan kembali Renstra dan RPJM Kabupaten/kota .
3. RPJMA 2012-2017 merupakan dasar penilaian terhadap kinerja tahunan dan lima tahunan Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaanpembangunan yang telah ditetapkan.Hasil evaluasi kinerja Kepala Daerah menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah.

BAB XI
PENUTUP

Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012–2017 (RPJM Aceh) memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJM Aceh disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJM Aceh ini merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra- SKPA), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan RPJM Kabupaten/Kota.

Keberhasilan Pemerintahan Aceh periode 2012-2017 dalam mewujudkan visi **"ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI"** perlu dukungan dan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH